



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RPIJM BIDANG CIPTA KARYA



TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan infrastruktur Bidang Cipta Karya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan tanggung jawab bersama (konkuren), antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi berupa Rencana Terpadu Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPIJM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kota Denpasar 2020-2024 ini disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan difasilitasi oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bali. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) ini diucapkan terima kasih.

Denpasar, Juli 2021

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran.....	I-2
1.3. Keluaran (Output)	I-2
1.4. Prinsip Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	I-2
1.5. Kedudukan RPIJM	I-3
1.6. Mekanisme Penyusunan	I-4
1.6.1 Tahap Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	I-6
1.6.2. Pemangku Kepentingan	I-7
1.7. Sistematika Pelaporan	I-7
 BAB II ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI INFRASTRUKTUR	
2.1 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau dari Dokumen Pembangunan	II-1
2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	II-1
2.1.2 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman ditinjau dari Dokumen RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Kota Denpasar	II-3
2.1.3 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau dari Dokumen RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Kota Denpasar	II-12
2.1.4 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau dari Dokumen RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Kota Denpasar	II-15
2.2 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau Dokumen Spasial	II-16
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	II-16
2.2.2 Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	II-16
2.2.3 Arah dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau dari Dokumen RTRW Kab/ Kota	II-19
2.3 Arah dan Rencana Strategis Sektoral	II-35
2.3.1 Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Mnum (RISPAM)	II-35
2.3.2 Strategi Sanitasi Kota (SSK)	II-39
2.3.3 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	II-50
2.4 Kesimpulan Arah Kebijakan.....	II-54

BAB III PROFIL INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN

3.1	Gambaran Umum Kota Denpasar	III-1
3.1.1	Administrasi Wilayah	III-1
3.1.2	Kependudukan	III-5
3.1.3	Hak Atas Tanah dan Zona Nilai Tanah	III-8
3.1.4	Kondisi Fiskal dan Anggran Bidang Cipta Karya	III-11
3.1.5	Kondisi Kelembagaan	III-12
3.2.	Kondisi Eksisting Infrastruktur Permukiman di Kota Denpasar	III-24
3.2.1	Kondisi Eksisting Penyediaan Air Minum	III-24
3.2.2	Kondisi Eksisting Persampahan	III-33
3.2.3	Kondisi Eksisting Air Limbah	III-44
3.2.4	Kondisi Eksisting Drainase	III-50
3.2.5	Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar ...	III-57
3.2.6	Kondisi Eksisting Penataan Bangunan dan Lingkungan	III-63
3.3.	Profil Kawasan Tematik	III-77
3.3.1	Penataan Kawasan Perkotaan (Kumuh)	III-77
3.4.	Isu Strategis Bidang Permukiman di Kota Denpasar	III-81
3.5.	Identifikasi Kawasan Prioritas	III-82
3.5.1	Pembobotan/ Scoring	III-85

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN

4.1	Analisis Kebijakan dan Rencana Kebutuhan	IV-1
4.1.1	Perumusan Kebijakan Sektor Air Minum	IV-1
4.1.2	Perumusan Kebijakan Sektor Sanitasi	IV-3
4.1.3	Perumusan kebijakan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan	IV-6
4.1.4	Perumusan Kebijakan Penanganan Kawasan Tematik	IV-8
4.2	Strategi pembangunan Skala Regional	IV-9
4.3	Strategi pembangunan Skala Kabupaten/ Kota.....	IV-10
4.4	Strategi pembangunan Skala Kawasan	IV-16

BAB V RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

5.1	Matriks Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Tahun 2021-2025	V-1
5.2	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)	V-1
5.3	Momerandum Program	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pembagian Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan SPKP	I-7
Tabel 2.1	: Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023	II-5
Tabel 2.2	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (terkait Bidang Cipta Karya)	II-8
Tabel 2.3	: Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (terkait Bidang Cipta Karya)	II-10
Tabel 2.4	: Hasil Skoring Des/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Air Limbah	II-40
Tabel 2.5	: Hasil Skoring Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Persampahan	II-43
Tabel 2.6	: Hasil Skoring Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Drainase	II-46
Tabel 3.1	: Luas Kecamatan di Kota Denpasar	III-1
Tabel 3.2	: Kelurahan dan Desa di masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar	III-2
Tabel 3.3	: Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.4	: Penduduk Kota Denpasar Per Kecamatan Tahun 2020	III-6
Tabel 3.5	: Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Denpasar	III-7
Tabel 3.6	: Hak Atas Tanah Kota Denpasar	III-8
Tabel 3.7	: Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/ Kota	III-11
Tabel 3.8	: Kapasitas Fiskal Kota Denpasar Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.9	: Anggaran Belanja Cipta Karya pada APBD Kota Denpasar Tahun 2017-2020	III-12
Tabel 3.10	: Unit SPAM Kota Denpasar	III-24
Tabel 3.11	: Sumber Air Tanah Kota Denpasar	III-24
Tabel 3.12	: Instalasi Pengolahan Air Tahun 2020 PDAM Kota Denpasar	III-25
Tabel 3.13	: Reservoir PDAM Kota Denpasar	III-25
Tabel 3.14	: Data Diameter dan Panjang Pipa tahun 2012 PDAM Kota Denpasar	III-25
Tabel 3.15	: Resiko Air di Kota Denpasar	III-26
Tabel 3.16	: Volume sampah Kota Denpasar yang masuk ke TPA	III-33
Tabel 3.17	: TPS di Kota Denpasar Tahun 2021	III-35
Tabel 3.18	: TPS 3R di Kota Denpasar Tahun 2021	III-37
Tabel 3.19	: Resiko Persampahan Kota Denpasar	III-38
Tabel 3.20	: Sambungan DSDP di Kota Denpasar	III-44
Tabel 3.21	: Area Beresoko Air Limbah di Kota Denpasar	III-47
Tabel 3.22	: Saluran Drainase Kota Denpasar	III-50
Tabel 3.23	: Kondisi Drainase Kota Denpasar	III-51
Tabel 3.24	: Titik Genangan di Kota Denpasar	III-51
Tabel 3.25	: Sisa Daerah Genangan di Kota Denpasar 2015-2019	III-52
Tabel 3.26	: Resiko Drainase Kota Denpasar	III-52
Tabel 3.27	: Sarana Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Kota Denpasar	III-57
Tabel 3.28	: Sarana Pendidikan di bawah Kementerian Agama di Kota Denpasar	III-57
Tabel 3.29	: Pasar Rakyat Kota Denpasar	III-58
Tabel 3.30	: Pasar di Kota Denpasar Berdasarkan Kreteria Pasca Bencana	III-60

Tabel 3.31	: Destinasi Wisata di Kota Denpasar yang termasuk dalam KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua	III-72
Tabel 3.32	: Destinasi Wisata Kota Denpasar di luas KSPN	III-72
Tabel 3.33	: RTH Publik dan Privat di Kota Denpasar.....	III-74
Tabel 3.34	: Aset Cabag Budaya Kota Denpasar.....	III-75
Tabel 3.35	: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Denpasar.....	III-78
Tabel 3.36	: Pembagian urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh	III-79
Tabel 3.37	: Lokasi Kumuh berdasarkan Kewenangan Penanganan.....	III-79
Tabel 3.38	: Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Selatan	III-87
Tabel 3.39	: Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Timur	III-89
Tabel 3.40	: Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Barat.....	III-92
Tabel 3.41	: Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Utara.....	III-94
Tabel 3.42	: Rekap pembobotan variabel masing-masing kecamatan di Kota Denpasar	III-95
Tabel 3.43	: Kawasan Prioritas Kota Denpasar.....	III-96
Tabel 4.1	: Kebijakan Sektor Air Minum.....	IV-1
Tabel 4.2	: Perumusan Sasaran Program Sektor Air Minum	IV-2
Tabel 4.3	: Usulan Kebutuhan Program Sektor Air Minum	IV-3
Tabel 4.4	: Kebijakan Sektor Sanitasi	IV-3
Tabel 4.5	: Perumusan Sasaran Program Kebijakan Sektor Air Limbah	IV-4
Tabel 4.6	: Usulan Kebutuhan Program Kebijakan Sektor Air Limbah	IV-4
Tabel 4.7	: Perumusan Sasaran Program Sektor Persampahan	IV-4
Tabel 4.8	: Rincian Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program untuk Pencapaian sasaran Program Sektor Persampahan.....	IV-5
Tabel 4.9	: Perumusan Sasaran Program Sektor Drainase.....	IV-6
Tabel 4.10	: Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program untuk Pencapaian sasaran Program Sektor Drainase.....	IV-6
Tabel 4.11	: Kebijakan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan	IV-7
Tabel 4.12	: Perumusan sasaran Program Bina Penataan Bangunan.....	IV-7
Tabel 4.13	: Rincian Usulan hasil Identifikasi Kebutuhan Program untuk Pencapaian Sasaran Program Sektor Bina Penataan Bangunan.....	IV-7
Tabel 4.14	: Kebijakan Kawasan Permukiman.....	IV-8
Tabel 4.15	: Perumusan Sasaran Program Penanganan Kawasan Tematik.....	IV-8
Tabel 4.16	: Usulan Kebutuhan Program Penanganan Kawasan Tematik.....	IV-9
Tabel 4.17	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Regional	IV-9
Tabel 4.18	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Air Minum Skala Kabupaten/Kota.....	IV-11
Tabel 4.19	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Skala Kabupaten/Kota.....	IV-12
Tabel 4.20	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Skala Kabupaten/Kota.....	IV-14
Tabel 4.21	: Strategi Penangan Kawasan Permukiman Skala Kabupaten/Kota	IV-15
Tabel 4.22	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Prioritas A.....	IV-16
Tabel 4.23	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Prioritas B.....	IV-18
Tabel 4.24	: Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Prioritas C	IV-20
Tabel 5.1	: Matriks RPIJM Kota Denpasar	V-8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Empat Prinsip Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	I-3
Gambar 1.2	: Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya	I-4
Gambar 1.3	: Skema Proses SPKP Bagian Dari Rangkaian Pelaksanaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	I-5
Gambar 2.1	: Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Bali	II-17
Gambar 2.2	: Peta Kawasan Strategis Provinsi Bali	II-18
Gambar 2.3	: Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota	II-20
Gambar 2.4	: Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air	II-25
Gambar 2.5	: Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	II-26
Gambar 2.6	: Peta Rencana Pengelolaan Persampahan	II-27
Gambar 2.7	: Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah	II-28
Gambar 2.8	: Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase	II-29
Gambar 2.9	: Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota	II-31
Gambar 2.10	: Peta penetapan Kawasan Strategis	II-34
Gambar 2.11	: Skema Penyediaan Air Minum Kota Denpasar	II-38
Gambar 2.12	: Peta Area Beresiko Air Limbah	II-42
Gambar 2.13	: Peta Area Beresiko Persampahan	II-45
Gambar 2.14	: Peta Area Beresiko Drainase	II-48
Gambar 2.15	: Peta Kawasan Kumuh	II-52
Gambar 3.1	: Diagram Persentase Luas Kecamatan di Kota Denpasar	III-2
Gambar 3.2	: Peta Administrasi Kota Denpasar	III-4
Gambar 3.3	: Grafik Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020	III-5
Gambar 3.4	: Diagram Distribusi Penduduk per Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2020.....	III-6
Gambar 3.5	: Grafik Peoyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2021-2025	III-7
Gambar 3.6	: Peta Hak Atas Tanah Kota Denpasar.....	III-9
Gambar 3.7	: Peta Nilai Zona Tanah Kota Denpasar Tahun 2020.....	III-10
Gambar 3.8	: Grafik Kapasitas Fiskla Kota Denpasr Tahun 2016-2020.....	III-12
Gambar 3.9	: Sturktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar	III-14
Gambar 3.10	: Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Denpasar	III-16
Gambar 3.11	: Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar.....	III-17
Gambar 3.12	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.....	III-18
Gambar 3.13	: Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar	III-19
Gambar 3.14	: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	III-21
Gambar 3.15	: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar	III-22
Gambar 3.16	: Struktur Organisasi Permda Air Minum Kota Denpasar	III-23
Gambar 3.17	: Peta Sumber Air Baku Kote Denpasar	III-28
Gambar 3.18	: Peta Sebaran IPA di Kota Denpasar	III-29
Gambar 3.19	: Peta Jalur Perpipaian Kota Denpasar	III-30

Gambar 3.20	: Peta Resiko Air Kota Denpasar.....	III-31
Gambar 3.21	: Peta Kawasan Eksisting Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar.....	III-32
Gambar 3.22	: Paradigma Pengelolaan Sampah.....	III-34
Gambar 3.23	: TPS di Kota Denpasar	III-36
Gambar 3.24	: Peta Sebaran TPS di Kota Denpasar	III-40
Gambar 3.25	: Peta Sebaran TPS 3R di Kota Denpasar.....	III-41
Gambar 3.26	: Peta Resiko Persampahan Kota Denpasar	III-42
Gambar 3.27	: Peta Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar	III-43
Gambar 3.28	: Peta Jaringan IPAL Kota Denpasar.....	III-48
Gambar 3.29	: Peta Resiko Air Limbah Kota Denpasar	III-49
Gambar 3.30	: Peta Jaringan Drainase Kota Denpasar	III-54
Gambar 3.31	: Peta Resiko Drainase Kota Denpasar	III-55
Gambar 3.32	: Peta Kondisi Eksisting Sistem Drainas Kota Denpasar.....	III-56
Gambar 3.33	: Peta Sebaran Pasar Rakyat Kota Denpasar.....	III-62
Gambar 3.34	: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Denpasar	III-66
Gambar 3.35	: Peta Rawan Bencana Abrasi Kota Denpasar	III-67
Gambar 3.36	: Peta Rawan Bencana Instrusi Air Laut Kota Denpasar	III-68
Gambar 3.37	: Peta Rawan Bencana Tsunami di Kota Denpasar	III-69
Gambar 3.38	: Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar	III-70
Gambar 3.39	: Peta KSPN Kuta – Sanur – Nusa Nua.....	III-71
Gambar 3.40	: Sebaran Destinasi Wisata di Kota Denpasar.....	III-73
Gambar 3.41	: Aset Cagar Budaya Kota Denpasar	III-75
Gambar 3.42	: Peta Sebaran Aset Cagar Budaya Kota Denpasar	III-76
Gambar 3.43	: Lokasi Kumuh Kota Denpasar.....	III-78
Gambar 3.44	: Peta Titik Kumuh Kota Denpasar	III-80
Gambar 3.45	: Peta Skor Total Pembobotan Kawasan Prioritas	III-97
Gambar 3.46	: Peta Kawasan Prioritas Kota Denpasar.....	III-98
Gambar 4.1	: Peta Sistem Jaringan Air Minum	IV-22
Gambar 4.2	: Peta Sistem Sanitasi Kota Denpasar.....	IV-23
Gambar 5.1	: Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2022.....	V-3
Gambar 5.2	: Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2023.....	V-4
Gambar 5.3	: Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2024.....	V-5
Gambar 5.4	: Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2025.....	V-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuh agenda Pembangunan yang tertang dalam RPJMN 2020-2024 Salah satunya agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan Urusan Bersama (Konkuren) menurut UU Pemerintahan daerah yang memerlukan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan infrastruktur Bidang Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi berupa Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPIJM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota, baik kebijakan pembangunan, spasial maupun sektoral. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dimana kebijakan dasar pembangunan diarahkan kepada 11 kebijakan salah satunya peningkatan pembangunan infrastruktur permukiman antara lain terdiri dari jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan sanitasi lingkungan. Sehubungan dengan hal itu maka Bappeda Kota Denpasar melaksanakan pekerjaan Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya yang merupakan dokumen perencanaan dalam pembangunan bidang

Cipta Karya sebagai dasar dalam penyusunan program dan anggaran serta mendorong proses pemerataan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum/Cipta Karya yang lebih ideal, efektif dan efisien.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan

Tujuan penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

Sasaran penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya :

- a. Teridentifikasinya arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Teridentifikasinya kondisi eksisting cakupan dan kebutuhan pelayanan infrastruktur permukiman di kabupaten/kota
- c. Tersusunnya strategi pengembangan infrastruktur permukiman, baik di tingkat regional, kabupaten/kota, maupun kawasan; dan
- d. Tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) di kabupaten/kota.

1.3. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran (Output) dari penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman berupa data dan informasi secara literal (input tabular) maupun spasial (input pemetaan) yang menjadi instrumen pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya berbasis Sistem Informasi Geospasial.

1.4. PRINSIP STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ini yang terkait dengan RPIJM Bidang Cipta Karya menekankan empat (4) prinsip sebagai berikut.

- i. Inklusif; Perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
- ii. Terpadu; Perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang tidak parsial, namun berorientasi pada peningkatan keterpaduan berdasarkan sudut pandang kewilayahan.

- iii. Strategis dan Prioritas; Perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang terintegrasi dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat (berorientasi pada outcome).
- iv. Berkelanjutan; Perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang berbasis pada ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Gambar 1. 1. Empat Prinsip Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Dengan 4 (empat) prinsip dasar tersebut, diharapkan keterpaduan perencanaan infrastruktur kawasan permukiman bidang Cipta Karya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terwujud, sehingga pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai

1.5. KEDUDUKAN RPIJM

Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, yang didalamnya memuat Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai output akhir. Penyusunan dokumen tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi tata ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Melalui Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP), kedua kelompok dokumen tersebut akan disinergikan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Sehingga untuk menunjang arahan pengembangan kawasan permukiman, kabupaten/kota diharapkan memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP)/Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dari sisi lingkup substansi, RKP/RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang tertuang dalam RTRW Kabupaten/Kota (RTRWK). Selain itu, amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan permukiman dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk Sektor (RIS) komponen komponen pembentuk permukiman.

The diagram illustrates the planning process for the Village Area Development Master Plan (RTRWP) and its integration with other regional planning documents. The process is organized into three main columns representing different stages or levels of planning.

Left Column (Regional Planning Documents):

- Top Box:** RTRWN, RPJPN/RPJMN, RTR KSN.
- Middle Box:** RTRWP, RPJPD/RPJMD.
- Bottom Box:** RTRWK, RDTR, RPJPD/RPJMD.

Right Column (Regional Planning Documents):

- Top Box:** RENSTRA DJCK.
- Middle Box:** RENSTRA BPPW.
- Bottom Box:** MEMORANDUM PROGRAM BIDANG BIDANG CK.

Central Column (Village Area Development Master Plan and Related Documents):

- Top Box:** RENSTRA PUPR, WPS, KAWASAN PERMUKIMAN, JALAN DAN JEMBATAN, PERUMAHAN, SUMBER DAYA AIR.
- Middle Box:** Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP), Arahan Kebijakan dan Rencana strategis Kawasan Permukiman, Profil Kawasan Permukiman Berbasis Spasial, Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
- Bottom Box:** RENCANA INDUK SEKTOR BIDANG PERMUKIMAN (UU NO 1 TAHUN 2011), RP3KP/RKP, SSK, RISPAM, RP2KPKP.

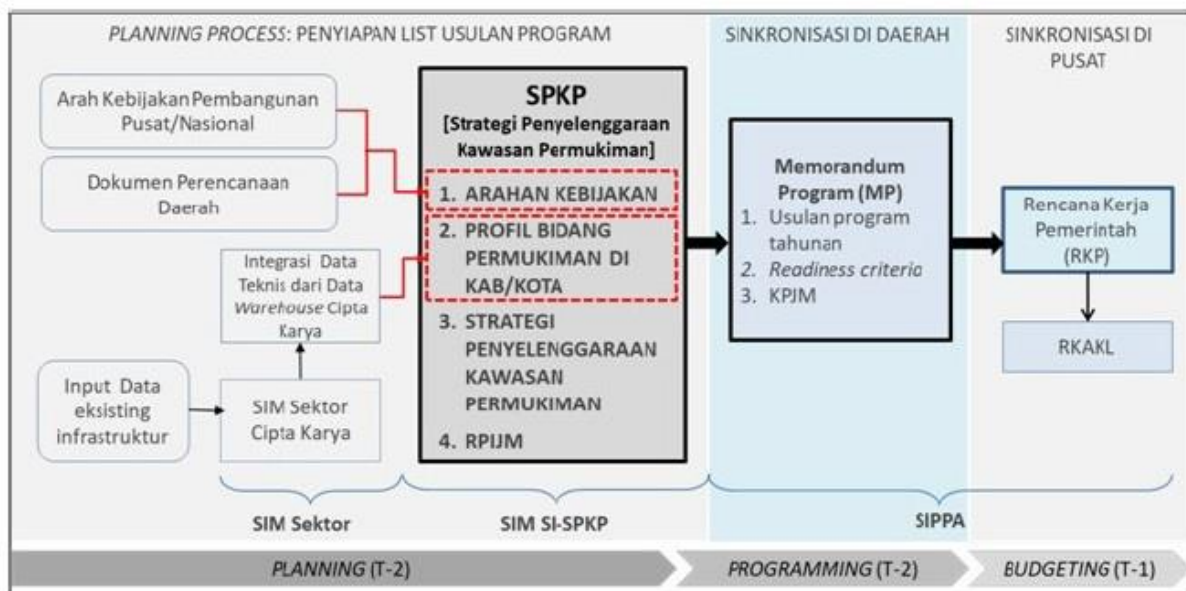
Flow and Relationships:

- Arrows indicate the flow of information and planning from the top boxes to the middle boxes, and from the middle boxes to the bottom boxes.
- Arrows also show the integration of the RTRWP (Middle Box, Left Column) into the SPKP (Middle Box, Central Column).
- Arrows show the integration of the RTRWK (Bottom Box, Left Column) into the RPJPD/RPJMD (Bottom Box, Central Column).
- Arrows show the integration of the RTRWK (Bottom Box, Left Column) into the RPJPD/RPJMD (Bottom Box, Right Column).
- Arrows show the integration of the RTRWK (Bottom Box, Left Column) into the RPJPD/RPJMD (Bottom Box, Central Column).
- Arrows show the integration of the RTRWK (Bottom Box, Left Column) into the RPJPD/RPJMD (Bottom Box, Right Column).

Laporan Akhir

1.6. MEKANISME PENYUSUNAN

Mekanisme Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) yang menghasilkan RPIJM Bidang Cipta Karya, meliputi tahapan dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan. Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemrograman, hingga penganggaran. Adapun skema proses tersebut tergambar sebagai berikut.



Gambar 1. 3. Skema Proses SPKP Bagian Dari Rangkaian Pelaksanaan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

Dalam proses perencanaan/planning (T-2) terdapat proses penyusunan daftar usulan program, dimana hal tersebut difasilitasi oleh SPKP melalui SIM SI-SPKP. Ketika proses perencanaan ini berlangsung, tentunya diperlukan data dan informasi keterpaduan perencanaan infrastruktur kawasan permukiman. Data tersebut berupa arah kebijakan pembangunan skala nasional maupun data tentang hasil sintesa dari dokumen perencanaan daerah. Kedua data tersebut diolah menjadi informasi sebagai substansi pertama SPKP.

Lalu, data teknis terkait kondisi eksiting infrastruktur, menjadi substansi kedua. Adanya instrumen SIM Sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini, dapat mengintegrasikan kebutuhan data teknis infrastruktur kawasan permukiman dalam SIM SI-SPKP.

Substansi ketiga dan keempat dalam SPKP merupakan rumusan hasil diskusi dan kesepakatan oleh Kabupaten/Kota, yaitu strategi penyelenggaraan kawasan permukiman dan RPIJM/Rencana Program Investasi Jangka Menengah. Keempat substansi tersebut terwujud dalam bentuk informasi geospasial dan literal (isian tabular) yang saling tersinergi.

Setelah dari proses perencanaan dilakukan sinkronisasi di daerah pada proses pemrograman/programming (T-2). Hasil proses perencanaan dari SIM SI-SPKP tersebut diintegrasikan oleh sistem ke SIPPA. Proses sinkronisasi berupa Memorandum Program (MP). Adapun Memorandum Program mencakup; (1) Usulan Program tahunan, (2) Readiness Criteria, dan (3) KPJM. Kemudian dilakukan sinkronisasi di pusat untuk proses penganggaran/budgeting (T-1). Output sinkronisasi berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

1.6.1. AHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam penyusunan SPKP, terdapat empat tahapan sebagai berikut.

- a) Tahap Pertama, melakukan telaah arah kebijakan dan rencana strategis dari dokumen pembangunan, dokumen spasial dan dokumen sektoral. Telaah dilakukan dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Selain melakukan telaah literal, penting untuk melakukan telaah secara spasial dari ketiga dokumen tersebut. Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan informasi yang saling terintegrasi. Serta membuat profil infrastruktur kawasan permukiman. Proses pembuatan profil dimulai dengan melakukan identifikasi gambaran umum kabupaten/kota, lalu dilanjutkan dengan melakukan identifikasi kondisi eksisting infrastruktur kawasan permukiman berikut dengan telaah awal kebutuhan infrastruktur yang mengikuti proyeksi pertumbuhan penduduk. Kedua identifikasi tersebut dilakukan secara literal maupun spasial. Kemudian, mengidentifikasi isu strategis bidang permukiman serta membuat identifikasi kawasan prioritas berdasarkan hasil overlay peta dari telaah spasial arah kebijakan pada bab satu dan hasil identifikasi spasial kondisi eksisting infrastruktur kawasan permukiman.
- b) Tahap Kedua, penyusunan strategi pembangunan. Hasil pada tahap pertama dilanjutkan dengan melakukan proses penarikan kesimpulan arah kebijakan yang kemudian mengarahkan kepada strategi pengembangan kebutuhan setiap infrastruktur kawasan permukiman. Simpulan tersebut mengerucut kepada arahan lokasi berdasarkan acuan peraturan yang menjadi dasar pengembangan infrastruktur kawasan permukiman. Proses ini harus melalui kesepakatan bersama di antara pemangku kepentingan bidang permukiman provinsi dan kabupaten/kota. Pada sub-bab berikutnya, dilakukan pembuatan rencana kebutuhan infrastruktur permukiman merupakan tahapan lanjutan dari proses penentuan kebutuhan infrastruktur yang menerjemahkan kebijakan dan strategi menjadi target target tahunan sebagai sasaran program/ kegiatan. Sasaran program tersebut berkaitan erat pada kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Setelah tersusun kebutuhan penanganan per sektor, kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan entitas skala kewenangan (regional, kabupaten/kota dan kawasan).
- c) Tahap Ketiga, RPIJM dan integrasi dengan SIPPA. Hasil dari strategi dan target tahunan dari kebutuhan infrastruktur permukiman pada tahap sebelumnya, lalu dirumuskan menjadi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota. RPIJM di-input dalam sistem informasi SI-SPKP. Hasil proses perencanaan dari SIM SI-SPKP tersebut diintegrasikan oleh sistem ke SIPPA. Dalam tahap ini dilakukan

finalisasi RPIJM bersama kabupaten/kota yang didampingi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Balai PPW).

d) Tahap Keempat, finalisasi SPKP.

1.6.2. PEMANGKU KEPENTINGAN

Kegiatan penyusunan SPKP terkait penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya melibatkan pemangku kepentingan baik yang berada di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari setiap pihak adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1. Pembagian Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan SPKP

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman DJCK	Pembina Kegiatan penyusunan SPKP	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan Strategi Nasional Penyelenggaraan Kawasan Permukiman b) Memberikan pendampingan penyusunan SPKP pada Kawasan Strategis Nasional dan Kepentingan Strategis Nasional c) Menyediakan Pedoman Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota d) Memberikan Bimbingan Teknis untuk Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman e) Melakukan Verifikasi data SPKP dan RPIJM dari Balai PPW
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Balai PPW)	Pendamping/ Pengendali kegiatan penyusunan SPKP	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pendampingan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota b) Melakukan pendampingan penyusunan SPKP pada Kawasan Strategis Nasional dan Kepentingan Strategis Nasional. c) Melakukan verifikasi data SPKP dan RPIJM dari Kabupaten/Kota d) Melakukan pengawalan <i>input</i> data pada SI-SPKP
Kabupaten/ Kota	Penyusun SPKP dan RPIJM	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN

- Bab I** Latar Belakang, maksud, tujuan, sasaran dan keluaran strategi penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Prinsip Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; Kedudukan RPIJM Bidang Cipta Karya, Mekanisme penyusunan dan Sistematika Laporan
- Bab II** Arah Kebijakan dan Strategis Infrastruktur Permukiman berisi Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau Dari Dokumen Pembangunan; Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Bidang Permukiman Ditinjau dari Dokumen Spasial; Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Sektoral.
- Bab III** Profil Infrastruktur Kawasan Permukiman, mencakup Gambaran Umum Kabupaten/Kota; Kondisi Eksisting Infrastruktur Permukiman di Kabupaten/ Kota; Profil Kawasan Tematik; Isu Strategis Bidang Permukiman di Kabupaten/Kota; dan Identifikasi Kawasan Prioritas.
- Bab IV** Strategi Pembangunan, berisi Analisis Kebijakan dan Rencana Kebutuhan; Strategi Pembangunan Skala Regional; Strategi Pembangunan Skala Kabupaten/Kota; dan Strategi Pembangunan Skala Kawasan.
- Bab V** Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), berisi matrik program dan memorandum program.



BAB II

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

2.1. ARAHAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN DITINJAU DARI DOKUMEN PEMBANGUNAN

2.1.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Tinjauan dokumen RPJMN dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arahan kebijakan pengembangan kawasan wilayah untuk periode 5 tahun. Arahan kebijakan tersebut menjadi komitmen pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan dan selanjutnya harus diimplementasikan oleh kementerian lembaga terkait. Serta sebagai tolok ukur pencapaian target; RPJMN memberikan arahan kuantitatif target lokasi pengembangan kawasan /wilayah yang diprioritaskan.

RPJMN ditetapkan dengan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 yang dapat dijadikan acuan bagi Kota Denpasar untuk bersinergi antara kepentingan pusat di Kota Denpasar dengan isu strategis pembangunan di Kota Denpasar. Arahan RPJMN, antara lain

- a. Tema Pengembangan Wilayah, yakni terkait Ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
- b. Pengembangan Kawasan Strategis terkait Destinasi Pariwisata di Provinsi Bali antara lain : Taman Nasional Bali Barat; Seluruh KSPN di Provinsi Bali termasuk Kota Denpasar sebagai KSPN ; dan Geopark Batur.
- c. Arahan Pengembangan Wilayah Perkotaan terkait di Provinsi Bali yakni Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa.
- d. Arahan Pengembangan Wilayah Perdesaan berupa percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
- e. Arahan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dengan Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan.

Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

- f. Arahan Pengembangan Kawasan Penanggulangan Daerah Bencana dengan Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai selatan Pulau Jawa-Bali dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir.
- g. Major Project terkait Provinsi Bali, Pengembangan Wilayah Metropolitan: Denpasar; Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga); dan Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dengan rincian
 1. Proyek Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar :
 - Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)
 - SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD);
 - Indikasi pendanaan Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
 2. Proyek Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
 - Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan (BKKBN)
 - PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan (Kemendikbud)
 - Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR)
 - Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan).
 - Indikasi Pendanaan Rp 187,1 Triliun (APBN).
 3. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
 - Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem offsite) skala regional, kota, dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK, Masyarakat)
 - Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK)
 - Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda)
 - Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda)

- Peningkatan perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Kementerian Kesehatan)
 - Indikasi pendanaan Rp 140,9 Triliun ; APBN: Rp 73,5 Triliun; APBD: Rp 1,7 Triliun; Masyarakat/ Swasta: Rp 65,7 Triliun.
4. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s.
 - Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m³/s.
 - Penurunan tingkat kebocoran hingga 25% (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah, PDAM)
 - Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
 - Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
 - Pembangunan SPAM regional 10.150 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
 - Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat (Ditjen CK - Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah)
 - Indikasi pendanaan Rp 123,4 Triliun; APBN : 77,9 Triliun; APBD : 15,6 Triliun; KPBU : 29,9 Triliun.

2.1.2. ARAHAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN DITINJAU DARI DOKUMEN RPJMD PROVINSI BALI DAN RPJMD KOTA DENPASAR

Tinjauan dokumen RPJMD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arahan kebijakan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

A.RPJMD Provinsi Bali

RPJMD Provinsi Bali dengan Perda No. 3 Tahun 2019 mengamanatkan enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, sustainability/ keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

Visi : *"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"* dengan misi yang terkait dengan Bidang Cipta Karya

- Misi 3 Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas;
- Misi 4 Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas;
- Misi 11: Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sakala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sad Kerthi'
- Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru;
- Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah;

- Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Beberapa arahan penting dari RPJMD Prov Bali, antara lain

- a. Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita
- b. Arahan Pengembangan Kawasan Perdesaan, pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis: pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana yang ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
- c. Arahan Pengembangan daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan; antara lain untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah di Provinsi Bali beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dikembangkan dan dibangun antara lain: Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah; Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara; Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah.
- d. Arahan Penanggulangan Daerah Bencana melalui mitigasi dampak perubahan iklim, penataan lingkungan, kebencanaan. Sedangkan arahan Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Air Minum melalui Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan pengembangan SPAM pada kawasan yang mengalami kritis air serta pengelolaan sistem layanan regional air minum. Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Drainase dengan mengembangkan lingkungan dan drainase sehat dilingkungan rumah layak huni Krama Bali; dan Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Persampahan melalui Pengelolaan persampahan khususnya di TPA Regional dengan teknologi waste to energy yang ramah lingkungan. Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Air Limbah melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dengan layanan regional.
- e. Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Pasar melalui Strategi Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak dengan Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen) Melalui Program Penguatan Dcesa Adat. Rencana Program Prioritas yang Mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kawasan dengan Mengembangkan lingkungan dan drainase sehat dilingkungan rumah layak huni Krama Bali

Tabel 2. 1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023 (terkait Bidang Cipta Karya)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun,2018)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	100 %	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.04	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	8,20 %	5,6 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.08	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Pokmas atau Aparatur yang di Bina dalam Menghadapi Bencana	90 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.09	Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.10	Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.11	Pengendalian Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100 %	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR				
2.05	LINGKUNGAN HIDUP				
2.05.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 %	100 %	UPTD Pengelolaan Sampah
2.05.07	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	18 %	27 %	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73 %	72 %	

B. RPJMD Kota Denpasar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 ditetapkan berdasarkan Perda Kota Denpasar No 5 Tahun 2021, antara lain merumuskan isu strategis :

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul
4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal
5. Kelestarian Lingkungan Hidup
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa.

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 adalah: “KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU” . Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
- Tujuan : Meningkatkan kemakmuran masyarakat
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
4. Mengurangi kemiskinan
- Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
- Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar
- Sasaran : 1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
2. Menurunnya kasus kriminalitas
3. Meningkatkan ketahanan pangan
4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
- Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

- Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
- Tujuan : 1. Meningkatnya Daya Saing Daerah
2. Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana
- Sasaran : 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat
2. Optimalnya pemanfaatan teknologi
3. Meningkatnya inovasi daerah
4. Meningkatnya kualitas Infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali
- Tujuan : Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali
- Sasaran : Meningkatnya pembangunan kebudayaan

Tabel 2. 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (terkait Bidang Cipta Karya)

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana			
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
			Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kampung tangguh bencana
		Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana	Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana			
Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Memperkuat konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas jaringan jalan
			Meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
			Meningkatkan kapasitas dan operasional pemeliharaan drainase
		Penataan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif	Meningkatkan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
			Mengurangi permukiman kumuh
			Meningkatkan sistem jaringan sanitasi bagi masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat
			Meningkatkan pengelolaan persampahan oleh seluruh pihak
			Meningkatkan sarana pengelolaan persampahan

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali			
Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Bali	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya
			Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan warisan Budaya
		Meningkatkan budaya literasi	Meningkatkan optimalisasi peran perpustakaan
		Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan gender
			Meningkatkan pembangunan gender

Tabel 2. 3. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (terkait Bidang Cipta Karya)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun,2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	56,43 % (88.559 SR)	75,55% (118,559 SR)	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Sarana dan Prasarana Persampahan yang memadai	70%	85%	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	6,63 % (10.403 SR) (62.418 Orang)	8.20% (12.873 SR) (77,238 Orang)	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi genangan	17,61% (39.984 M)	16,98% (29.449 M)	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang saluran drainase berfungsi normal	70,00% (1.141.616)	70,58% (1.151.350)	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik	90,36 % (795.093 M)	96,22% (846.593 M)	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan Lingkungan yang memenuhi Standar Teknis	1 Kawasan	6 Kawasan	PD yang Menangani,Urusan Pemerintahan,Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	0,395%	0 %	PD yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa / kelurahan tangguh bencana	18,60%	65,12%	Perangkat Daerah yang Menangani

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun,2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%	100,00%	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100,00%	100,00%	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan,	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	12,33 menit	15 menit	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat yang Memperolaeh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	93%	98%	PD yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

2.1.3. ARAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024). Renstra meliputi uraian tentang kondisi potensi dan permasalahan visi dan misi tujuan sasaran strategis arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan keluaran kegiatan target capaian serta pendanaan.

Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan Permen PUPR No.23 Tahun 2020 memuat beberapa pokok bahasan penting yang perlu diperhatikan antara lain : Isu strategis kementerian PUPR, meliputi :

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Visi kementerian PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) Misi Kementerian PUPR :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air,konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman: a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum; b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM; c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan.

Strategi Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku.
- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan: a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi; b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi. c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi; e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun; c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- c. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
- e. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular economy) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan: a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman; b. Pengembangan instrumen perencanaan

kawasan permukiman secara terpadu; c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

2.1.4. ARAHAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

Wilayah Pengembangan Strategis (adalah rencana pengembangan yang terdiri atas berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis pendekatan WPS, rencana pengembangan juga dapat diartikan sebagai program pembangunan infrastruktur dalam rentang waktu 5 (tahun) Arahan pengembangan Bidang Permukiman pada WPS 15 Koridor Gilimanuk-Denpasar-Padangbai, meliputi Pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan pariwisata, pusat kegiatan ekonomi, peningkatan infrastruktur sumber daya air dan penanganan kawasan rawan bencana longsor; dengan Program Prioritas :

- Pembangunan prasarana pengendalian banjir Tukad Mati Tengah di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar,
- Revitalisasi Tukad Badung di kota Denpasar,
- Pembangunan dan pengadaan PS Persampahan konsep 3R Kawasan Renon,
- Pembangunan IPAL Komunal/DED IPAL Komunal skala kawasan di kota Denpasar,
- Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Timur dan Denpasar Barat,

- Penataan Bangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
- Penataan RTH Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
- Penataan Bangunan Kawasan Rawan Bencana, serta
- Pembangunan Rumah Susun sewa.

2.2. ARAHAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN DITINJAU DARI DOKUMEN SPASIAL

Arahan dan rencana strategis bidang permukiman ditinjau dari dokumen spasial seperti RTRWN, RTRW Provinsi RTRW Kabupaten / RDTR, RTBL dan dokumen spasial lainnya.

2.2.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

Tinjauan RTRW Nasional dilakukan untuk mengetahui arahan spasial secara nasional terhadap rencana strategis bidang permukiman yang diprioritaskan. Proses tinjauan RTRW Nasional dilakukan dengan mengecek ada tidaknya arahan pengembangan bidang permukiman yang diprioritaskan dalam struktur ruang nasional, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional.

Pengisian materi RTRWN mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Bali adalah kawasan Perkotaan Singaraja, Semarapura dan Negara. Kawasan Andalan yang terkait dengan wilayah Kota Denpasar adalah Kawasan andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan Sektor unggulan: -pariwisata, - pertanian, - industri, - perikanan, - panas bumi.

2.2.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)

Tinjauan RTRW Provinsi dilakukan untuk mengetahui Kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda RTRW No.16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009 – 2029.

Rencana sistem perkotaan meliputi PKN kawasan perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) yang sekaligus sebagai KSN dari sudut kepentingan ekonomi; PKW kawasan perkotaan Singaraja, Semarapura, Negara.

PKL terdiri atas:

- a. Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;

- b. Kawasan Perkotaan Bangli dan Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli;
- c. Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten Klungkung;
- d. Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem; dan
- e. Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng.

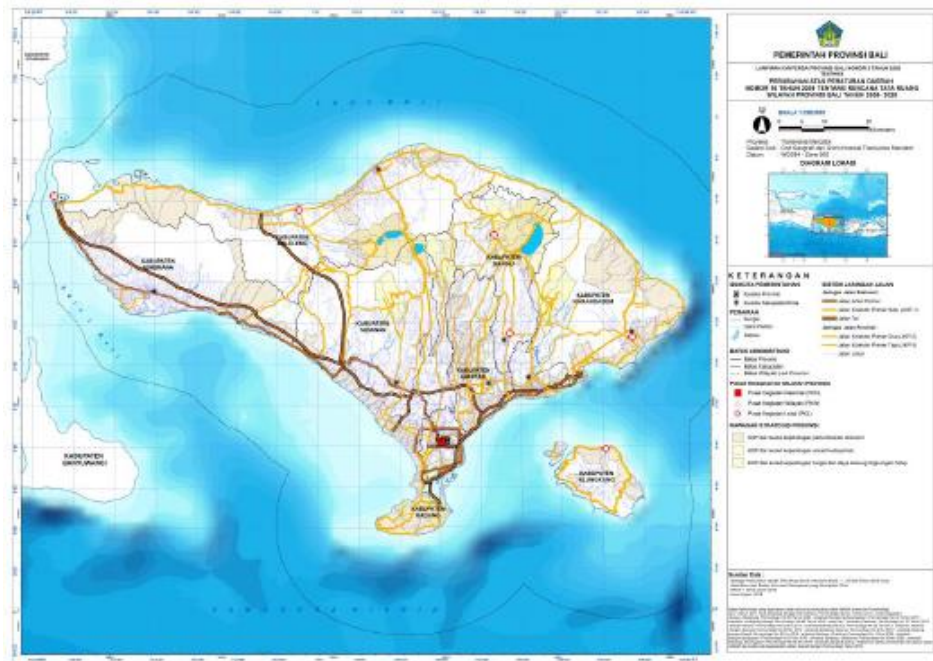


Gambar 2. 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Bali

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terdiri atas :

1. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi dalam bentuk Pusat Pemerintahan Provinsi berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi.
2. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebanyak 18 KSPD berfungsi sebagai Kawasan Pariwisata.
3. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK) mencakup 4 KSPDK berfungsi sebagai Kawasan Pariwisata.
4. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kentingan ekonomi dalam bentuk Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD), mencakup 6 KPTD berfungsi sebagai Kawasan Pariwisata.
5. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi dalam bentuk Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD), mencakup 6 KPTD berfungsi sebagai Kawasan Pariwisata.
6. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dalam bentuk Kawasan Tempat suci Pura Sad Kahyangan mencakup 10 kawasan berfungsi sebagai Kawasan Tempat Suci/Pura.
7. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya dalam bentuk Kawasan Warisan Budaya, mencakup :3 Kawasan berfungsi sebagai Kawasan warisan budaya.
8. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung berfungsi sebagai daya dukung lingkungan hidup.
9. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli berfungsi sebagai daya dukung lingkungan hidup.

10. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup Kawasan Danau Beratan- Buyan – Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 2. 2. Peta Kawasan Strategis Provinsi Bali

Kawasan perlindungan setempat mencakup : a. Kawasan Suci; b. Kawasan Tempat Suci; c. Kawasan Sempadan Pantai; d. Kawasan Sempadan Sungai; e. Kawasan Sempadan Jurang; f. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; dan g. Ruang Terbuka Hijau Kota.

Kawasan Cagar Budaya mencakup :

1. Warisan budaya dunia:
 - a. Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
 - b. Lansekap budaya subak dan pura di daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan di Kabupaten Gianyar;
 - c. Lansekap budaya subak dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batukau di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan; dan
 - d. Pura Taman Ayun dan sekitarnya di Kabupaten Badung
2. Bangunan dan benda cagar budaya yang telah ditetapkan Pemerintah tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota.

Kawasan Resiko Bencana Alam mencakup : a.kawasan rawan tanah longsor; b.kawasan rawan gelombang pasang; c.kawasan rawan banjir. Kawasan resiko bencana alam geologi mencakup a.kawasan rawan letusan gunung berapi; b.kawasan rawan gempa bumi; c. kawasan rawan gerakan tanah; d.kawasan

rawan yang terletak di zona patahan aktif; e.kawasan rawan tsunami; f.kawasan rawan abrasi; g.kawasan rawan bahaya gas beracun; dan h.kawasan rawan intrusi air laut.

2.2.3. ARAHAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN DITINJAU DARI DOKUMEN RTRW KAB /KOTA

Dokumen Perencanaan spasial berupa RTRW Kabupaten /Kota merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan RTRW Provinsi.

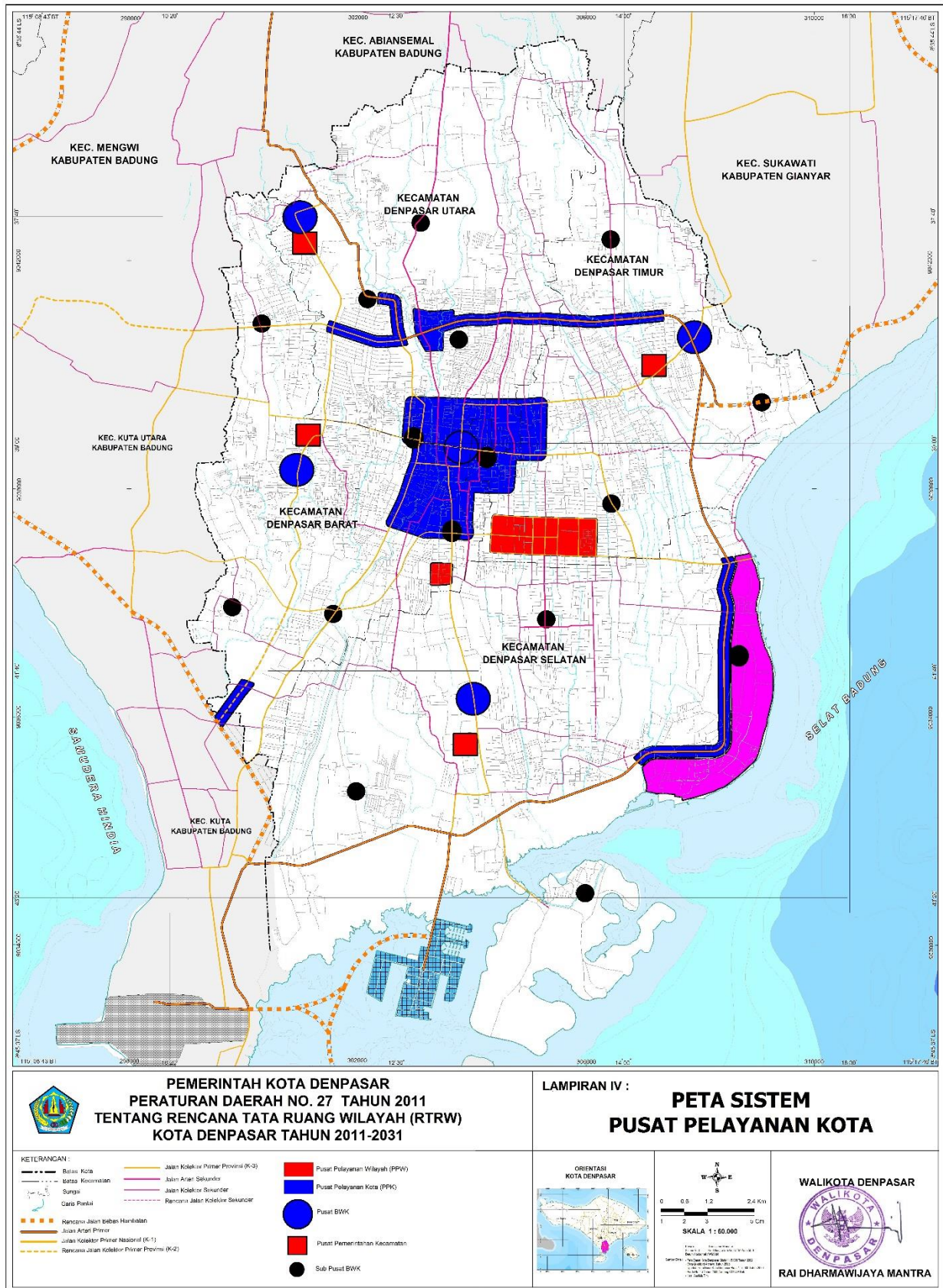
A. Pusat–Pusat Kegiatan

Perda No.27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar 2011-2031 memberikan arahan pusat-pusat kegiatan skala internasional, nasional, provinsi yang berada di Kota Denpasar maupun arahan pusat-pusat kegiatan skala Kota Denpasar. Kota Denpasar dan sebagian Kuta merupakan kota inti dari kawasan perkotaan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus sebagai Kawasan Strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pusat Pelayanan Wilayah di Kota Denpasar yang melayani skala regional antara lain kawasan sekitar Niti Mandala berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala wilayah; kawasan sekitar Sanglah sebagai Pusat kegiatan ekonomi, pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan skala wilayah; kawasan sekitar terminal Ubung sebagai Pusat transportasi penumpang antar wilayah Type B; kawasan Pelabuhan Benoa Pusat transportasi laut antar wilayah dan internasional; kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Jalan Gatot Subroto, Jalan Mahendradata sebagai Pusat Perdagangan dan jasa skala wilayah; dan kawasan pariwisata Sanur sebagai Kawasan pariwisata khusus.

Pusat Pelayanan Kota berada di BW Tengah, meliputi kawasan cathus patha agung Kota Denpasar dan sekitar jalan Gajah Mada sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, budaya, pemerintahan dan kawasan heritage; Kawasan Niti Praja Lumintang Sebagai kawasan pemerintahan; kawasan sekitar koridor Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, jalan Diponegoro, Jalan Setiabudi, Jalan Cokoraminoto, Jalan Surapati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan WR Supratman, Jalan Gunung Agung dan Jalan Tantular sebagai Pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani seluruh wilayah kota; Kawasan Ubung sebagai Pusat kegiatan perdagangan dan terminal kargo; kawasan Kreneng dan Jalan Kamboja sebagai Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan dan olah raga.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) terdiri atas : a. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara dikembangkan di Kawasan Ubung Kaja; b. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur dikembangkan di Kawasan di sekitar Jalan WR Supratman, Kelurahan Kesiman Kertalangu; c.Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan dikembangkan Kawasan di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Sesetan; dan d.Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Gunung Agung dan Jalan Mahendradata, Desa Tegal Kertha. Fungsi Kawasan SPPK sebagai Pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani skala kecamatan atau BWK.



Gambar 2. 3. Peta Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)/Pusat Lingkungan (PL), terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan di BWK Tengah sebagai Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Tengah, mencakup :
 - a. Pusat Lingkungan Tengah I dikembangkan di Kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung;
 - b. Pusat Lingkungan Tengah II dikembangkan di Koridor Jalan Cokroaminoto;
 - c. Pusat Lingkungan Tengah III dikembangkan di Koridor Jalan Gatot Subroto dan jalan Ahmad Yani;
 - d. Pusat Lingkungan Tengah IV dikembangkan di Koridor Jalan Hayam Wuruk; dan
 - e. Pusat Lingkungan Tengah V dikembangkan di Koridor Jalan Diponegoro dan koridor Jalan Teuku Umar.
2. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan di BWK Utara sebagai Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara, mencakup :
 - a. Pusat Lingkungan Utara I dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Ubung;
 - b. Pusat Lingkungan Utara II dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Peguyangan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Utara III dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Agung.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan di BWK Timur sebagai Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur, terdiri atas :
 - a. Pusat Lingkungan Timur I dikembangkan di Kawasan Penatih;
 - b. Pusat Lingkungan Timur II dikembangkan di Kawasan Kesiman Kertalangu; dan
 - c. Pusat Lingkungan Timur III dikembangkan di Kawasan Kesiman.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan di BWK Selatan sebagai Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan, mencakup :
 - a. Pusat Lingkungan Selatan I dikembangkan di sekitar Pasar Sanur;
 - b. Pusat Lingkungan Selatan II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Pekerisan dan Jalan Barito;
 - c. Pusat Lingkungan Selatan III dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Sesetan;
 - d. Pusat Lingkungan Selatan IV dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Kapaon; dan
 - e. Pusat Lingkungan Selatan V dikembangkan di sekitar Pasar Serangan.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan di BWK Barat sebagai Pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat, mencakup :
 - a. Pusat Lingkungan Barat I dikembangkan di Kawasan sekitar simpang Kebo Iwa;
 - b. Pusat Lingkungan Barat II dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Gunung Rinjani; dan
 - c. Pusat Lingkungan Barat III dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Pasar Umadui.

B. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Jaringan Prasarana sumber daya air di Kota Denpasar, terdiri atas : sistem jaringan sumber daya air, sistem persampahan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase. Sistem sungai di wilayah kota

merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) dengan sungai utama Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung, Tukad Buaji, dan Tukad Ngenjung.

1. Sistem jaringan air baku ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok, terdiri atas:
 - a. pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - b. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam penampung (retarding basin) dan waduk muara di wilayah kota untuk mendukung sediaan air baku; dan
 - c. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota.
2. Sistem jaringan irigasi di wilayah kota, terdiri atas:
 - a. pelayanan irigasi melayani areal persawahan yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal persawahan yang ditetapkan beralih fungsi berdasarkan rencana pola ruang namun belum dialihfungsikan;
 - b. pelayanan irigasi melayani 9 Daerah Irigasi (DI);
 - c. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air;
3. Sistem pengendalian banjir dilaksanakan melalui:
 - a. normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, dan Tukad Ngenjung beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
 - b. pengembangan kolam konservasi (retarding basin) untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di aliran Tukad Mati;
 - c. pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
 - d. pengembangan saluran penampung (long storage) di Jalan By Pas Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta; dan
 - e. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (box culvert) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota.
4. Sistem pengamanan pantai dilaksanakan berdasarkan karakter dan fungsi pantai, terdiri atas:
 - a) pengembangan teknik pengamanan pantai:
 - 1) pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan groin atau krib);
 - 2) pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (offshore breakwaters);
 - 3) perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (seawall) atau revetment; dan
 - 4) penambahan suplai sedimen ke pantai (sand nourishment) di pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serangan; dan
 - b) pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang Pantai Padanggalak, Pantai Sanur, Mertasari dan Pantai Serangan

Sistem prasarana penyehatan lingkungan permukiman di Kota Denpasar, terdiri atas sistem persampahan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase. Sistem persampahan kota, terdiri atas : a. jenis sampah yang dikelola; b. penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah; dan c. penanganan sampah. Jenis sampah yang dikelola terdiri atas : a.sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah terdiri :

- a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle); pemanfaatan kembali sampah (reuse); perubahan pola pikir (reimagine); dan perubahan disain pengelolaan (redesign);
- b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
- c. pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.

Penanganan sampah dilaksanakan melalui :

- a. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
- b. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan sarana pengangkut sampah ke transfer depo;
- c. sebelum ke TPA sampah dari transfer depo dan TPS dapat dibawa ke tempat pengomposan dengan pemilahan sampah terlebih dahulu;
- d. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di IPST Suwung; dan
- e. pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, desa pakraman, masyarakat atau swasta.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, terdiri atas di TPA Suwung seluas 10 Ha di Kecamatan Denpasar Selatan.Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS) tersebar di seluruh wilayah kota

Sistem pengelolaan air limbah kota terdiri atas :

- a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
- b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil; dan
- c. penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup kawasan peruntukan industri.

Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (off site), melalui pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung Denpasar Selatan melayani sebagian Kawasan Pusat Kota Denpasar, sebagian kawasan Denpasar Selatan dan Kawasan Sanur, serta sebagian Kawasan Kuta (wilayah Kabupaten Badung) pada tahap I dan perluasan pada kawasan lainnya pada Tahap II, dan Tahap III. Pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala

kota, dikembangkan jaringan air limbah komunal setempat (on-site) dalam bentuk program sanitasi masyarakat (sanimas) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain.

Sistem Drainase mencakup klasifikasi sistem jaringan drainase dan pengembangan dan peningkatan jaringan drainase. Sistem pengendalian banjir kota dan wilayah yang lebih luas, dilaksanakan sesuai dengan master plan sistem pengendalian banjir berdasarkan kerjasama antar daerah.

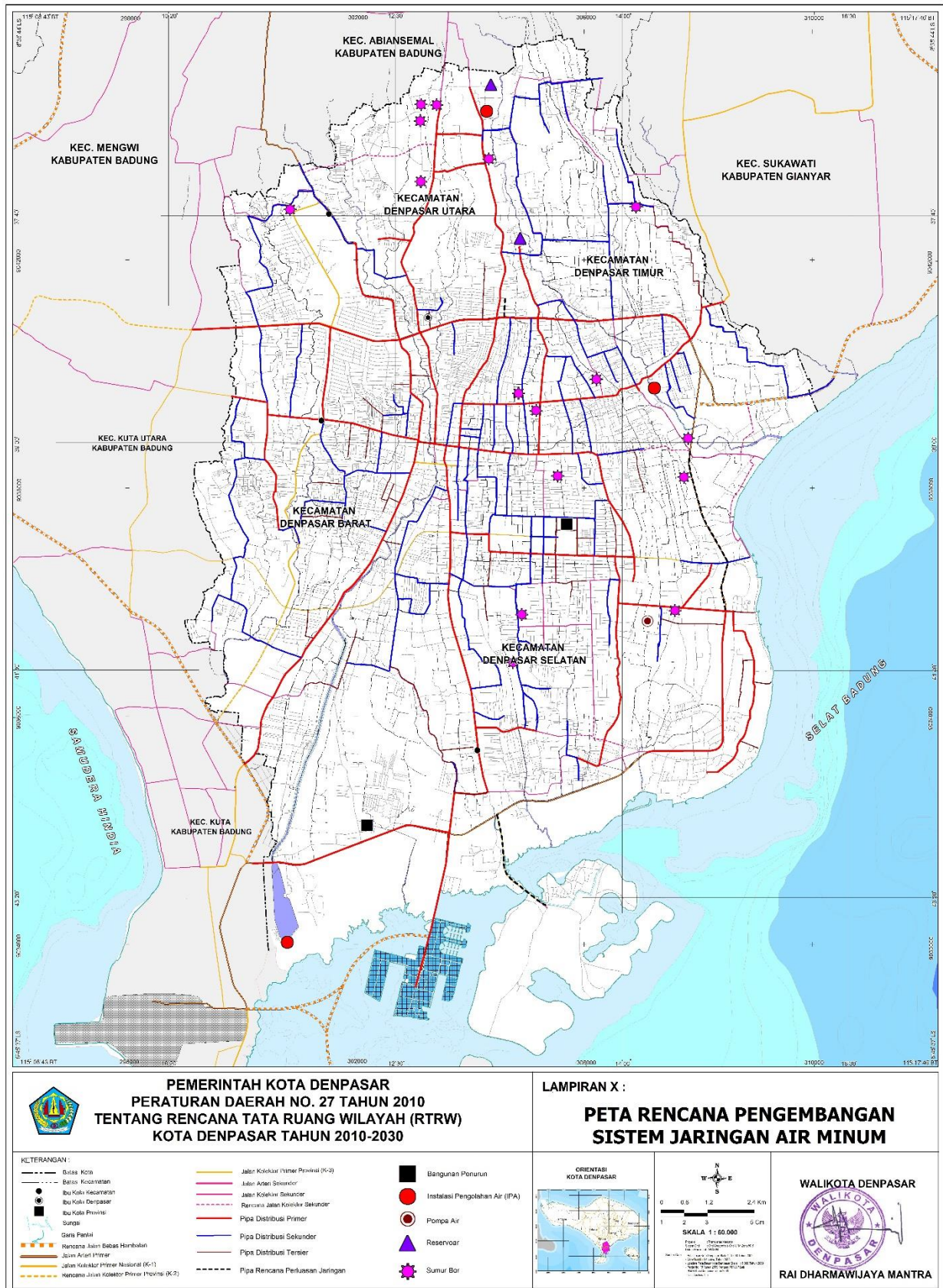
Sistem jaringan drainase primer, terdiri atas: saluran pembuangan utama terdiri atas: 1. sistem saluran pembuangan Tukad Badung; 2. sistem saluran pembuangan Tukad Ayung; 3. sistem saluran pembuangan Tukad Mati; 4. sistem saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung; dan 5. sistem saluran pembuangan Pemogan.

Sistem jaringan drainase sekunder, berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/ perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan.

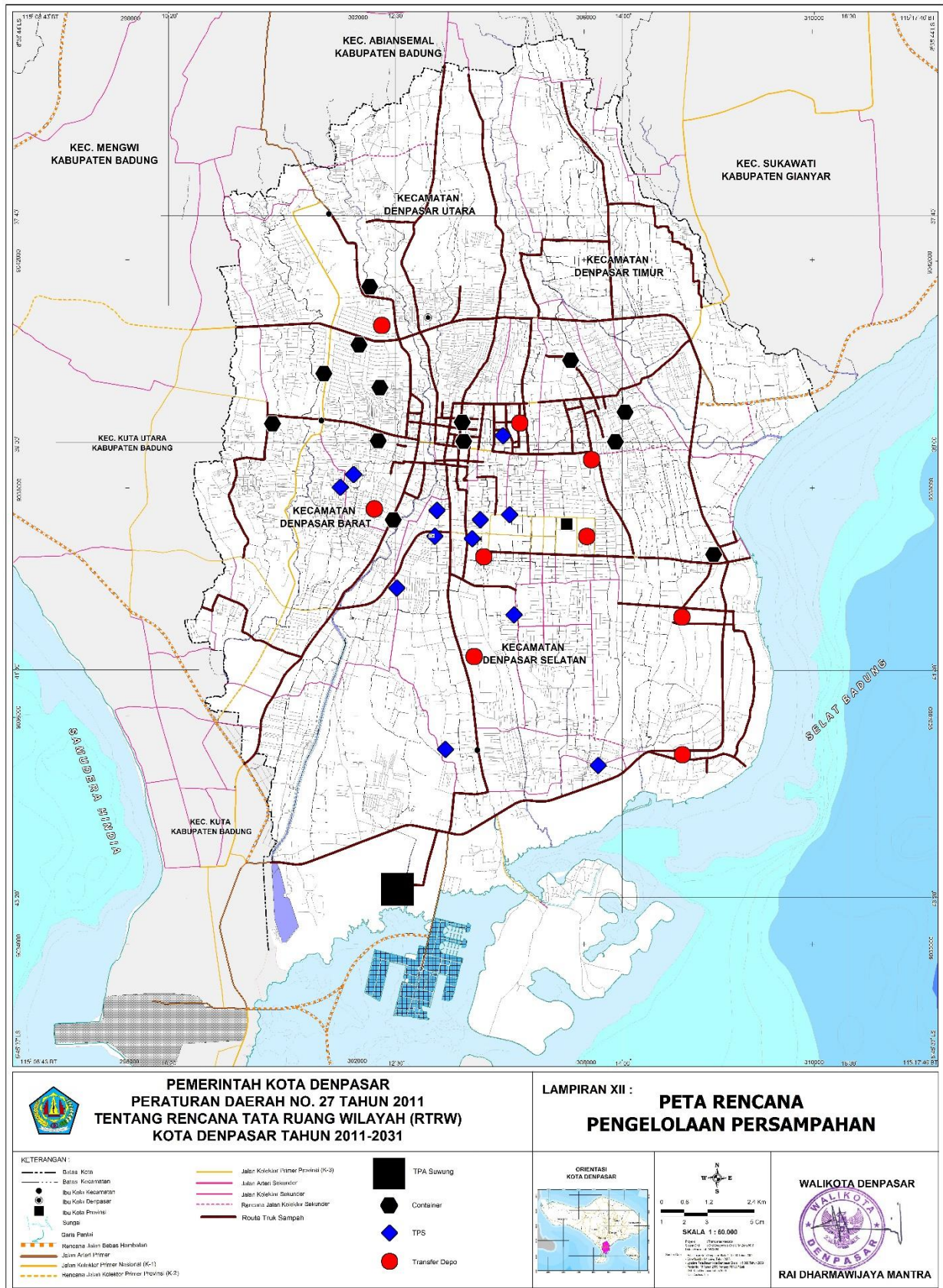
Sistem jaringan drainase tersier, terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran saluran kecil pada kawasan perumahan.

Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase, dilakukan dengan cara:

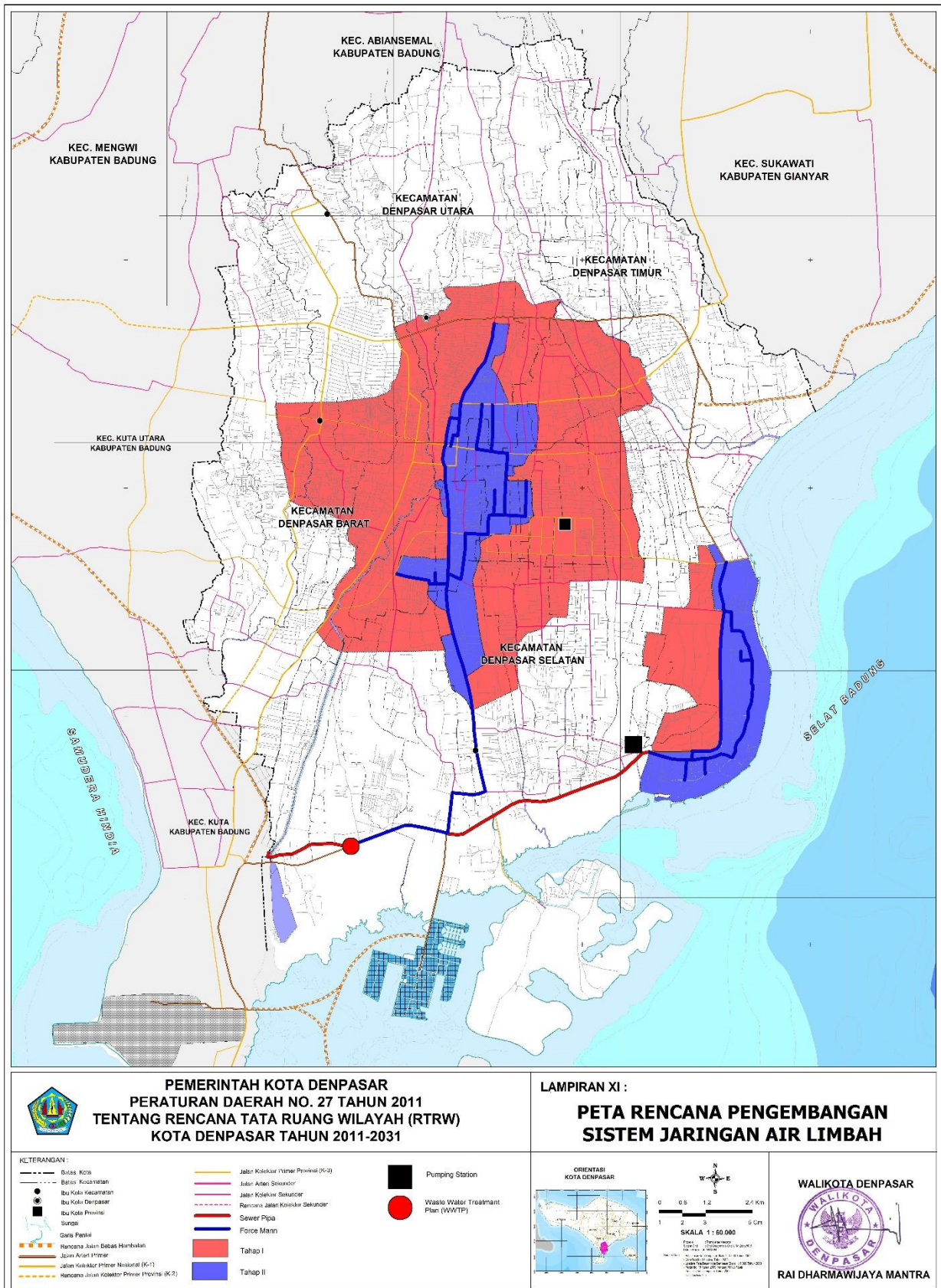
- a. Normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversifikasi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/ penangkapan sampah;
- b. Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong;
- c. Kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan;
- d. Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun, sebelum disalurkan kepada drainase kota;
- e. Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran; dan
- f. Pengembangan retarding basin (kolam penampung) pada sistem saluran pembuangan Tukad Mati, long storage (wadah penyimpanan) pada sistem saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung dan Pemogan sesuai masterplan drainase kota.



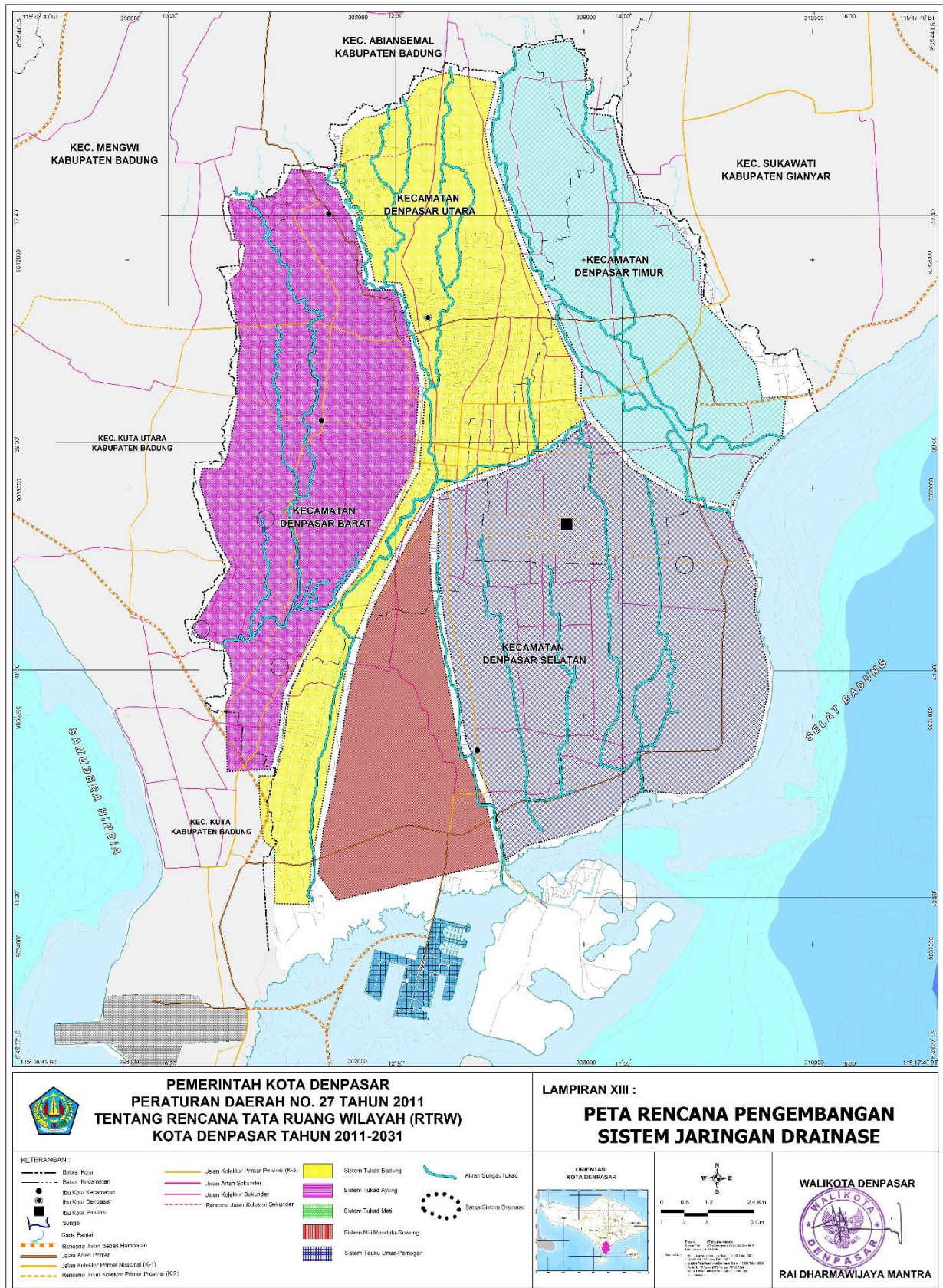
Gambar 2. 5. Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum



Gambar 2. 6. Peta Rencana Pengelolaan Persampahan



Gambar 2. 7. Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah



Gambar 2. 8. Peta Rencana Pengembangan Sisten Jaringan Drainase

C. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas: kawasan suci; kawasan tempat suci; kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan sungai; kawasan sempadan jurang; kawasan sekitar waduk; dan kawasan sekitar mata air

Kawasan suci, terdiri atas: a. kawasan suci campuhan; b. kawasan suci pantai; c. kawasan suci laut; d. kawasan suci mata air; dan e. kawasan suci cathus patha.

- Sebaran kawasan suci campuhan terdiri atas seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar.
- Sebaran kawasan suci pantai terdiri atas tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti;
- Sebaran lokasi kawasan suci laut terdiri atas kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
- Sebaran kawasan suci mata air terdiri atas tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar.
- Kawasan suci cathus patha terdiri atas: a. Cathus Patha Agung wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka; dan b. Cathus Patha Alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/desa pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

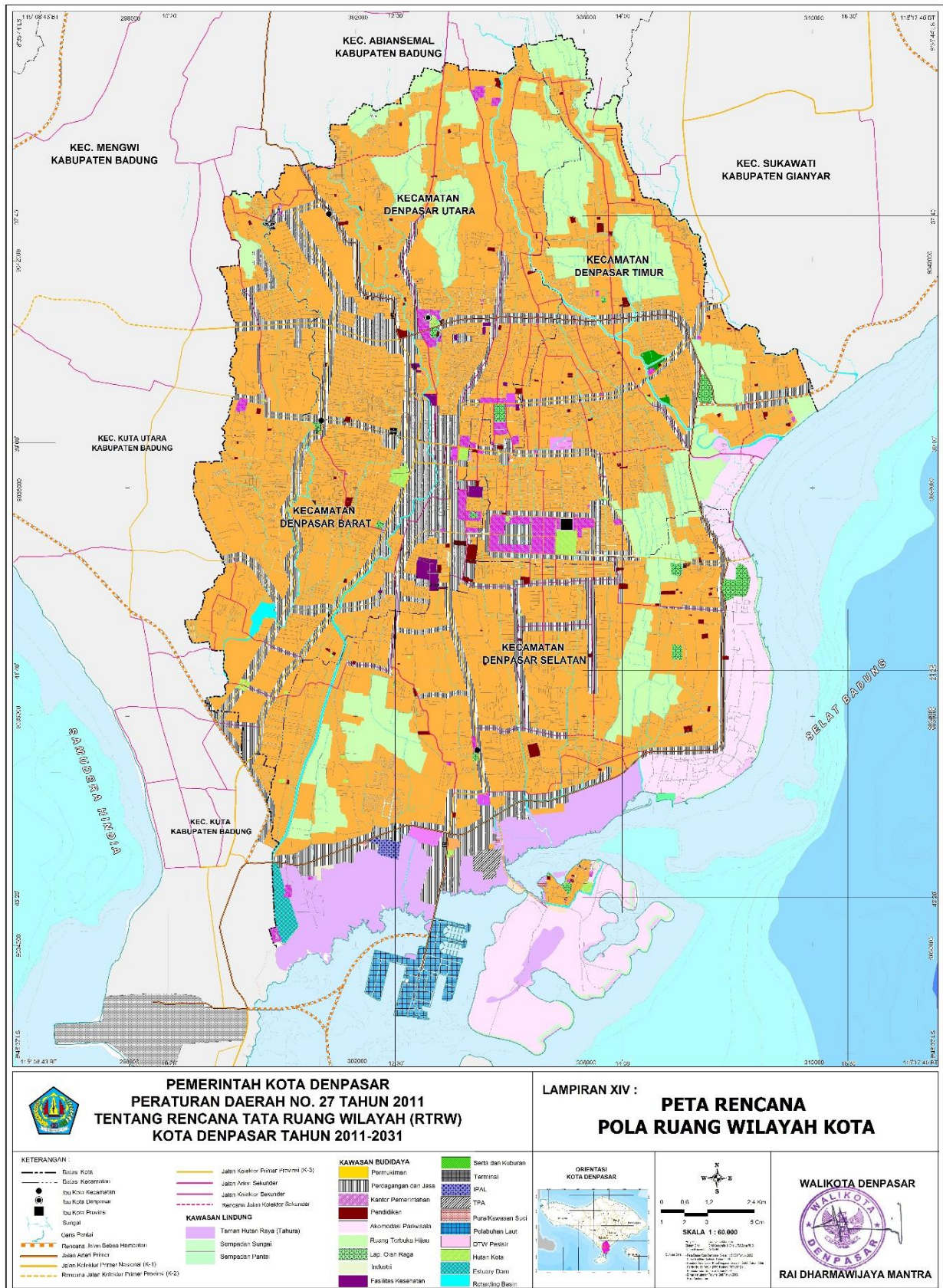
Kawasan tempat suci terdiri atas: a. radius kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan di sekitar pura Sakenan; dan b. radius kesucian tempat suci kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar.

Kawasan sempadan pantai terdiri atas sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang kurang lebih 36,6 (tiga puluh enam koma enam) kilometer panjang pantai dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar, terdiri atas kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai berhutan bakau, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.

Sebaran sempadan sungai terdiri atas ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar.

Kawasan sekitar waduk terdiri atau kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius kawasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari pinggir waduk ke arah darat.

Kawasan sekitar mata air, terdiri atas: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung – Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertelangu, Jalan Gunitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulastri – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex – Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan-Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja – Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.



Gambar 2. 9. Peta Rencana Pola Rung Wilayah Kota

D. Kawasan Resiko Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri atas: a. kawasan rawan banjir; b. kawasan rawan tsunami; c. kawasan rawan abrasi pantai; dan d. kawasan rawan intrusi air laut.

Kawasan rawan banjir, terdiri atas: kawasan sekitar Tukad Tebe, Tukad Mati Pemecutan Kelod, hilir Tukad Badung Pemogan, Panjer, Sidakarya dan Sanur Kauh. Kawasan rawan tsunami, terdiri atas: Kelurahan Serangan dan Sidakarya meliputi seluruh dusun/banjar.

Kawasan Rawan abrasi pantai : Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur, meliputi sepanjang pantai pada jarak 100 – 200 (seratus sampai dua ratus) meter dari pasang tertinggi.

E. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan signifikan dalam perekonomian kota atau wilayah, terdiri atas: a. Kawasan Pusat Kota; b. Kawasan Sanur; c. Kawasan Ubung Kaja; d. Kawasan Pulau Serangan; Kawasan Pelabuhan Benoa; dan f. Kawasan Pengembangan LC Margaya.

- Kawasan strategis yang memiliki kepentingan pelestarian nilai historis dan budaya yang menjadi jati diri kota, terdiri atas: a. Kawasan Pusat Kota; dan b. Kawasan Taman Budaya (Art Centre).
- Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial dan publik yang tinggi, terdiri atas: a. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali; b. Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota; dan c. Kawasan Sanglah.
- Kawasan strategis yang memiliki kepentingan perlindungan keragaman sumber daya hayati dan perlindungan terhadap bencana, terdiri atas Kawasan Tahura Ngurah Rai.
- Kawasan Strategis yang memiliki kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, terdiri dari Kawasan Pelabuhan Benoa.

F. Evakuasi Bencana

Sistem penanggulangan bencana dan jalur evakuasi bencana terdiri atas: a. sistem penanggulangan bencana; dan b. jalur evakuasi bencana. Sistem penanggulangan bencana, dikembangkan melalui:

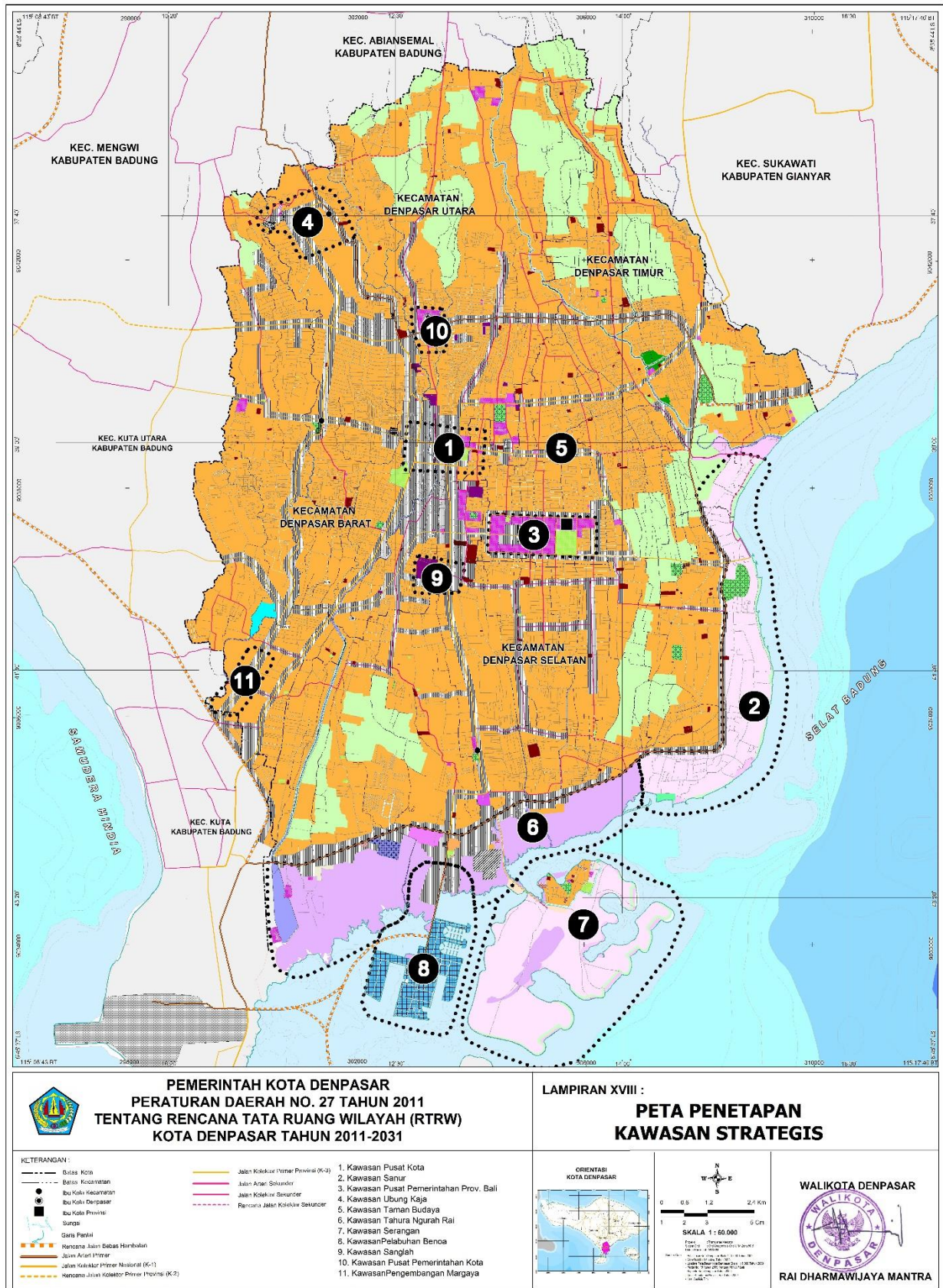
- a. pembentukan 4 Wilayah Manajemen Penanggulangan Bencana sekaligus Wilayah Manajemen Penanggulangan Kebakaran (WMK) tersebar di tiap Wilayah Kecamatan dengan pelayanan Penanganan Gawat Darurat Terpadu (safe community); dan
- b. Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Crisis centre) di Jalan Imam Bonjol sebagai Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu.

Lokasi penyebaran Pos Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang diintegrasikan dengan Pos Sektor dan Pos Kebakaran (safe community) terdiri atas:

- a. Pos Sektor Kecamatan Denpasar Utara di Tonja, Kecamatan Denpasar Timur di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Selatan di desa Sidakarya dan Jalan Juanda Kawasan Niti Mandala dan Kecamatan Denpasar Barat di Jalan Imam Bonjol; dan
- b. Pos Kebakaran (safe community) Kecamatan Denpasar Utara di terminal Ubung, Kecamatan Denpasar Timur di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Selatan di Pelabuhan Benoa dan Kecamatan Denpasar Barat di Jalan Mahendradatta.

Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:

- a. jalur-jalur jalan yang digunakan terdiri atas: Jalan Ngurah Rai, Jalan Hang Tuah, Jalan Raya Puputan, Jalan Teuku Umar, Jalan Gatot Subroto, Jalan Mahendradatta, Jalan Raya Sesetan, Jalan Diponegoro, Jalan Nias, Jalan Imam Bonjol, Jalan WR Supratman; dan
- b. jalur-jalur jalan atau gang pada kawasan permukiman.



Gambar 2. 10. Peta Penetapan Kawasan Strategis

2.3. ARAHAN DAN RENCANA STRATEGIS SEKTORAL

2.3.1. RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

Isu dan Permasalahan (Teknis) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar, meliputi:

- a. Terbatasnya Kapasitas produksi PDAM kota Denpasar yang ada pada saat ini, khususnya yang menggunakan air baku dari air permukaan (sumber air baku potensial) sudah tidak dapat dikembangkan lagi hal ini karena keterbatasan sumber air baku permukaan yang ada di wilayah administrasi kota Denpasar.
- b. Rendahnya kapasitas jaringan distribusi dan tingginya tingkat kebocoran; kapasitas jaringan pipa distribusi sudah tidak memadai lagi, sehingga walaupun sudah dilakukan penambahan pompa booster, masih banyak daerah yang belum mendapat pelayanan yang memadai baik tekanan air di tempat konsumen maupun jam pelayanan air minum.

Isu dan permasalahan (Non Teknis) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar, antara lain adanya Jumlah pemberitahuan pencabutan setiap tahun yang mencapai sekitar 60-70% dari jumlah sambungan pelanggan setiap tahun mengindikasikan bahwa pelanggan tidak puas dengan pelayanan PDAM dan kurangnya kesadaran pelanggan untuk membayar rekening air.

Dari sisi area berisiko rawan air minum, berdasarkan indikator kontinuitas pelayanan dengan parameter jumlah jam pelayanan air pada suatu area yang mampu dilayani dalam satu hari (24 jam) menunjukkan tidak adanya area yang berisiko rawan air minum kategori sangat tinggi ataupun kategori tinggi.

Rencana strategi Pembagian zone distribusi di wilayah pelayanan SPAM Kota Denpasar direncanakan dengan mempertimbangkan :

- Kebutuhan air pada tiap sub daerah pelayanan (tiap desa/kelurahan)
- Lokasi dan elevasi sub daerah pelayanan
- Lokasi dan elevasi unit produksi yang direncanakan melayani daerah tersebut
- Kebutuhan air minum di daerah pelayanan dan kapasitas unit produksi yang direncanakan

Rencana program dibagi menjadi empat tahap :

Rencana Tahap I (2015 – 2017)

Rencana program jangka pendek dalam penyediaan air baku di Unit Kota wilayah Kota Denpasar. Rencana tahap I adalah pemenuhan kebutuhan air minum pada akhir tahun 2017. Adapun rencana penanganan pada program ini :

- a. Peningkatan system jaringan distribusi utama dan distribusi bagi pada SPAM Kota Denpasar dengan memanfaatkan air baku air minum IPA Tukad Petanu 150 l/dt.
- b. Peningkatan system jaringan distribusi utama dan distribusi bagi pada SPAM Kota Denpasar dengan memanfaatkan air baku air minum IPA Tukad Penet 150 l/dt.
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan IPA Waribang 150 l/dt

- d. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB pada Sistem penyediaan air baku IPA Waribang
- e. Studi Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan melalui tampungan Waduk sebagai air baku irigasi dan air minum.
- f. Pembangunan SPAM dengan memanfaatkan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Waduk Muara Unda Tahap I : 550 l/dt .
- g. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB pada Sistem penyediaan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Waduk Muara Tukad Unda Tahap II sebagai sumber air baku air minum
- h. Studi Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan untuk lintas kabupaten Provinsi Bali yang digunakan sebagai sumber air baku.

Rencana Tahap II (2018 – 2022)

Rencana tahap II ini merupakan lanjutan dari program jangka pendek dalam penyediaan air baku pada pengembangan SPAM Kota Denpasar . Rencana tahap II adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan jangka waktu dari tahun (2018 – 2022). Adapun rencana penanganan pada program ini :

- a. Pembangunan SPAM dengan memanfaatkan air baku IPA Storage Ayung 1100 lt/dt
- b. Pembangunan SPAM dengan memanfaatkan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Waduk Muara Unda Tahap II : 500 l/dt .
- c. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB pada Sistem Storage Ayung sebagai sumber air baku irigasi dan air minum
- d. Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB pada Sistem penyediaan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Waduk Muara Tukad Unda Tahap I sebagai sumber air baku air minum
- e. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB pada Sistem penyediaan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Waduk Muara Tukad Unda Tahap II sebagai sumber air baku air minum
- f. Mengoptimalkan kapasitas SPAM Kota Denpasar pada jaringan unit transmisi dan distribusi pada IPA Ayung.
- g. Pembangunan Waduk sebagai sumber air baku irigasi dan air minum
- h. Pembangunan IPA lintas kabupaten sebagai sumber air baku air minum

Rencana Tahap III (2023 – 2027)

Pada rencana tahap III ini meliputi program optimalisasi. Rencana tahap III adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan jangka waktu dari tahun (2023 – 2027). Adapun rencana penanganan pada program ini :

- a. Pembangunan SPAM Kota Denpasar dengan memanfaatkan air baku lintas kabupaten (inter basin transfer) : IPA Storage Telagawaja 850 l/dt.
- b. Mengoptimalkan kapasitas system pada jaringan unit transmisi dan distribusi pada SPAM Kota Denpasar.
- c. Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB Waduk sebagai sumber air baku irigasi dan air minum
- d. Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun JDB IPA lintas kabupaten sebagai sumber air baku air minum

Rencana Tahap IV (2028 – 2032)

Untuk rencana tahap IV periode tahun 2028 – 2032 adalah program peningkatan dan penambahan kapasitas desain disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani dan peningkatan cakupan pelayanan. Rencana program pada tahap IV dalam adalah rencana pengembangan jaringan distribusi dan peningkatan jumlah pelanggan. Penanganan program pada tahapan ini meliputi :

- a. Pengembangan dan pemanfaatan IPA lintas kabupaten yang potensial dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah Kota Denpasar.
- b. Pemasangan pipa transmisi dari intake IPA Tukad lintas kabupaten sampai Reservoir agar diperoleh kuantitas dan kualitas air yang tetap terjaga.
- c. Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) dari reservoir (RD) pada sistem penyediaan air baku dan sampai rencana blok pelayanan.
- d. Penambahan pipa pada jaringan pipa distribusi utama maupun bagi secara paralel
- e. Perluasan jaringan pipa distribusi pada unit PDAM Kota terutama yang belum tersentuh air bersih maupun daerah permukiman baru.
- f. Menjaga tingkat kebocoran sehingga setiap tahun menurun.
- g. Penempatan valve dan accesories lainnya pada titik tertentu untuk mengatur aliran
- h. Pergantian water meter yang rusak / kurang berfungsi dengan baik.

Rencana Sistem Pelayanan, Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Denpasar dibagi menjadi 3 Zone, yaitu:

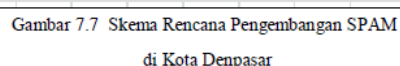
Zone 1 : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Air Baku dari beberapa sumber air diantaranya : IPA Ayung III kapasitas produksi 500 lt/dt; Paket Ayung III kapasitas produksi 50 lt/dt; Sumur Bor : Sumur E4, SB 2 Peguyangan, SB 3 Peguyangan, SB Ubung, SB

- Daerah pelayanan meliputi desa/kelurahan : di Kecamatan Denpasar Utara : Pemecutan Kaja, Dauh Puri Kaja, Tonja, Peguyangan, Ubung, Ubung Kaja, Peguyangan Kaja, Peguyangan Kangin; di Kecamatan Denpasar Barat : Tegal Kerta, Padangsambian, Padangsambian Kaja, Sambian Kelod, Pemecutan Kelod, Pemecutan, Tegal Harum; di Kecamatan Denpasar Timur : Kesiman Petilan, Sumerta Kauh, Penatih, Penatih Dangin Puri, Kesiman Kertalangu.

- Air Baku dari beberapa sumber air diantaranya : Sumur E1, Sumur E2, SB Sedap malam 1, SB Sedap malam 2, SB. Badak Agung, TPW 4, SB 6 Panjer, SB Sidakarya, SB Singkep, SB Tk Badung, IPA Petanu 150 l/dt, Rencana Sistem IPA Unda 550 lt/dt.
- Daerah pelayanan meliputi desa/kelurahan : di Kecamatan Denpasar Utara : Dangin Puri Kaja, Dangin Puri kauh, Dangin Puri kangin; di Kecamatan Denpasar Barat : Dauh Puri Kauh, Dauh Puri, Dauh Puri Kelod, Dauh Puri Kangin; di Kecamatan Denpasar Timur : Kesiman Kertalangu, Dauh Puri kelod, Sumerta Kelod, Kesiman, Sumerta, Sumerta Kaja, Dangin Puri; di Kecamatan Denpasar Selatan : Pemogan, Pedungan, Sesetan, Serangan, Sidakarya, Panjer, Sanur Kaja, Renon.

- Air Baku dari beberapa sumber air diantaranya : IPA Waribang 150 lt/dt, dan SB Sanur
- Daerah pelayanan meliputi desa/kelurahan : Renon, Sanur Kauh, Sanur di K^{ecamatan} Denpasar Selatan.



Laporan Akhir

2.3.2. STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)

A. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN DAN AREA BERISIKO

Isu dan Permasalahan (Teknis) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Denpasar, antara lain:

- a. Masih ada masyarakat yang Buang Air Besar sembarangan sebanyak 179 KK (0,1%)
- b. Tangki septik individual yang dibangun masyarakat banyak yang belum sesuai dengan standar pengolahan aman
- c. Terbatasnya jumlah pengolahan komunal (SPALD Setempat) hanya sebanyak 8 unit, dimana 1 unit dalam keadaan rusak dan hanya dimanfaatkan oleh 827 KK (0,4%)
- d. Banyak masyarakat yang antusias dengan adanya DSDP hanya saja tidak semua rumah dapat dilayani karena faktor kondisi jalan lingkungan dan topografi wilayah dimana DSDP saat ini baru mampu melayani 8.500 KK (3,8%)
- e. Pembuangan limbah melalui tangki septik dan sumur resapan serta pembuangan air bekas mandi, cuci dan dapur masih banyak dilakukan secara langsung ke sungai dan pantai
- f. Pemeliharaan peralatan untuk fasilitas pembuangan air limbah belum jelas
- g. Secara kualitatif dan kuantitatif pencemaran pada air permukaan dan air tanah terus bertambah akibat perkembangan penduduk dan ekonomi yang mempengaruhi jumlah air limbah dan juga jenis kandungannya misalnya limbah beracun
- h. Banyak masyarakat yang antusias dengan adanya DSDP hanya saja tidak semua rumah dapat dilayani karena faktor kondisi jalan lingkungan dan topografi wilayah
- i. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan limbah domestik
- j. Kurangnya sosialisasi pengelolaan air limbah domestik
- k. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi pengelolaan air limbah domestik
- l. Industri rumah tangga belum memiliki IPAL

Isu dan Permasalahan (Non Teknis) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Denpasar, antara lain:

- a. Belum terdapat peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik
- b. Dalam hal ini belum ada instansi yang bertugas mengelola air limbah secara tersendiri. Air limbah masih ditangani oleh berbagai instansi, sehingga sulit dalam mengkoordinasikan kegiatannya di lapangan. BLUPAL telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Bali, dan hanya akan menangani pengelolaan air limbah perpipaan (sewerage) secara off-site pasca proyek DSDP
- c. Sampai saat ini dana yang alokasikan untuk pengelolaan air limbah masih sangat minim bila dibandingkan dengan sektor pembangunan yang lainnya
- d. Masyarakat Kota Denpasar belum semuanya menyadari bahwa air limbah yang dihasilkannya perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air penerima
- e. Sektor swasta masih beranggapan bahwa sektor usaha bidang limbah domestik tidak menguntungkan
- f. Industri rumah tangga belum menerapkan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar teknis

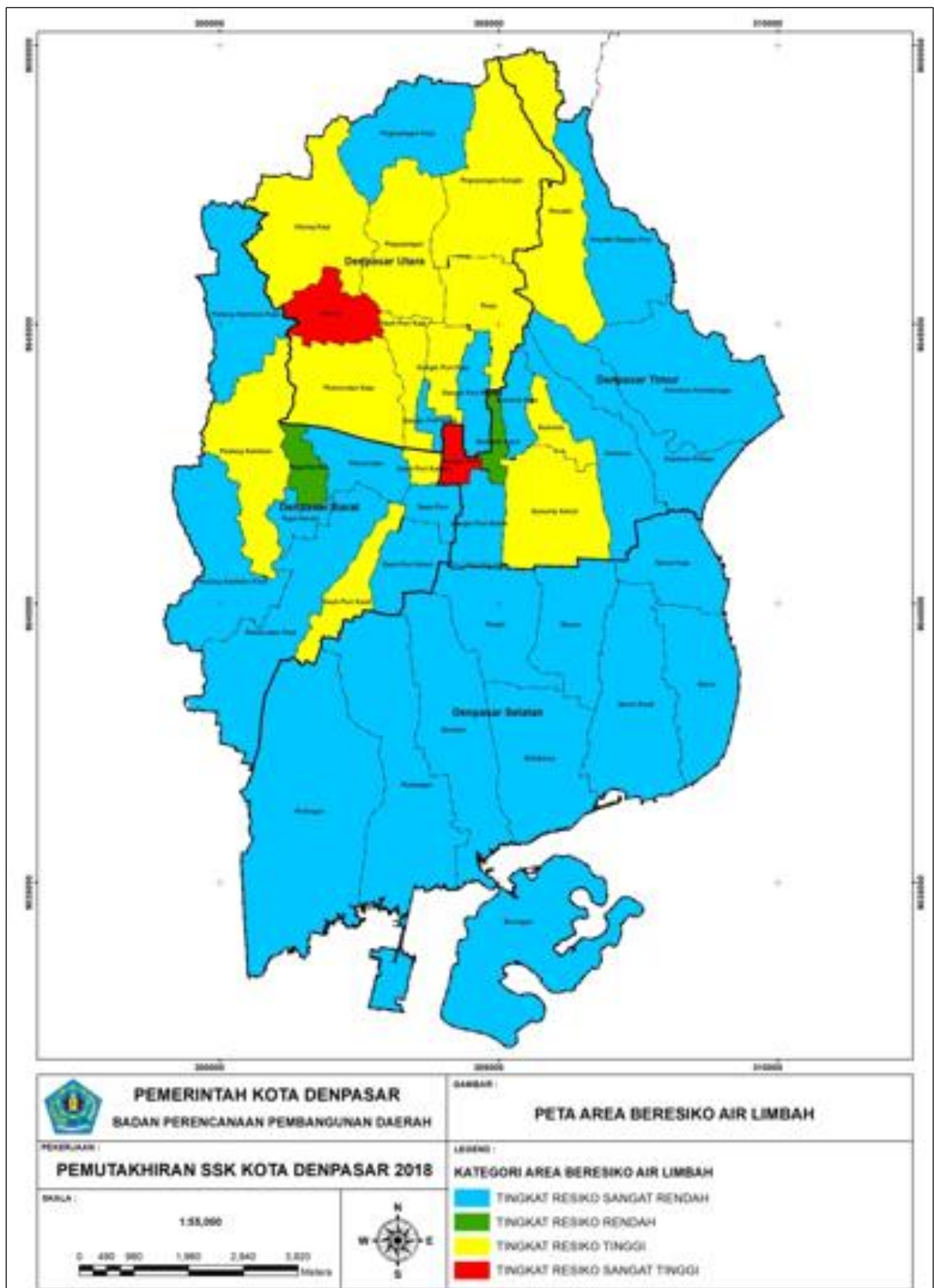
- g. Kurangnya kemampuan usaha menengah/kecil dalam membuat IPAL
- h. Anggapan apabila air limbah meresap ke tanah tidak menimbulkan masalah
- i. Kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik masih kurang
- j. Pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan fasilitas pengelolaan limbah domestik
- k. Pengetahuan masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan limbah domestik masih kurang
- l. Pengusaha Real Estate masih belum menyadari pentingnya untuk membuat IPAL komunal.

Dari permasalahan air limbah tersebut diatas maka dapat digambarkan lokasi-lokasi area beresiko air limbah di Kota Denpasar sebagai berikut

Tabel 2. 4. Hasil Skoring Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Air Limbah

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
1	Resiko 4	Denpasar Timur	Dangin Puri	Resiko Sangat Tinggi
		Denpasar Utara	Ubung	Resiko Sangat Tinggi
2	Resiko 3	Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Resiko Tinggi
		Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Resiko Tinggi
		Denpasar Barat	Padangsambian	Resiko Tinggi
		Denpasar Timur	Penatih	Resiko Tinggi
		Denpasar Timur	Sumerta	Resiko Tinggi
		Denpasar Timur	Sumerta Kelod	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kaja	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Dauh Puri Kaja	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Peguyangan	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Peguyangan Kangin	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Pemecutan Kaja	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Tonja	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Ubung Kaja	Resiko Tinggi
3	Resiko 2	Denpasar Barat	Tegal Kertha	Resiko Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kauh	Resiko Rendah
4	Resiko 1	Denpasar Barat	Dauh Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Padangsambian Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Padangsambian Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Pemecutan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Pemecutan Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Tegal Harum	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Panjer	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Pedungan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Pemogan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Renon	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Serangan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sesetan	Resiko Sangat Rendah

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
		Denpasar Selatan	Sidakarya	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman Kertalangu	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman Petilan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Penatih Dangin Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan Kaja	Resiko Sangat Rendah



Gambar 2. 12. Peta Area Berisiko Air Limbah

Isu dan Permasalahan (Teknis) Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar, antara lain:

- Keberadaan TPS 3R masih sangat kurang, sekalipun sudah terdapat Bank Sampah yang beroperasi, usaha pengurangan sampah hanya mencapai 16,2%
- Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sehingga belum semua wilayah dapat terlayani ditandai dengan upaya penanganan sampah hanya mencapai 40,12%
- Masih adanya sampah yang tidak tertangani sebesar 43,68% sehingga praktik pengelolaan sampah individual seperti pembuangan liar dan pembakaran masih dilakukan oleh masyarakat
- Teknologi pengelolaan persampahan masih sederhana
- Kualitas sarana dan prasarana pendukung TPA masih dibawah standar
- Kondisi Sarana dan Prasarana banyak yang rusak.

Isu dan Permasalahan (Non Teknis) Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar, antara lain:

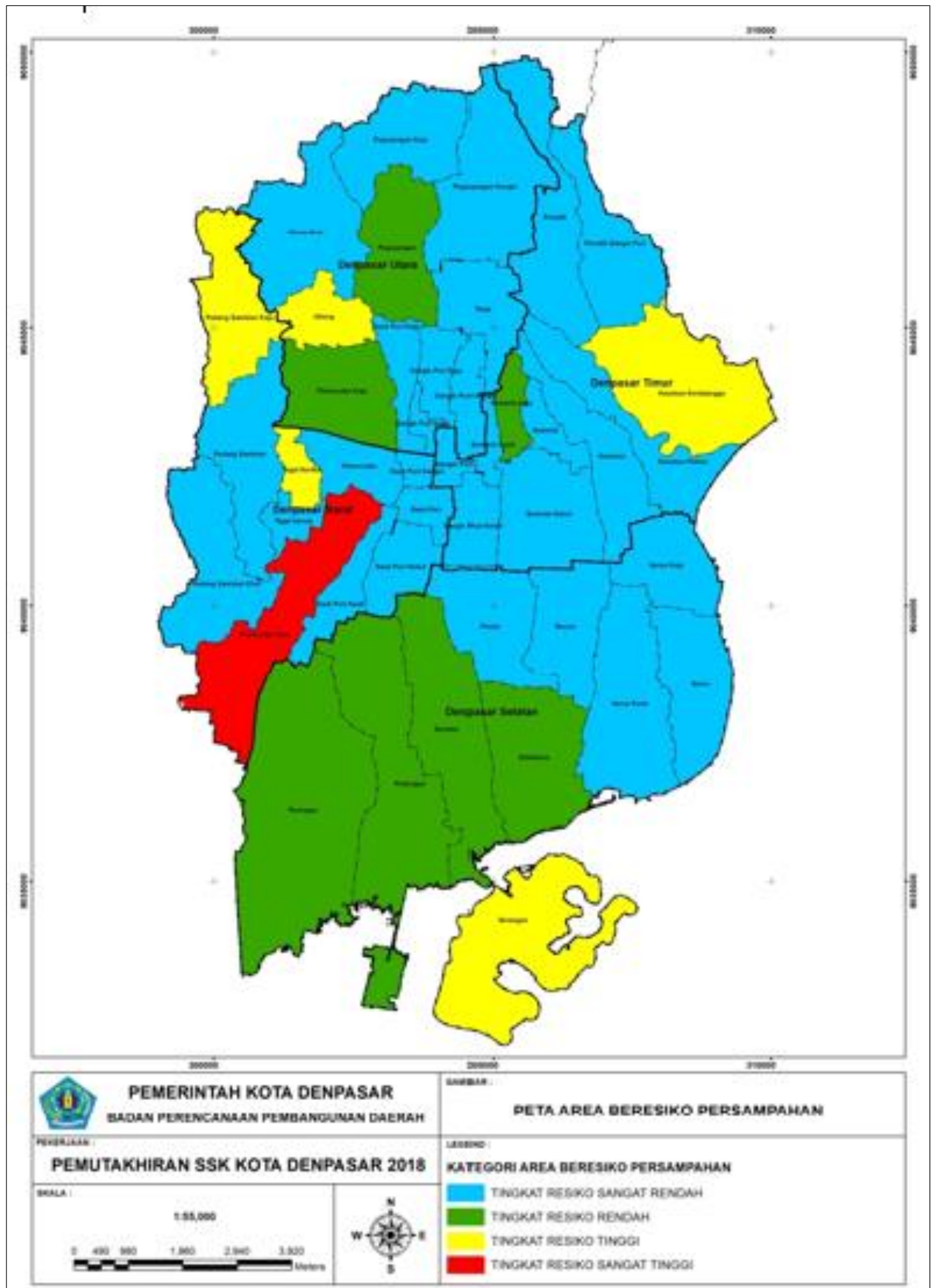
- Penerapan Retribusi dan peraturan belum memadai
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dalam bidang kebersihan
- Sosialisasi kelembagaan pengelola persampahan yang bersifat regional (SARBAGITA) dan pembagian peran masing-masing daerah belum memadai
- Sosialisasi kelembagaan pengelola persampahan yang bersifat regional (SARBAGITA) dan pembagian peran masing-masing daerah belum memadai
- Program pendukung untuk advokasi, penyadaran dan penguatan kapasitas masyarakat untuk sektor persampahan masih minim
- Adanya pergeseran gaya hidup masyarakat yang serba menggunakan plastik dan cenderung menggunakan barang-barang sekali pakai
- Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan persampahan
- Pihak swasta yang bergerak dibidang pariwisata dan industri kecil belum menerapkan konsep pengelolaan sampah yang baik
- Adanya sampah kiriman dari wilayah lain

Dari permasalahan persampahan tersebut diatas maka dapat digambarkan lokasi lokasi area beresiko persampahan di Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2. 5. Hasil Skoring Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Persampahan

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
1	Resiko 4	Denpasar Barat	Pemecutan Klod	Resiko Sangat Tinggi
2	Resiko 3	Denpasar Barat	Padangsambian Kaja	Resiko Tinggi
		Denpasar Barat	Tegal Kertha	Resiko Tinggi
		Denpasar Selatan	Serangan	Resiko Tinggi
		Denpasar Timur	Kesiman Kertalangu	Resiko Tinggi
		Denpasar Utara	Ubung	Resiko Tinggi
3	Resiko 2	Denpasar Selatan	Pemogan	Resiko Rendah
		Denpasar Selatan	Sesetan	Resiko Rendah

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
4	Resiko 1	Denpasar Selatan	Sidakarya	Resiko Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kaja	Resiko Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan	Resiko Rendah
		Denpasar Utara	Pemecutan Kaja	Resiko Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Padangsambian	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Padangsambian Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Pemecutan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Tegal Harum	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Panjer	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Renon	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Dangin Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman Petilan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Penatih	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Penatih Dangin Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kelod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dauh Puri Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Tonja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Ubung Kaja	Resiko Sangat Rendah



Gambar 2. 13. Peta Area Berisiko Persampahan

Isu dan Permasalahan (Teknis) Sistem Pengelolaan Drainase Kota Denpasar, antara lain:

- Akibat debit air hujan dimana kapasitas saluran atau gorong-gorong yang tidak memadai
- Kurangnya kapasitas saluran atau gorong-gorong dapat disebabkan oleh desain yang tidak tepat atau desain yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan kota dalam jangka waktu tertentu. Juga dapat diakibatkan oleh penumpukan sampah atau sedimen yang memperkecil penampang basah saluran atau gorong-gorong akibat kurangnya pemeliharaan
- Akibat pasang surut laut menimbulkan halangan pada beberapa saluran sebelum bermuara ke laut, seperti saluran Tk Lobong dan Tk Loloan
- Adanya beberapa bendung tetap yang dulunya tidak menimbulkan masalah, namun sekarang dengan terjadinya peningkatan debit akibat perubahan lahan
- Adanya penumpukan sampah di sungai, saluran, bangunan bagi atau gorong-gorong sehingga menimbulkan penyumbatan
- Tingginya tingkat sedimentasi dan tumpukan sampah drainase
- Masih ada titik genangan di beberapa lokasi

Isu dan Permasalahan (Non Teknis) Sistem Drainase Kota Denpasar, antara lain:

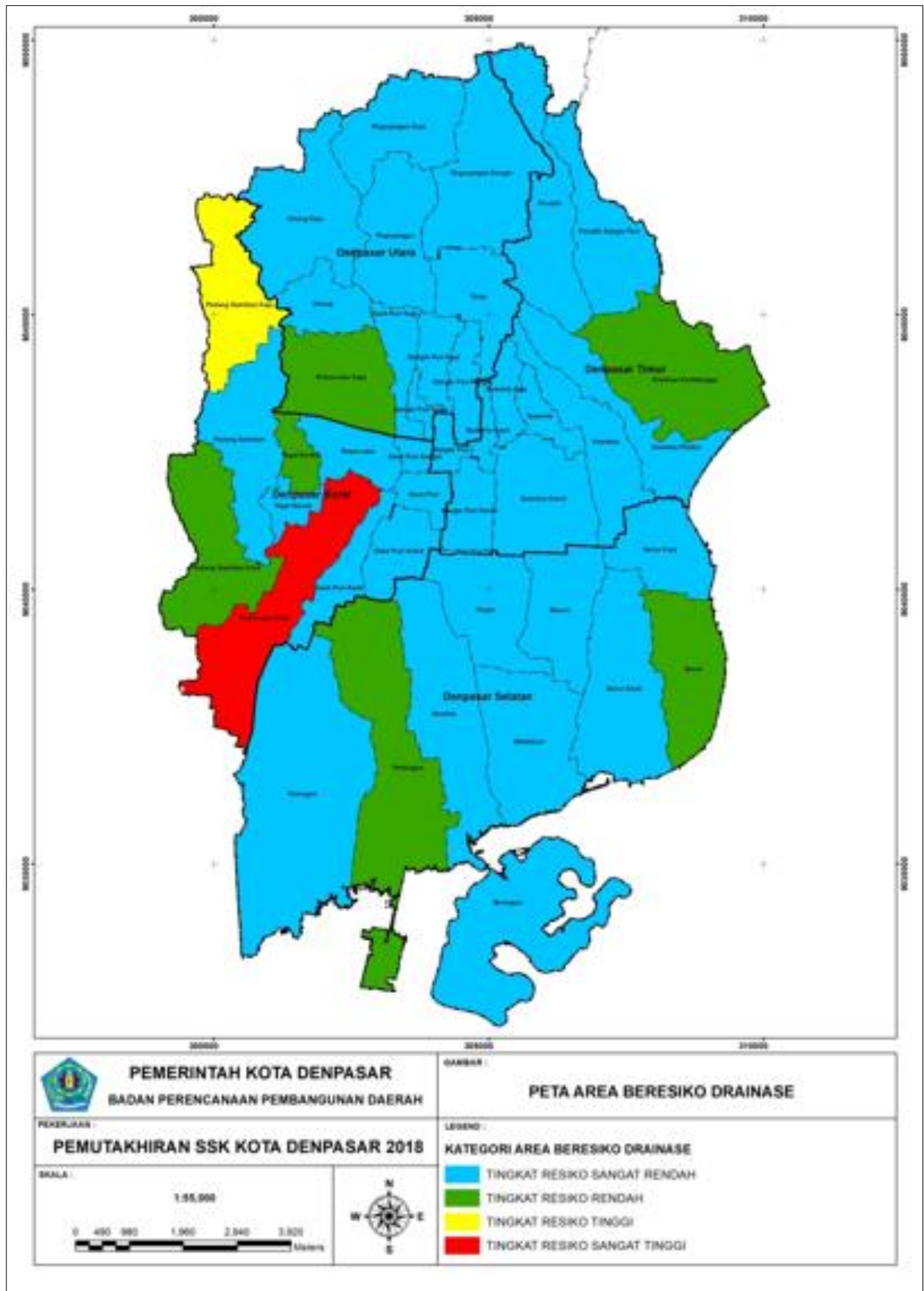
- Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan jaringan drainase yang telah dibangun masih rendah
- Masih ada perusahaan yang membuang limbah ke saluran drainase

Dari permasalahan drainase tersebut diatas maka dapat digambarkan lokasilokasi area beresiko drainase di Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2. 6. Hasil Skoring Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Resiko Drainase

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
1	Resiko 4	Denpasar Barat	Pemecutan Klod	Resiko Sangat Tinggi
2	Resiko 3	Denpasar Barat	Padangsambian Kaja	Resiko Tinggi
3	Resiko 2	Denpasar Barat	Padangsambian Klod	Resiko Rendah
		Denpasar Barat	Tegal Kertha	Resiko Rendah
		Denpasar Selatan	Pedungan	Resiko Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur	Resiko Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman Kertalangu	Resiko Rendah
		Denpasar Utara	Pemecutan Kaja	Resiko Rendah
4	Resiko 1	Denpasar Barat	Dauh Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Dauh Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Padangsambian	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Pemecutan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Barat	Tegal Harum	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Panjer	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Pemogan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Renon	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sanur Kauh	Resiko Sangat Rendah

No	Area Beresiko	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Tingkat Resiko
		Denpasar Selatan	Serangan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sesetan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Selatan	Sidakarya	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Dangin Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Kesiman Petilan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Penatih	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Penatih Dangin Puri	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Timur	Sumerta Kelod	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dangin Puri Kauh	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Dauh Puri Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan Kaja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Peguyangan Kangin	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Tonja	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Ubung	Resiko Sangat Rendah
		Denpasar Utara	Ubung Kaja	Resiko Sangat Rendah



Gambar 2. 14. Peta Area Berisiko Drainase

B. ARAH PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Arah pengembangan strategi air limbah domestik meliputi :

1. Penyusunan Perda air limbah yang disesuaikan dengan kondisi terkini
2. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan DSDP pada daerah yang sesuai dengan pengaliran grafitasi.
3. Penambahan jumlah IPAL Sanimas terbangun khususnya untuk daerah yang tidak terlayani DSDP dan perekrutan serta pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia pengelola IPAL Sanimas.
4. Pertegas peraturan penyediaan saluran untuk DSDP pada tiap bangunan baru melalui peryasatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
5. Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: Pengembangan program SANIMAS dan Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah-daerah prioritas.

Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan. Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kota Denpasar berdasarkan isu strategis yang ada saat ini disampaikan sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik, meliputi :

- STRATEGI 1 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem *offsite* melalui sistem komunal dan terpusat;
- STRATEGI II : Pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat
- STRATEGI III : Melakukan updating dokumen perencanaan dan peyediaan payung hukum pengelolaan air limbah
- STRATEGI IV : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor air limbah
- STRATEGI V : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah

Arah pengembangan strategi persampahan meliputi :

- a. Penegakkan peraturan daerah dan sanksi-sanksi pengelolaan sampah
- b. Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat dalam reduksi sampah melalui 3R
- c. Upaya meningkatkan minat masyarakat untuk upaya pengurangan sampah dari sumbernya
- d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Strategi pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kota Denpasar berdasarkan isu strategis yang ada saat ini disampaikan sebagai berikut

- STRATEGI I : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya
- STRATEGI II: Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah
- STRATEGI III : Pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat
- STRATEGI IV : Penguatan kelembagaan dan SDM pengelola sampah

STRATEGI V: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Arah pengembangan strategi drainase perkotaan meliputi :

1. Tersedianya Masterplan Drainase sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Perbaikan kondisi saluran drainase
3. Keindahan lingkungan & terjaga saluran dari sampah.
4. Terbangunnya saluran drainase sesuai kebutuhan.
5. Tersedianya saluran drainase lingkungan
6. Tersedianya saluran drainase primer dan sekunder yang baik serta pengurangan genangan.

Strategi pengembangan drainase perkotaan selama 5 (lima) tahun mendatang di Kota Denpasar berdasarkan isu strategis yang ada saat ini disampaikan sebagai berikut :

STRATEGI I : Pemberdayaan masyarakat dan swasta

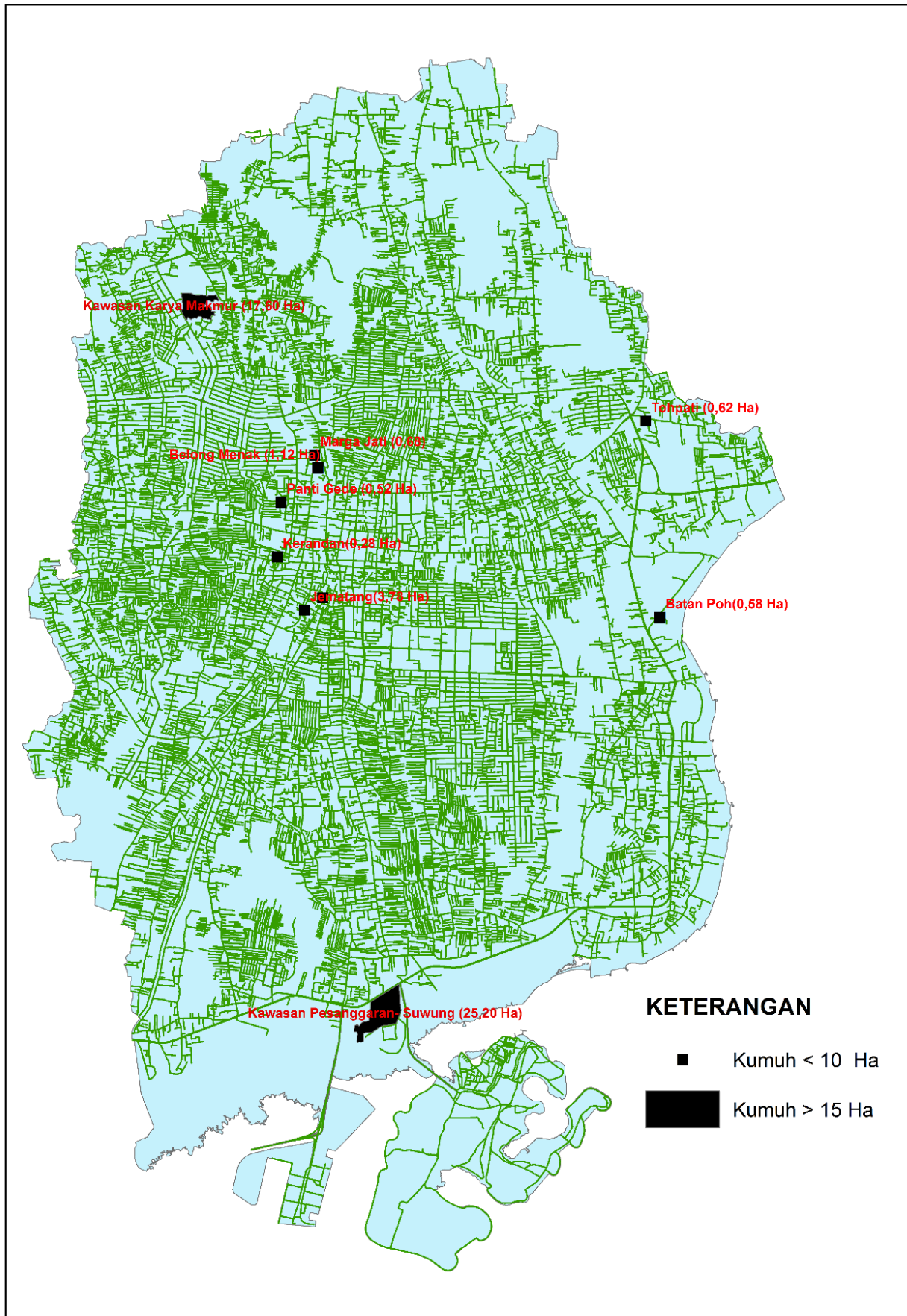
STRATEGI II: Revitalisasi saluran primer dan sekunder

2.3.3. RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Isu dan Permasalahan (Teknis) Penanganan Kawasan Kumuh Kota Denpasar, antara lain:

- a. Lokasi Jalan Ulun Carik : Kondisi sungai dipenuhi oleh sampah-sampah yang terbawa aliran air, sehingga kondisi sampah yang menumpuk di beberapa titik sungai dapat menimbulkan ancaman banjir.
- b. Lokasi Jalan SMA 3 Gg VI : Lebar jalan yang sempit tidak memadai dengan kepadatan bangunan yang ada sehingga dapat mengganggu sirkulasi kendaraan masuk dan keluar.
- c. Lokasi Jalan Nusa Indah Gg XXI : Tidak terdapat pengelolaan persampahan yang memenuhi standar teknis.
- d. Lokasi Jalan WR Supratman Gg 2D dan Jalan Waribang Gg Ia : Permukiman padat dengan kondisi jalan yang sempit, terdapat beberapa jalan tidak memiliki drainase dan kondisi air limbah yang masuk ke saluran drainase dan bangunan yang tidak memiliki gsb dengan sungai yang ada di dalam permukiman.
- e. Lokasi Jalan Pulau Buru Sekitar no 32B : Pengelolaan limbah rumah tangga masih belum optimal karena sebagian besar masyarakat membuang limbah rumah tangga ke sungai yang berada di belakang permukiman (Tukad Badung)
- f. Lokasi Jalan Pulau Misol Gg VB : Belum terdapat system proteksi kebakaran
- g. Lokasi Gang Dahlia dan Gang Cempaka : Permukiman padat, pengelolaan limbah rumah tangga masih dibawa ke drainase, dan jalan-jalan lingkungan yang ada belum memenuhi standar.
- h. Lokasi Br. Kerandan Gang Dahlia : Kondisi drainase kurang memadai dan ditemukan beberapa drainase yang tersumbat oleh sampah
- i. Lokasi Jalan Buana Kubu Gg Genta : Pengelolaan air limbah rumah tangga belum optimal karena masih memanfaatkan drainase yang ada sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga
- j. Lokasi Gang Tukad Grembengan : Lebar jalan yang belum memenuhi standar

- k. Lokasi Jalan Batusari Gang 4 Depan Setra Madure : Belum terdapat drainase di beberapa jalan dan belum terdapat pengolahan limbah secara terpadu, masyarakat masih membuang limbah rumah tangga ke saluran drainase
- l. Lokasi Jalan Pulau Ayu Selatan : Kondisi drainase kurang memadai dan ditemukan beberapa drainase yang tersumbat oleh sampah
- m. Lokasi Kawasan Permukiman TPA Suwung : Perkerasan jalan pada permukiman yang ada masih berupa perkerasan tanah, belum semua kawasan dilengkapi dengan drainase, sehingga terdapat genangan air limbah yang meluap dari saluran.
- n. Lokasi Jalan Karya Makmur dan Gang Kelapa Muda : Kondisi perkerasan pada jalan karya makmur masih berupa perkerasan tanah kapur dan terdapat beberapa titik genangan namun pada gang kelapa muda sudah berpaving. Belum semua kawasan terdapat saluran drainase.
- o. Lokasi Jalan Sakura Gang IV Ujung : Belum terdapat hidran air untuk proteksi kebakaran
- p. Lokasi Br. Teruna Sari Jalan Gatot Subroto VI Q,S : Kondisi drainase belum optimal, terdapat sampah-sampah yang menyumbat saluran drainase.
- q. Lokasi Jalan Bung Tomo VI : Kondisi jalan sudah berpaving namun ada yang masih menggunakan perkerasan tanah dan kapur, terdapat kondisi drainase yang bercampur dengan sampah.
- r. Lokasi Jalan Wibisana Barat Gg Taman Sari, Gg Ayam dan Jalur Tukad Teba : Kondisi drainase belum optimal, terdapat sampah-sampah yang menyumbat saluran drainase.
- s. Lokasi Kawasan sekitar Wanasari : Terdapat jaringan jalan dan drainase belum memadai, pelayanan air bersih belum optimal dan pengelolaan air limbah.



Gambar 2. 15. Peta Kawasan Kumuh

Hasil perhitungan penilaian kekumuhan dengan skala prioritas tertinggi berada di Kawasan Permukiman TPA Suwung. Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh TPA Suwung melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pencegahan permukiman kumuh dilakukan melalui strategi :

- a. Penetapan regulasi terkait bangunan dan Lingkungan;
- b. Sosialisasi regulasi bangunan dan lingkungan;
- c. Pembinaan standar air minum yang sehat;
- d. Pemeliharaan saluran drainase secara berkala;
- e. Pembinaan program 3R; Pembinaan pengolahan sampah berbasis masyarakat;
- f. Pemberdayaan masyarakat terkait sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis;
- g. Sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui strategi :

- a. Pengaturan komponen keteraturan bangunan yang sesuai dengan syarat teknis;
- b. Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan sesuai syarat teknis bangunan (bedah rumah);
- c. Perbaikan kualitas permukaan jalan (pavingisasi);
- d. Rehabilitasi unit penyedia air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis;
- e. Penambahan jalur pipa untuk saluran rumah yang belum terakses air minum
- f. Pembangunan saluran baru dan normalisasi saluran drainase yang telah ada;
- g. Penambahan tempat sampah sementara di titik-titik pada jalan utama dengan sistem sampah terpilah;
- h. Peningkatan jangkauan Kawasan Permukiman dan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah;
- i. Pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran berupa motor damkar dan hydrant.

Rencana Program pada Kawasan Permukiman Kumuh di Permukiman TPA Suwung, meliputi:

- a. Indikasi program dan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru permukiman kumuh terdiri dari program fisik dan program non fisik. Adapun program-program yang bisa dilakukan berupa rehabilitasi aspek-aspek kekumuhan yang berpotensi menjadi kumuh seperti rehabilitasi bangunan-bangunan dengan kepadatan tinggi, memiliki ketidakteraturan, pemeliharaan jalan lingkungan di permukiman-permukiman padat, pemeliharaan dan normalisasi rutin saluran drainase, peningkatan sistem pengangkutan sampah, pemeliharaan sarana pembuangan air limbah dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang proteksi kebakaran. Selain program berupa pemeliharaan dari aspek infrastruktur dasar permukiman, program-program berupa sosialisasi dapat dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, seperti sosialisasi pola hidup sehat, sosialisasi pengolahan sampah 3R dan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih.
- b. Indikasi program dan kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh terdiri dari indikator fisik dan non fisik. Program dan kegiatan fisik, meliputi aspek infrastruktur permukiman seperti

bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, dan proteksi kebakaran.

2.4. KESIMPULAN ARAHAN KEBIJAKAN

Bedasarkan arahan kebijakan pembangunan dan arahan spasial serta arahan sektoral; pusat dan daerah tersebut diatas maka dapat disimpulkan arahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kota Denpasar untuk mendukung fungsinya sebagai kawasan perkotaan metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
- b. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, entitas regional entitas kabupaten/kota dan entitas kawasan;
- c. Peningkatan pelayanan air limbah domestik terpusat dan domestik setempat, entitas regional, entitas kabupaten/kota dan entitas kawasan;
- d. Peningkatan pelayanan persampahan entitas regional, entitas kabupaten/kota, dan entitas kawasan;
- e. Peningkatan pelayanan drainase lingkungan permukiman
- f. Peningkatan kualitas permukiman
- g. Peningkatan penataan bangunan dan lingkungan pelayanan Perkantoran pemerintah kota



BAB III

PROFIL INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1.1. ADMINISTRASI WILAYAH

Secara geografis, Kota Denpasar terletak pada 08° 35' 31"–08° 44' 49" Lintang Selatan dan 115° 10' 23"–115° 16' 27" Bujur Timur. Berdasarkan Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2021, luas wilayah Kota Denpasar adalah 127.78 Km². Secara geografis lokasi wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan:

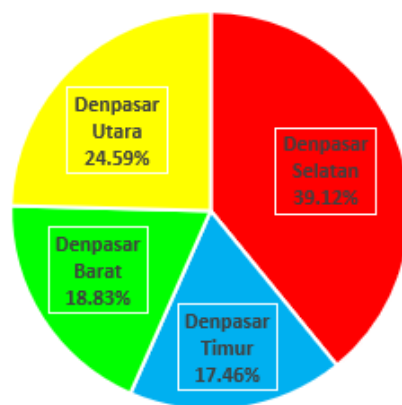
- Sebelah utara : Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal (Kab. Badung)
- Sebelah timur : Kecamatan Sukawati (Kab. Gianyar) dan Selat Badung
- Sebelah selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kab. Badung) dan Teluk Benoa
- Sebelah barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Sempasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Utara. Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 49.99 Km² atau sekitar 39.12% dari luas wilayah, kemudian disusul oleh Kecamatan Denpasar Utara dengan luas wilayah kurang lebih 31.42 Km² atau sekitar 24.59% dari luas Kota Denpasar, selanjutnya adalah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 24.06 Km² atau 18.83%, dan yang terakhir adalah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah sekitar 22.31 Km² atau 17.46% dari luas wilayah Kota Denpasar. Berikut merupakan table luas masing-masing kecamatan di Kota Denpasar.

Tabel 3. 1. Luas Kecamatan di Kota Denpasar

No	Nama Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Denpasar Selatan	10	49,99	39,12
2	Denpasar Timur	11	22,31	17,46
3	Denpasar Barat	11	24,06	18,83
4	Denpasar Utara	11	31,42	24,59
Jumlah		43	127,78	100,00

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka 2021



Gambar 3. 1. Diagram Persentase Luas Kecamatan di Kota Denpasar

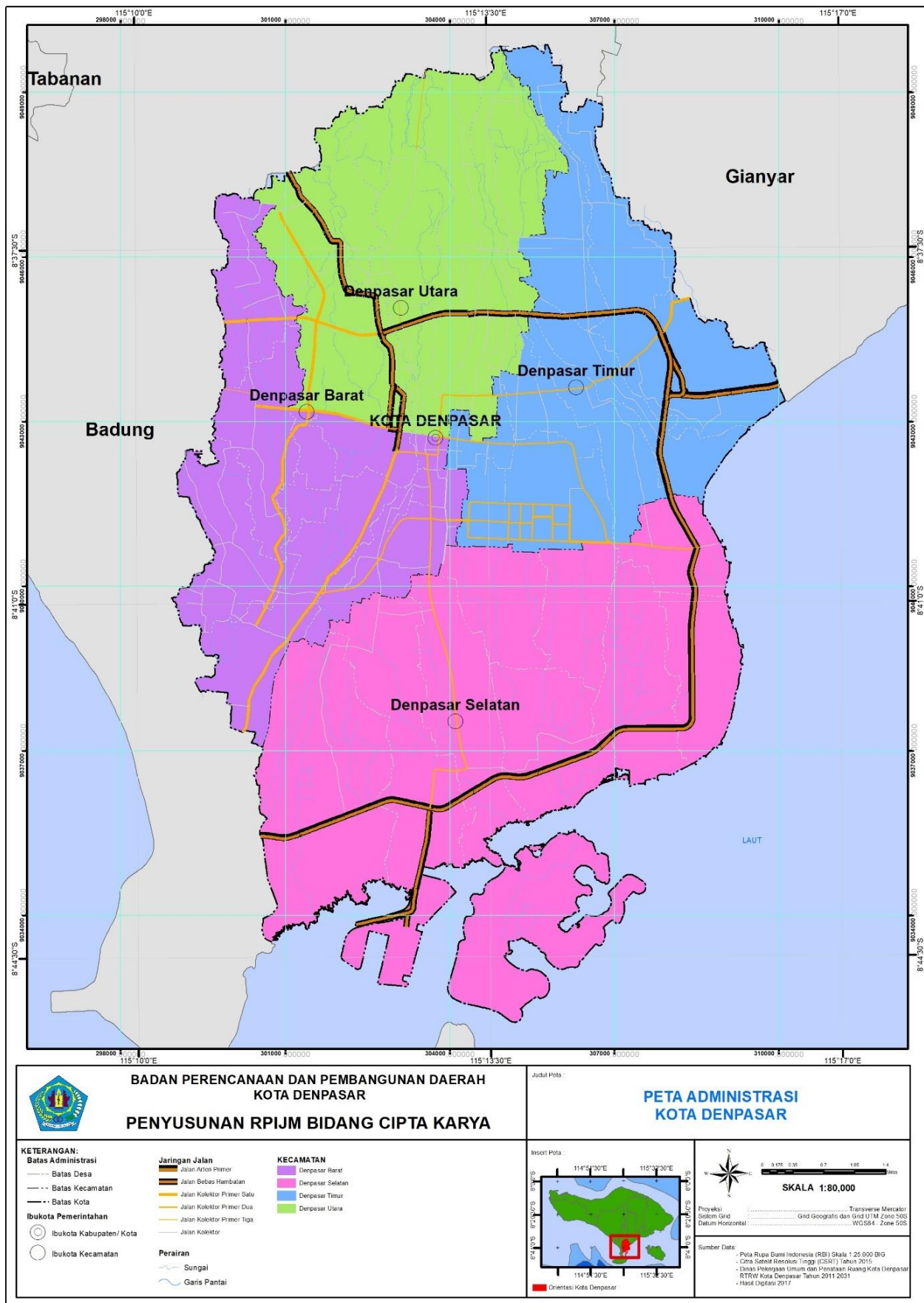
Kota Denpasar memiliki 43 Desa/ Kelurahan diantaranya 10 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan, 11 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Denpasar Timur, 11 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Denpasar Barat, dan 11 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara.

Tabel 3. 2. Kelurahan dan Desa di masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Denpasar Selatan			4.999,00	39,12
1	1.1	Desa Pemogan	971,00	7,60
	1.2	Kelurahan Pedungan	749,00	5,86
	1.3	Kelurahan Sesean	739,00	5,78
	1.4	Kelurahan Serangan	481,00	3,76
	1.5	Desa Sidakarya	389,00	3,04
	1.6	Kelurahan Panjer	359,00	2,81
	1.7	Kelurahan Renon	254,00	1,99
	1.8	Desa Sanur Kauh	386,00	3,02
	1.9	Kelurahan Sanur	402,00	3,15
	1.10	Desa Sanur Kaja	269,00	2,11
Kecamatan Denpasar Timur			2.254,00	17,64
2	2.1	Desa Dangin Puri Klod	142,00	1,11
	2.2	Desa Sumerta Klod	271,00	2,12
	2.3	Kelurahan Kesiman	266,00	2,08
	2.4	Desa Kesiman Petilan	290,00	2,27
	2.5	Desa Kesiman Kertalangu	405,00	3,17
	2.6	Kelurahan Sumerta	52,00	0,41
	2.7	Desa Sumerta Kaja	73,00	0,57
	2.8	Desa Sumerta Kauh	89,00	0,70
	2.9	Kelurahahn Dangin Puri	65,00	0,51
	2.10	Kelurahan Penatih	281,00	2,20
	2.11	Desa Penatih Dangin Puri	320,00	2,50
Kecamatan Denpasar Barat			2.413,00	18,88
3	3.1	Desa Padang Sambian Klod	412,00	3,22

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
	3.2	Desa Pemecutan Klod	450,00	3,52
	3.3	Desa Kauh Puri Kauh	190,00	1,49
	3.4	Desa Kauh Puri Klod	188,00	1,47
	3.5	Kelurahan Dauh Puri	60,00	0,47
	3.6	Desa Dauh Puri Kangin	59,00	0,46
	3.7	Kelurahan Pemecutan	186,00	1,46
	3.8	Desa Tegal Harum	50,00	0,39
	3.9	Desa Tegal Kertha	35,00	0,27
	3.10	Kelurahan Padang Sambian	374,00	2,93
	3.11	Desa Padang Sambian Kaja	409,00	3,20
Kecamatan Denpasar Utara			3.112,00	24,35
4	4.1	Desa Dangin Puri Kaja	142,00	1,11
	4.2	Desa Dangin Puri Kangin	75,00	0,59
	4.3	Kelurahan Tonja	230,00	1,80
	4.4	Desa Dangin Puri Kauh	72,00	0,56
	4.5	Desa Pemecutan Kaja	385,00	3,01
	4.6	Kelurahan Ubung	103,00	0,81
	4.7	Desa Ubung Kaja	400,00	3,13
	4.8	Desa Dauh Puri Kaja	109,00	0,85
	4.9	Kelurahan Peguyangan	644,00	5,04
	4.10	Desa Peguyangan Kaja	536,00	4,19
	4.11	Desa Peguyangan Kangin	416,00	3,26
Kota Denpasar			12.278,00	100

Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka 2021



Gambar 3. 2. Peta Administrasi Kota Denpasar

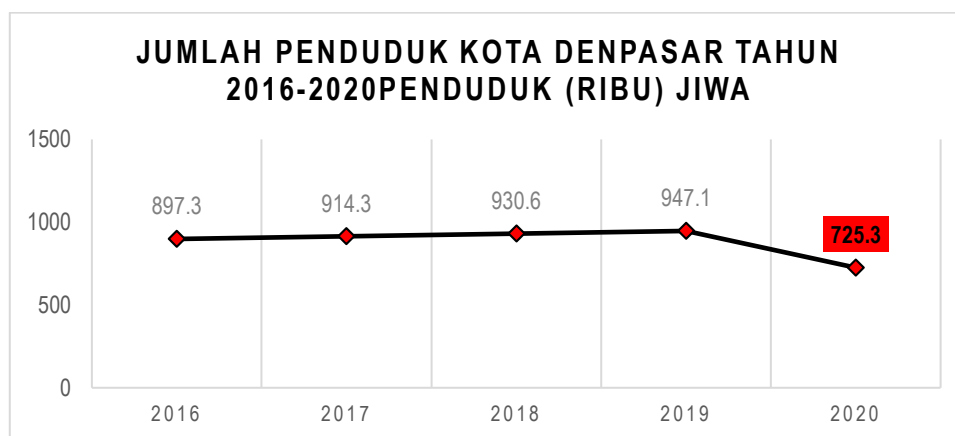
3.1.2. KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam suatu perencanaan wilayah. Berdasarkan data Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebanyak 725.314 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk -1.91%. Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 sekitar 221.800 jiwa. Penurunan jumlah penduduk pada Tahun 2020 di Kota Denpasar salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Tabel 3. 3. Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu) jiwa
1	2016	897.3
2	2017	914.3
3	2018	930.6
4	2019	947.1
5	2020	725.3

Sumber: Kompilasi Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2017-2021



Gambar 3. 3. Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilo meter persegi. Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 klasifikasi kepadatan penduduk dibagi menjadi:

- Kepadatan rendah : <150 jiwa/ha
- Kepadatan sedang : 151-200 jiwa/ha
- Kepadatan Tinggi : 201-400 jiwa/ha

Kepadatan penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020 adalah 5,676 jiwa/ Km². Berdasarkan standar tersebut kepadatan penduduk di Kota Denpasar Tahun 2020 termasuk dalam kategori kepadatan rendah yaitu kurang dari 150 jiwa/ha (56 jiwa/ ha).

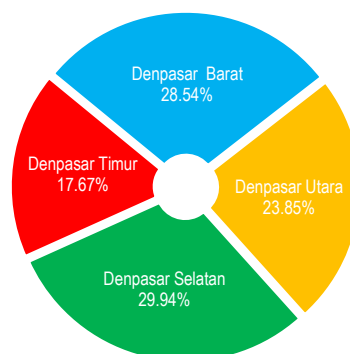
Bila dilihat dari data perkecamatan, jumlah penduduk terbesar di Kota Denpasar berada di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sejumlah 217,100 penduduk, kemudian Kecamatan Denpasar Barat 206,958 penduduk, Denpasar Utara 172,314 penduduk, dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Denpasar Timur sejumlah 128,276 penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat yaitu 8,601 jiwa/ Km². Berikut merupakan table jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020.

Tabel 3. 4. Penduduk Kota Denpasar Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase	Kepadatan Penduduk/ Km ²
1	Denpasar Selatan	217,100	29.93	4,341
2	Denpasar Timur	128,276	17.69	5,749
3	Denpasar Barat	206,958	28.53	8,601
4	Denpasar Utara	172,980	23.85	5,505
Kota Denpasar		725,314	100.00	5,676

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021

DISTRIBUSI PENDUDUK PER KECAMATAN DI KOTA DENPASAR TAHUN 2020



Gambar 3. 4. Digram distribusi penduduk Per Kecamatan Kota Denpasar Tahun 2020

Proyeksi penduduk yang digunakan dalam penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya ini adalah metode Geometri. Dimana metode ini perkembangan penduduk secara otomatis berganda dengan penambahan penduduk. Metode ini tidak memperhatikan adanya apakah suatu saat akan terjadi perkembangan menurun yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang mendekati maksimum. Formula metode geometri adalah sebagai berikut:

$$P_n = P_0(1 + r)^n$$

Keterangan:

P_n = jumlah penduduk pada tahun proyeksi (jiwa)

P_0 = jumlah penduduk pada awal tahun dasar (jiwa)

r = laju pertumbuhan penduduk (%)

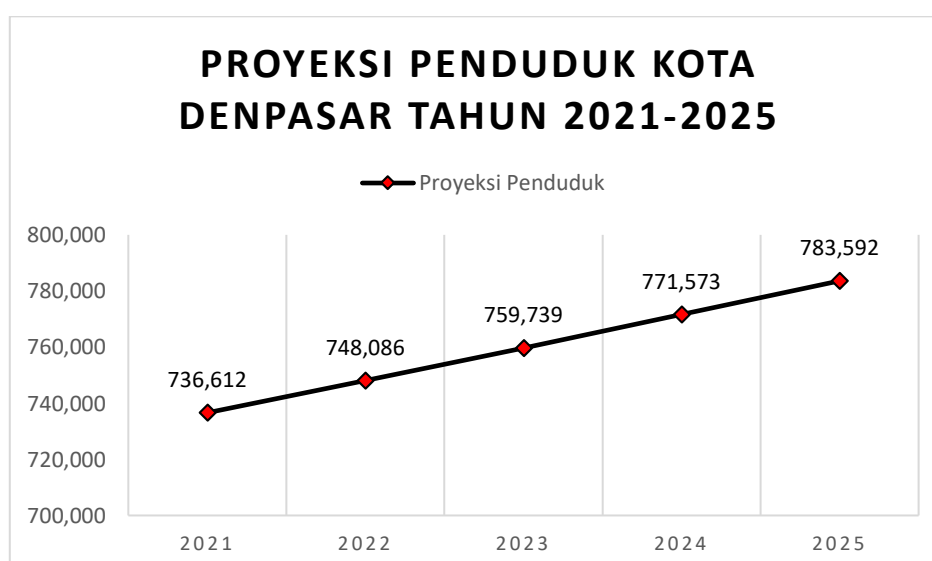
n = selisih antara tahun proyeksi dengan tahun dasar (tahun)

Jumlah penduduk awal tahun dasar yang digunakan dalam analisis proyeksi penduduk dalam Dokumen RPIJM ini adalah penduduk Tahun 2020 yaitu sejumlah 725,314 dengan tahun proyeksi adalah Tahun 2021 – 2025. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar adalah -1.91%, sehingga data tersebut kurang relevan digunakan dalam analisis proyeksi penduduk (jumlah penduduk proyeksi akan semakin kecil), sehingga laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam proyeksi penduduk ini adalah laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar hasil sensus Tahun 2000 hingga Tahun 2020 yaitu sebesar 1.56%. Berikut merupakan hasil analisis proyeksi penduduk Kota Denpasar Tahun 2021 – 2025.

Tabel 3. 5. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Denpasar

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2021	736,612
2	2022	748,086
3	2023	759,739
4	2024	771,573
5	2025	783,592

Sumber: Hasil analisis, 2021



Gambar 3. 5. Grafik Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2021 - 2025

3.1.3. HAK ATAS TANAH DAN ZONA NILAI TANAH

a. Hak Atas Tanah

Menurut UUPA No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan, yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lainnya. Beberapa jenis hak atas tanah diantaranya adalah:

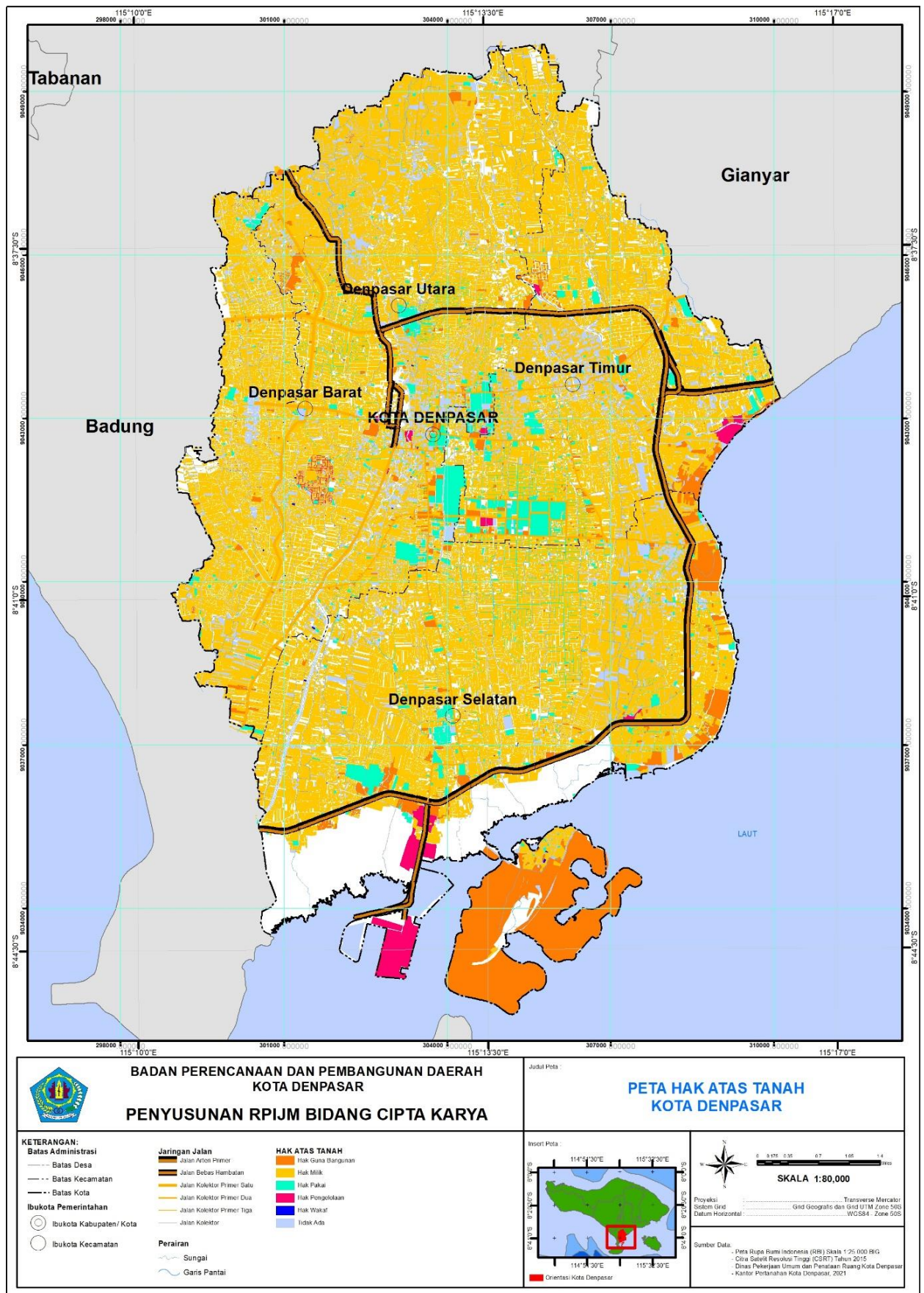
- a. hak milik; merupakan hak turn temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah.
- b. hak guna-usaha; merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, dalam jangka waktu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.
- c. hak guna-bangunan; merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- d. hak pakai; merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini
- e. hak sewa; seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- f. hak membuka tanah dan memungut hasil hutan; hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- g. hak-hak lian yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Berdasarkan data dari Pertanahan Kota Denpasar, hak atas tanah di Kota Denpasar terbagi menjadi hak milik, Hak Guna Pakai, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Hak Wakaf. Jumlah tanah dengan status Hak Milik di Kota Denpasar sejumlah 186,912, Hak Guna Bangunan 3,877, Hak Pakai 2,403, Hak Pengelolaan 26, dan Hak Wakaf 121. Berikut merupakan tabel dan ha katas tanah di Kota Denpasar.

Tabel 3. 6. Hak atas tanah Kota Denpasar

No	Hak Atas Tanah	Jumlah
1	Hak Milik	186,912
2	Hak Guna Bangunan	3,877
3	Hak Pakai	2,403
4	Hak Pengelolaan	26
5	Hak Wakaf	121

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Tahun 2021



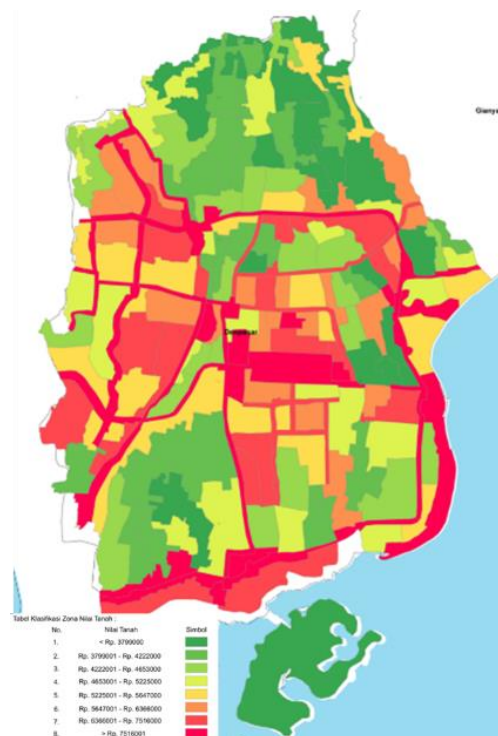
Gambar 3. 6. Peta Hak Atas Tanah Kota Denpasar

b. Zona Nilai Tanah

Zona nilai tanah (ZNT) adalah polygon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, batasnya bersifat imajiner atau nyata sesuai penggunaan tanah. Informasi ZNT merupakan informasi strategis dalam pengambilan keputusan pembangunan serta investasi. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, klasifikasi zona nilai tanah Kota Denpasar dapat dibagi menjadi beberapa nilai yaitu:

1. < Rp 3.799,000
2. Rp 3,799,001 – Rp 4,222,000
3. Rp 4,222,001 – Rp 4,653,000
4. Rp 4,653,001 – Rp 5,225,000
5. Rp 5,225,001 – Rp 5,647,000
6. Rp 5,647,001 – Rp 6,366,000
7. Rp 6,366,001 – Rp 7,516,000
8. > Rp 7,516,001

Wilayah yang memiliki nilai tanah > Rp 7,516,001 diantaranya kawasan pesisir pantai sanur, kawasan di ruas jalan Bypass Ngurah Rai, Ruas Jalan Gatot Subroto, Ruas Jalan Cokroaminoto, Ruas Jalan Raya Sesetan, Ruas Jalan Tengku Umar, Ruas Jalan Imam Bonjol, Ruas Jalan Mahendradata, Ruas Jalan kebo Iwa, Ruas Jalan Gunung Agung, Ruas Jalan Hayam Wuruk, dan kawasan Puputan Renon. Berikut merupakan peta klasifikasi nilai tanah Kota Denpasar Tahun 2020.



Gambar 3. 7. Peta Nilai Zona Tanah Kota Denpasar Tahun 2020

3.1.4. KONDISI FISKAL DAN ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang diceminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, serta untuk penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/ Kota

No	Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	$IKFD < 0.517$	Sangat Rendah
2	$0.517 \leq IKFD < 0.747$	Rendah
3	$0.747 \leq IKFD < 1.168$	Sedang
4	$1.168 \leq IKFD < 2.145$	Tinggi
5	$IKFD \geq 2.145$	Sangat Tinggi

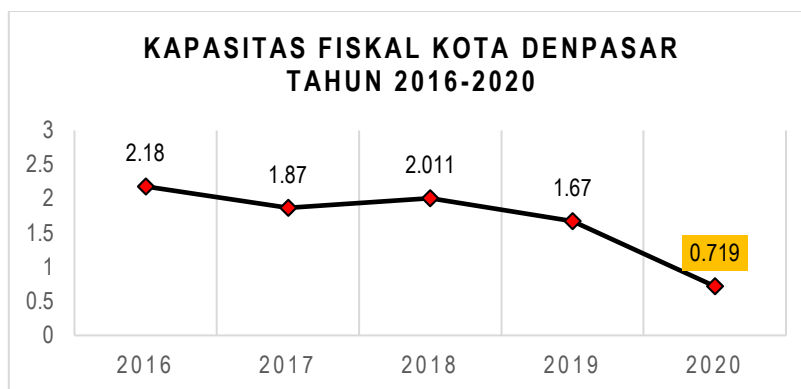
Sumber: Permen Keuangan No.7 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Np 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal, Kapasitas fiskal Kota Denpasar Tahun 2020 adalah 0.719. Kapasitas fiskal Kota Denpasar Tahun 2020 termasuk dalam kategori rendah ($0.517 \leq IKFD < 0.747$). Dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapasitas fiskal daerah Kota Denpasar dalam 5 tahun terakhir masuk dalam kategori sangat tinggi dan kategori tinggi. Berikut merupakan tabel kapasitas fiskal daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 8. Kapasitas Fiskal Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2016	2.18	Sangat Tinggi
2	2017	1.87	Tinggi
3	2018	2.011	Tinggi
4	2019	1.670	Tinggi
5	2020	0.719	Rendah

Sumber: PMK, 07 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020



Gambar 3. 8. Grafik Kapasitas Fiskal Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

Besar anggaran belanja bidang cipta karya di Kota Denpasar dalam 4 tahun terakhir berkisar dari 2.41% - 3.28% dari total anggaran belanja daerah. Pada tahun 2020 total anggaran belanja bidang cipta karya Kota Denpasar adalah Rp 45,463,320,049, atau sekitar 2.41% dari total anggaran belanja APBD Kota Denpasar. Anggaran bidang cipta karya terbesar adalah pada bidang PLP yaitu sebesar Rp 36,167,364,573, sedangkan anggaran terkecil adalah pada bidang air minum yaitu sebesar Rp 111,405,200. Berikut merupakan tabel besar anggaran belanja bidang cipta karya Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020.

Tabel 3. 9. Anggaran Bidang Cipta Karya pada APBD Kota Denpasar Tahun 2017 -2020

No	URAIAN	APBD KOTA DENPASAR			
		BELANJA (Rp)			
		2017	2018	2019	2020
1	PKP	15,221,921,080	23,193,883,934	22,083,868,073	7,970,971,487
2	PBL	4,062,513,563	1,658,513,740	0	1,213,578,789
3	AIR MINUM	343,383,528	2,929,740,350	2,097,318,405	111,405,200
4	PLP	54,872,949,458	49,703,561,382	57,343,410,425	36,167,364,573
	Belanja CIPTA KARYA	74,500,767,629	77,485,699,405	81,524,596,903	45,463,320,049
	APBD	2,280,383,206,910	2,365,991,774,110	2,487,294,595,540	1,884,553,111,850
	% Anggaran Bidang Cipta Karya terhadap APBD Kota	3.27%	3.27%	3.28%	2.41%

Sumber: APBD Kota Denpasar Tahun 2017 - 2020

3.1.5. KONDISI KELEMBAGAAN

Beberapa Lembaga bidang permukiman di Kota Denpasar diantaranya adalah Bappeda Kota Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

1) **Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Denpasar**

Berdasarkan Renstra Bapperda Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 tugas dan fungsi Bappeda Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

a) **Tugas :**

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pengendalian serta evaluasi program pembangunan.

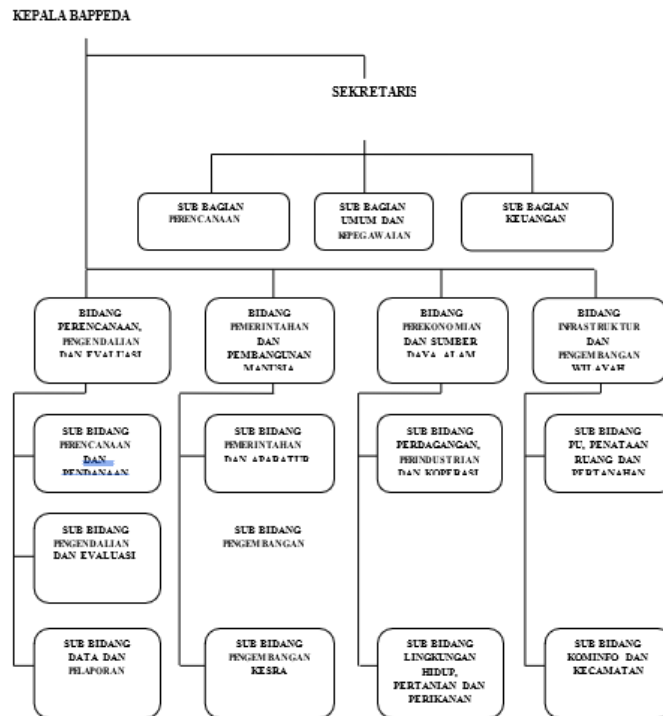
b) **Fungsi:**

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan

c) **Struktur Organisasi:**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dan Rumah Sakit Umum Daerah, Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Data dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sub Bidang Pengembangan SDM , Sub Bidang Pengembangan Kesra
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Sub Bidang Lingkungan hidup Pertanian dan Perikanan
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari Sub Bidang PU Penataan Ruang dan
7. Pertanahan, Sub Bidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan, Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan



Gambar 3. 9. Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Berdasarkan Resnstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas PUPR Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

a) Tugas:

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
2. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;

b) Fungsi:

1. Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

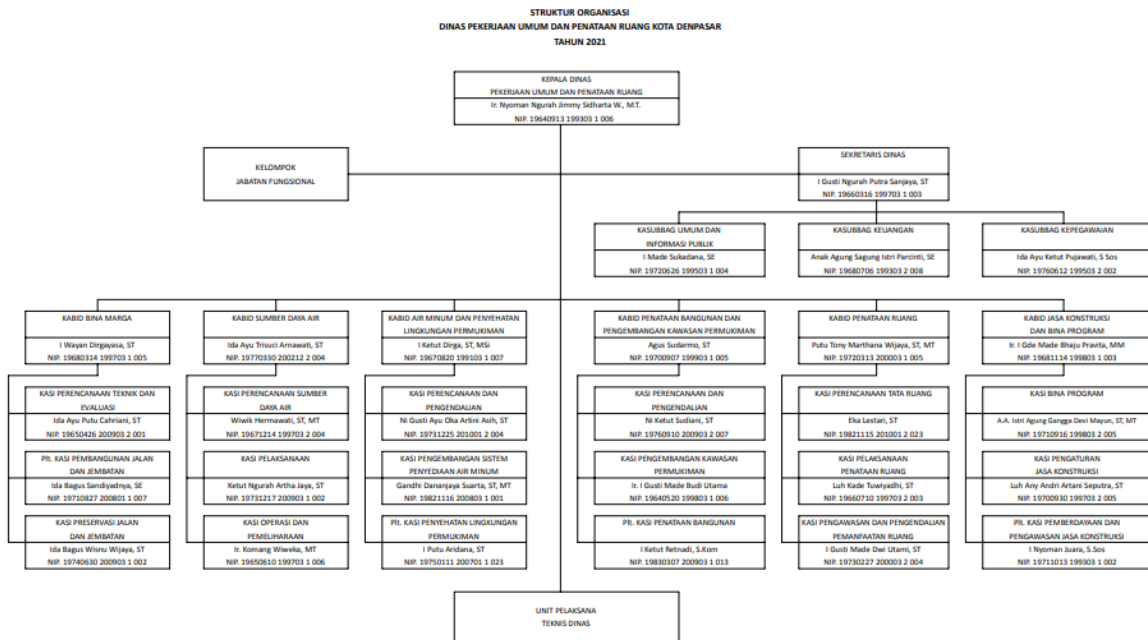
c) Struktur Organisasi:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu OPD Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/fasilitas wilayah dan Penataan Ruang serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - b. kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Kepala Seksi Pelaksanaan;
 - c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
5. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. Kepala Seksi Penataan Bangunan.
7. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.
8. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Bina Program;

- b. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.



Gambar 3. 10. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Denpasar

3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar

Berdasarkan Renstra Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, berikut merupakan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar :

a) Tugas:

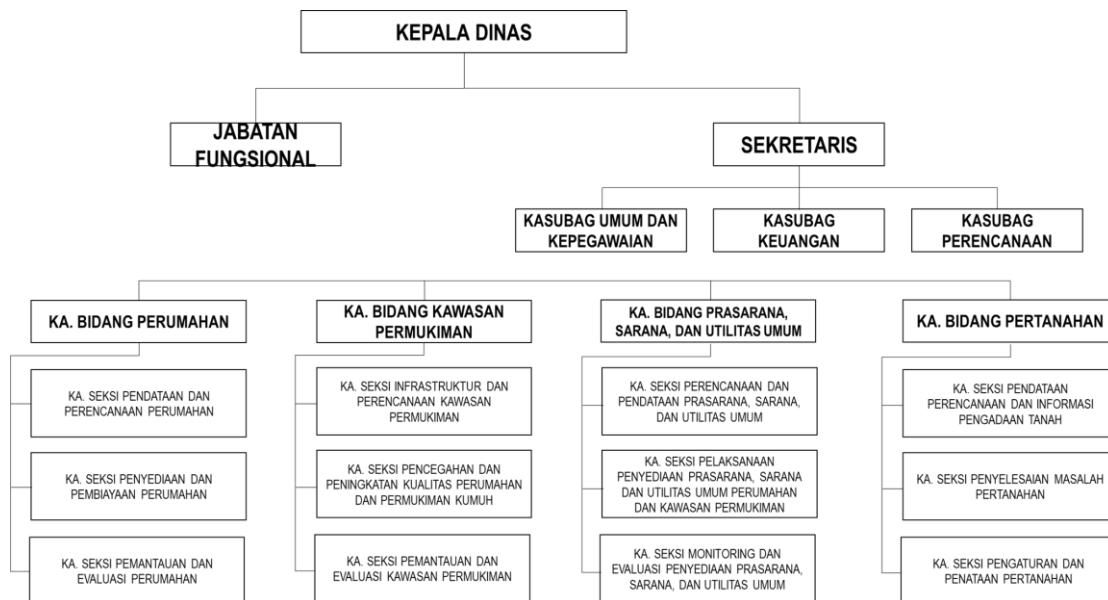
1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan
2. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah pada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

b) Fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyelenggarakan pelayanan umum urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tertata dengan baik

3. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan ijin
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

c) **Struktur Organisasi**



Gambar 3. 11. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar

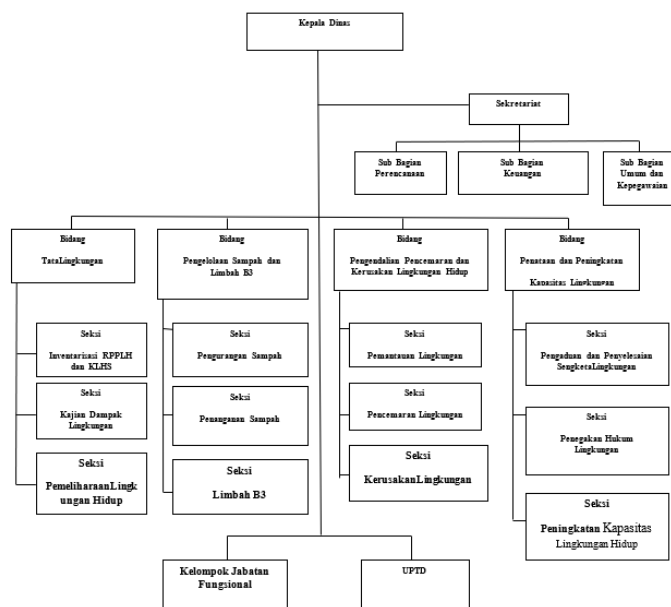
4) **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

a) **Tugas dan Fungsi**

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Dimana Rencana Kinerja tersebut didasarkan pada struktur organisasi daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudkan Good Governance.

b) Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar No 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah DLHK Kota Denpasar sebagai berikut:



Gambar 3. 12. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

a) Tugas dan Fungsi

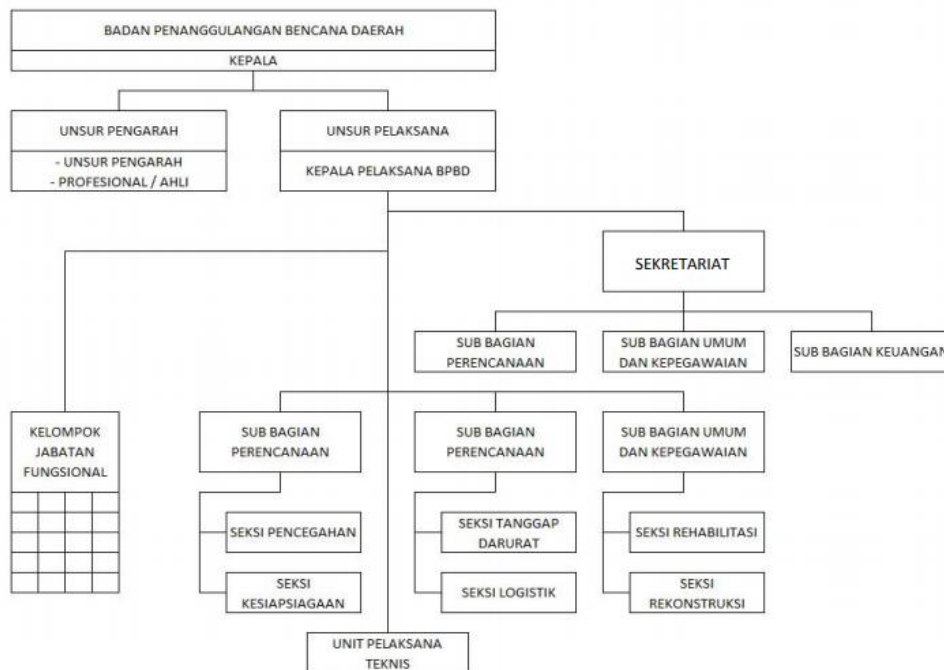
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan

- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- 5. Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Tanggap Darurat
 - b. Kepala Seksi Logistik
- 6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekonstruksi
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. 13. Struktur Organisasi BPBD Kota Denpasar

6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

a) Tugas:

membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Denpasar. (menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

b) Fungsi:

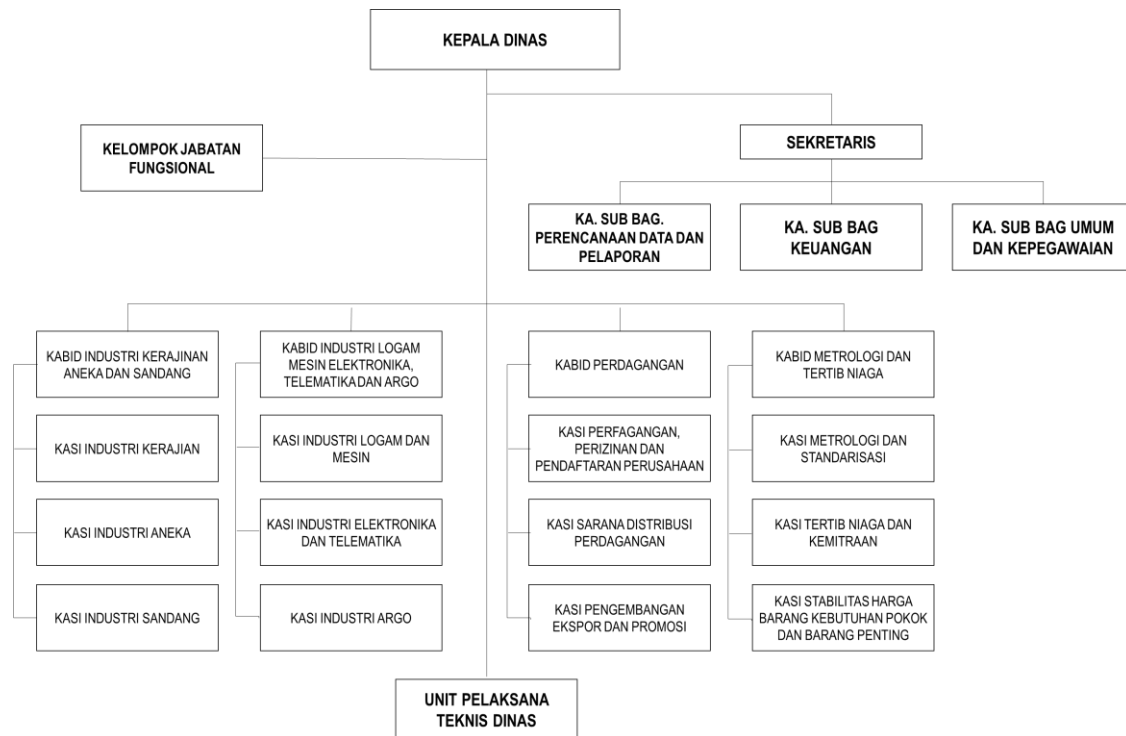
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

c) Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 5 huruf n Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dinyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang
 - a. Seksi Industri Kerajinan;
 - b. Seksi Industri Aneka; dan
 - c. Seksi Industri Sandang.
4. Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro;
 - a. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - b. Seksi Industri Elektronika dan Telematika; dan
 - c. Seksi Industri Agro.
5. Bidang Perdagangan;
 - a. Seksi Perdagangan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekspor dan Promosi.
6. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
 - a. Seksi Metrologi dan Standarisasi;
 - b. Seksi Tertib Niaga dan Kemitraan; dan
 - c. Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



Gambar 3. 14. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

7) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

a) Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga . Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar yang mana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi :

- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Data dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian

- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Bidang Pemuda dan Olahraga
 - a) Seksi Pemuda
 - b) Seksi Olahraga
 - c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana
- 6) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter



Gambar 3. 15. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar

8) Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Kota Denpasar

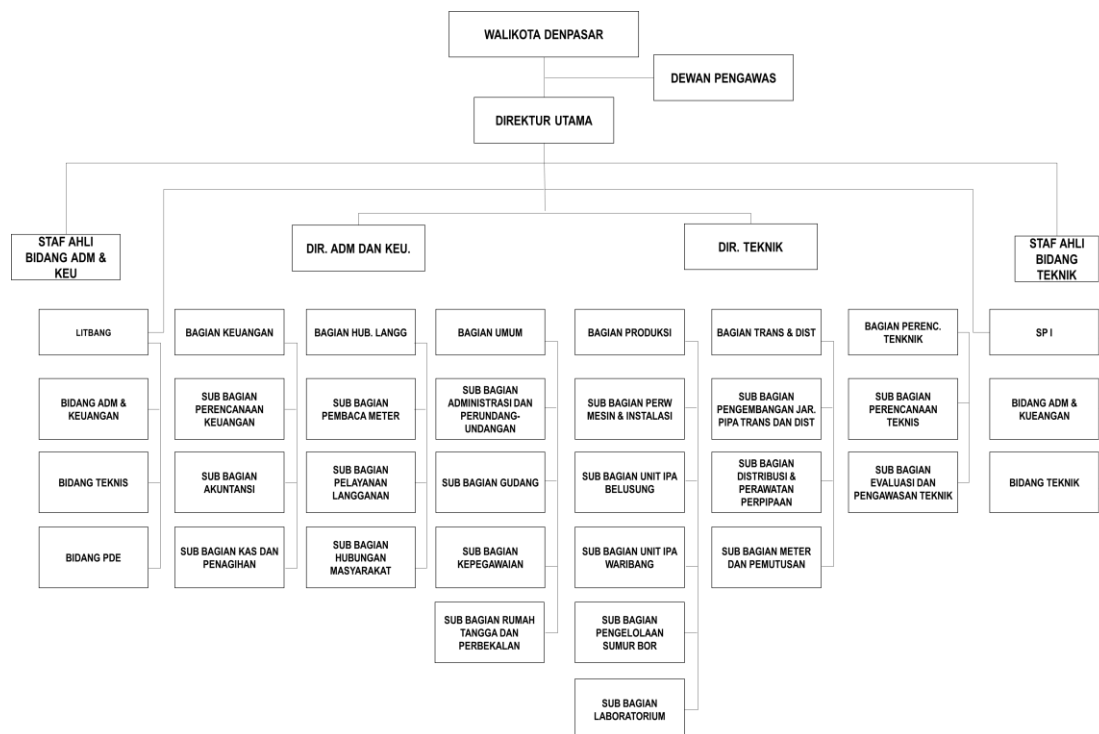
a) Tugas Pokok

Pengelolaan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan pada daerah Kabupaten lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota dengan daerah yang bersangkutan.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma mempunyai fungsi ekonomi dan sosial; dan Dalam melaksanakan fungsi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, pemanfaatan umum, keberlanjutan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

c) Struktur Organisasi



Gambar 3. 16. Struktur Organisasi Perumda Air Minum Kota Denpasar

3.2. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI KOTA DENPASAR

3.2.1. KONDISI EKSISTING PENYEDIAAN AIR MINUM

PDAM Kota Denpasar memanfaatkan sumber air dari air permukaan dan air baku dari sumur dalam (sumur bor). Jumlah saluran rumah PDAM Kota Denpasar Tahun 2020 sebanyak 75.672 dan jumlah yang telah terlayani PAM/ PDAM Perpipaan adalah sebanyak 75.672 jiwa atau prosentase jiwa terlayani PDAM sebesar 50.92%.

a) Unit Air Baku

Sumber air baku yang digunakan PDAM Kota Denpasar berasal dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku adalah IPA Besung, IPA Besung Paket, IPA Waribang 1, dan IPA Waribang 2. Sedangkan sumur bor yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku berjumlah 18 unit yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 3. 10. Unit SPAM Kota Denpasar

No	Nama Unit SPAM	Kapasitas Terpasang	Kapasitas Produksi	Kapasitas Distribusi	Kapasitas Air Terjual	Non-Revenue Water
1	IPA BESUNG	490	500,0	453,2	13.983.745	39,07%
2	IPA BESUNG PAKET	43	45,0	39,3	1.323.978	
3	IPA WARIBANG 1	150	150,0	127,6	3.396.121	
4	IPA WARINGAN 2	150	150,0	152,5	4.097.866	

Sumber: PDAM Kota Denpasar Tahun 2021

Tabel 3. 11. Sumber Air Tanah Kota Denpasar

No	Nama	Kapasitas	
		Terpasang (lt/dt)	Produksi (lt/dt)
Sumur Bor			
1	E.1 Subita	70	72
2	E.2 Kecubung	30	30
3	TPW 4 Panjer	29	32,5
4	SB. 6 Panjer	29	29,3
5	SB. Tonja	5	4,2
6	SB. Ubung	4	4,4
7	SB. Sedap Malam	46	44,9
8	SB. Sedap Malam II	30	28,8
9	SB. Penatih	5	5
10	SB. Badak Agung	30	28,6
11	SB. Br. Gunung	13	11,9
12	SB. Sidakarya	11	11
13	SB. Pelagan	13	13,4
14	SB. Keboiwa	2	2
15	SB. Singkep	35	37,5
16	SB. Mahendradata	4	3
17	SB. Tukad Badung	37	36
18	SB. Waribang	38	37,9

Sumber: PDAM Kota Denpasar, 2021

b) Unit Produksi Air

Kemampuan PDAM Kota Denpasar dalam melayani kebutuhan air di Kota Denpasar sangat bergantung pada sumber air baik IPA maupun sumur bor (air tanah). Secara kuantitas produksi air dari sistem yang ada di PDAM Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12. Instalasi Pengolahan Air Tahun 2020 PDAM Kota Denpasar

No	Nama Unit SPAM	Kapasitas Produksi (lt/dt)
1	IPA BESUNG	500,0
2	IPA BESUNG PAKET	45,0
3	IPA WARIBANG 1	150,0
4	IPA WARANGAN 2	150,0

Sumber: PDAM Kota Denpasar, 2021

Reservoir

Sistem penyediaan air minum Kota Denpasar yang dikelola oleh PDAM Kota Denpasar dilengkapi dengan 2(dua) buah reservoir distribusi, yaitu Reservoir Belusung dan Reservoir Waribang I dan II. Reservoir Belusung melayani Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur, sedangkan Reservoir Waribang I dan II melayani sebagian Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.

Tabel 3. 13. Reservoir PDAM Kota Denpasar

No	Nama	Volume (m ³)	Elevasi	Wilayah yang dilayani
1	IPA BELUSUNG	10.000	84 M	Denpasar Utara, Denpasar Barat dan Denpasar Timur
2	IPA WARIBANG I DAN II	5.400	30 M	Denpasar Timur dan Denpasar Selatan

Sumber: PDAM Kota Denpasar, 2021

c) Unit Distribusi

Berdasarkan dokumen RISPAM Kota Denpasar, panjang pipa transmisi yang terpasang pada sistem penyediaan air minum Kota Denpasar adalah 4.106 meter dengan diameter 10" – 28", terdiri dari pipa baja 2.906 meter dan pipa ACP diameter 24" sepanjang 1.200 meter. Berikut merupakan tabel data diameter, material dan panjang pipa transmisi Tahun 2012 PDAM Kota Denpasar.

Tabel 3. 14. Data Diameter dan Panjang Pipa Tahun 2012 PDAM Kota Denpasar

No	Uraian	Panjang Pipa (m)	Keterangan
1	Pipa Transmisi Ø24" Steel	375	IPA Ayung III ke Reservoir I
2	Pipa Transmisi Ø28" Steel	120	Intake ke IPA
3	Pipa Transmisi Ø24" Steel	1.200	W.M Kertanegara ke Reservoir I
4	Pipa Transmisi Ø20" Steel	288	IPA Waribang+Galeri ke Reservoir I
5	Pipa Transmisi Ø10" Steel	2.123	W>M Gianyar ke Reservoir Poh Manis
TOTAL		4.106	

Sumber: Dokumen RISPAM Kota Denpasar

Kawasan Resiko Air Kota Denpasar Tahun 2020

Analisis kawasan resiko air di Kota Denpasar dilakukan bersarkan lamanya pelayanan air bersih pada setiap desa/kelurahan di Kota Denpasar dalam satu hari (24) jam. Berdasarkan data yang diperoleh dari PDAM Kota Denpasar pelayanan air bersih di Kota Denpasar adalah 22.5 Jam hingga 24 Jam dalam waktu satu hari. Pelayanan rata-rata di sistem jaringan distribusi, PDAM Kota Denpasar Tahun 2020 adalah 23,00 jam/ hari. Jam pelayanan air bersih rata-rata di Kecamatan Denpasar Barat adalah 23.44 jam/ hari, Kecamatan Denpasar Selatan 23.91 jam/ hari, Kecamatan Denpasar Timur 23.80 jam/ hari, dan Kecamatan Denpasar Utara 23.70 jam/ hari. Wilayah yang mendapatkan pelayanan rata-rata terkecil adalah Dauh Puri Kauh, Dauh Puri Kelod, Padang Sambian Kelod Denpasar Barat, Serangan Denpasar Selatan dan Ubung Denpasar Utara yaitu 22.50 jam per hari.

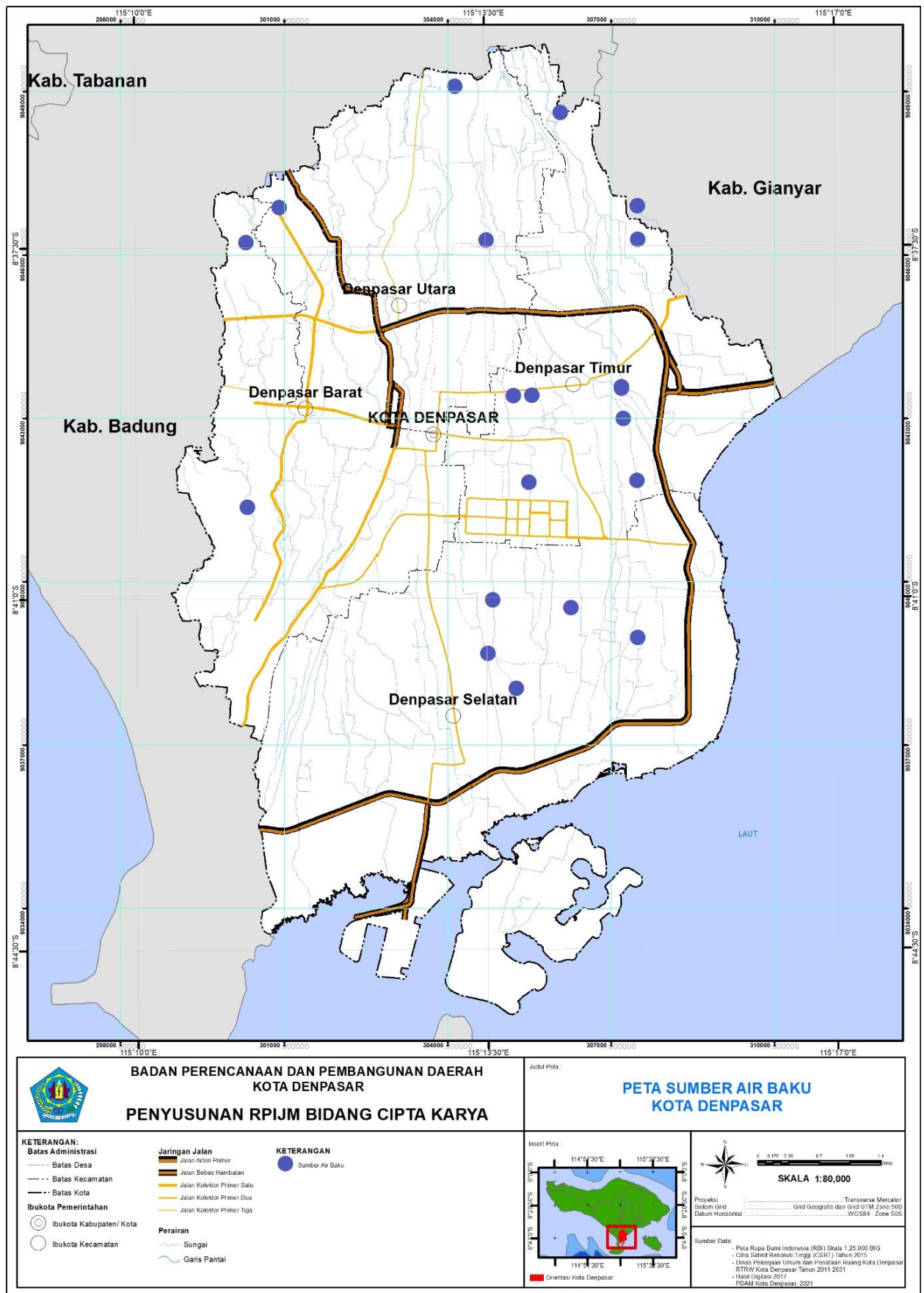
Berdasarkan data tersebut maka tingkat resiko air bersih di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi kawasan tidak risiko air bersih, resiko air rendah, dan resiko air sedang. Berikut merupakan penjabaran resiko air pada masing-masing desa/kelurahan di Kota Denpasar.

Tabel 3. 15. Resiko Air di Kota Denpasar

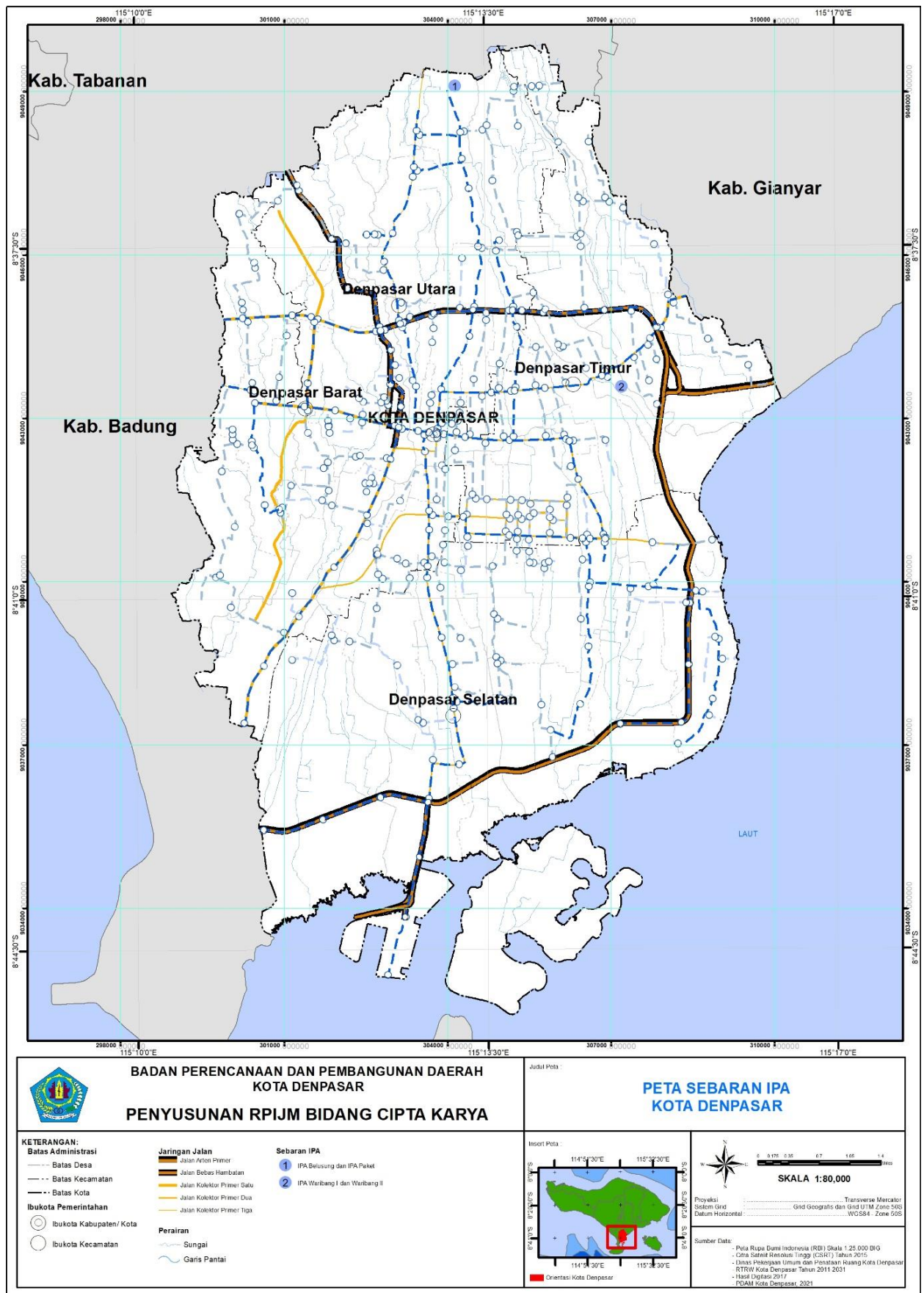
No	Skor Nilai Area Beresiko	No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Tidak Rawan				
1	0	1	Dauh Puri Kangin	Denpasar Barat
		2	Dauh Puri	Denpasar Barat
		3	Padang Sambian	Denpasar Barat
		4	Pemecutan	Denpasar Barat
		5	Sanur Kauh	Denpasar Selatan
		6	Sidakarya	Denpasar Selatan
		7	Panjer	Denpasar Selatan
		8	Pedungan	Denpasar Selatan
		9	Renon	Denpasar Selatan
		10	Sanur	Denpasar Selatan
		11	Sesetan	Denpasar Selatan
		12	Dangin Puri Kelod	Denpasar Timur
		13	Sumerta Kaja	Denpasar Timur
		14	Sumerta Kauh	Denpasar Timur
		15	Sumerta Kelod	Denpasar Timur
		16	Dangin Puri	Denpasar Timur
		17	Kesiman	Denpasar Timur
		18	Sumerta	Denpasar Timur
		19	Dangin Puri Kaja	Denpasar Utara
		20	Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
		21	Dangin Puri Kauh	Denpasar Utara
		22	Dauh Puri Kaja	Denpasar Utara
		23	Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
		24	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara
		25	Peguyangan	Denpasar Utara
		26	Tonja	Denpasar Utara
Rawan Rendah				
2	1	1	Padang Sambian Kaja	Denpasar Barat
		2	Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
		3	Tegal Harum	Denpasar Barat

No	Skor Nilai Area Beresiko	No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
		4	Tegal Kertha	Denpasar Barat
		5	Pemogan	Denpasar Selatan
		6	Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
		7	Kesiman Petilan	Denpasar Timur
		8	Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
		9	Penatih	Denpasar Timur
		10	Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
		11	Ubung Kaja	Denpasar Utara
Rawan Sedang				
	2	1	Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat
		2	Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat
		3	Padang Sambian Kelod	Denpasar Barat
		4	Serangan	Denpasar Selatan
		5	Ubung	Denpasar Utara

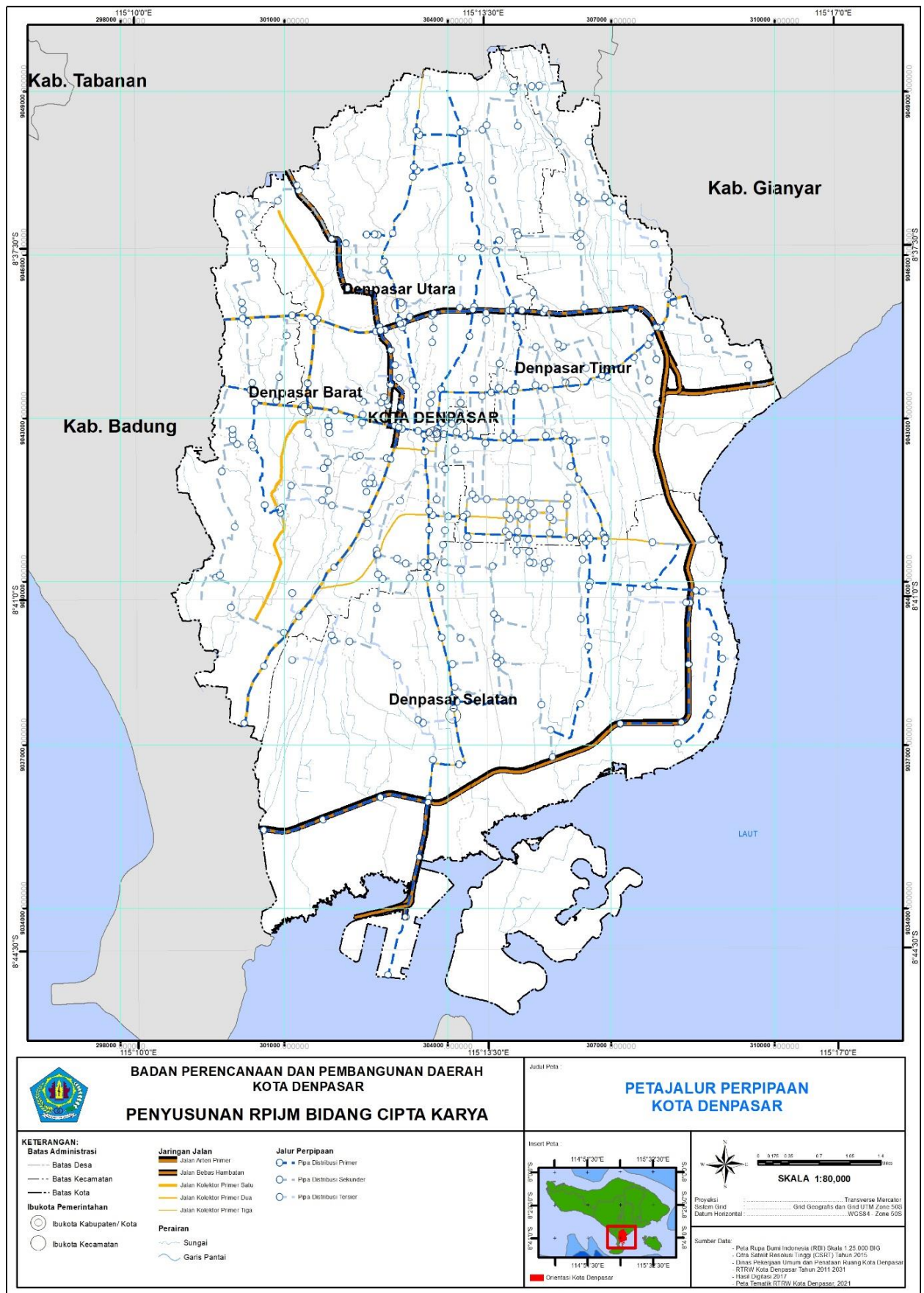
Sumber: Hasil analisis, 2021



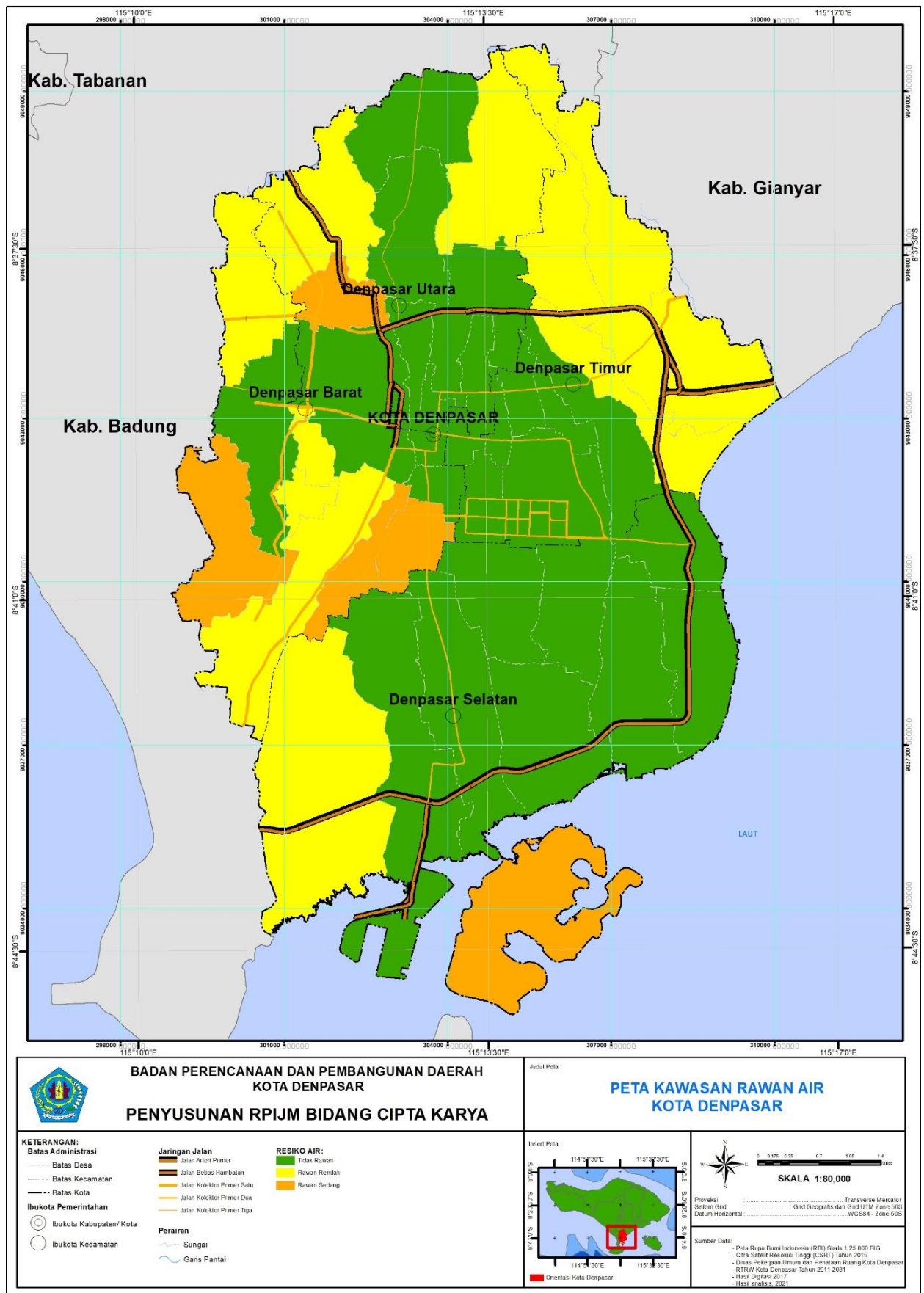
Gambar 3. 17. Peta Sumber Air Baku Kote Denpasar



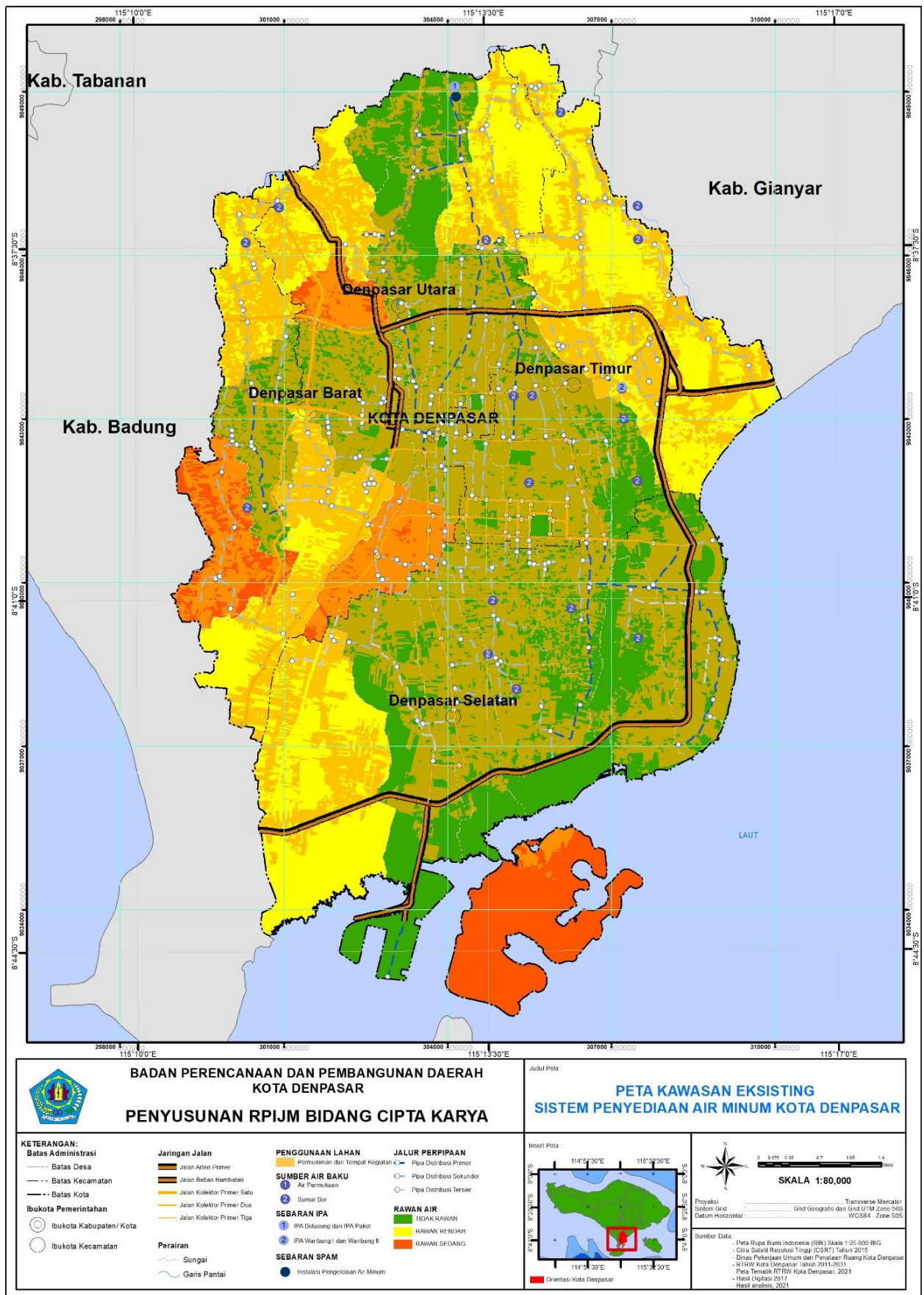
Gambar 3. 18. Peta Sebaran IPA di Kota Denpasar



Gambar 3. 19. Peta Jalur Perpipaan Kota Denpasar



Gambar 3. 20. Peta Resiko Air Kota Denpasar



Gambar 3. 21. Peta Kawasan Eksisting Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar

3.2.2. KONDISI EKSISTING PERSAMPAHAN

a) Sumber Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbul sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga terdapat dua sumber sampah, yaitu:

- Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Berdasarkan hal tersebut sumber sampah di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu rumah tangga yang berasal dari kegiatan rumah tangga di Kota Denpasar, serta sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan komersial, kegiatan dari kawasan fasilitas pendidikan, perkantoran dan fasilitas sosial lainnya, serta dari kegiatan pada kawasan pariwisata.

b) Volume Sampah Kota Denpasar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar jumlah sampah di Kota Denpasar yang masuk ke TPA pada Tahun 2020 adalah 969,867 m³. dengan rincian DLHK Kota Denpasar 564,847 m³, PD. Pasar Kota Denpasar 21,212 m³, swasta 365,439 m³, dan DPU Kota Denpasar 18,369 m³. Volume sampah terbesar adalah pada bulan Desember dengan jumlah 100,271 m³. Berikut merupakan tabel volume sampah di Kota Denpasar yang masuk ke TPA pada Tahun 2020 berdasarkan bulan.

Tabel 3. 16. Volume sampah Kota Denpasar yang masuk ke TPA

NO	BULAN	DLHK KOTA DENPASAR	PD. PASAR DENPASAR	SWASTA DENPASAR	DPU KOTA DENPASAR	JUMLAH/ BULAN
		M ³	M ³	M ³	M ³	M ³
1	Januari	46,096	4,776	26,166	2,664	79,702
2	Pebruari	41,552	4,192	27,116	2,368	75,228
3	Maret	44,402	1,384	26,124	1,453	73,363
4	April	47,957	1,606	25,240	1,276	76,079
5	Mei	52,134	1,416	24,199	1,551	79,300
6	Juni	48,227	1,142	25,645	1,553	76,567
7	Juli	45,605	1,234	28,245	1,467	76,551
8	Agustus	45,272	1,332	28,500	1,332	76,436
9	September	44,627	1,172	31,962	1,213	78,974
10	Oktober	44,448	1,036	41,408	1,308	88,200
11	Nopember	46,349	1,014	40,715	1,118	89,196
12	Desember	58,178	908	40,119	1,066	100,271
Jumlah / Tahun		564,847	21,212	365,439	18,369	969,867

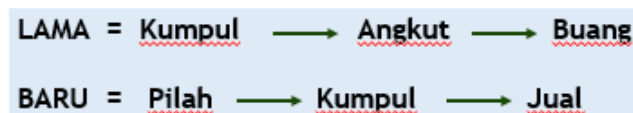
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 2021

c) Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Sistem pengelolaan sampah di Kota Denpasar adalah pengelolaan sampah berbasis sumber. Tujuan pengelolaan sampah berbasis sumber adalah untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA, jadi sampah yang dibuang ke TPA hanya residunya dan memberikan pedoman atau pemahaman kepada masyarakat bahwa melalui pemilahan, pengangkutan, pembentukan bank sampah dan TPS 3R pengurangan sampah dapat dilaksanakan secara maksimal.

Paradigma pengelolaan sampah metode lama adalah sampah dikumpulkan kemudian diangkut dan langsung di buang ke TPS atau TPA. Sedangkan metode pengelolaan sampah yang baru adalah sampah dipilah dari tingkat rumah tangga kemudian di kumpulkan dan di jual.

PARADIGMA PENGELOLAAN SAMPAH



Gambar 3. 22. Paradigma Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Kota Denpasar adalah pengelolaan sampah berbasis sumber, dimana masyarakat berkewajiban melakukan pemilihan sampah dari tingkat terkecil yaitu tingkat rumah tangga.

Pemilhan sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik.

Pengelolaan Sampah Organik

- Skala Rumah Tangga melakukan *composting* dengan biopori
- Swakelola sampah setempat:
 - Swakelola ke TPS 3R kemudian dilakukan proses *composting*
 - Swakelola/ Moci ke TPS kemudian Truk DLHK ke TPA Suwung
 - Swakelola dengan Truk menuju TPA Suwung

Pengelolaan Sampah Anorganik

- Bank Sampah
- PT. Arditech (Pabrik Pencacah Plastik)
- APSI

d) Sarana Persampahan

1) TPS

Berdasarkan Permen PU Nomo3 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, jumlah TPS di Kota Denpasar adalah sebanyak 12 buah yang tersebar di semua kecamatan, yaitu 6 TPS di Kecamatan Denpasar Barat diantaranya TPS Jl. Pulau Kawe, TPS Jl. Pulau Seram, TPS Jl. Slamet Riyadi/Sudirman, TPS Swakarya Baru, TPS Jl. Gunung Karang, dan TPS Padangsambian Kaja. Sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur hanya ada satu TPS yaitu TPS Yangbatu. TPS yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan sejumlah 3 buah yaitu TPS Jl. Citarum/Panjer, TPS Sidakarya, dan TPS Serangan, dan TPS di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 2 buah yaitu TPS Lumintang dan TPS Anggrek/Kreneng.

Tabel 3. 17. TPS di Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Lokasi TPS	Kecamatan	Alamat	Luas m ²
1	TPS Lumintang	Denpasar Utara	Jl. Mataram, Br. Lumintang Desa Dauh Puri Kaja	171
2	TPS Jl. Pulau Kawe	Denpasar Barat	Jl. Pulau Kawe dekat Alfa Mart	96
3	TPS Jl. Pulau Seram	Denpasar Barat	Jl. Pulau Seram belakang Level 21	28
4	TPS Jl. Anggrek/Kreneng	Denpasar Utara	Jl. Anggrek Barat Pasar Kreneng	270
5	TPS Jl. Slamet Riadi/Sudirman	Denpasar Barat	Jl. Slamaet Riyadi I Suidrman Ujung	182
6	TPS Swakarya Baru	Denpasar Barat	Jl. Swakarya Baru Sudirman Ujung	108
7	TPS Yangbatu	Denpasar Timur	Jl. Cok. Tresna Timur Warung Sakinah	224
8	TPS Jl. Citarum/Panjer	Denpasar Selatan	Jl. Citarum Panjer	450
9	TPS Sidakarya	Denpasar Selatan	Jl. Mertasari Sidakarya (dekat jembatan)	500
10	TPS Jl. Gunung Karang	Denpasar Barat	Jl. Gunung Karang	525
11	TPS Padangsambian Kaja	Denpasar Barat	Jl. Karang Sari Desa Padangsambian Kaja	200
12	TPS Serangan	Denpasar Selatan	Jl. Tukad Bulan No. 9, Serangan, Kec. Denpasar Selatan	300

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2021

Berikut merupakan daerah pelayanan masing-masing TPS di Kota Denpasar:

1. TPS Lumintang melayani penanpungan sampah sementara dari Kelurahan Tonja, Desa Peguyangan Kaja, Kelurahan Peguyangan, Desa Peguyangan Kangin, Desa Dangin Puri Kaja, dan Desa Dauh Puri Kaja
2. TPS Gunung Karang melayani penanpungan sampah sementara dari Desa Pemecutan Kelod
3. TPS Yangbatu melayani penanpungan sampah sementara dari Kelurahan Sumerta, Kelurahan Renon, Desa Sumerta Klod, Kelurahan Tonja, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Kangin Puri Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Kesiman, Desa Sumerta Kangin, dan Desa Dangin Puri Kangin.

4. TPS Anggrek/ Kreneng melayani penanpungan sampah sementara dari Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Sumerta Kauh, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Tonja, dan Desa Dauh Puri Kaja
5. TPS Sidakarya melayani penanpungan sampah sementara dari Desa Sidakarya
6. TPS Serangan melayani penanpungan sampah sementara dari Kelurahan Serangan
7. TPS Pulau Kawe melayani penanpungan sampah sementara dari Kelurahan Pedungan dan Desa Dauh Puri Kauh
8. TPS Swakarya Baru melayani penanpungan sampah sementara dari Desa Dauh Puri Kelod
9. TPS Pulau Seram melayanai penampungan sampah sementara dari Desa Dauh Puri Kelod dan Desa Dauh Puri Kauh
10. TPS Slamet Riyadi melayani penanpungan sampah sementara dari Kelurahan Dauh Puri
11. TPS Citarum melayani penampuangn sampah sementara dari Kelurahan Panjer
12. TPS Padangsambian Kaja melayani pengumpulan sampah sementara dari Desa Padangsambian Kaja



a. TPS Jl. Slamet Riyadi/ Sudirman



b. TPS Yangbatu



c. TPS Serangan



d. TPS Jl. Anggrek/ Kreneng

Gambar 3. 23. TPS di Kota Denpasar

2) TPS 3R

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) atau TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terdapat 14 buah TPS3R dan TPST di Kota Denpasar diantaranya adalah TPST Desa

Kesiman, TPS 3R Suwung, TPS 3R Sekar Tunjung, TPS 3R Monang Maning, TPS 3R Uma Sari, TPS3R Sari Sadana Bung Tomo, TPS 3R Pegok, TPS 3R Sadu, TPS 3R Desa Sidakarya, TPS 3R Cemara, TPS 3R Desa Pemogan, TPS 3R Padang Sambian, TPS 3R Pulau Kawe, dan TPS 3R Panjer.

Dari 14 TPST dan TPS 3R yang ada di Kota Denpasar, 11 diantaranya dalam kondisi aktif. Bila dilihat dari kepemilikannya, 6 diantaranya merupakan Milik Aset Provinsi Bali, 4 aset Kota Denpasar, dan 1 milik aset Desa Padangsambian. Berikut merupakan tabel sebaran dan status TPST dan/atau TPS 3R di Kota Denpasar Tahun 2021.

Tabel 3. 18. TPS 3R di Kota Denpasar

No.	Nama TPS 3R / TPST	Kepemilikan	Luas Lahan	Jumlah Sampah Masuk (kg/hari)	Serapan Sampah (kg/hari)			KET
					Anorganik	Organik	Residu	
1	TPST Desa Kesiman Kertalangu Jl. Sekar Sari Gg. Melasti III No.2, Desa Kesiman Kertalangu	Milik Aset Pemprov Bali	22,5 are	1,430 kg	± 50 kg	± 1,380 kg	± 310 kg	Aktif
2	TPS 3R Suwung Jl. TPA Suwung, Kelurahan Seseetan	Milik Aset Pemprov Bali	8 are	747 kg	± 14 kg	± 733 kg	± 680 kg	Aktif
3	TPS 3R Sekar Tanjung Jl. Danau Tempe Gang I Desa Sanur Kauh	Milik Aset Pemprov Bali	20 are	520 kg	± 20 kg	± 500 kg	± 350 kg	Aktif
4	TPS 3R Monang Maning Jl. Gunung Rinjani, Desa Tegal Kerta	Milik Aset Pemprov Bali	4 are	6.250 kg	± 320 kg	± 3.290 kg	± 2.640 kg	Aktif
5	TPS 3R Uma Sari Jl. Cokroaminoto, Desa Ubung Kaja	Milik Pemda Kota Denpasar	13,6 are	930 kg	± 500 kg	± 430 kg	± 2.070 kg	Aktif
6	TPS 3R Sari Sedana Bung Tomo Jl. Bung Tomo IV No.1 ,Desa Pemecutan Kaja	Milik Pemda Kota Denpasar	9 are	638 kg	± 19 kg	± 619 kg	± 849 kg	Aktif
7	TPS 3R Pegok Jl. Raya Seseetan Gg. Gurita I, Kelurahan Seseetan	Milik Aset Pemprov Bali	2 are	395 kg	± 250 kg	± 145 kg	± 22 kg	Aktif
8	TPS 5R Sadu Jl. Pralina, Br. Sima, Desa Sumerta Kaja	Kontrak	10 are	5,000 kg	± 2,000 kg	± 3,000 kg	± 1.000 kg	Aktif
9	TPS 3R Desa Sidakarya Jl. Mertasari, Sidakarya (Dekat Jembatan), Desa Sidakarya	Milik Aset Pemprov Bali	4 are	440 kg	± 300 kg	± 140 kg	± 27 kg	Aktif
10	TPS 3R Cemara Desa Sanur Kaja Jl. Tukad Nyali No. 1, Desa Sanur Kaja	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
11	TPS 3R Desa Pemogan Desa Pemogan	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
12	TPS 3R Padangsambian Jl. Gunung Tangkuban Perahu III, Kel. Padangsambian, Denbar	Desa Padangsambian	8 are	4.200 kg	± 630 kg	± 1.470 kg	± 2.100 kg	Aktif
13	TPS 3R Pulau Kawe Jl. Pulau Kawe No.14, Desa Dauh Puri Klod	Milik Pemda Kota Denpasar	2 are	4.500 kg	± 150 kg	± 2.478 kg	± 1.872 kg	Aktif
14	TPS 3R Citarum Panjer Jalan Citarum, Panjer	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2021

e) **Kawasan Beresiko Persampahan**

Berdasarkan data dari dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Tahun 2018, area beresiko persampahan di Kota Denpasar dibagi menjadi area beresiko sangat tinggi, area beresiko tinggi, area beresiko rendah, dan area beresiko sangat rendah.

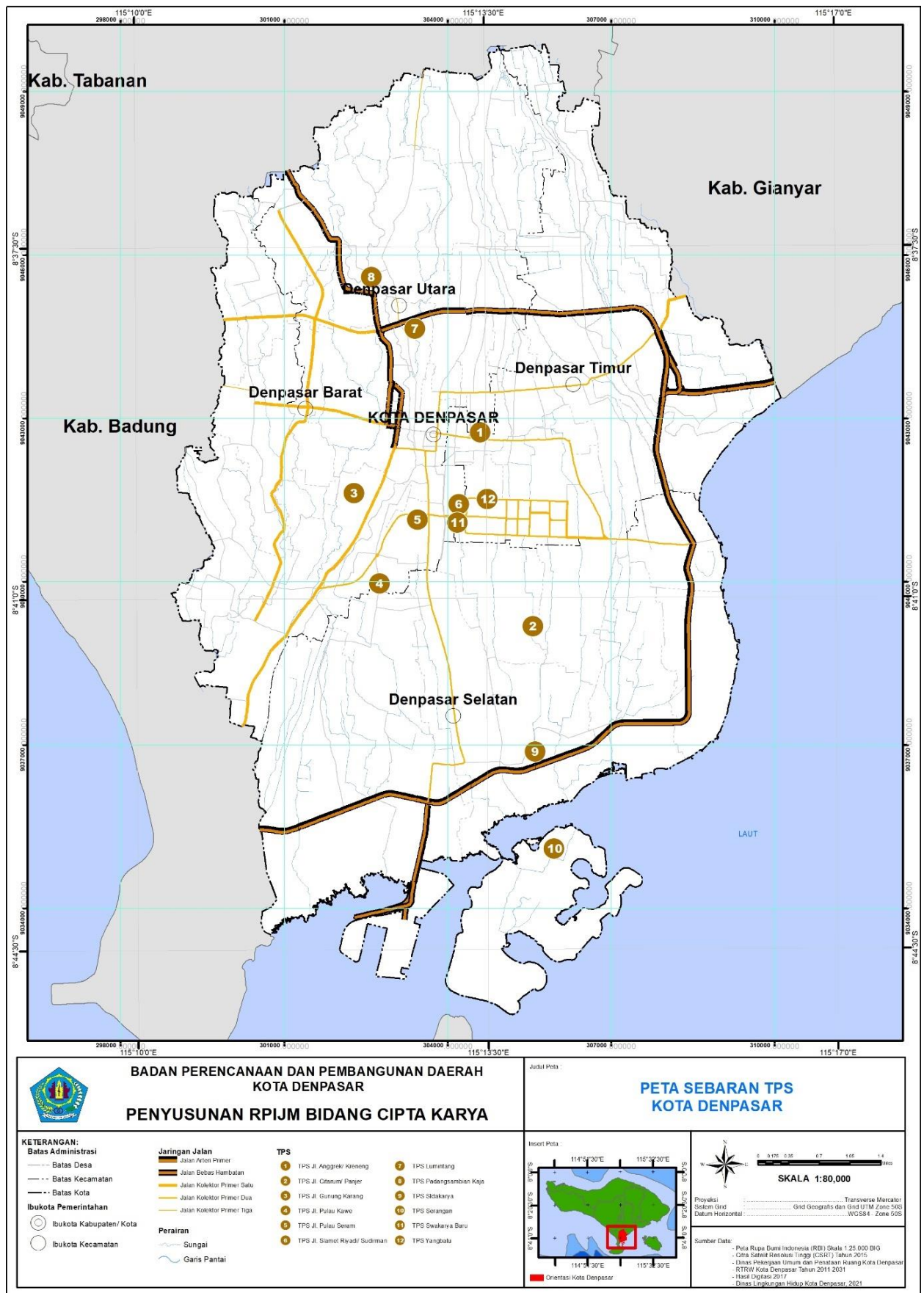
Kawasan yang termasuk dalam area beresiko sangat tinggi adalah Desa Pemecutan Kelod, sedangkan kawasan yang termasuk dalam kategori resiko persampahan tinggi adalah Desa Padangsambian Kaja, Tegal Kerta, Serangan, Kesiman Kertalangu, dan Ubung. Kawasan yang termasuk dalam resiko persampahan rendah diantaranya Pedungan, Pemogan, Sesetan, Sidakarya, Sumerta Kaja, Peguyangan, dan Pemecutan Kaja. Berikut merupakan tabel kawasan beresiko persampahan di Kota Denpasar.

Tabel 3. 19. Risiko Persampahan Kota Denpasar

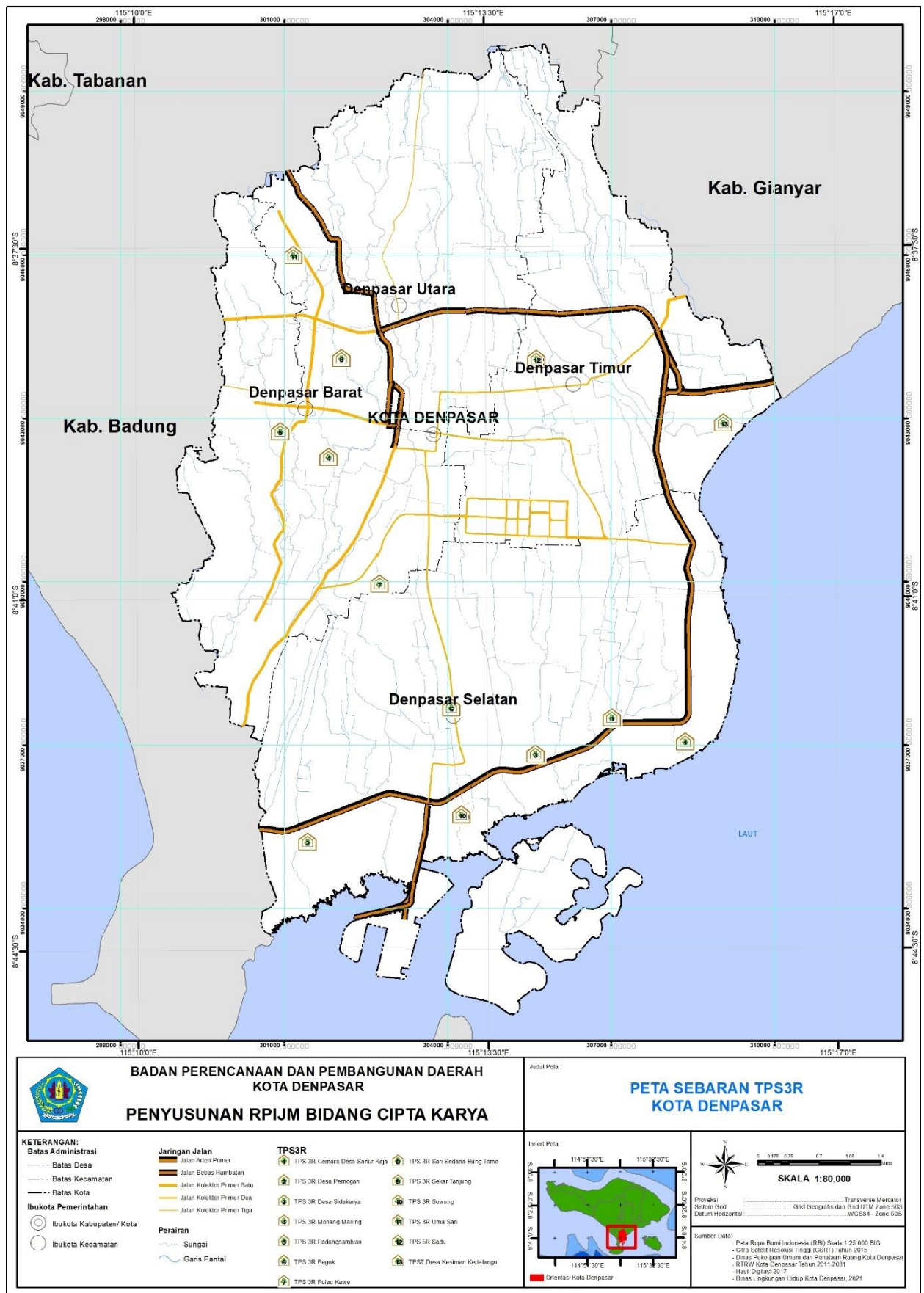
No	Area Beresiko		Desa / Kelurahan	Kecamatan
Resiko Sangat Tinggi		No		
1	Resiko 4	1	Pemecutan Klod	Denpasar Barat
Resiko Tinggi				
2	Resiko 3	1	Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
		2	Tegal Kertha	Denpasar Barat
		3	Serangan	Denpasar Selatan
		4	Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
		5	Ubung	Denpasar Utara
Resiko Rendah				
3	Resiko 2	1	Pedungan	Denpasar Selatan
		2	Pemogan	Denpasar Selatan
		3	Sesetan	Denpasar Selatan
		4	Sidakarya	Denpasar Selatan
		5	Sumerta Kaja	Denpasar Timur
		6	Peguyangan	Denpasar Utara
		7	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara
Resiko Sangat Rendah				
4	Resiko 1	1	Dauh Puri	Denpasar Barat
		2	Dauh Puri Kangin	Denpasar Barat
		3	Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat
		4	Dauh Puri Klod	Denpasar Barat
		5	Padangsambian	Denpasar Barat
		6	Padangsambian Klod	Denpasar Barat
		7	Pemecutan	Denpasar Barat
		8	Tegal Harum	Denpasar Barat
		9	Panjer	Denpasar Selatan
		10	Renon	Denpasar Selatan
		11	Sanur	Denpasar Selatan
		12	Sanur Kaja	Denpasar Selatan
		13	Sanur Kauh	Denpasar Selatan
		14	Dangin Puri	Denpasar Timur
		15	Dangin Puri Klod	Denpasar Timur
		16	Kesiman	Denpasar Timur

No	Area Beresiko		Desa / Kelurahan	Kecamatan
		17	Kesiman Petilan	Denpasar Timur
		18	Penatih	Denpasar Timur
		19	Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
		20	Sumerta	Denpasar Timur
		21	Sumerta Kauh	Denpasar Timur
		22	Sumerta Kelod	Denpasar Timur
		23	Dangin Puri Kaja	Denpasar Utara
		24	Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
		25	Dangin Puri Kauh	Denpasar Utara
		26	Dauh Puri Kaja	Denpasar Utara
		27	Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
		28	Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
		29	Tonja	Denpasar Utara
		30	Ubung Kaja	Denpasar Utara

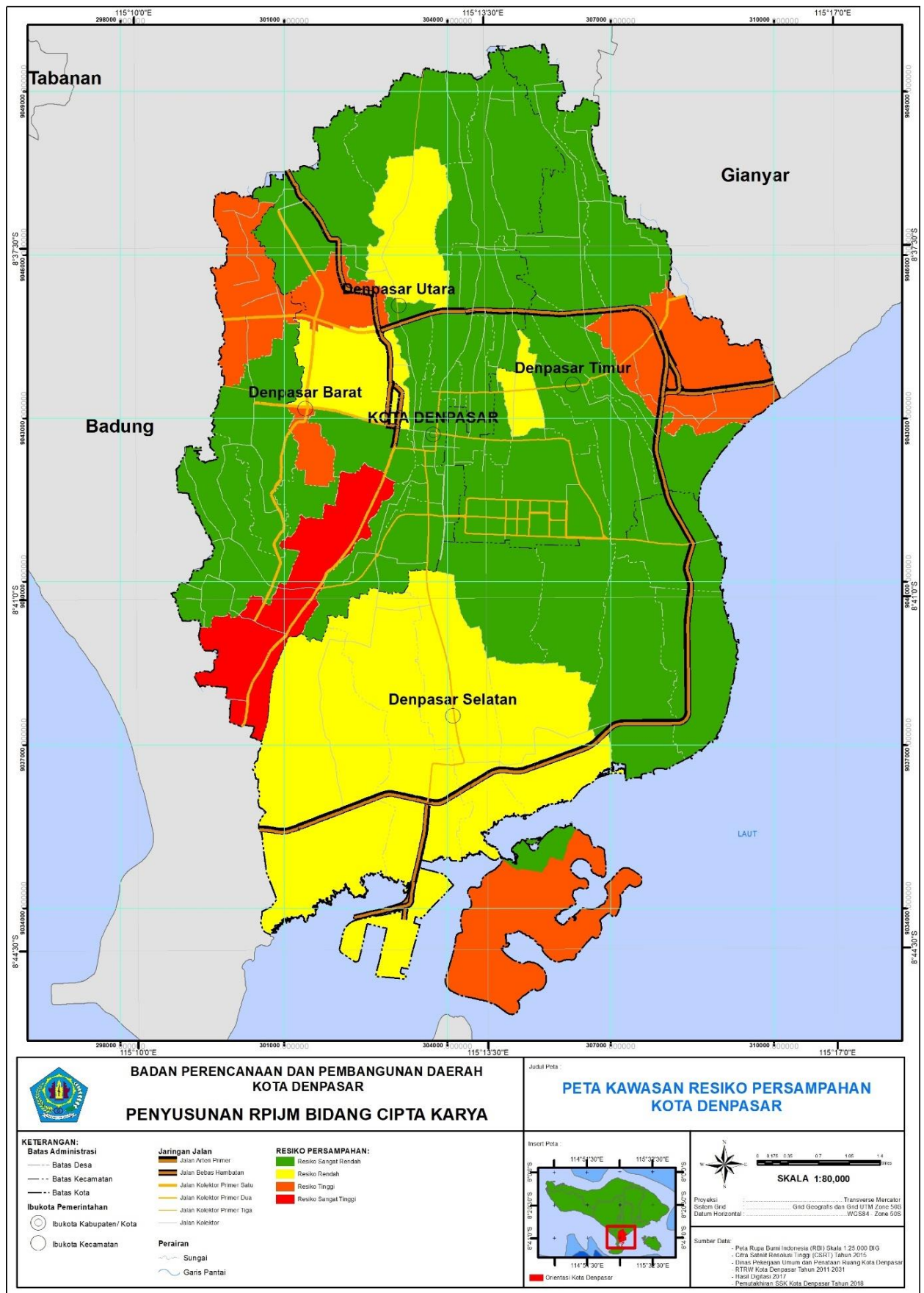
Sumber: Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Tahun 2018



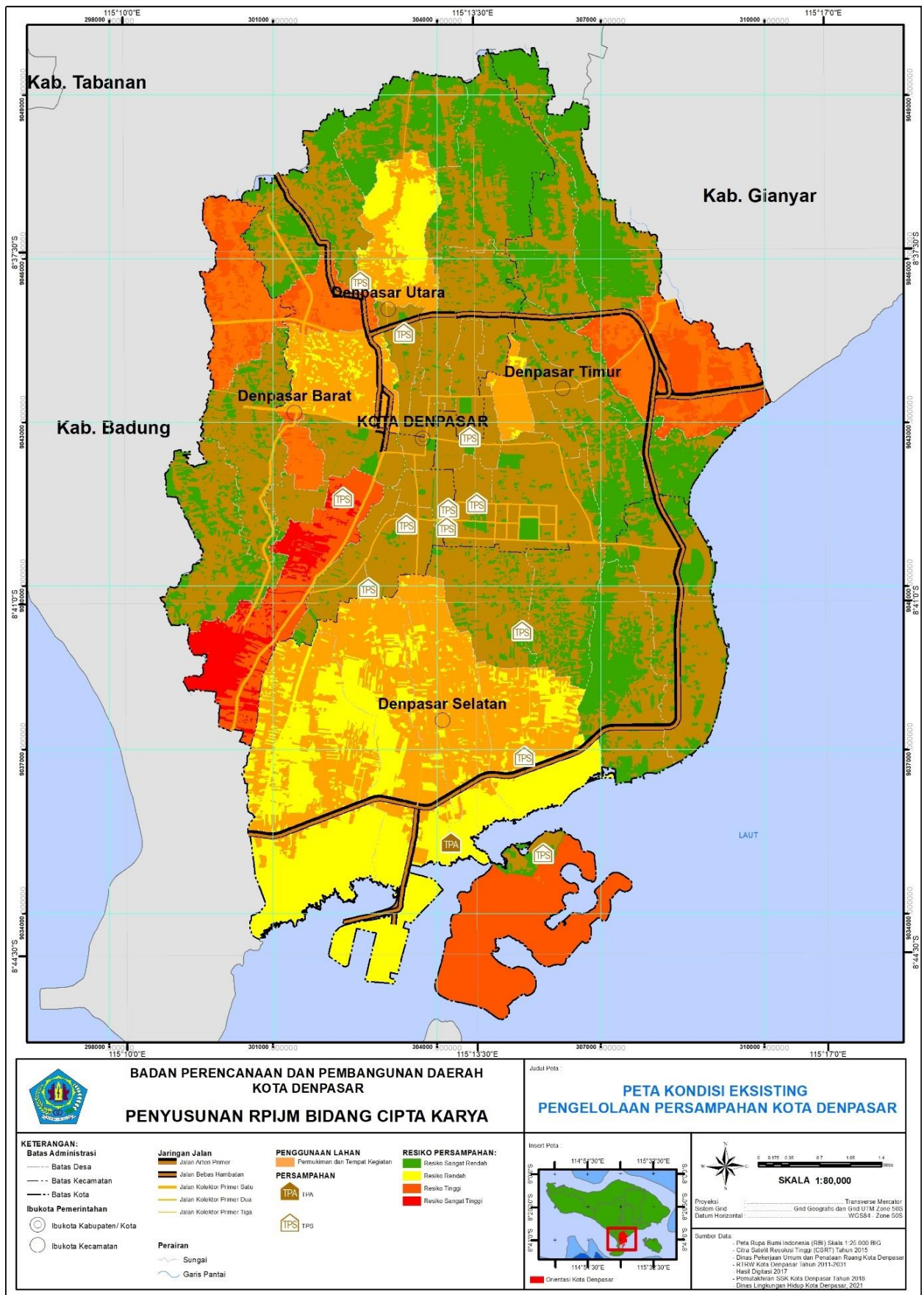
Gambar 3. 24. Peta Sebaran TPS di Kota Denpasar



Gambar 3. 25. Peta Sebaran TPS 3R di Kota Denpasar



Gambar 3. 26. Peta Resiko Persampahan Kota Denpasar



Gambar 3. 27. Peta Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar

3.2.3. KONDISI EKSISTING AIR LIMBAH

Sistem penyediaan air limbah domestik (SPALD) di Kota Denpasar terdiri dari SPALD Terpusat Skala Kota (DSDP) dan SPALD terpusat skala permukiman/ komunal (sanimas).

1) SPALD Terpusat Skala Kota (DSDP)

DSDP atau Denpasar Sewerage Development Project merupakan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota yang berasal dari rumah tangga atau hotel dan restaurant yang berada di kawasan Kota Denpasar, Sanur, dan Kuta yang disalurkan melalui sistem perpipaan dan pemompaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang berlokasi di daerah Suwung sebelum dibuang ke badan perairan. DSDP merupakan salah satu program pembangunan bidang pekerjaan umum ke-Cipta Karya-an yang menangani masalah pengolahan limbah cair.

a. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Instalasi Pengeolahan Air Limbah DSDP project terdapat pada Desa Suwung dengan sistem **Aerated Lagoon** dan **Sedimentation Pond**. Kapasitas IPAL Suwung mencapai 51.000 m³/hr dan Kualitas Efluen yang dihasilkan dari pengolahan 30 mg/lit BOD₅. Bangunan utama pada IPAL Suwung terdiri dari Inflow Pumping Station (3 unit pompa dengan kapasitas 46,5 m³/menit), Electrical Building dan Control Building (dilengkapi dengan Ruang pertemuan dan Laboratorium).

b. Area Pelayanan

Sampai Tahun 2020 penduduk yang terlayani DSDP sudah mencapai 9554 sambungan rumah (volume layanan untuk Kota Denpasar mencapai 7293 m³/hari). Area pelayanannya meliputi Kota Denpasar (Dangin Puri Kaja, Dangin Puri Kauh, Dangin Puri Kangin, Dangin Puri, Dauh Puri, Sumerta Kauh, Dangin Puri Kelod, Dauh Puri Kelod, Sesetan dan Pemogan), kawasan wisata Sanur (Sanur Kaja, Sanur, dan Sanur Kauh) kawasan wisata Kuta di wilayah Kabupaten Badung. Pada phase 1 (2008), cakupan pelayanan di Kota Denpasar direncanakan untuk melayani $\pm 30\%$ penduduk kota dengan luas area pelayanan 520 ha.

Tabel 3. 20. Sambungan DSDP di Kota Denpasar

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sambungan DSDP
1	Dangin puri	316
2	Dangin Puri Kaja	150
3	Dangin Puri Kangin	805
4	Dangin Puri Kauh	113
5	Dangin Puri Kelod	289
6	Dauh puri	485
7	Dauh Puri Kaja	100
8	Dauh Puri Kauh	170
9	Dauh Puri Kangin	2
10	Dauh Puri Kelod	4070
11	Sesetan	7
12	Sumerta Kauh	142
13	Tonja	43

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sambungan DSDP
14	Sanur dan Sanur Kauh	1362
15	Pemogan	1500
	Jumlah Total	9554

Sumber: Dinas PUPR Kota Denpasar, 2021

2) SPALD Terpusat Skala Permukiman/ Komunal (Sanimas)

SPALD terpusat skala permukiman/ komunal (SANIMAS) merupakan sebuah program berbasis masyarakat dari Kementerian PUPR dimana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah domestik seperti limbah pada/ cair dari WC, air bekas cuci dan limbah dapur, dibangun pada suatu lahan yang digunakan secara bersama dalam sebuah kawasan permukiman padat dengan kategori sanitasi tidak layak.

Fungsi utama dari OPAL Domestik Termusat Skala Komunal adalah menyelamatkan sungais sebagai drainase alami dan menyelamatkan air tanah dari pencemaran limbah domestik rumah tangga seperti limbah kamar mandi/WC dan dapur pada suatu permukiman padat penduduk, sehingga lingkungan menjadi bersih dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Manfaat SPALD Terpusat Permukiman/ Komunal adalah:

- Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat semakin baik
- Mengolah Air Limbah Domestik nantinya bisa digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing
- Sungai sebagai saluran drainase dan tanah tidak tercemar
- Menyelamatkan biota-biota sungai dari kandungan bahan-bahan kimia yang ada pada limbah
- Lingkungan menjadi bersih dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik

Pada tahun 2020 di Kota Denpasar terdapat 21 unit SANIMAS yang dibangun oleh Dinas PU Kota Denpasar yang terdiri dari 8 unit IPAL Komunal untuk permukiman dan 13 unit IPAL Komunal untuk pasar desa.

a) IPAL Komunal untuk Permukima

1. IPAL Komunal Sanimas KSM Bhuana Asri (Jl. Gunung Abang, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat)
 - Dibangun tahun : 2007
 - Dana : APBN (DAK)
 - Kapasitas :32 SR
2. IPAL Komunal Mekar Indah (Jl. Wibisana Gang Mekar, Br. Mekar Manis, Desa Pemecutan Kaja)
 - Dibangun tahun : 2008
 - Dana : APBN (DAK)
 - Kapasitas 60 SR
3. IPAL Komunal Sanimas KSM Tunggul Aji (Jalan Bung Tomo X Tempekan Tunggul Aji, Br. Merta Yasa, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara)
 - Dibangun tahun : 2012
 - Dana : APBN (DAK)
 - Kapasitas : 82 SR
4. IPAL Komunal Sanimas KSM Batusari (Br. Belong Menak, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara)

- Dibangun tahun : 2012
 - Dana : APBN (DAK)
 - Jumlah : 57 SR
5. IPAL Komunal Sanimas KSM Pucuk Sari (Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia III Br. Batur, Kelurahan Ubung, Kec. Denpasar Utara)
 - Dibangun tahun : 2003
 - Dana : APBD
 - Kapasitas : 156 SR
 6. IPAL Komunal Sanimas KSM Kusuma Bangsa (Jalan Kusuma Bangsa V, Br. Mekar Manis, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara)
 - Dibangun tahun : 2004
 - Dana : APBD
 - Kapasitas : 160 SR
 7. IPAL Komunal Sanimas KSM Sagina Sari (Jalan Segina VI Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat)
 - Dibangun tahun : 2006
 - Dana : APBD
 - Kapasitas : 206 SR
 8. IPAL Komunal Sanimas KSM Santi Madu (Jalan Gunung Agung, Gang II, Br. Merthayasa, Desa Pemecutan Kaca, Kec. Denpasar Utara)
 - Dibangun tahun : 2006
 - Dana : APBD
 - Kapasitas : 74 SR

b) IPAL Komunal untuk Pasar Desa

- Tahun 2011 : **Pasar Tembau, Pasar Sidakarya, Pasar Tegal Harum, Pasar Panjer, Pasar Anggabaya**
- Tahun 2012 : **Pasar Binoh, Pasar Ubung**
- Tahun 2013 : **Pasar Pemogan, Pasar Padangsambian, Pasar Penatih**
- Tahun 2014 : **Pasar Batan Kendal, Pasar Penatih Dangin Puri, Pasar Tonja**

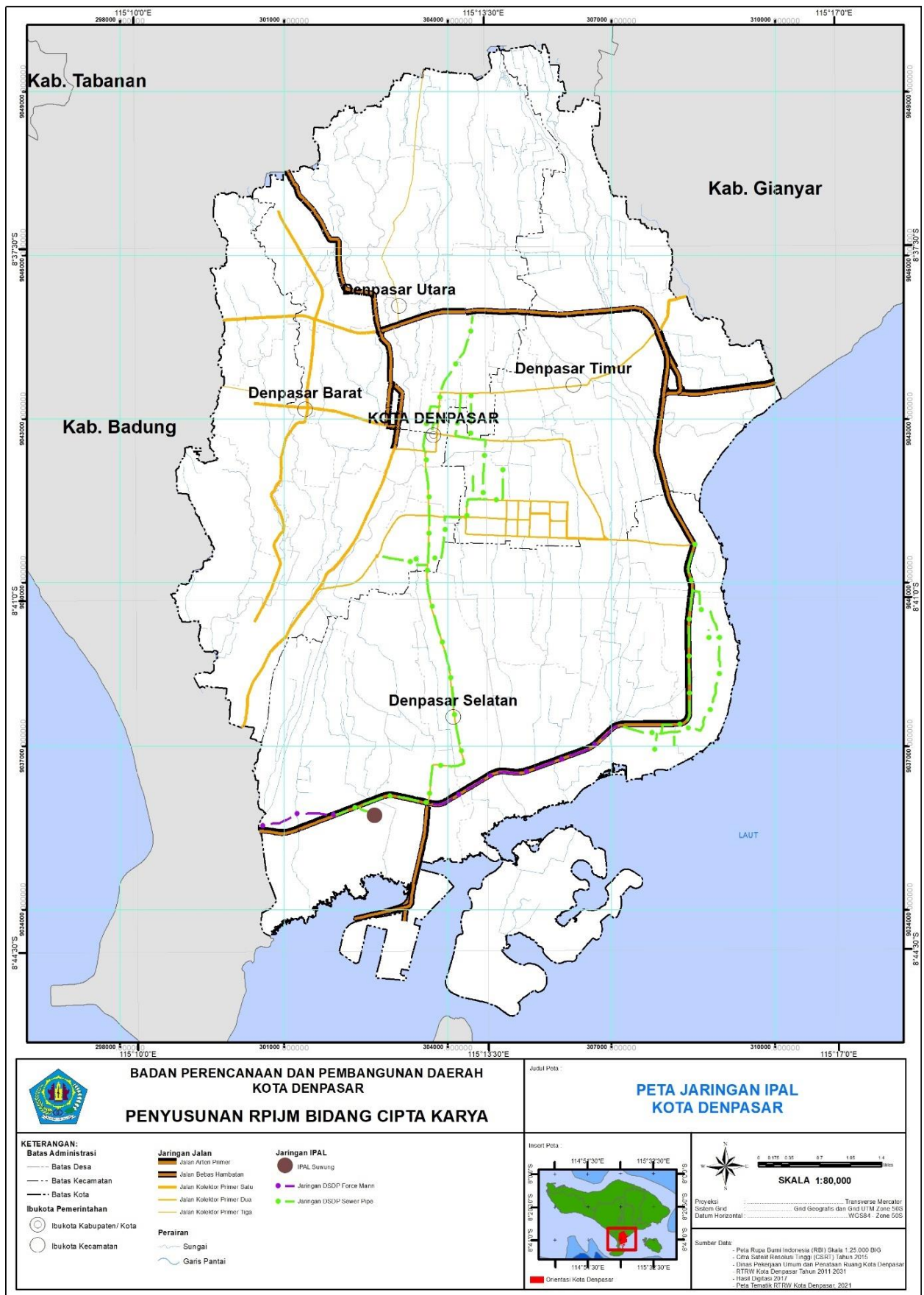
Kawasan Beresiko Air Limbah Kota Denpasar

Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Tahun 2018, area beresiko air limbah di Kota Denpasar terdiri dari resiko sangat tinggi, resiko tinggi, resiko rendah, dan resiko sangat rendah. Kawasan yang termasuk dalam resiko air limbah di Kota Denpasar adalah Kelurahan Dangin Puri dan Kelurahan Ubung, sedangkan yang termasuk dalam kategori resiko air limbah tinggi diantaranya adalah Desa Dauh Puri Kangin, Dauh Puri Kauh, Padangsambian, Penatih, Sumerta, Sumerta Kelod, Dangin Puri Kaja, Dauh Puri Kaja, Peguyangan, Peguyangan Kangin, Pemecutan Kaja, Tonja, dan Ubung Kaja. Berikut merupakan tabel kawasan beresiko air limbah di Kota Denpasar.

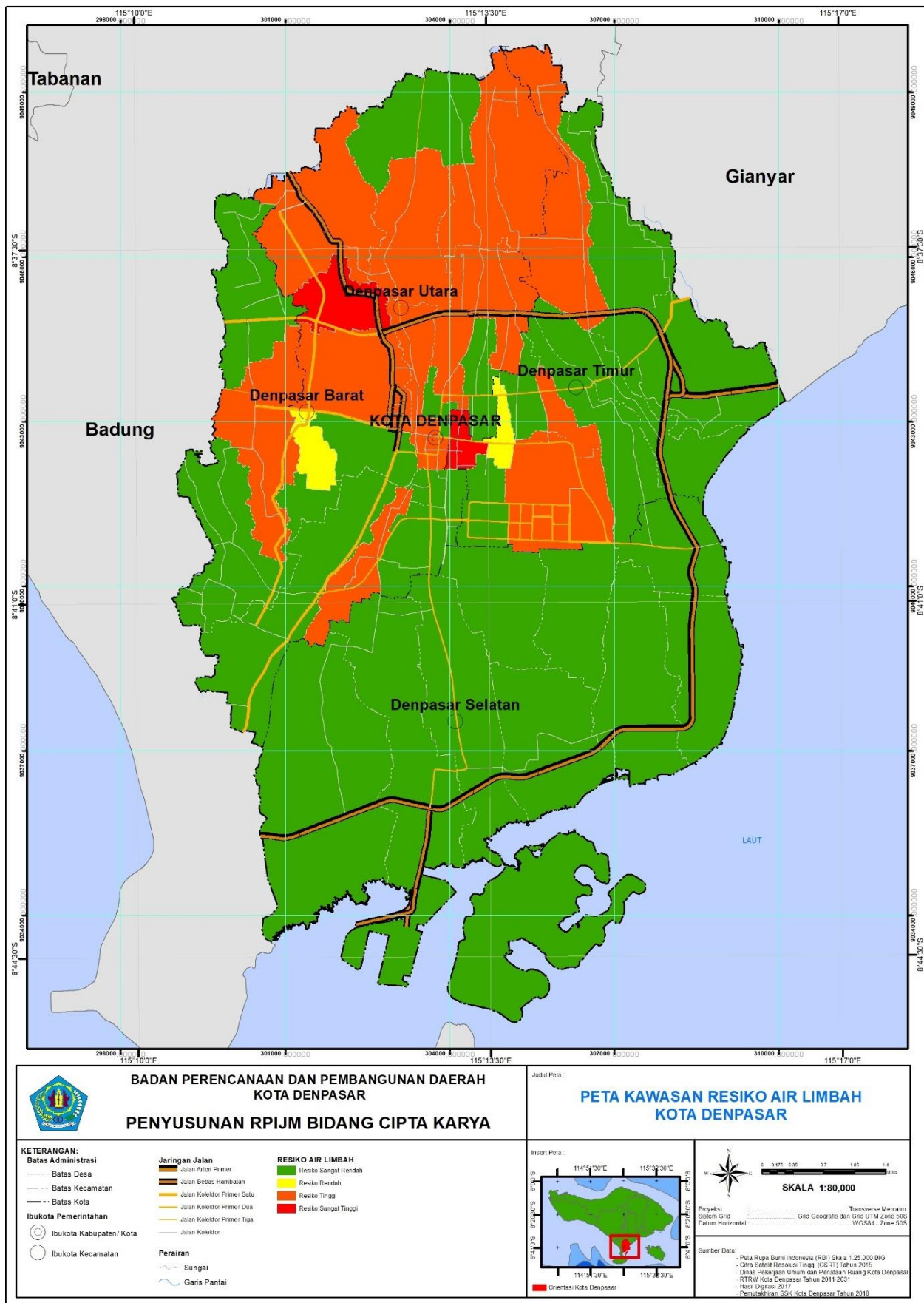
Tabel 3. 21. Area Beresiko Air Limbah di Kota Denpasar

No	Area Beresiko	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Resiko Sangat Tinggi			
1	Resiko 4	Dangin Puri	Denpasar Timur
		Ubung	Denpasar Utara
Resiko Tinggi			
2	Resiko 3	Dauh Puri Kangin	Denpasar Barat
		Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat
		Padangsambian	Denpasar Barat
		Penatih	Denpasar Timur
		Sumerta	Denpasar Timur
		Sumerta Kelod	Denpasar Timur
		Dangin Puri Kaja	Denpasar Utara
		Dauh Puri Kaja	Denpasar Utara
		Peguyangan	Denpasar Utara
		Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
		Pemecutan Kaja	Denpasar Utara
		Tonja	Denpasar Utara
		Ubung Kaja	Denpasar Utara
		Resiko Rendah	
3	Resiko 2	Tegal Kertha	Denpasar Barat
		Sumerta Kauh	Denpasar Timur
Resiko Sangat Rendah			
4	Resiko 1	Dauh Puri	Denpasar Barat
		Dauh Puri Klod	Denpasar Barat
		Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
		Padangsambian Klod	Denpasar Barat
		Pemecutan	Denpasar Barat
		Pemecutan Klod	Denpasar Barat
		Tegal Harum	Denpasar Barat
		Panjer	Denpasar Selatan
		Pedungan	Denpasar Selatan
		Pemogan	Denpasar Selatan
		Renon	Denpasar Selatan
		Sanur	Denpasar Selatan
		Sanur Kaja	Denpasar Selatan
		Sanur Kauh	Denpasar Selatan
		Serangan	Denpasar Selatan
		Sesetan	Denpasar Selatan
		Sidakarya	Denpasar Selatan
		Dangin Puri Klod	Denpasar Timur
		Kesiman	Denpasar Timur
		Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
		Kesiman Petilan	Denpasar Timur
		Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
		Sumerta Kaja	Denpasar Timur
		Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
		Dangin Puri Kauh	Denpasar Utara
		Peguyangan Kaja	Denpasar Utara

Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Tahun 2018



Gambar 3. 28. Peta Jaringan IPAL Kota Denpasar



Gambar 3. 29. Peta Resiko Air Limbah Kota Denpasar

3.2.4. KONDISI EKSISTING DRAINASE

1) Saluran Drainase Kota

Saluran drainase Kota Denpasar terdiri dari saluran induk/ sungai, saluran sekunder, dan saluran tersier. Panjang saluran induk di Kota Denpasar adalah 57.20 km yang terdiri dari Tukad teba, Tukad Abianbase, Tukad Loloan, Tukad Ngenjung, Tukad Punggawa, Tukad Rangda, Tukad Pekaseh, Tukad Badung, dan Tukad Mati. Saluran drainase sekunder di Kota Denpasar terdiri dari saluran jalan kota dan saluran jalan LC. Saluran tersier/ lingkungan terdiri saluran jalan lingkungan sepanjang 879.85 km. Berikut merupakan tabel saluran drainase di Kota Denpasar

Tabel 3. 22. Saluran Drainase Kota Denpasar

NO.	NAMA SALURAN	PANJANG	
I	SALURAN INDUK / SUNGAI	57.20	km
1	Tukad Teba	11.20	km
2	Tukad Abianbase	4.15	km
3	Tukad Loloan	3.75	km
4	Tukad Ngenjung	2.15	km
5	Tukad Punggawa	6.55	km
6	Tukad Rangda	4.25	km
7	Tukad Pekaseh	7.00	km
8	Tukad Badung	12.50	km
9	Tukad Mati	5.65	km
II	SALURAN SEKUNDER		
1	Saluran Jalan Kota	486.084	km
2	Saluran Jalan LC	150,546.41	m
III	SALURAN TERSIER / LINGKUNGAN		
1	Saluran Jalan Lingkungan	879,850.32	m

Sumber: Dinas PUPR Kota Denpasar, 2021

2) Kondisi Saluran Drainase

Kondisi eksisting drainase tahun 2019 sebagian besar dalam kondisi balik yaitu 1,627.8864 Km atau 99.815% dari total panjang drainase. Sedangkan drainase dengan kondisi tersumbat pada tahun 2019 sepanjang 3.017 Km, dimana panjang drainase tersumbat tersebut telah berkurang setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel kondisi drainase di Kota Denpasar Tahun 2014-2019.

Tabel 3. 23. Kondisi Drainase Kota Denpasar

No	Tahun	Panjang Drainase Tersumbat	Drainase Kondisi Baik	
			Panjang	Persentase (%)
1	2014	4.893	1,625.98	99.7
2	2015	4.566	1,626.314	99.72
3	2016	4.403	1,626.477	99.73
4	2017	3.262	1,627.619	99.8
5	2018	3.099	1,627.782	99.81
6	2019	3.017	1,627.864	99.815

Sumber: Dinas PUPR Kota Denpasar, 2021

3) Titik Genangan Kota Denpasar

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Denpasar, terdapat 32 titik genangan di Kota Denpasar dengan luas total genangan 22.7052 Ha dan ketinggian rata-rata 28 – 30 cm. Hingga Tahun 2019 sisa daerah genangan di Kota Denpasar yang belum tertangani seluas 3.9984 Ha yang tersebar di 4 titik genangan. Berikut merupakan tabel titik genangan di Kota Denpasar.

Tabel 3. 24. Titik Genangan Kota Denpasar

No	Titik Genangan	Luas M ²
1	Jalan Kargo, Pidada	7.180,93
2	Jalan Buluh Indah dan sekitarnya	6.700,25
3	Jalan Gunung Agung, Gunung Batur	11.330,18
4	Jalan Gunung Rinjani	11.330,18
5	Banjar Tegal Harum, Perumnas	3.170,68
6	Jalan Pura Demak	6.435,78
7	Abiantimbul, Sari Gading	3.870,28
8	Jalan Noja, Kesiman Petilan	4.900,28
9	Jalan Pulau Serangan, Satelite	8.862,64
10	Jalan Tukad Batanghari	5.236,52
11	Jalan Tukad Yeh Aya	5.236,52
12	Jalan Waturenggong	5.236,52
13	Jalan Kapten Agung	4.900,92
14	SD 12 Jalan Hangtuah, Tukad Penet	2.824,24
15	Jalan Gemitir Kesiman Kertalangu	12.096,76
16	Jalan Bedugul, Pekerisan Dewata	21.148,45
17	Kepaon, BPTP	5.797,30
18	Griya Anyar	1.545,17
19	Jalan Nakula dan sekitarnya	13.740,81
20	Pemogan (Mekar Jaya)	2.458,84
21	Lingkungan Bumi Ayu, Jalan Sekuta, By Pass Ngurah Rai, Radison	10.357,81
22	Jalan Penyaringan, Kutat Lestari, Danau Tempe dan Sekitarnya	18.384,73
23	Jalan Gatsu VI dan Sekitarnya	3.609,44
24	Padang Sambian Kaja	3.355,66
25	Jalan A Yani, Nangka Utara, Antasura, Astasura dan Sekitarnya	8.058,80
26	Jalan Siulan	8.095,60
27	Jalan By Pass Ngurah Rai Barat Makro	15.437,96

No	Titik Genangan	Luas M ²
28	Padang Sambian Kelod, Jalan Tangkuban Perahu, SD 11 dan 13 Padang Sambian	11.842,78
29	Jalan Ratna	976,57
30	Jalan Kamboja	976,57
31	Jalan Suli	976,57
32	Jalan Kenyeri	976,57

Sumber: Dinas PUPR Kota Denpasar, 2021

Hingga tahun 2019 masih sisa 4 titik genangan yang belum tertangani dengan total luas genangan 3.9984 Ha. Titik genangan yang belum tertangani Tahun 2019 diantaranya:

1. Kawasan Bumi Ayu, Penyaringan Kutat Lestari (sudah diusulkan ke BWS pusat)
2. Jalan A yani Denpasar Utara (Perlu adanya rekonstuksi saluran tepi jalan)
3. Kecubung, Hayam Wuruk (Perlu adanya rekonstruksi saluran tepi jalan)
4. Kertha Pura (Perlu adanya rekonstruksi saluran tepi jalan)

Tabel 3. 25. Sisa Daerah Genangan Kota Denpasar Tahun 2015-2019

No	Tahun	Sudah ditangani (Ha)	Belum ditangani (Ha)
1	2015	11.3526	11.3526
2	2016	16.3204	6.3847
3	2017	17.7373	4.9679
4	2018	18.4479	4.2572
5	2019	18.7074	3.9984

Sumber: Dinas PUPR Kota Denpasar, 2021

4) Kawasan Rawan Drainase Kota Denpasar

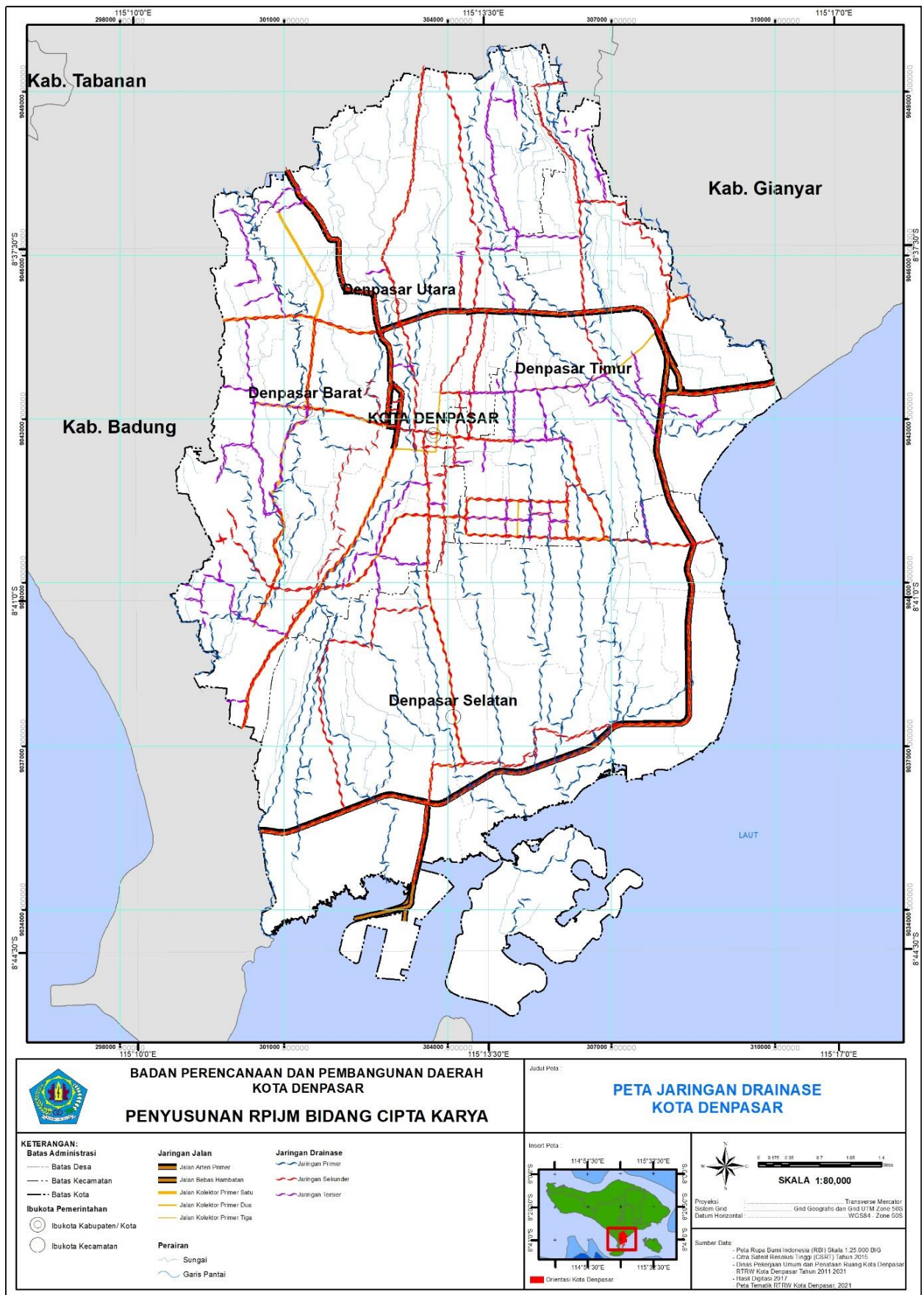
Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Tahun 2018, area rawan drainase di Kota Denpasar dibagi menjadi 4 kategori yaitu area resiko drainase sangat tinggi, area resiko drainase tinggi, area resiko drainase rendah, dan area resiko drainase sangat rendah. Area yang termasuk dalam area resiko drainase sangat tinggi adalah Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, dan yang termasuk dalam kategori resiko drainase tinggi adalah Desa Padangsambian Kaja Denpasar Barat. Berikut merupakan tabel area beresiko drainase di Kota Denpasar.

Tabel 3. 26. Resiko Drainase Kota Denpasar

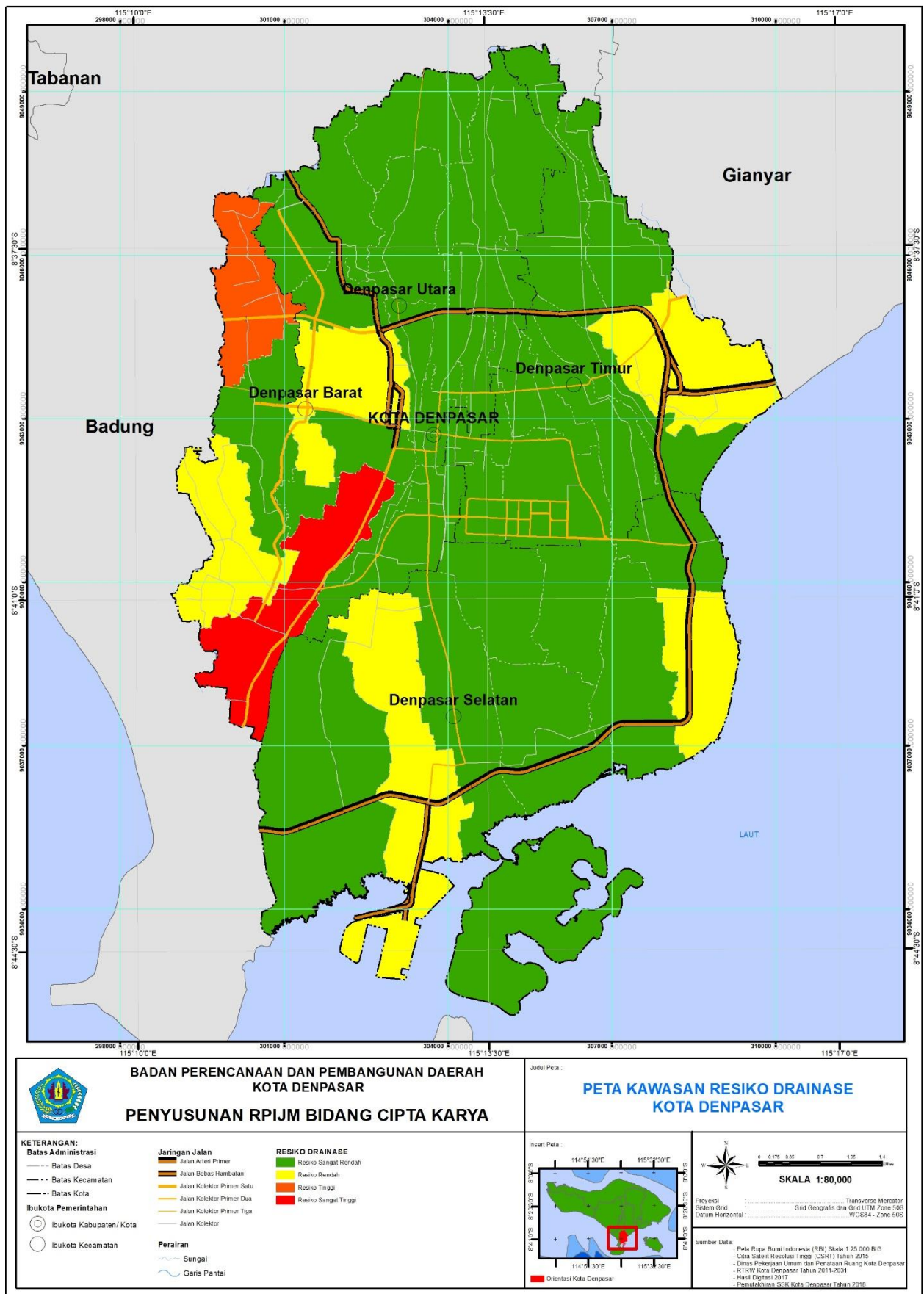
No	Area Beresiko		Desa / Kelurahan	Kecamatan
Resiko Sangat Tinggi		No		
1	Resiko 4	1	Pemecutan Klod	Denpasar Barat
Resiko Tinggi				
2	Resiko 3	1	Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
Resiko Rendah				
3	Resiko 2	1	Padangsambian Klod	Denpasar Barat

No	Area Beresiko		Desa / Kelurahan	Kecamatan
		2	Tegal Kertha	Denpasar Barat
		3	Pedungan	Denpasar Selatan
		4	Sanur	Denpasar Selatan
		5	Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
		6	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara
Resiko Sangat Rendah				
4	Resiko 1	1	Dauh Puri	Denpasar Barat
		2	Dauh Puri Kangin	Denpasar Barat
		3	Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat
		4	Dauh Puri Klod	Denpasar Barat
		5	Padangsambian	Denpasar Barat
		6	Pemecutan	Denpasar Barat
		7	Tegal Harum	Denpasar Barat
		8	Panjer	Denpasar Selatan
		9	Pemogan	Denpasar Selatan
		10	Renon	Denpasar Selatan
		11	Sanur Kaja	Denpasar Selatan
		12	Sanur Kauh	Denpasar Selatan
		13	Serangan	Denpasar Selatan
		14	Sesetan	Denpasar Selatan
		15	Sidakarya	Denpasar Selatan
		16	Dangin Puri	Denpasar Timur
		17	Dangin Puri Klod	Denpasar Timur
		18	Kesiman	Denpasar Timur
		19	Kesiman Petilan	Denpasar Timur
		20	Penatih	Denpasar Timur
		21	Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
		22	Sumerta	Denpasar Timur
		23	Sumerta Kaja	Denpasar Timur
		24	Sumerta Kauh	Denpasar Timur
		25	Sumerta Kelod	Denpasar Timur
		26	Dangin Puri Kaja	Denpasar Utara
		27	Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
		28	Dangin Puri Kauh	Denpasar Utara
		29	Dauh Puri Kaja	Denpasar Utara
		30	Peguyangan	Denpasar Utara
		31	Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
		32	Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
		33	Tonja	Denpasar Utara
		34	Ubung	Denpasar Utara
		35	Ubung Kaja	Denpasar Utara

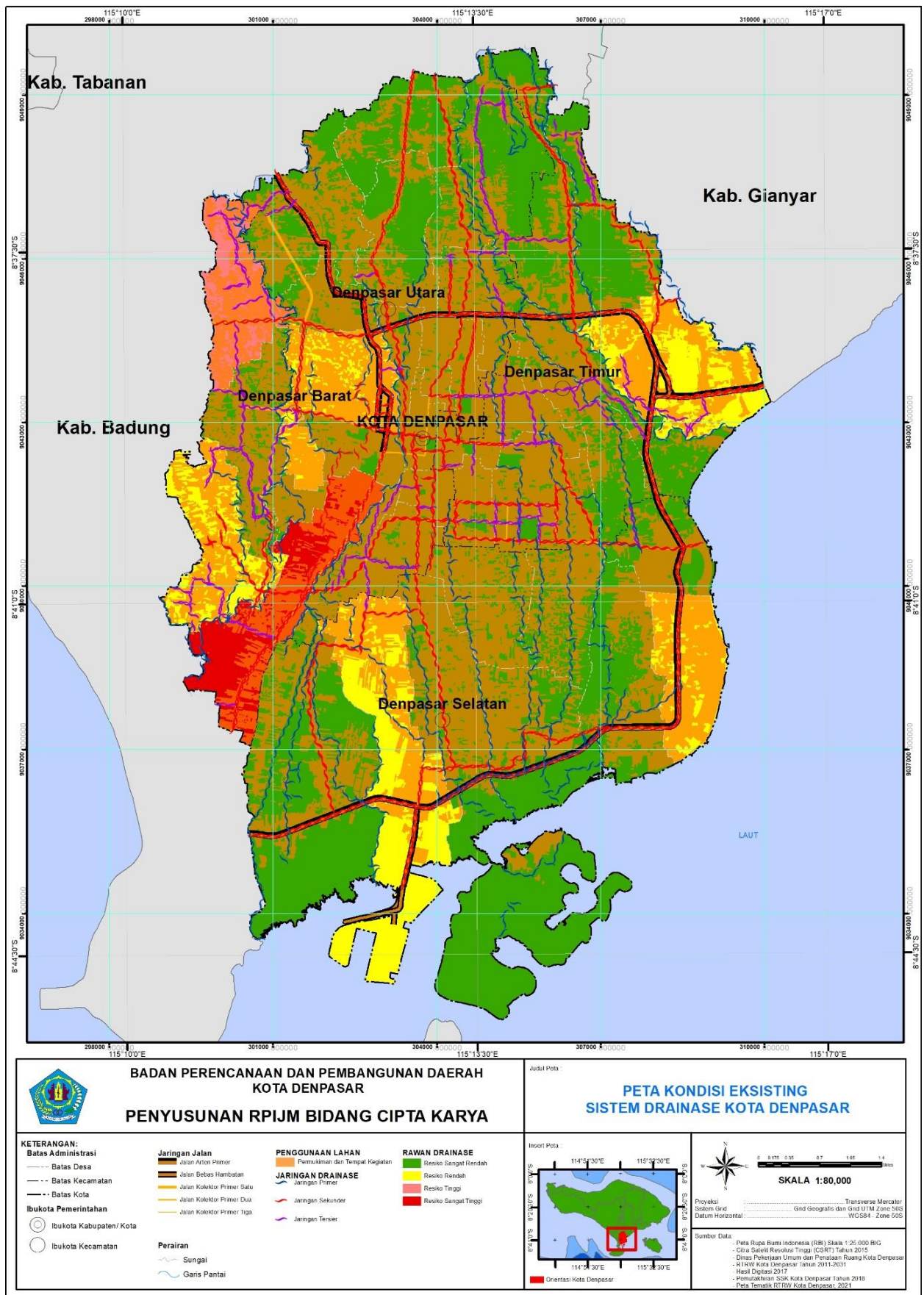
Sumber: Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar 2018



Gambar 3. 30. Peta Jaringan Drainase Kota Denpasar



Gambar 3. 31. Peta Resiko Drainase Kota Denpasar



Gambar 3. 32. Peta Kondisi Eksisting Sistem Drainas Kota Denpasar

3.2.5. KONDISI EKSISTING PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN, OLAHRAGA, DAN PASAR

1) Prasarana dan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Denpasar dapat dibedakan menjadi sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan sarana pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Kota Denpasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi. Sedangkan sarana pendidikan di bawah Kementerian Agama terdiri dari MI, MTs, dan MA

Berdasarkan data dari Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021, jumlah sarana pendidikan SD di Kota Denpasar sejumlah 233 buah yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan sarana pendidikan SMP berjumlah sebanyak 70 buah. Sarana pendidikan menengah atas dan kejuruan masing-masing berjumlah 35 dan 32 buah. Sedangkan jumlah perguruan tinggi di Kota Denpasar adalah sebanyak 20 buah yang tersebar di semua kecamatan di Kota Denpasar. Berikut merupakan tabel sebaran sarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Kota Denpasar.

Tabel 3. 27. Sarana Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Kota Denpasar

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1	Denpasar Selatan	68	22	11	7	5
2	Denpasar Timur	52	14	6	8	6
3	Denpasar Barat	58	15	8	3	4
4	Denpasar Utara	55	19	10	14	5
	Kota Denpasar	233	70	35	32	20

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021

Sarana pendidikan di bawah Kementerian Agama di Kota Denpasar terdiri dari MI, MTs, dan MA. Berdasarkan data dari Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021, jumlah sarana pendidikan MI di Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebanyak 14 buah yang tersebar di semua kecamatan, dengan jumlah paling banyak di Kecamatan Denpasar Selatan (6 buah) dan Denpasar Barat (5 buah). Sedangkan jumlah sarana pendidikan MTs di Kota Denpasar sebanyak 6 buah yang tersebar di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Jumlah sarana pendidikan MA di Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebanyak 4 buah yang tersebar di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara. Berikut merupakan tabel sebaran sarana pendidikan di bawah Kementerian Agama di Kota Denpasar.

Tabel 3. 28. Sarana Pendidikan di bawah Kementerian Agama di Kota Denpasar

No	Kecamatan	MI	MTs	MA
1	Denpasar Selatan	6	3	2
2	Denpasar Timur	1		1
3	Denpasar Barat	5	2	
4	Denpasar Utara	2	1	1
	Kota Denpasar	14	6	4

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021

2) Prasarana dan Sarana Pasar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, berdasarkan pengelolanya pasar di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi Pasar yang dikelola oleh FPPD Kota Denpasar, dan dikelola oleh Perumda Pasar Sewaka Dharama Kota Denpasar. Dari total 50 pasara raykat terdapat 34 pasar rakyat yang dikelola oleh FPPD Kota Denpasar dan 16 pasar rakyat yang dikelolao oleh Perumda Pasar Sewaka Dharma. Berikut merupakan tabel pasar rakyat di Kota Denpasar Berdasarkan Pengeloloanya.

Tabel 3. 29. Pasar Rakyat di Kota Denpasar

No.	Nama Pasar Rakyat	Alamat
FPPD Kota Denpasar		
1	Pasar Desa Tegal Harum	Jl. Gunung Rinjani No. 99X Perumnas Monang Maning Denpasar
2	Pasar Desa Pakraman Padang Sambian	Jl. Gunung Tangkuban Perahu II No. 1 Denpasar
3	Pasar Desa Abian Tegal	Jl. Batanta Gg VII Desa Dauh Puri Kauh Denpasar
4	Pasar Yadnya	Jl. Surabi No. 36 Denpasar
5	Pasar Gunung Sari	Jl. Siulan No. 95 Denpasar
6	Pasar Desa Kerta Sari	Desa Kesiman Kertalangu Denpasar
7	Pasar Tamba	Jl. Trengguli No. 1 Denpasar
8	Pasar Kerta Waringin Sari	Jl. Trenggana No. 177, Br. Anggabaya Penatih Denpasar
9	Pasar Desa Pakraman Penatih	Jl. Trenggana No. 2 Penatih Denpasar
10	Pasar Windu Bhoga Pemogan	Jl. Raya Pemogan Gg Pasar Windu Bhoga Br. Sakah Denpasar
11	Pasar Kertha Bhoga Desa Adat Pemogan	Jl. Pulau Bungin No. 119 Denpasar
12	Pasar Sudha Merta	Jl. Sidakarya No. 128 Denpasar
13	Pasar Sari Merta	Jl. Merta Sari Suwung Kangin Sidakarya Denpasar
14	Pasar Renon II	Jl. Tukad Badung Renon Denpasar
15	Pasar Renon I	Jl. Tukad Balian Renon Denpasar
16	Pasar Desa Nyanggelan	Jl. Tukad Pakrisan No. 55 A Panjer Denpasar
17	Pasar Rakyat Br. Pitik Pedungan	Jl. Pulau Bungin
18	Pasar Batan Kendal	Jl. Mertasari No. 64 Suwung Batan Kendal Denpasar
19	Pasar Desa Adat Sesetan	Jl. Raya Sesetan No. 97 Denpasar
20	Pasar Desa Pedungan	Jl. Pulau Moyo Pedungan Denpasar
21	Pasar Desa Pedungan Banjar Kaja (Pasar Sari)	Jl. Pulau Kawe No. 69 Br. Kaja Pedungan Denpasar
22	Pasar Desa Intaran	Jl. Pejeng Sari Sanur Kauh Denpasar
23	Pasar Desa Pakraman Serangan	Kelurahan Serangan
24	Pasar Desa Pakraman Poh Gading	Jl. Tunggul Ametung II No. 20 Denpasar
25	Pasar Desa Adat Ubung	Jl. Cokroaminoto Br. Batur Ubung Denpasar
26	Pasar Agung Desa Pakraman Peninjoan	Jl. Cekomaria No. 1 Peguyangan Kangin Denpasar
27	Pasar Desa Adat Sangging Sari	Jl. Seroja GG Sangging Tonja Denpasar
28	Pasar Pondok Indah	Jl. Pondok Indah II Desa Pemecutan Kaja Denpasar
29	Pasar Desa Adat Peguyangan	Br. Pulugambang Peguyangan Denpasar
30	Pasar Sindu Sanur	Jl. Pasar No. 1 Sanur Denpasar
31	Pasar Tradisional Modern Kesiman	Jl. Waribang Kesiman Denpasar
32	Pasar Phula Kerti	Jl. Serma Made Pil No. 55 Denpasar
33	Pasar Anyar Peguyangan	Jl. A. Yani Utara Br. Batur Peguyangan Kaja Denpasar Utara
34	Pasar Tradisional Jaba Puri Jero Kuta	Jl. Sutomo No. 51 Denpasar Utara, Desa Pemecutan Kaja

No.	Nama Pasar Rakyat	Alamat
Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar		
35	Pasar Badung	Jl. Sulawesi No.1 Denpasar Barat
36	Pasar Pidada	Jl, Pidada IX Denpasar Utara, Kelurahan Ubung
37	Pasar Lokitasari	Jl, Thamrin No. 69 Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat
38	Pasar Kreneng	Jl, Kamboja Desa Dangin Puri Kangin Denpasar Utara
39	Pasar Anyar Sari	Jl. Gunung Galunggung Desa Padang Sambian Kaja Denpasar Utara
40	Pasar Satriya	Jl, Abimanyu No, 1 Desa Dangin Puri Kauh Denpasar Utara
41	Pasar Sanglah	Jl. Waturenggong Desa Dauh Puri Kelod Denpasar Barat
42	Pasar Ketapian	Jl, Pucuk No, 1 Kel. Sumerta Denpasar Timur
43	Pasar Gunung Agung Utara	Jl. Gunung Agung Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara
44	Pasar Gunung Agung Malam	Jl. Gunung Agung Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara
45	Pasar Kumbasari Siang	Jl. Gajah Mada Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat
46	Pasar Kumbasari Malam	Jl. Gajah Mada Kelurahan Pemecutan Denpasar Barat
47	Pasar Abian Timbul	Jl. Iman Bonjol No. 431 Kel. Pemecutan Denpasar Barat
48	Pasar Cokroaminoto	Jl,Cokroaminoto Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara
49	Pasar Asoka	Jl, Kamboja Desa Dangin Puri Kangin Denpasar Utara
50	Pasar Suci Sari Jaya	Jl. Hasanudin Desa Dauh Puri Kangin Denpasar Barat

Sumber: Disperindag Kota Denpasar, 2021

Di Kota Denpasar terdapat 2 (dua) pasar yang termasuk pasca bencana/ kebakaran diantaranya adalah Pasar Badung dan Pasar Anyar Sari. Pasar Badung mengalami bencana kebakaran pada Tanggal 29 Februari 2016 sedangkan Pasar Anyar Sari mengalami bencana kebakaran pada tanggal 11 Agustus 2018. Kepemilikan tanah pasar di Kota Denpasar terdiri dari tanah desa, tanah banjar adat, tanah masyarakat, serta tanah pemda. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, semua pasar di Kota Denpasar tidak ada mengalami status sengketa.

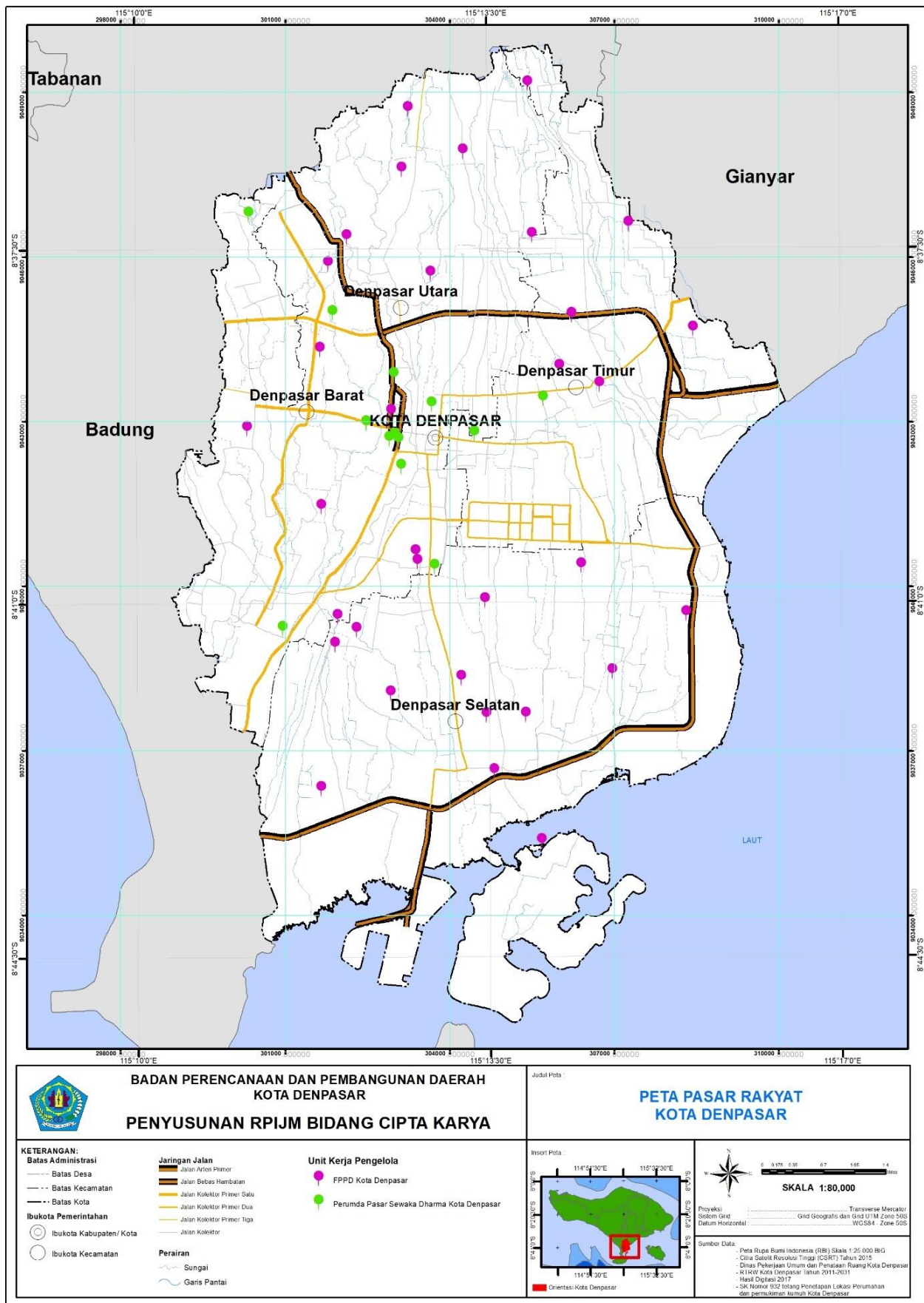
Kota Denpasar memiliki 1 pasar dengan Tipe A yaitu Pasar Badung, pasar Tipe B yaitu Pasar Agung Desa Pekraman Peninjoan, Tipe C diantaranya Pasar Desa Pekraman Padangsambian, Pasar Tamba, Pasar Kerta Waringin Sari, Pasar Sudha Merta, Pasar Desa Nyanggelan, Pasar Desa Pekraman Poh Gadung, dan Pasar Anyar Sari. Sedangkan pasar dengan Tipe D adalah Pasar Rakyat Br. Pitik Pedungan. Berikut merupakan pasar di Kota Denpasar menurut kejadian bencana (kebakaran), status sengketa, tipe pasar, kepemilikan lahan, serta usulan pendanaan.

Tabel 3. 30 Pasar di Kota Denpasar Berdasarkan kriteria pasca bencana, status sengketa, tipe, dan kepemilikan tanah

No	Pasar yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian	Pasar yang termasuk pasca bencana/ kebakaran	Tidak dalam status sengketa	Bukan pasar rakyat A, B, C, dan D	Kepemilikan tanah oleh Pemda	Tidak diusulan Pendanaan lain
1	Pasar Desa Tegal Harum	Tidak	Tidak		Tanah Desa	Diusulkan dana TP T.A 2022
2	Pasar Desa Pakraman Padang Sambian	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
3	Pasar Desa Abian Tegal	Tidak	Tidak		Tanah Banjar Adat	
4	Pasar Yadnya	Tidak	Tidak		Tanah Masyarakat	
5	Pasar Gunung Sari	Tidak	Tidak		Tanah Banjar Adat	
6	Pasar Desa Kerta Sari	Tidak	Tidak		Tanah Banjar Adat	
7	Pasar Tamba	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
8	Pasar Kerta Waringin Sari	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
9	Pasar Desa Pakraman Penatih	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
10	Pasar Windu Bhoga Pemogan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
11	Pasar Kertha Bhoga Desa Adat Pemogan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
12	Pasar Sudha Merta	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
13	Pasar Sari Merta	Tidak	Tidak		Tanah Banjar Adat	
14	Pasar Renon II	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
15	Pasar Renon I	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
16	Pasar Desa Nyanggelan	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
17	Pasar Rakyat Br. Pitik Pedungan	Tidak	Tidak	Tipe D	Tanah Desa	
18	Pasar Batan Kendal	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
19	Pasar Desa Adat Sesetan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
20	Pasar Desa Pedungan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
21	Pasar Desa Pedungan Banjar Kaja (Pasar Sari)	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
22	Pasar Desa Intaran	Tidak	Tidak		Tanah Masyarakat	
23	Pasar Desa Pakraman Serangan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
24	Pasar Desa Pakraman Poh Gading	Tidak	Tidak	Tipe C	Tanah Desa	
25	Pasar Desa Adat Ubung	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
26	Pasar Agung Desa Pakraman Peninjoan	Tidak	Tidak	Tipe B	Tanah Desa	
27	Pasar Desa Adat Sangging Sari	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
28	Pasar Pondok Indah	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
29	Pasar Desa Adat Peguyangan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
30	Pasar Sindu Sanur	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
31	Pasar Tradisional Modern Kesiman	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
32	Pasar Phula Kerti	Tidak	Tidak		Tanah Desa	Dana BKK T.A 2021
33	Pasar Anyar Peguyangan	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
34	Pasar Tradisional Jaba Puri Jero Kuta	Tidak	Tidak		Tanah Desa	
35	Pasar Badung Kota Denpasar	Mengalami bencana kebakaran pada tanggal 29 Februari Tahun 2016	Tidak	Tipe A	Tanah Pemda	
36	Pasar Pidada	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	

No	Pasar yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian	Pasar yang termasuk pasca bencana/ kebakaran	Tidak dalam status sengketa	Bukan pasar rakyat A, B, C, dan D	Kepemilikan tanah oleh Pemda	Tidak diusulan Pendanaan lain
37	Pasar Lokitasari	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
38	Pasar Kreneng	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
39	Pasar Anyar Sari	Mengalami bencana kebakaran pada tanggal 11 Agustus Tahun 2018	Tidak	Tipe C	Tanah Pemda	
40	Pasar Satriya	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
41	Pasar Sanglah	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
42	Pasar Ketapian	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
43	Pasar Gunung Agung Utara	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
44	Pasar Gunung Agung Malam	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
45	Pasar Kumbasari Siang	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
46	Pasar Kumbasari Malam	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
47	Pasar Abian Timbul	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
48	Pasar Cokroaminoto	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
49	Pasar Asoka	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	
50	Pasar Suci Sari Jaya	Tidak	Tidak		Tanah Pemda	

Sumber: Disperindag Kota Denpasar, 2021



Gambar 3. 33. Peta Sebaran Pasar Rakyat Kota Denpasar

3.2.6. KONDISI EKSISTING PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Penataan bangunan dan lingkungan merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, khususnya wujud fisik bangunan Gedung dan lingkungannya. Kondisi eksisting penataan bangunan dan lingkungan di Kota Denpasar terdiri dari kawasan rawan bencana, destinasi wisata, ruang terbuka hijau, dan bangunan cagar budaya.

1) Kawasan Rawan Bencana

Rawan bencana yang terjadi di Kota Denpasar terjadi diakibatkan oleh factor alam, non alam, dan ulah manusia. Beberapa bencana yang pernah melanda Kota Denpasar diantaranya bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin putting beliung, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan lain-lain. Kawasan rawan bencana Kota Denpasar terdiri dari:

a) Kawasan Rawan Banjir

Definisi kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/ atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Sebaran wilayah rawan bencana banjir di Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Sistem I yaitu Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung meliputi Jalan Tengku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja, dan Jalan Kaliasem
2. Sistem II yaitu Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung meliputi Jalan Siulan
3. Sistem III yaitu Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul
4. Sistem IV yaitu Sistem Saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalang Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan
5. Sistem V yaitu Sistem Saluran Pembuangan Pemogan meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

b) Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10 meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter. Kawasan pantai di Kota Denpasar yang termasuk dalam zona kerawanan tinggi mulai dari Pantai Padang Galak, Sanur, Serangan, dan Kawasan Teluk Benoa. Sebaran kawasan rawan tsunami di Kota Denpasar diantaranya:

- o Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh dusun/banjar;

- Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;
 - Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
 - Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batankendal dan Pegok;
 - Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batankendal;
 - Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.
 - Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
 - Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
 - Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
 - Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.
 - Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200.
- c) Kawasan Rawan Gelombang dan Abrai Pantai
- Wilayah rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar kecuali pada kawasan hutan bakau. Wilayah termasuk dalam kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Denpasar diantaranya adalah Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu.
- d) Kawasan Intrusi Air Laut
- Kawasan intrusi air laut di Kota Denpasar tersebar pada kawasan sepanjang pesisir di Kota Denpasar ke arah daratan.
- e) Kawasan Rawan kebakaran
- Kawasan rawan kebakaran di Kota Denpasar meliputi seluruh wilayah di Kota Denpasar dengan karakteristik permukiman penduduk yang padat.
- f) Epidemik dan Wabah penyakit
- Epidemi dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit disuatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemi dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya epidemi dan wabah penyakit yang mengancam pada kelas bahaya rendah mengancam di sembilan belas desa/kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di dua puluh empat desa/kelurahan. Luas wilayah rawan edipemi dan wabah penyakit seluas 12.629,25 ha atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha

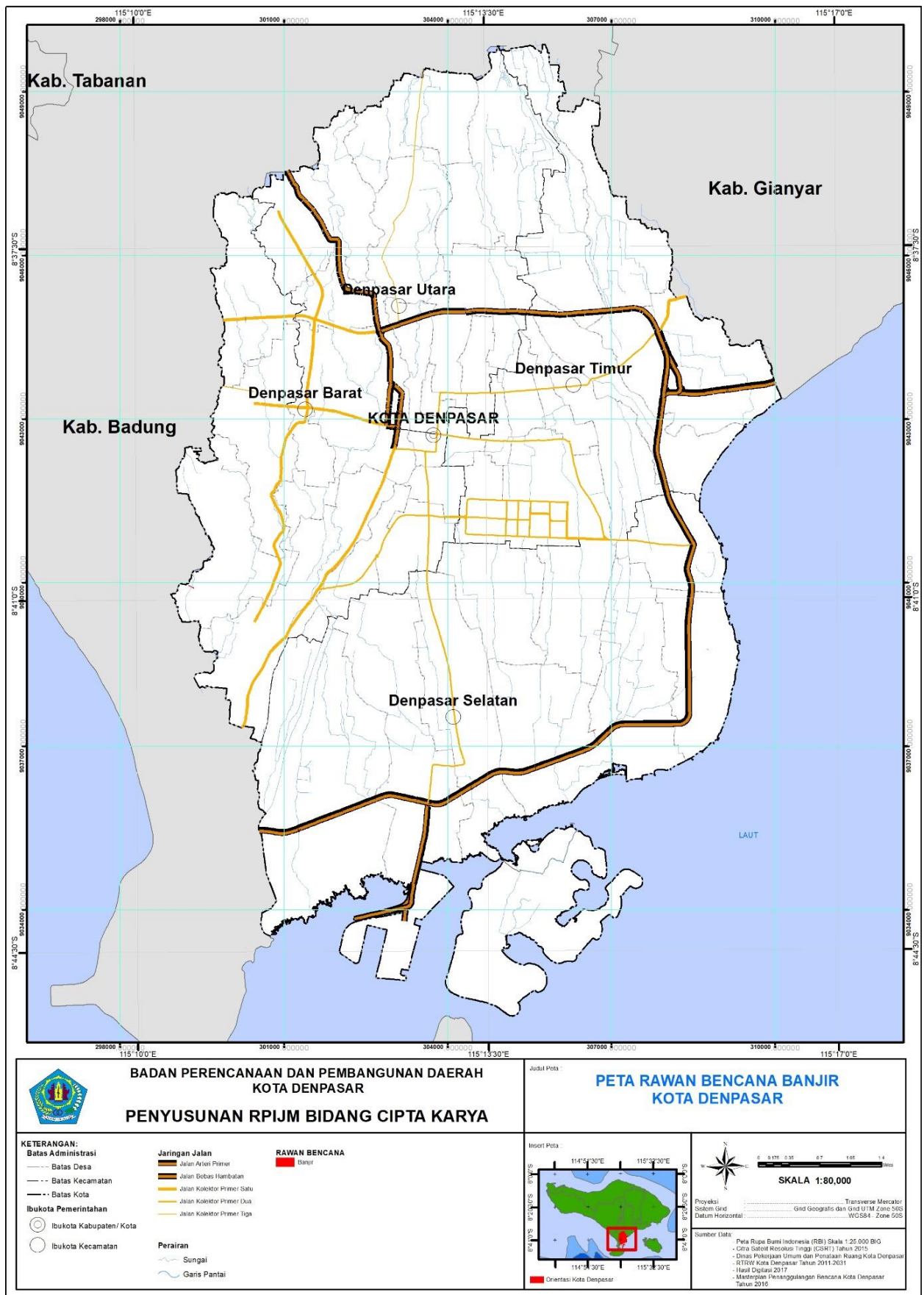
g) Gempa Bumi

Kota Denpasar termasuk sebagai wilayah yang rawat terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya gempa bumi sedang yaitu mencakup 43 desa/ kelurahan dengan luas wilayah rawan gempa bumi adalah 12.862,08 Ha atau 99.98% dari luas total Kota Denpasar.

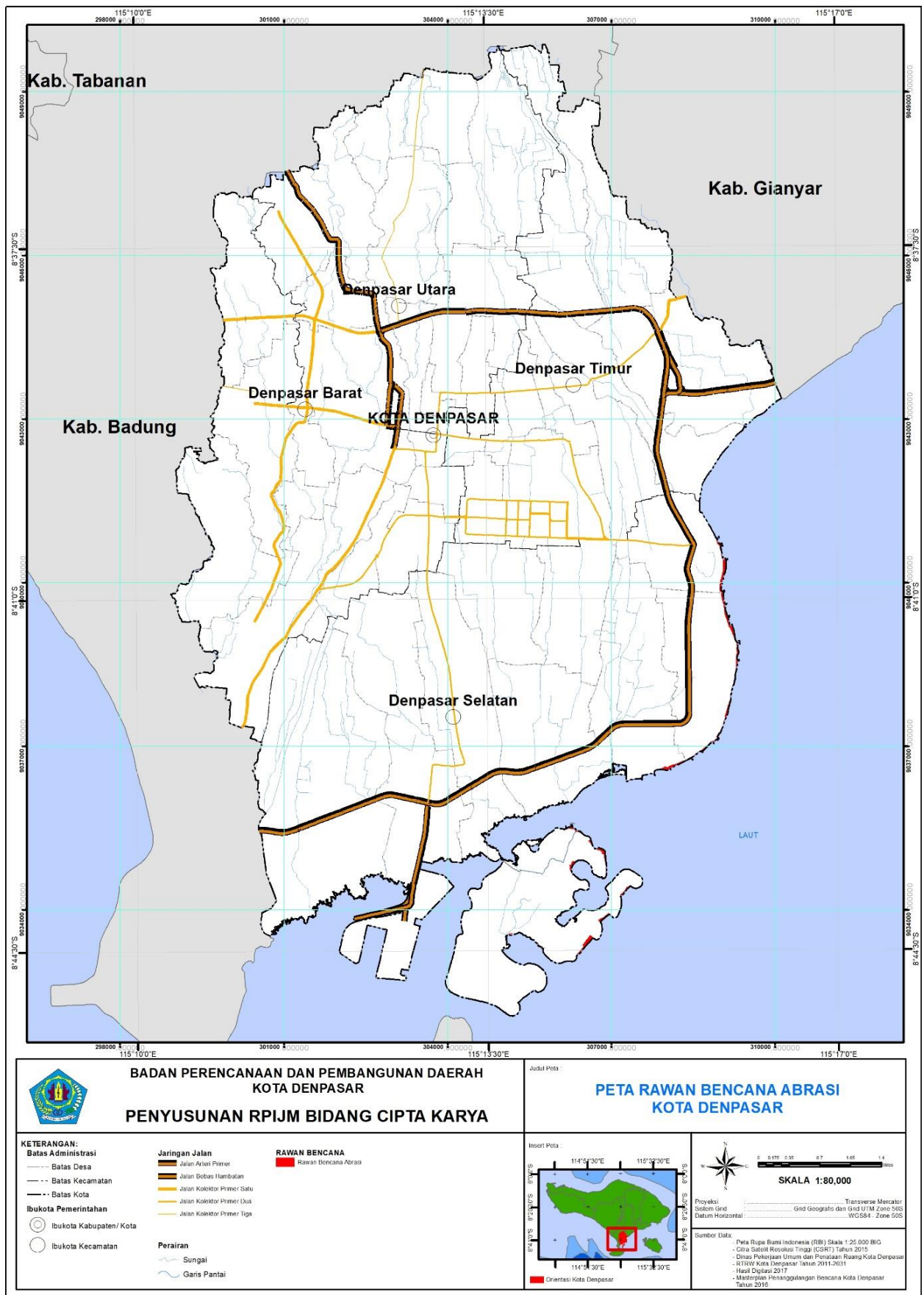
h) Cuaca Ekstrem

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrem. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrem seluas 12.791,07 ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

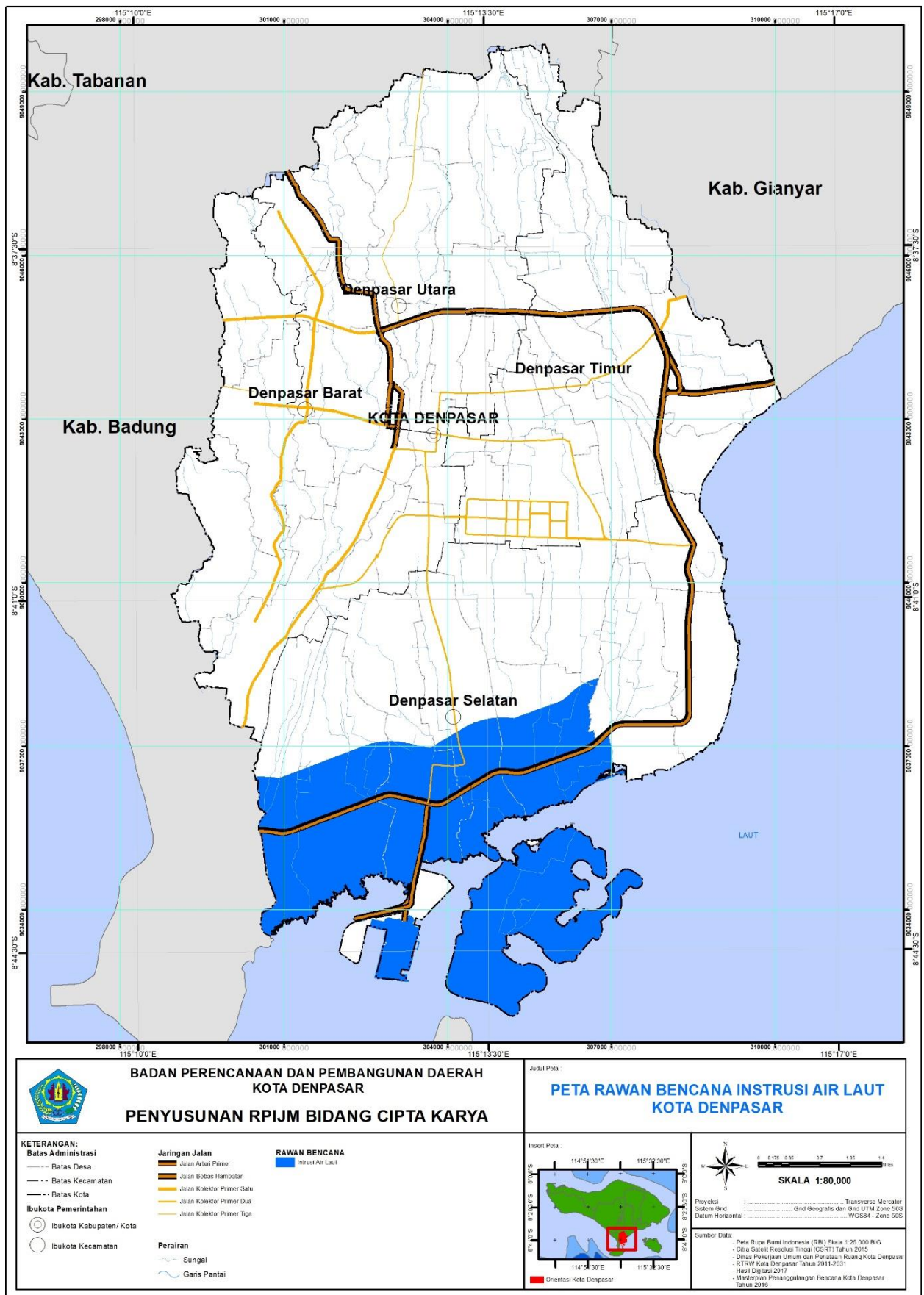
Sarana dan prasana yang dimiliki oleh BPBD Kota Denpasar dalam penanggulangan bencana di Kota Denpasar diantaranya adalah Pusdalops (Call Center), Public Safe Community (PSC), dan 4 (empat) Pos, yaitu Pos Induk, Pos Juanda, Pos Cokro, Pos Mahendradata. Selain itu sarana penanggulangan bencan berupa Pos Balawisata yang berlokasi di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Pos Lemayuer, Pantai Segara Ayu, dan Serangan.



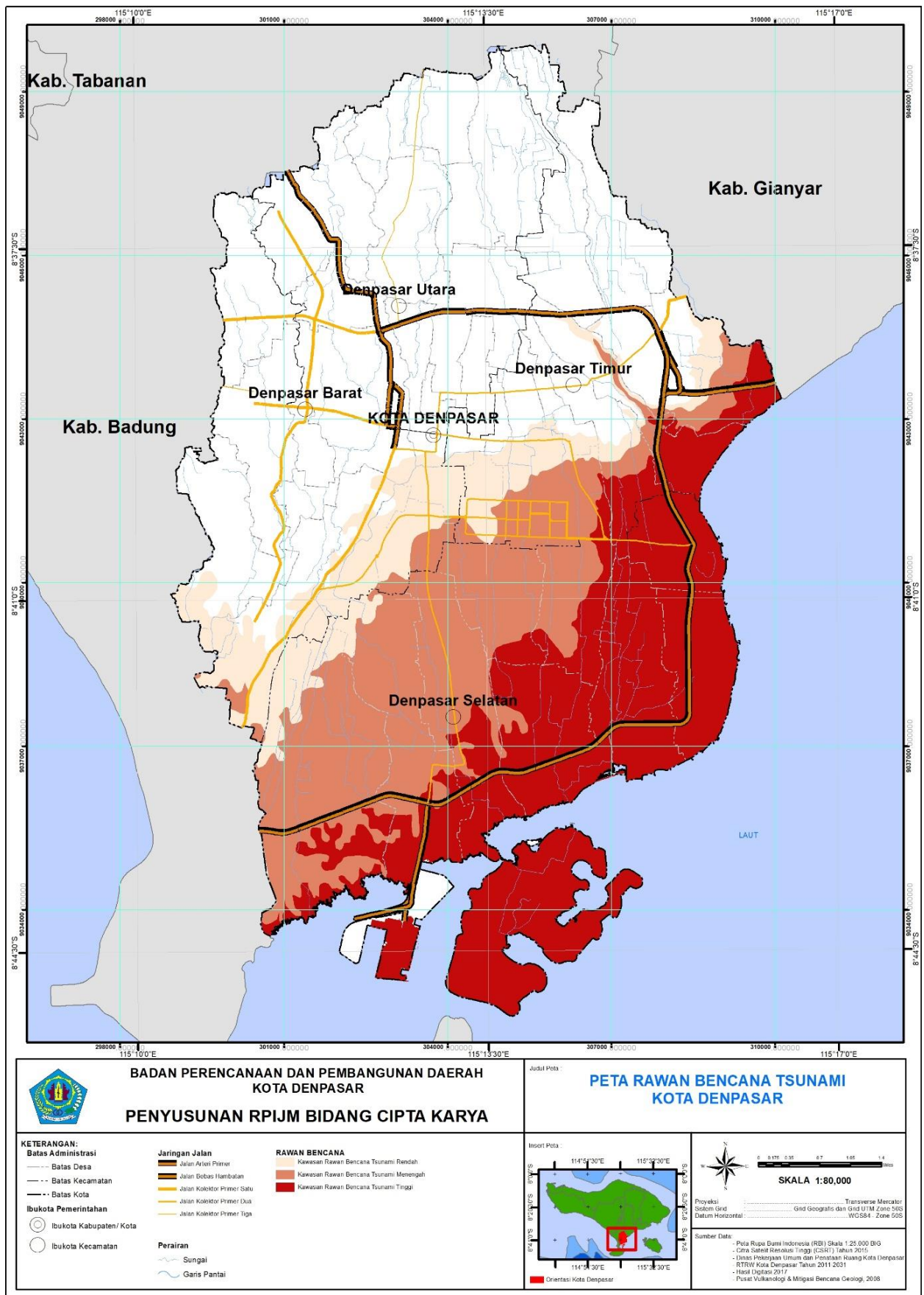
Gambar 3. 34. Peta Rawan Bencana Banjir Kota Denpasar



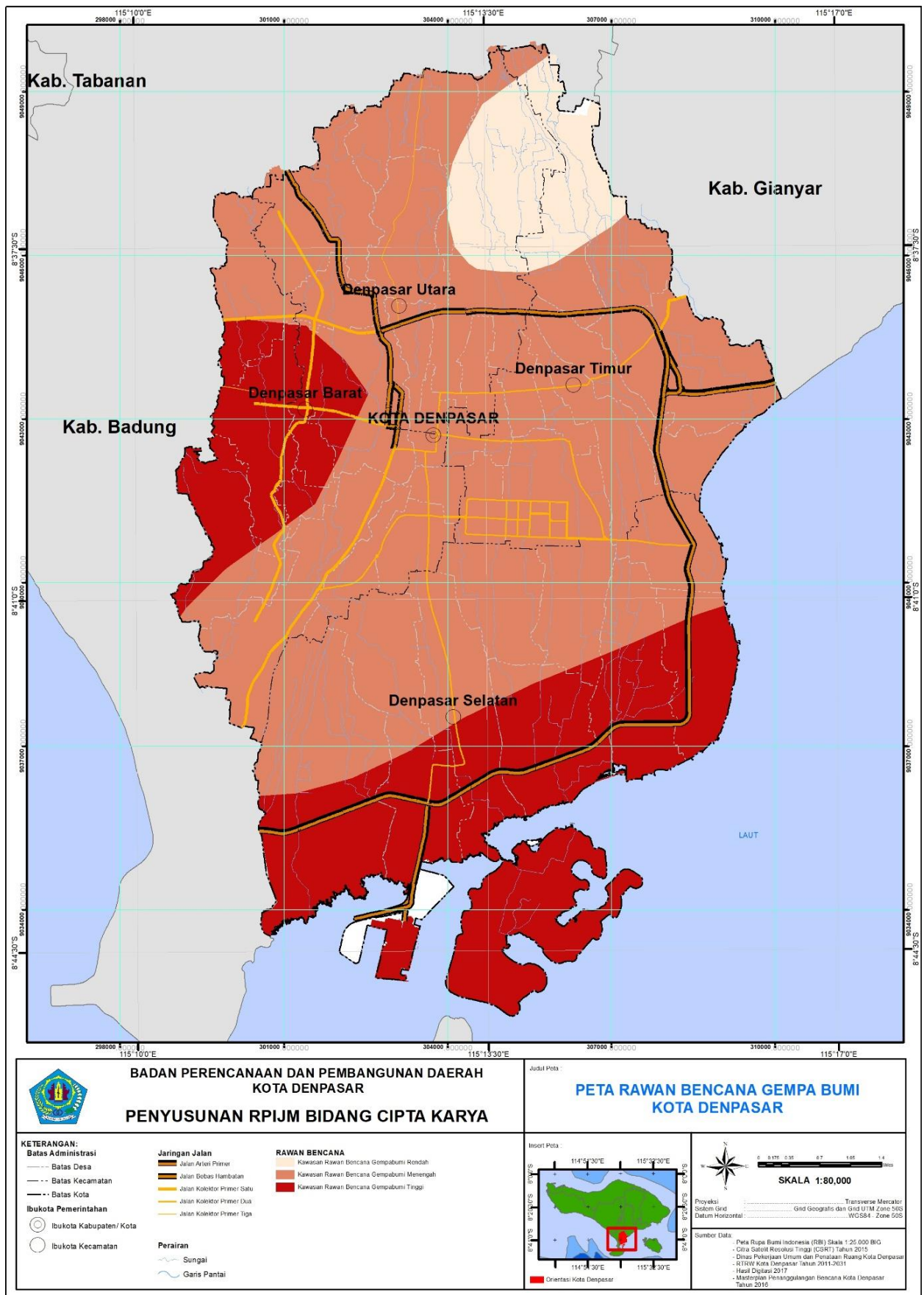
Gambar 3. 35. Peta Rawan Bencana Abrasi Kota Denpasar



Gambar 3. 36. Peta Rawan Bencana Intrusi Air Laut Kota Denpasar



Gambar 3. 37. Peta Rawan Bencana Tsunami di Kota Denpasar



Gambar 3. 38. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar

2) Destinasi Wisata

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang besar dan sudah terkenal dengan hingga ke manca negara. Oleh karena itu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025 beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Bali termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utamapariwisata atau memiliki potensu untuk pengembangan pariwisata nasional yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Kota Denpasar termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur – Nusa Dua, dengan jenis daya tarik wisata sebagai berikut:

- Wisata Pantai/ Bahari
- Flora – Fauna
- Situs Sejarah/ Tempat Ibadah
- Teman Bertema

Deliniasi KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua meliputi sebagian wilayah Kabupaten Badung dan sebagian wilayah Kota Denpasar. Wilayah Kota Denpasar yang termasuk dalam deliniasi KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua adalah, Kecamatan Denpasar Selatan, sebagian Kecamatan Denpasar Timur, dan sebagian kecil Kecamatan Denpasar Barat.



Gambar 3. 39. Peta KSPN Kuta - Sanur - Nusa Dua

Berdasarkan hasil overlay peta KSPN dengan peta sebaran destinasi wisata di Kota Denpasar, terapat beberapa destinasi wisata di Kota Denpasar yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur – Nusa Dua. Berikut merupakan tabel destinasi wisata di Kota Denpasar yang termasuk dalam KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua.

Tabel 3. 31. Destinasi Wisata di Kota Denpasar yang termasuk dalam KSPN Kuta - Sanur - Nusa Dua

No	Destinasi Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Kawasan Pariwisata Sanur	Alam
2	Pulau Serangan	Alam
3	Hutan Mangrove	Alam
4	Monument Perjuangan Rakyat Bali	Budaya
5	Taman Budaya	Budaya
6	Museum Bali	Budaya
7	Museum Le Mayeur	Budaya
8	Museum Sidik Jari	Budaya
9	Pasar Badung/ Kumbasari	Budaya
10	Pasar Kreneng	Budaya
11	Puri Jro Kuta	Budaya
12	Pasar Burung Satria	Budaya
13	Prasasti Blanjong	Budaya
14	Lapangan Puputan Badung	Budaya
15	Desa Wisata Sanur Kaja	Budaya
16	Desa Wisata Sanur	Budaya
17	Desa Wisata Danur Kauh	Budaya
18	Desa Wisata Serangan	Budaya
19	Taman Kumbasari	Rekreasi
20	Taman Janggan	Rekreasi
21	Pura Jagadnatha	Religi
22	Pura Sakenan	Religi
23	Pura Maospahit	Religi

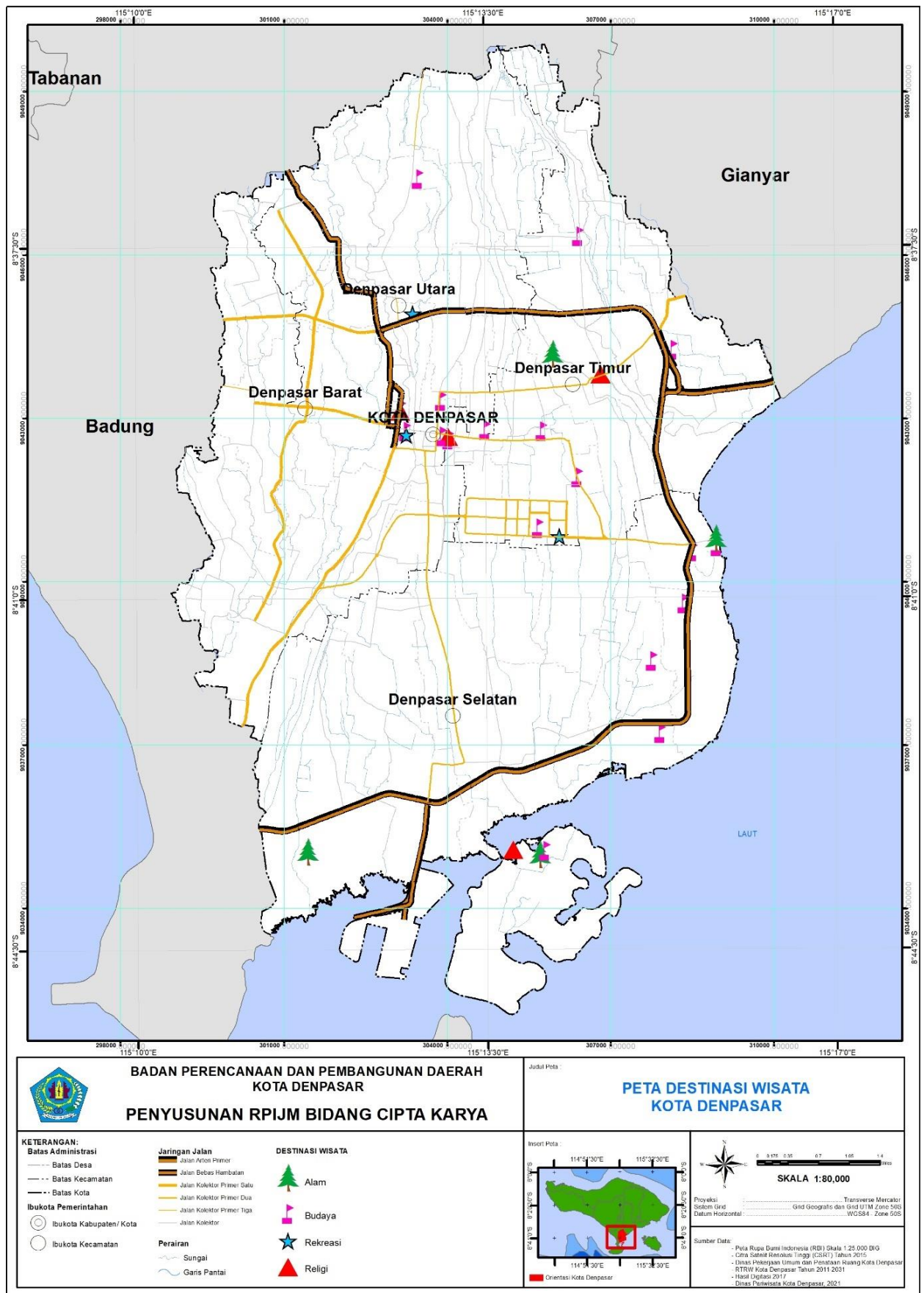
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan Hasil analisis, 2021

Selain destinasi wisata yang termasuk dalam KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua, Kota Denpasar juga memiliki beberapa destinasi wisata di luar kawasan KSPN diantaranya adalah destinasi wisata Tukad Bindu, Desa Budaya Kertalangu, Subak Sembung, Desa Wisata Penatih, Taman Kota Lumintang, dan Pura Petilan Pengrebongan. Berikut merupakan tabel destinasi wisata di Kota Denpasar diluar KSPN.

Tabel 3. 32. Destinasi Wisata Kota Denpasar di luar KSPN

No	Destinasi Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Tukad Bindu	Alam
2	Desa Budaya Kertalangu	Budaya
3	Subak Sembung	Budaya
4	Desa Wisata Penatih	Budaya
5	Taman Kota Lumintang	Rekreasi
6	Pura Petilan Pengrebongan	Religi

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar dan Hasil analisis, 2021



Gambar 3. 40. Sebaran Destinasi Wisata Kota Denpasar

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan kategori RTH Kota Denpasar dikelompokkan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik dikategorikan 20% (dua puluh perseratus) dari luas wilayah kota mencakup taman kota, taman rekreasi, taman pinggir jalan (jalur hijau), lapangan olah raga, pemakaman, setra, estuary dam, sempadan pantai, sempadan sungai, hutan kota, persawahan ekowisata, dan Tahura Ngurah Rai. RTH privat dikategorikan 16% (enam belas perseratus) mencakup kebun, sawah dan RTH permukiman, budaya, dan perkantoran.

Tabel 3. 33. RTH Publik dan Privat di Kota Denpasar

No	Kepemilikan RTH	Kecamatan				Persentase (%)
		Denpasar Utara	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Selatan	
I	RTH PUBLIK					
1	Taman banjar/ perumahan	33.800	40.450	30.940	52.090	0,12
2	Taman desa/ kelurahan	32.450	52.450	40.025	42.530	0,13
3	Taman Kota	24.588	156.573	37.520	23.383	0,19
4	Hutan Kota	95.870	84.080	43.090	53.183	0,22
5	Lapangan olahraga terbuka	90.651	110.194	58.261	278.353	0,42
6	Jalur Hijau Jalan	49.049	90.406	30.713	62.514	0,18
7	RTH Sempadan Sungai	267.402	344.014	205.227	223.067	0,81
8	STH Sempadan Pantai	-	113.103	-	471.504	0,46
9	RTH dibawah jalur SUTT	-	68.547	399.448	465.955	0,73
10	Setra, Kubutan, Makam	3.943	25.804	108.626	68.807	0,16
11	RTH di kawasan Suci dan Tempat Suci	73.308	52.498	63.290	111.177	0,23
II	RTH PRIVAT					
1	Pekarangan rumah tinggal	3.642.302	1.685.200	2.813.300	3.204.500	8,88
2	Halaman perkantoran, pertokoan	355.700	208.900	525.900	615.900	1,33
3	Taman atap bangunan	5.230	6.202	3.380	4.809	0,02
4	Sawah (sabuk hijau)	5.459.149	5.336.625	1.785.151	4.294.817	13,20
5	Kebun (sabuk hijau)	1.091.829	800.493	192.425	644.222	2,13
6	Taman Hutan Raya				5.597.901	4,38
	Total	10.554.210	8.374.240	5.320.158	14.362.149	33,61

Sumber: Dokumen Identifikasi RTH di 4 Kecamatan di Kota Denpasar, 2017

4) Bangunan Cagar Budaya

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, di Kota Denpasar terdapat 3 (tiga) buah asset cagar budaya baik berupa benda cagar budaya maupun situs cagar budaya diantaranya adalah Prasasti Blanjong Sanur, Pura Maospahit Gerenceng, dan Hotel inna Bali Heritage. Prasasti Blanjong Sanur termasuk dalam klasifikasi benda cagar budaya yang berlokasi di sisi tenggara Pura Blanjong Sanur. Instansi atau pemilik benda cagar budaya Prasasti Blanjong Sanur adalah Masyarakat Banjr Blanjong Intaran Sanur, Masyarakat Adat Renon, Adat Cerancam Kesiman, Banjar Lantang Hidung.

Tabel 3. 34. Aset Cagar Budaya Kota Denpasar

No	Nama Aset Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Nama Instansi/ Pemilik Cagar Budaya	Lokasi	SK Penetapan Cagar Budaya
1	Prasasti Blanjong Sanur	Benda	Masyarakat Banjar Blanjong Intaran Sanur, Masyarakat Adat Renon, Adat Cerancam Kesiman, Banjar Lantang Hidung	Sisi Tenggara Pura Blanjong Sanur,	188.45/825/HK/2019 tentang Penetapan Prasasti Blanjong sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar
2	Pura Maospahit Gerenceng	Situs	Banjar Gerenceng dan Banjar Panti Gede serta Pengemponnya I Ketut Gede Sudiasna (Pemangku Pura)	Jl Sutomo No. 3 Denpasar	188.45/1460/hk/2019 tentang Penetapan Pura Maospahit Gerenceng Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar
3	Hotel Inna Bali Heritage	Situs	Inna Bali Hotel Business and Marketing	Jl Veteran No 3 Denpasar	188.45/1092/HK/2019 tentang Penetapan Hotel Inna Bali Heritage sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar.

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2021



a. Prasasti Blanjong

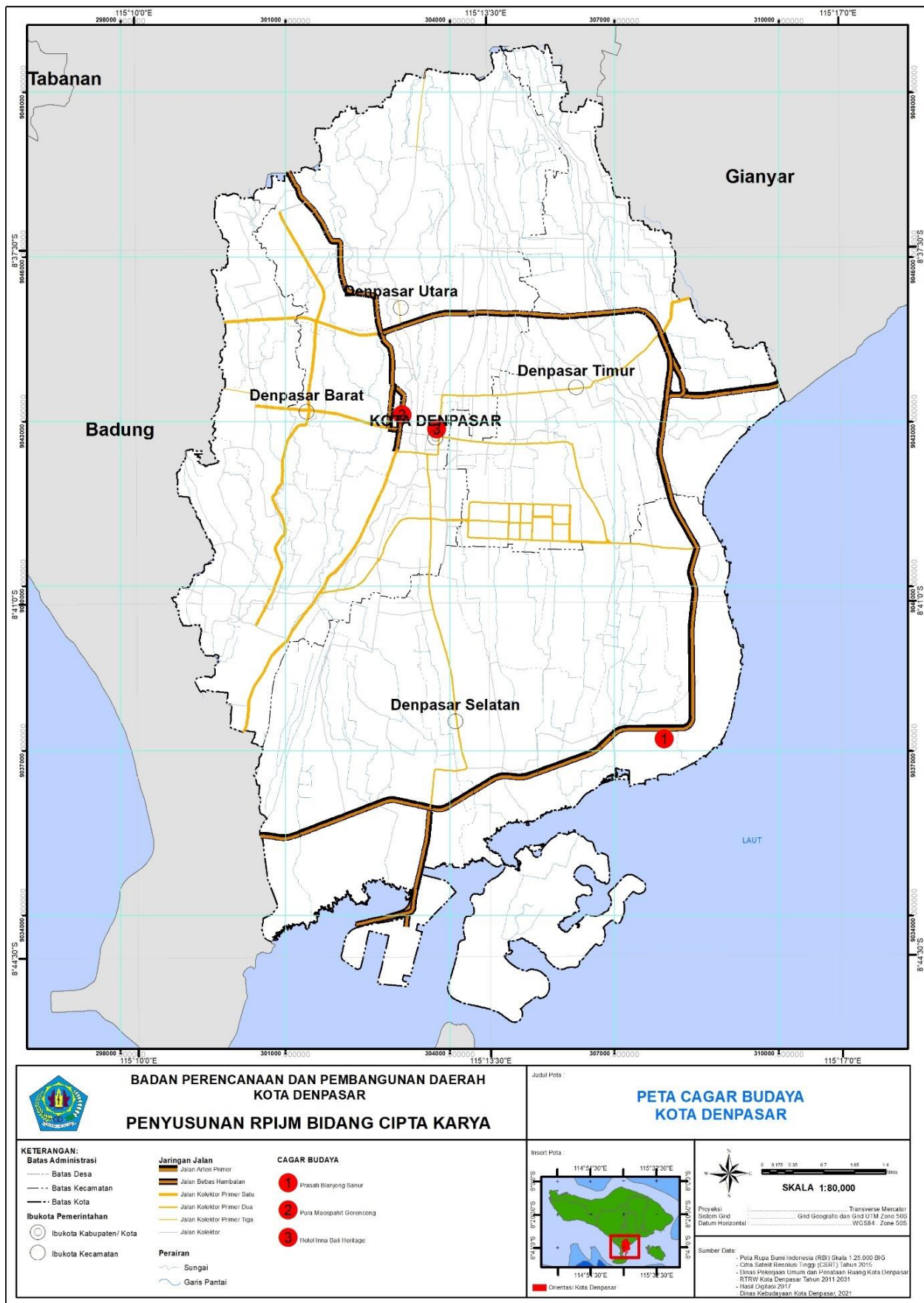


b. Pura Maospahit



c. Hotel Inna Bali Heritage

Gambar 3. 41. Aset Cagar Budaya Kota Denpasar



Gambar 3. 42. Peta Sebaran Aset Cagar Budaya Kota Denpasar

3.3. PROFIL KAWASAN TEMATIK

3.3.1. PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN (KUMUH)

Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdapat 10 (sepuluh) lokasi kumuh di Kota Denpasar yang tersebar di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara. Beberapa lokasi kumuh Kota Denpasar diantaranya Jematang, Catur Panca, Kerandan, Kawasan Pesanggaran -Suwung, Batan Poh, Tohpati, Panti Gede, Marga Jati, Belong Menak, dan Kawasan Karya Makmur.

Jumlah lokasi kawasan kumuh di Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 3 titik, diantaranya adalah lokasi kumuh Jematang, kumuh Catur Panca, dan kumuh Kerandan. Ketiga titik kumuh tersebut termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan status lahan legal. Kumuh Jematang berlokasi di Dusun Jematang Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh dengan luas kawasan sekitar 3.780 Ha, kawasan kumuh Catur Panca berlokasi di Lingkungan Catur Panca, Desa/ Kelurahan Dauh Puri dengan luas kawasan kumuh sekitar 0.140 ha, dan lokasi kumuh Kerandan berlokasi di Lingkungan Kerandan Desa/ Kelurahan Pemecutan dengan luas sekitar 0.280 Ha.

Jumlah lokasi kumuh di Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebanyak 2 lokasi yaitu kumuh Pesanggaran – Suwung dan Kumuh Batan Poh. Kawasan Kumuh Pesanggaran- Suwung merupakan kawasan kumuh terluas di Kota Denpasar dengan luas sekitar 25.200 ha, kawasan kumuh Pesanggaran- Suwung ini berlokasi di Lingkungan Pesanggaran, Desa/ Kelurahan Pedunganan. Kawasan kumuh Pesanggaran – Suwung termasuk dalam kategori kumuh sedang dengan prioritas B3. Sedangkan kumuh Batan Poh berlokasi di Dusun Batan Poh Desa/ Kelurahan Sanur Kaja dengan luas kawasan sekitar 0.580 Ha termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan prioritas C5.

Lokasi kumuh di Kecamatan Denpasar Timur berjumlah satu titik yaitu Kawasan Kumuh Tohpati yang berlokasi di Dusun Tohpati, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu dengan luas kawasan kumuh sekitar 0.620 Ha. Kawasan kumuh Tohpati termasuk dalam kategori kumuh ringan dan prioritas C3.

Lokasi kumuh di Kecamatan Denpasar Utara adalah sebanyak 4 titik yaitu kumuh Panti Gede, Marga Jati, Belong Menak, dan Kawasan Karya Makmur. Keempat kawasan kumuh tersebut termasuk dalam kategori kumuh ringan. Kawasan kumuh Panti Gede berlokasi di Dusun Panti Gede, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kaja dengan luas kawasan kumuh sekitar 0.520 Ha. Kawasan Kumuh Marga Jati berlokasi di Dusun Margajati, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kaja dengan luas kawasan kumuh sekitar 0.680 Ha. Kawasan kumuh Belong Menak berlokasi di Dusun Belong Menak, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kaja dengan luas sekitar 1.120 Ha. Dan kawasan kumuh Karya Makmur berlokasi di Dusun Petangan Gede dan Dusun Pemangkalan Desa/ Kelurahan Ubung Kaja dengan luas 17.600 Ha.

Tabel 3. 35. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Denpasar

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Kependudukan		Kekumuhan
			RT/RW	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan/Ha	
1	Jematang	3.780	Dusun Jemateng	Dauh Puri Kauh	Denpasar Barat	324	<150 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
2	Catur Panca	0.140	Lingkungan Catur Panca	Dauh Puri	Denpasar Barat	114	>400 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
3	Kerandan	0.280	Lingkungan Kerandan	Pemecutan	Denpasar Barat	140	>400 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
4	Kawasan Pesanggaran – Suwung	25.200	Lingkungan Pesanggaran	Pedungan	Denpasar Selatan	545	<150 jiwa/ Ha	Kumuh Sedang
5	Bantan Poh	0.580	Dusun Bantan Poh	Sanur Kaja	Denpasar Selatan	80	<150 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
6	Tohpati	0.620	Dusun Tohpati	Kesiman Ketalangu	Denpasar Timur	114	151-200 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
7	Panti Gede	0.520	Dusun Panti Gede	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	200	201-400 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
8	Marga Jati	0.680	Dusun Margajati	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	235	201-400 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
9	Belong Menak	1.120	Dusun Belong Menak	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	289	201-400 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
10	Kawasan Karya Makmur	17.600	Dusun Petangan Gede dan Dusun Pemangkalan	Ubung Kaja	Denpasar Utara	759	<150 jiwa/ Ha	Kumuh Ringan
Total Luasan Kumuh		50.520						

Sumber: Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh



a) Kawasan Kumuh Suwung



b) Kawasan Kumuh Karya Makmur



c) Kawasan Kumuh Jematang



d) Kawasan Kumuh Jematang

Gambar 3. 43. Lokasi Kumuh di Kota Denpasar

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan Pemerintah terkait Penangan Permukiman Kumuh dapat dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan penjabaran seperti pada table berikut:

Tabel 3. 36. Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penangan Permukiman Kumuh

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten atau Kota

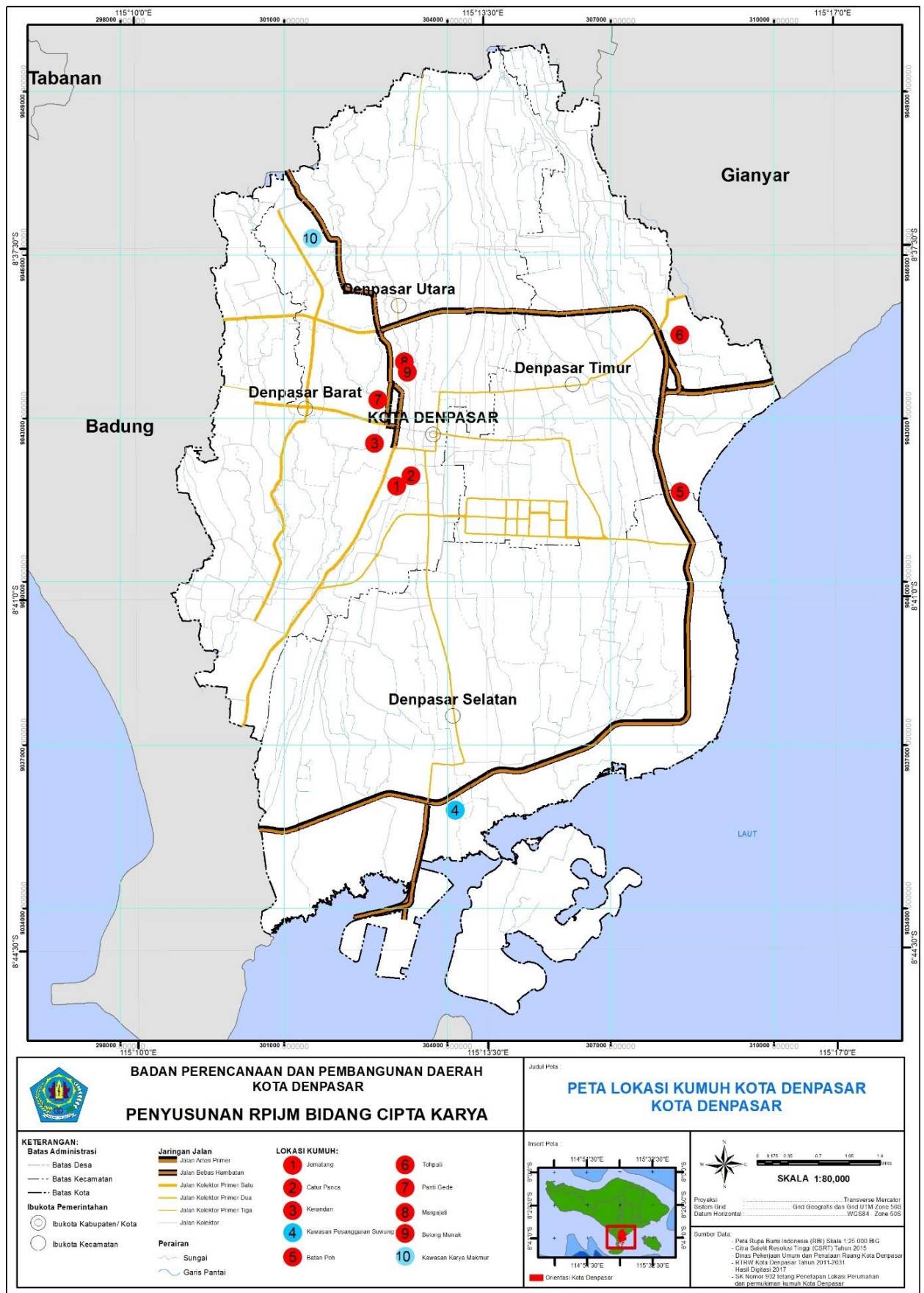
Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan data SK kumuh Kota Denpasar dan pembagian urusan pemerintah terkait penangan permukiman kumuh, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) lokasi kumuh di Kota Denpasar yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Pusat karena memiliki luas >15 Ha yaitu Kumuh Pesanggaran – Suwung dengan luas 25.200 Ha dan Kumuh Kawasan Karya Makmur dengan luas 17.600 Ha. Sedangkan 8 (delapan) lokasi kumuh lainnya merupakan urusan/ kewenangan Pemerintah Kota Denpasar karena memiliki luas di bawah 10 Ha. Tabel Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 37. Lokasi Kumuh berdasarkan Kewenangan Penanganan

No	Lokasi Kumuh	Luas Ha
Kewenangan Pusat		
1	Kawasan Pesanggaran – Suwung	25.200
2	Kawasan Karya Makmur	17.600
Kewenangan Kota		
1	Jematang	3.780
2	Catur Panca	0.140
3	Kerandan	0.280
4	Batan Poh	0.580
5	Tohpati	0.620
6	Panti Gede	0.520
7	Marga Jati	0.680
8	Belong Menak	1.120

Sumber: SK 188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh



Gambar 3. 44. Peta Titik Kumuh Kota Denpasar

3.4. ISU STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN DI KOTA DENPASAR

Isu strategis bidang permukiman merupakan hasil diskusi atas telaah kajian dokumen terhadap kondisi factual/ eksisting di daerah yang sesuai dengan arah kebijakan. Isu strategis dirumuskan melalui diskusi di daerah, antara lain dapat berupa:

- a. Isu pengembangan wilayah seperti perekonomian, iklim dan kebencanaan, lingkungan, maupun gender
- b. Isu tematik kawasan bidang infrastruktur permukiman, seperti penyelenggaraan air minum, sanitasi, sarana pendidikan, sarana olahraga dan pasar, penataan kawasan, maupun penataan bangunan dan lingkungan
- c. Pembahasan isu strategis yang terdapat pada dokumen perencanaan baik dokumen kebijakan, spasial, maupun sectoral.

1) Isu Strategis Air Minum

- a. Terbatasnya kapasitas produksi dan kapasitas terpasang sumber air
- b. Rendahnya cakupan layanan air minum perpipaan
- c. Kerjasama regional pengelolaan air minum belum berjalan dengan baik
- d. Masih banyaknya masyarakat menggunakan sumur bor dan sumur dangkal sebagai sumber air bersih

2) Isu Strategis Persampahan

- a. Pengurangan sampah di sumber belum berjalan dengan baik
- b. Beberapa TPS 3 R tidak menjalankan fungsi 3R
- c. Keterbatasan prasarana dan sarana pemindahan serta pengangkutan sampah
- d. Kapasitas TPA Suwung sudah penuh, dan rencana penutupan TPA Suwung
- e. Penggalakan pembentukan TPS 3R untuk mengelola sampah dari sumber

3) Isu Strategis Air Limbah

- a. Cakupan layanan DSDP masih rendah
- b. Keterbatasan lahan untuk pengembangan IPAL Komunal
- c. Septiktank limbah tinja swadaya masyarakat belum memenuhi standar teknis
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah (masih ada BABS)
- e. Masih banyak masyarakat yang membuang limbah ke sungai

4) Isu Strategis Drainase

- a. Keadaan topografi Kota Denpasar dan banyaknya genangan
- b. Multi fungsi saluran drainase, saluran air limbah, saluran irigasi
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan drainase

- d. Sistem Sarana dan Prasarana drainase belum berfungsi dengan baik dan belum terintegrasi

5) Isu Strategis Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar

- a. Belum ada Sport Center kawasan Kota
- b. Pengelolaan pasar belum baik
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Belum Memadi

6) Isu Strategis Kawasan Perkotaan

- a. Permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang berada di lahan sewa
- b. Standar kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman yang berada di KSN

7) Isu Strategis Penataan Bangunan Lingkungan

- a. Status lahan pada lokasi pentaan
- b. Ketidakteraturan bangunan
- c. Sarana dan Prasarana proteksi kebakaran belum ada
- d. Tenaga Ahli/teknis penataan bangunan masih kurang

3.5. IDENTIFIKASI KAWASAN PRIORITAS

Identifikasi kawasan prioritas dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi wilayah di dalam suatu kota yang lebih membutuhkan penanganan. Selain itu identifikasi kawasan prioritas juga menjadi salah satu strategi untuk menyusun suatu perencanaan dan pembiayaan yang lebih efisien dan akurat sesuai kebutuhan.

Dalam penentuan kawasan prioritas pengembangan infrastruktur kawasan permukiman, didapatkan dari hasil overlay beberapa peta seperti:

1. Lokasi arahan kebijakan pembangunan, spasial, dan sectoral
2. Kondisi eksisting infrastruktur kawasan permukiman yang terdiri dari kondisi infrastruktur air minum, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan
3. Kawasan rawan air dan sanitasi
4. Arahan pembangunan permukiman tematik
5. Kawasan prioritas pembangunan pemerintah daerah

Dalam penentuan kawasan prioritas pengembangan infrastruktur kawasan permukiman, dilakukan pembobotan pada setiap kecamatan dengan kreteria penilaian sebagai berikut:

1. **Rawan air minum** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan :
 - 4 = Resiko Sangat Tinggi;
 - 3 = Resiko Tinggi;
 - 2 = Resiko Sedang;
 - 1 = Resiko Rendah;
 - 0 = Tidak Beresiko/ Tidak Rawan
2. **Rawan air limbah** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 4 = Resiko Sangat Tinggi;
 - 3 = Resiko Tinggi;
 - 2 = Resiko Sedang;
 - 1 = Resiko Rendah;
 - 0 = Tidak Beresiko/ Tidak Rawan
3. **Rawan persampahan** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 4 = Resiko Sangat Tinggi;
 - 3 = Resiko Tinggi;
 - 2 = Resiko Sedang;
 - 1 = Resiko Rendah;
 - 0 = Tidak Beresiko/ Tidak Rawan
4. **Rawan drainase** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 4 = Resiko Sangat Tinggi;
 - 3 = Resiko Tinggi;
 - 2 = Resiko Sedang;
 - 1 = Resiko Rendah;
 - 0 = Tidak Beresiko/ Tidak Rawan
5. **Permukiman** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = Tercantum dalam RTRWK sebagai kawasan peruntukan permukiman;
 - 0 = Tidak Tercantum dalam RTRWK sebagai kawasan peruntukan permukiman
6. **Kumuh** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 3 = Tercantum dalam SK Kumuh, kumuh berat;
 - 2 = Tercantum dalam SK Kumuh, kumuh sedang,
 - 1 = Tercantum dalam SK Kumuh, kumuh ringan,
 - 0 = tidak tercantum dalam SK Kumuh
7. **Kawasan Strategis Nasional (KSN)** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = masuk dalam deliniasi KSN;
 - 0 = tidak masuk dalam deliniasi KSN

8. **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = masuk dalam deliniasi KSPN;
 - 0 = tidak masuk dalam deliniasi KSPN
9. **Pembangunan Cipta Karya** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - -1 = sudah pernah ada pembangunan CK (APBN);
 - 0 = belum pernah ada pembangunan CK (APBN)
10. **Hutan Lindung** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - -1 = masuk kedalam kawasan hutan lindung;
 - 0 = tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung
11. **Arahan Air Minum** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = kecamatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan dalam dokumen perencanaan sectoral dan kesepakatan FGD;
 - 0 = kecamatan tidak termasuk kedalam lokasi arahan penanganan
12. **Arahan Air Limbah** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = kecamatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan dalam dokumen perencanaan sectoral dan kesepakatan FGD;
 - 0 = kecamatan tidak termasuk kedalam lokasi arahan penanganan
13. **Arahan Persampahan** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = kecamatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan dalam dokumen perencanaan sectoral dan kesepakatan FGD;
 - 0 = kecamatan tidak termasuk kedalam lokasi arahan penanganan
14. **Arahan Drainase** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = kecamatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan dalam dokumen perencanaan sectoral dan kesepakatan FGD;
 - 0 = kecamatan tidak termasuk kedalam lokasi arahan penanganan
15. **Arahan Permukiman** : kecamatan diberi skor dengan ketentuan
 - 1 = kecamatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan dalam dokumen perencanaan sectoral dan kesepakatan FGD;
 - 0 = kecamatan tidak termasuk kedalam lokasi arahan penanganan)

Setelah melakukan proses skoring pada setiap variable, masing-masing kecamatan mendapatkan nilai skor skoring. Setelah itu nilai total tersebut dibagi menjadi tiga kelas, untuk kelas dengan nilai tertinggi merupakan Prioritas 1, kelas dengan nilai sedang merupakan Prioritas 2, dan kelas dengan nilai rendah merupakan Prioritas 3.

3.5.1. PEMBOBOTAN/ SCORING

Dalam tahap ini pembobotan dilakukan pada setiap kecamatan. Sehingga pembobotan mengenai variable-variabel yang telah ditentukan diatas akan diuraikan berdasarkan kecamatan- kecamatan di Kota Denpasar.

1) Kecamatan Denpasar Selatan

- a. **Variabel Rawan Air Minum:** Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan air di Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari kawasan rawan air kategori sedang, rendah, dan tidak rawan. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air sedang. Bobot rawan air minum pada Kecamatan Denpasar Selatan adalah (2);
- b. **Variabel Rawan Air Limbah:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar keseluruhan wilayah di Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam rawan air limbah kategori resiko sangat rendah. Bobot rawan air limbah di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);
- c. **Variabel Rawan Persampahan:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam kategori tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan persampahan kategori tinggi. Bobot rawan persampahan di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (3);
- d. **Variabel Rawan Drainase:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam kategori resiko rendah dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan drainase rendah. Bobot rawan drainase di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (2);
- e. **Variabel Permukiman:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Denpasar Selatan merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan peruntukan permukiman. Sehingga bobot variable permukiman di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);
- f. **Variabel Kumuh:** Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat satu kawasan kumuh yang termasuk dalam kategori Kumuh Sedang yaitu Kawasan Pesanggaran – Suwung dan satu kawasan kumuh ringan yaitu Kawasan Bantan Poh di Desa Sanur Kaja. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi kekumuhan yang digunakan dalam pembobotan adalah yang

memiliki tingkat kekumuhan lebih tinggi. Sehingga kekumuhan yang digunakan dalam pembobotan ini adalah kumuh sedang. Bobot kekumuhan di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (2)

- g. **Variabel Kawasan Strategis Nasional:** Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RTRWN tersebut, seluruh Kawasan Kota Denpasar termasuk Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam kawasan Staretgis Nasional Sarbagita. Sehingga bobot variable Kawasan Strategis Nasional pada Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);
- h. **Variabel KSPN:** Berdasarkan deliniasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur-Nusa Dua, Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam Kawasan KSPN tersebut. Sehingga bobot variable KSPN pada Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1)
- i. **Variabel Pembangunan Cipta Karya:** Berdasarkan dari pelaksanaan Tahun 2020 Pembangunan Cipta karya yang bersuber dari dana APBN di Kecamatan Denpasar Selatan adalah Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua. Sehingga bobot variable pembangunan cipta karya di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (-1);
- j. **Variabel Hutan Lindung:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, tidak terdapat kawasan hutan lindung di Kota Denpasar, melainkan Kawasan Taman Hutan Raya. Sehingga bobot variable Hutan Lindung pada Kecamatan Denpasar Selatan adalah (0);
- k. **Variabel Arahan Air Minum:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Selatan tidak termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sector air minum di Kota Denpasar. Sehingga bobot arahan air minum di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (0);
- l. **Variabel Arahan Air Limbah:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Selatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan air limbah. Sehingga bobot variable arahan air limbah di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);
- m. **Variabel Arahan Persampahan:** Kecamatan Denpasar Selatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan persampahan terutama adalah Pembangunan dan Pengadaan TPS 3R. sehingga bobot variable arahan persampahan di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);
- n. **Variabel Arahan Drainase:** Kecamatan Denpasar Selatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sistem drainase. Sehingga bobot variable arahan drainase di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);

- o. **Variabel Arahkan Permukiman:** Kecamatan Denpasar Selatan termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan terkait permukiman, baik untuk kawasan kumuh maupun pengembangan kawasan permukiman. Sehingga bobot variabel arahan permukiman di Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1);

Tabel 3. 38. Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Selatan

No	Variabel	Bobot
1	Rawan Air	2
2	Rawan Air Limbah	1
3	Rawan Persampahan	3
4	Rawan Drainase	2
5	Permukiman	1
6	Kumuh	2
7	Kawasan Strategis Nasional	1
8	KSPN	1
9	Pembangunan Cipa Karya	-1
10	Hutan Lindung	0
11	Arahan Air Minum	0
12	Arahan Air Limbah	1
13	Arahan Persampahan	1
14	Arahan Drainase	1
15	Arahan Permukiman	1
Total Skor		16

Sumber: Hasil analisis, 2021

2) Kecamatan Denpasar Timur

- a. **Variabel Rawan Air Minum:** Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan air di Kecamatan Denpasar Timur terdiri dari kawasan rawan air kategori rendah, dan tidak rawan. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air rendah. Bobot rawan air minum pada Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- b. **Variabel Rawan Air Limbah:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar keseluruhan wilayah di Kecamatan Denpasar Timur termasuk dalam rawan air limbah kategori rawan sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air limbah yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Bobot rawan air limbah di Kecamatan Denpasar Timur adalah (4);
- c. **Variabel Rawan Persampahan:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur termasuk dalam kategori tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan adalah yang

memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan persampahan kategori tinggi. Bobot rawan persampahan di Kecamatan Denpasar Timur adalah (3);

- d. **Variabel Rawan Drainase:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur termasuk dalam kategori resiko rendah dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan drainase rendah. Bobot rawan drainase di Kecamatan Denpasar Timur adalah (2);
- e. **Variabel Permukiman:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Denpasar Timur merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan peruntukan permukiman. Sehingga bobot variable permukiman di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- f. **Variabel Kumuh:** Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, di Kecamatan Denpasar Timur terdapat satu kawasan kumuh yang termasuk dalam kategori Kumuh Ringan yaitu Kawasan Tohpati di Desa Kesiman Kertalangu. Sehingga bobot kekumuhan di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- g. **Variabel Kawasan Strategis Nasional:** Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RTRWN tersebut, seluruh Kawasan Kota Denpasar termasuk Kecamatan Denpasar Timur termasuk dalam kawasan Staretgis Nasional Sarbagita. Sehingga bobot variable Kawasan Strategis Nasional pada Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- h. **Variabel KSPN:** Berdasarkan deliniasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur-Nusa Dua, Kecamatan Denpasar Timur termasuk dalam Kawasan KSPN tersebut. Sehingga bobot variable KSPN pada Kecamatan Denpasar Selatan adalah (1)
- i. **Variabel Pembangunan Cipta Karya:** Berdasarkan dari pelaksanaan Tahun 2020 Pembangunan Cipta karya yang bersumber dari dana APBN di Kecamatan Denpasar Timur adalah Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium Media Rekam ISI Denpasar. Sehingga bobot variable pembangunan cipta karya di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1)
- j. **Variabel Hutan Lindug:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, tidak terdapat kawasan hutan lindung di Kota Denpasar, melainkan Kawasan Taman Hutan Raya. Sehingga bobot variable Hutan Lindung pada Kecamatan Denpasar Timur adalah (0);

- k. **Variabel Arahan Air Minum:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Timur termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sector air minum di Kota Denpasar. Sehingga bobot arahan air minum di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- l. **Variabel Arahan Air Limbah:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Timur termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan air limbah. Sehingga bobot variable arahan air limbah di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- m. **Variabel Arahan Persampahan:** Kecamatan Denpasar Timur termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan persampahan terutama adalah Pembangunan dan Pengadaan TPS 3R. sehingga bobot variable arahan persampahan di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- n. **Variabel Arahan Drainase:** Kecamatan Denpasar Timur termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sistem drainase. Sehingga bobot variable arahan drainase di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);
- o. **Variabel Arahan Permukiman:** Kecamatan Denpasar Timur termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan terkait permukiman, baik untuk kawasan kumuh maupun pengembangan kawasan permukiman. Sehingga bobot variable arahan permukiman di Kecamatan Denpasar Timur adalah (1);

Tabel 3. 39. Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Timur

No	Variabel	Bobot
1	Rawan Air	1
2	Rawan Air Limbah	4
3	Rawan Persampahan	3
4	Rawan Drainase	2
5	Permukiman	1
6	Kumuh	1
7	Kawasan Strategis Nasional	1
8	KSPN	0
9	Pembangunan Cipa Karya	-1
10	Hutan Lindung	0
11	Arahan Air Minum	1
12	Arahan Air Limbah	1
13	Arahan Persampahan	1
14	Arahan Drainase	1
15	Arahan Permukiman	1
Total Skor		17

Sumber: Hasil analisis, 2021

3) Kecamatan Denpasar Barat

- a. **Variabel Rawan Air Minum:** Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan air di Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari kawasan rawan air kategori sedang, rendah, dan tidak rawan. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air sedang. Bobot rawan air minum pada Kecamatan Denpasar Barat adalah (2);
- b. **Variabel Rawan Air Limbah:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar keseluruhan wilayah di Kecamatan Denpasar Barat termasuk dalam rawan air limbah kategori resiko tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air limbah yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air limbah tinggi. Bobot rawan air limbah pada Kecamatan Denpasar Barat adalah (3);
- c. **Variabel Rawan Persampahan:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat termasuk dalam kategori rawan persampahan sangat tinggi, tinggi, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan persampahan kategori sangat tinggi. Bobot rawan persampahan di Kecamatan Denpasar Barat adalah (4);
- d. **Variabel Rawan Drainase:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan termasuk dalam kategori rawan drainase sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan drainase sangat tinggi. Bobot rawan drainase di Kecamatan Denpasar Barat adalah (4);
- e. **Variabel Permukiman:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Denpasar Barat merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan peruntukan permukiman. Sehingga bobot variable permukiman di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);
- f. **Variabel Kumuh:** Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, di Kecamatan Denpasar Barat terdapat 3 kawasan kumuh yang termasuk dalam kategori Kumuh Ringan yaitu Kawasan Jematang Desa Dauh Puri Kauh, Kawasan Catur Panca Kelurahan Dauh Puri, dan Kawasan Kerandan Kelurahan Pemecutan. Bobot variable kumuh di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);

- g. **Variabel Kawasan Strategis Nasional:** Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RTRWN tersebut, seluruh Kawasan Kota Denpasar termasuk Kecamatan Denpasar Barat termasuk dalam kawasan Staretgis Nasional Sarbagita. Sehingga bobot variable Kawasan Strategis Nasional pada Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);
- h. **Variabel KSPN:** Berdasarkan deliniasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur-Nusa Dua, sebagian besar Kecamatan Denpasar Barat tidak termasuk dalam Kawasan KSPN tersebut. Sehingga bobot variable KSPN pada Kecamatan Denpasar Barat adalah (0);
- i. **Variabel Pembangunan Cipta Karya:** Tidak ada pembangunan CK di Kecamatan Denpasar Barat yang bersumber dari APBN. Sehingga bobot variable pembangunan cipta karya di Kecamatan Denpasar Barat adalah (0);
- j. **Variabel Hutan Lindung:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, tidak terdapat kawasan hutan lindung di Kota Denpasar, melainkan Kawasan Taman Hutan Raya. Sehingga bobot variable Hutan Lindung pada Kecamatan Denpasar Barat adalah (0);
- k. **Variabel Arahan Air Minum:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Barat tidak termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sector air minum di Kota Denpasar. Sehingga bobot arahan air minum di Kecamatan Denpasar Barat adalah (0);
- l. **Variabel Arahan Air Limbah:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Barat termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan air limbah. Sehingga bobot variable arahan air limbah di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);
- m. **Variabel Arahan Persampahan:** Kecamatan Denpasar Barat termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan persampahan terutama adalah Pembangunan dan Pengadaan TPS 3R. sehingga bobot variable arahan persampahan di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);
- n. **Variabel Arahan Drainase:** Kecamatan Denpasar Barat termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sistem drainase. Sehingga bobot variable arahan drainase di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);
- o. **Variabel Arahan Permukiman:** Kecamatan Denpasar Barat termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan terkait permukiman, baik untuk kawasan kumuh maupun pengembangan

kawasan permukiman. Sehingga bobot variabel arahan permukiman di Kecamatan Denpasar Barat adalah (1);

Tabel 3. 40. Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Barat

No	Variabel	Bobot
1	Rawan Air	2
2	Rawan Air Limbah	3
3	Rawan Persampahan	4
4	Rawan Drainase	4
5	Permukiman	1
6	Kumuh	1
7	Kawasan Strategis Nasional	1
8	KSPN	1
9	Pembangunan Cipa Karya	0
10	Hutan Lindung	0
11	Arahan Air Minum	0
12	Arahan Air Limbah	1
13	Arahan Persampahan	1
14	Arahan Drainase	1
15	Arahan Permukiman	1
Total Skor		21

Sumber: Hasil analisis, 2021

4) Kecamatan Denpasar Utara

- a. **Variabel Rawan Air Minum:** Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan air di Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari kawasan rawan air kategori sedang, rendah, dan tidak rawan. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air sedang. Bobot rawan air minum pada Kecamatan Denpasar Utara adalah (2);
- b. **Variabel Rawan Air Limbah:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar keseluruhan wilayah di Kecamatan Denpasar Utara termasuk dalam rawan air limbah kategori resiko sangat tinggi, tinggi, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini, kondisi rawan air yang digunakan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan air limbah yang digunakan dalam proses pembobotan ini adalah rawan air sangat tinggi. Bobot rawan air limbah pada Kecamatan Denpasar Utara adalah (4);
- c. **Variabel Rawan Persampahan:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Utara termasuk dalam kategori tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan persampahan yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan persampahan yang digunakan dalam

pembobotan ini adalah rawan persampahan kategori tinggi. Bobot rawan persampahan di Kecamatan Denpasar Utara adalah (3);

- d. **Variabel Rawan Drainase:** Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Utara termasuk dalam kategori resiko rendah dan sangat rendah. Dalam analisis kawasan prioritas ini kondisi rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan adalah yang memiliki potensi rawan paling tinggi. Sehingga rawan drainase yang digunakan dalam pembobotan ini adalah rawan drainase rendah. Bobot rawan drainase di Kecamatan Denpasar Utara adalah (2);
- e. **Variabel Permukiman:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Denpasar Utara merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan peruntukan permukiman. Sehingga bobot variable permukiman di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- f. **Variabel Kumuh:** Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/932/HK/2020 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, di Kecamatan Denpasar Utara terdapat empat kawasan kumuh yang termasuk dalam kategori Kumuh Ringan yaitu Kawasan Panti Gede, Marga Jati, Belong Menak pada Desa Pemecutan Kaja, dan Kawasan Karya Makmur di Desa Ubung Kaja. Bobot kekumuhan di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1)
- g. **Variabel Kawasan Strategis Nasional:** Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RTRWN tersebut, seluruh Kawasan Kota Denpasar termasuk Kecamatan Denpasar Utara termasuk dalam kawasan Staretgis Nasional Sarbagita. Sehingga bobot variable Kawasan Strategis Nasional pada Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- h. **Variabel KSPN:** Berdasarkan deliniasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta – Sanur-Nusa Dua, sebagian besar Kecamatan Denpasar Utara tidak termasuk dalam Kawasan KSPN tersebut. Sehingga bobot variable KSPN di Kecamatan Denpasar Utara adalah (0);
- i. **Variabel Pembangunan Cipta Karya:** Tidak ada pembangunan CK di Kecamatan Denpasar Barat yang bersementer dari APBN. Sehingga bobot variable pembangunan cipta karya di Kecamatan Denpasar Utara adalah (0);
- j. **Variabel Hutan Lindung:** Berdasarkan RTRW Kota Denpasar, tidak terdapat kawasan hutan lindung di Kota Denpasar, melainkan Kawasan Taman Hutan Raya. Sehingga bobot variable Hutan Lindung pada Kecamatan Denpasar Utara adalah (0);

- k. **Variabel Arah Air Minum:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Utara termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sector air minum di Kota Denpasar. Sehingga bobot arahan air minum di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- l. **Variabel Arah Air Limbah:** Berdasarkan dokumen sectoral serta hasil diskusi, Kecamatan Denpasar Utara termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan air limbah. Sehingga bobot variable arahan air limbah di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- m. **Variabel Arah Persampahan:** Kecamatan Denpasar Utara termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan persampahan terutama adalah Pembangunan dan Pengadaan TPS 3R. sehingga bobot variable arahan persampahan di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- n. **Variabel Arah Drainase:** Kecamatan Denpasar Utara termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan sistem drainase. Sehingga bobot variable arahan drainase di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);
- o. **Variabel Arah Permukiman:** Kecamatan Denpasar Utara termasuk kedalam lokasi yang akan mengalami penanganan terkait permukiman, baik untuk kawasan kumuh maupun pengembangan kawasan permukiman. Sehingga bobot variabel arahan permukiman di Kecamatan Denpasar Utara adalah (1);

Tabel 3. 41. Pembobotan Variabel di Kecamatan Denpasar Utara

No	Variabel	Bobot
1	Rawan Air	2
2	Rawan Air Limbah	4
3	Rawan Persampahan	3
4	Rawan Drainase	2
5	Permukiman	1
6	Kumuh	1
7	Kawasan Strategis Nasional	1
8	KSPN	0
9	Pembangunan Cipa Karya	0
10	Hutan Lindung	0
11	Arahan Air Minum	1
12	Arahan Air Limbah	1
13	Arahan Persampahan	1
14	Arahan Drainase	1
15	Arahan Permukiman	1
Total Skor		19

Sumber: Hasil analisis, 2021

Tabel 3. 42. Rekap pembobotan variabel masing-masing kecamatan di Kota Denpasar

WADMKK	WADMKC	RAIR	RLIMBAH	RSAMPAH	RDRAINASE	PERMUKIMAN	KUMUH	KSN	KSPN	PEMCK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	2	3	4	4	1	1	1	1	0
	DENPASAR SELATAN	2	1	3	2	1	2	1	1	-1
	DENPASAR TIMUR	1	4	3	2	1	1	1	0	-1
	DENPASAR UTARA	2	4	3	2	1	1	1	0	0

Lanjutan..

WADMKK	WADMKC	HLINDUNG	ARAIR	ARLIMBAH	ARSAMPAH	ARDRAINASE	ARPERMUKIMAN	TOTAL	KWSPRIO
		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	0	0	1	1	1	1	21	Prioritas 1
	DENPASAR SELATAN	0	0	1	1	1	1	16	Prioritas 3
	DENPASAR TIMUR	0	1	1	1	1	1	17	Prioritas 3
	DENPASAR UTARA	0	1	1	1	1	1	19	Prioritas 2

Berdasarkan hasil overlay dan skoring/ pembobotan masing-masing kriteria, maka diperoleh total skor masing-masing kecamatan di Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Denpasar Barat : 21
- 2) Denpasar Utara : 19
- 3) Denpasar Timur : 17
- 4) Denpasar Selatan : 16

Dari total skor tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu:

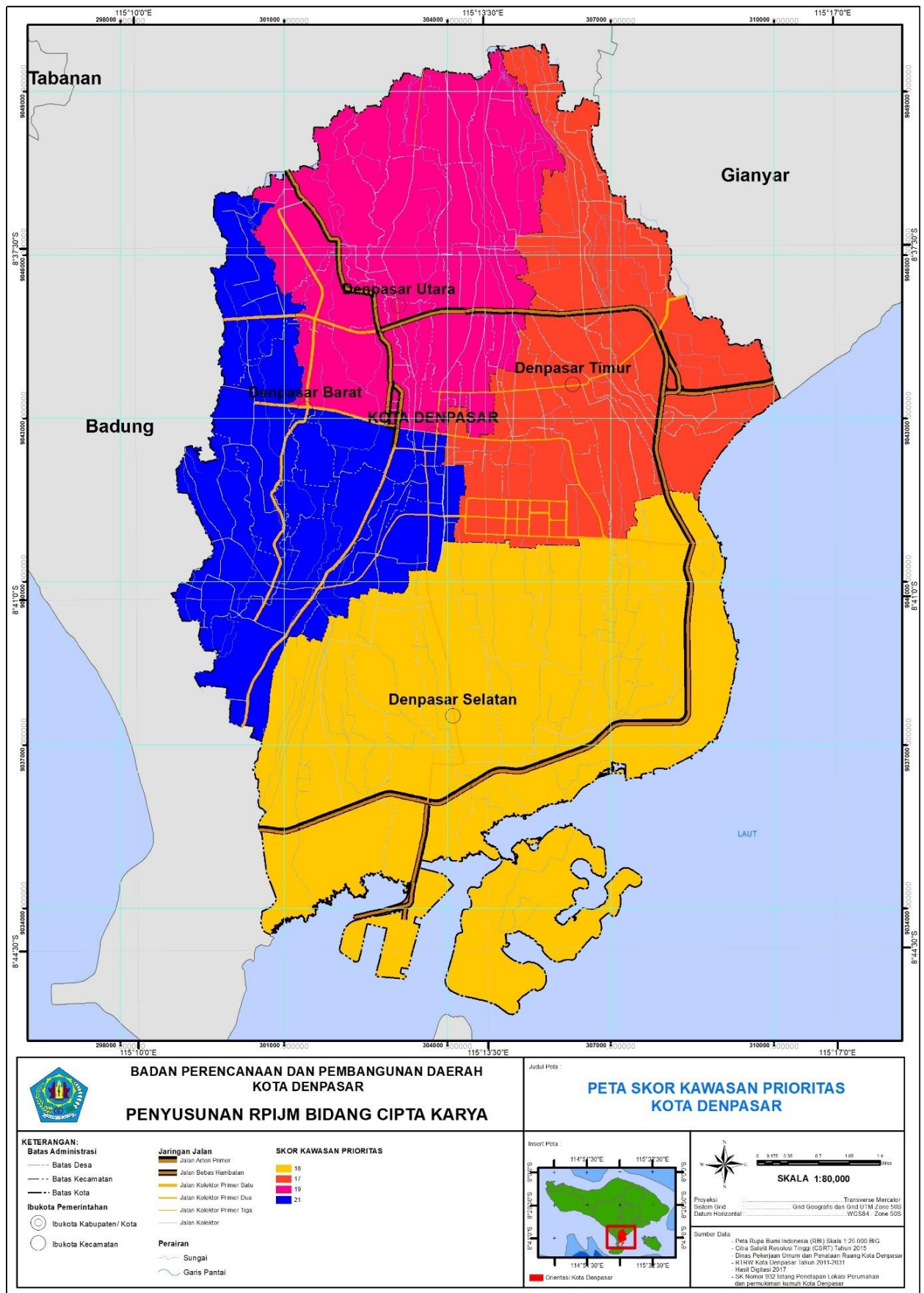
Tabel 3. 43. Kawasan Prioritas Kota Denpasar

No	Skor	Kelas	Kecamatan
1	20-21	Prioritas 1	Denpasar Barat
2	18-19	Prioritas 2	Denpasar Utara
3	16-17	Prioritas 3	Denpasar Timur dan Denpasar Selatan

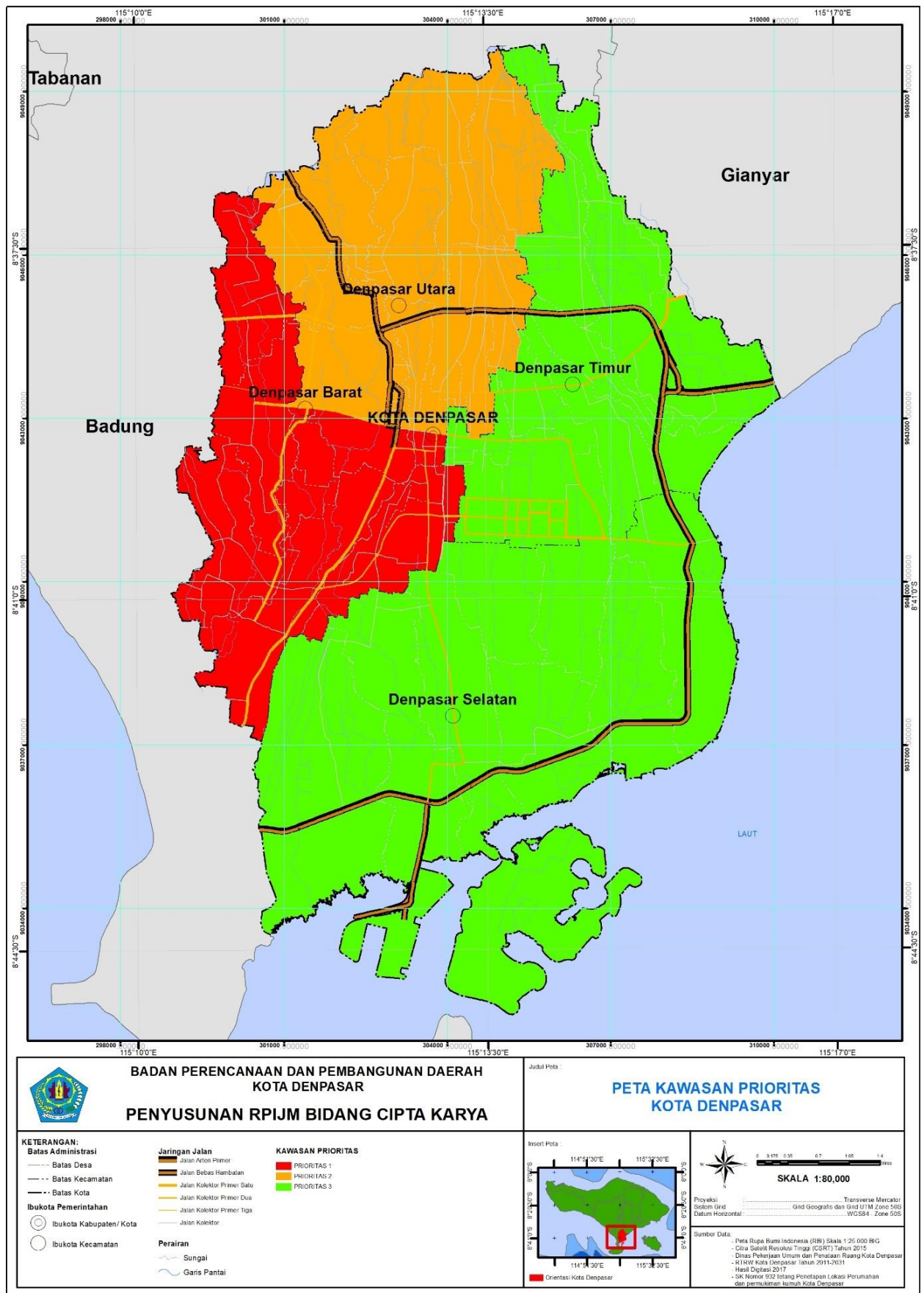
Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Denpasar Barat merupakan kawasan prioritas 1 di Kota Denpasar, yang artinya Kecamatan Denpasar Barat merupakan wilayah yang menjadi prioritas 1 dalam penanganan infrastruktur permukiman baik persampahan, drainase, limbah, air minum, dan infrastruktur lainnya atau dengan kata lain Kecamatan Denpasar Barat merupakan wilayah yang lebih membutuhkan penanganan infrastruktur dibandingkan kecamatan lainnya.

Sedangkan Kecamatan Denpasar Utara merupakan Kawasan prioritas 2 di Kota Denpasar yang artinya Kecamatan Denpasar Utara merupakan wilayah yang menjadi prioritas 2 dalam penanganan infrastruktur permukiman. Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan merupakan kawasan prioritas 3 yang artinya kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah yang menjadi prioritas 3 dalam penanganan infrastruktur di Kota Denpasar.



Gambar 3. 45. Peta Skor Total Pembobotan Kawasan Prioritas



Gambar 3. 46. Peta Kawasan Prioritas Kota Denpasar



BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN

4.1. ANALISIS KEBIJAKAN DAN RENCANA KEBUTUHAN

4.1.1. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR AIR MINUM

Pada sub-bab ini dilakukan proses penarikan kesimpulan kebijakan setelah proses pengisian arahan kebijakan perencanaan pembangunan, spasial, dan sektoral pada Bab 2 dan kondisi eksisting pada Bab 3 yang terkait dengan arahan pengembangan air minum. Peningkatan akses air minum perpipaan seluruh Indonesia untuk 10 juta sambungan rumah dengan strategi pengembangan untuk menyediakan air baku bagi kawasan perkotaan dan KSPN (Sanur- Kuta-Nusa Dua) merupakan arahan kebijakan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan sumber air tentu mengharapkan kerjasama yang terintegrasi SPAM Bali Bagian Selatan yang diamanatkan RPJMN, RTRW Provinsi Bali dan RTRW kota dapat segera terwujud.

Tabel 4. 1. Kebijakan Sektor Air Minum

No	Kebijakan Pengembangan Air Minum 2020-2024	Strategi Pengembangan Air Minum 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none">Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s.Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN)Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang	Kota Denpasar sbg KSN Perkotaan Sarbagita dan sbg Destinasi KSPN Sanur-Kuta-Nusa Dua	Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024
2	Pengembangan SPAM terpadu Wilayah Bali Selatan yang terintegrasi dengan SPAM Kawasan Perkotaan Sarbagita	Pengembangan SPAM Kabupaten/ Kota oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terintegrasi dengan SPAM lintas Kabupaten/ Kota	Kawasan Metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan	Perda 3/2020 tentang perubahan Perda 16/2009 ttg RTRW Provinsi Bali
3	Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota..	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang telah ada;	Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar	Perda 27 Tahun 2011 ttg RTRW Kota Denpasar

No	Kebijakan Pengembangan Air Minum 2020-2024	Strategi Pengembangan Air Minum 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan air baku Estuary Dam; • pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku. 	Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat	
4	Peningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat	Mengembangkan sistem penyediaan air minum, melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat	Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor Air Minum difokuskan kepada pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Perumusan sasaran program sektor Air Minum dilakukan sesuai dengan tabel 4.1 berikut. Kondisi eksisting cakupan pelayanan air minum sebesar 75.672 SR dengan sasaran program pada tahun 2025 sebesar 96.672 SR maka kapasitas terpasang dan kapasitas produksi air yang diperlukan sebesar 1.073 l/dt dengan asumsi kebutuhan air per orang per hari 125/or/hari dengan kebocoran 20 %.

Tabel 4. 2. Perumusan Sasaran Program Sektor Air Minum

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SPAM Jaringan Perpipaan						
	Kapasitas Terpasang	833 L/det	878	911	965	1019	1073
	Kapasitas Produksi	845 L/det	878	911	965	1019	1073
	<i>Idle Capacity</i>	-12 L/det	0	0	0	0	0
	Kebocoran	%	20	20	20	20	20
	Cakupan Pelayanan penduduk	75.672 SR	78.672	81672	86672	91672	96672
2	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan						
	Cakupan Pelayanan penduduk	Jiwa					

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor Air Minum yang dijabarkan setiap tahunnya senagiman tercantum pada tabel 4.3 . Sesuai dengan sasaran program tersebut pada tabel 4.2, maka rencana pengembangan kebutuhan air pada tahun 2021 sebesar 32,55 l/t menjadi 54,25 l/dt pada tahun 2025

Tabel 4. 3. Usulan Kebutuhan Program Sektor Air Minum

NO	USULAN KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA PENGEMBANGAN				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SPAM Regional						
	1.Wilayah...	L/det					
2	SPAM Non Regional						
	1.Kota Denpasar	L/det	32,55	32,55	54,25	54,25	54,25
	2.Kecamatan..	L/det					
	3.Desas...	L/det					
3	SPAM Kawasan Khusus						
	1.Kawasan...	L/det					
	2.Kawasan...	L/det					

4.1.2. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR SANITASI

Pada sub-bab ini dilakukan proses penarikan kesimpulan kebijakan setelah proses pengisian arahan kebijakan perencanaan pembangunan, spasial, dan sektoral pada Bab 2 dan kondisi eksisting pada Bab 3 yang terkait dengan arahan pengembangan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4. Kebijakan Sektor Sanitasi

No	KebijakanPengembangan Sanitasi 2020-2024	Strategi Pengembangan Sanitasi 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar :	Mengembangkan SPALD-S, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman; TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD);	Kota Denpasar sebagai kota inti Wilayah Metropolitan Sarbagita	Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024
2	Pengembangan infrastruktur drainase, persampahan dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan operasional pemeliharaan drainase Meningkatkan sistem jaringan sanitasi bagi masyarakat. 	Wilayah Kota Denpasar	Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar
3	Peningkatan akses pengelolaan air limbah skala offsite setempat maupun terpusat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem offsite melalui sistem komunal dan terpusat	Kota Denpasar	Dokumen SSK
4	Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah dan optimalisasi sarana prasarana pengelolaan sampah Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan 	Kota Denpasar	Masterplan Persampahan Kota Denpasar

a. Sektor Air Limbah

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor Air Limbah difokuskan kepada pengembangan SPALD T, SPALD S dan IPLT. Perumusan sasaran program Sektor Air Limbah dilakukan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 5. Perumusan Sasaran Program Sektor Air Limbah

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat						
	Cakupan Pelayanan SPALD Terpusat						
	i. Jumlah pelanggan	9.554 SR	9724	10024	10524	11024	11524
	ii. % terlayani	6,08%	6,19	6,38	6,70	7,01	7,33
	Kapasitas terpakai	m3/hari					
	Idle Capacity	m3/hari					
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat						
	Cakupan pelayanan penduduk	%					
	Kapasitas IPLT	m3/hari					
	Sistem Pengolahan Air Limbah pada IPLT						

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor Air Limbah yang dijabarkan setiap tahunnya. Adapun rencana pengembangan program sektor air limbah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.6

Tabel 4. 6. Usulan Kebutuhan Program Sektor Air Limbah

NO	USULAN KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA PENGEMBANGAN				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SPAL terpusat						
	1. SPAL terpusat skala Kota	SR/ Kawasan	170	300	500	500	500
	2. SPAL terpusat skala Kawasan	SR/ Kawasan		700	1662		
	3.Desa...	SR/ Kawasan					
2	SPAL Komunal						
	1.SPAL Komunal...	SR/ Kawasan					
	2.SPAL Komunal...	SR/ Kawasan					
3	IPLT						
	1.Pembangunan IPLT...	m3/hari					
	2.Optimalisasi IPLT...						

b. Sektor Persampahan

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor persampahan difokuskan kepada pengolahan di sumber, pengangkutan dan pengolahan di akhir. Perumusan sasaran program sektor persampahan dilakukan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 7. Perumusan Sasaran Program Sektor Persampahan

NO	Renc. Kebutuhan Penanganan	Kondisi Eksisting	Sasaran Program Kegiatan				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengolahan Sampah di Sumber						
	Persentase sampah diolah di sumber (%)	0,90	0,90	1,92	2,34	2,60	2,84
	Jumlah sampah diolah di	9.688	9.688	21.073	26.165	29.559	32.954

NO	Renc. Kebutuhan Penanganan	Kondisi Eksisting	Sasaran Program Kegiatan				
			2021	2022	2023	2024	2025
	sumber (m3)						
2	Pengangkutan Sampah						
	Cakupan Pelayanan Pengangkutan sampah(%)	99,10	99,10	98,08	97,66	97,40	97,16
3	Pengolahan Sampah di TPA						
	Persentase Sampah diolah di TPA (%)	99,10	99,10	98,08	97,66	97,40	97,16
	Jumlah Sampah diolah di TPA (m3)	1.068.720	1.068.720	1.077.143	1.092.222	1.109.369	1.126.893
	Metode Pengolahan sampah di TPA	SLF	SLF	SLF	SLF	SLF	SLF

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor Persampahan yang dijabarkan setiap tahunnya. Sasaran kebutuhan program pada Tabel 4.7 tersebut diatas dengan asumsi jumlah timbulan sampah dengan standar produksi sampah 4 liter/orang/hari; 1 Unit TPS 3 R melayani 500 KK setara dengan 2500 penduduk; dan 1 TPST melayani 500 KK setara dengan 2500 penduduk. Berdasarkan laporan dari TPS 3 R Bungtomo, TPS 3 R Suwung dan TPST Kertalangu diperoleh rata-rata pengurangan sampah di TPS 3R hanya 46,5 % dari sampah yang masuk, dan pengurangan sampah di TPST 79,42 % dari sampah yang masuk; sisanya (residu) harus diangkut ke TPA.

Rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program sampai dengan tahun 2025 dibutuhkan sesuai dengan tercantum pada Tabel 4.8 berikut

Tabel 4. 8. Rincian Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program Untuk Pencapaian Sasaran Program Sektor Persampahan

NO	Rencana Kebutuhan Penanganan	EKSISTING	Rencana Pengembangan				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengolahan Sampah di Sumber						
	TPST	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
	TPS 3R	6 unit	6 unit	9 unit	11 unit	13 unit	15 unit
B	Pengangkutan Sampah						
	Fasilitas Pengolahan Sampah Sementara						
	Fasilitas Pengangkutan Sampah						
	i. Gerobak Sampah						
	ii. Motor Sampah	28 unit	28 unit	31 unit	34 unit	37 unit	40 unit
	iii. Dump Truck	67 unit	67 unit	70 unit	73 unit	76 unit	79 unit
	iv. Armroll Truck						
	v. Compactor Truck	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit
	vi. Street Sweeper Truck	1 unit	1 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit
	vii. Trailler						
C	Pengolahan Sampah di TPA						
	Pengadaan Alat berat di TPA						
	i. Excavator	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	ii. Bulldozer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

NO	Rencana Kebutuhan Penanganan	EKSISTING	Rencana Pengembangan				
			2021	2022	2023	2024	2025
D	Pemindahan Sampah di TPS						
	Wheel Loader	4 unit	4 unit	6 unit	7 unit	8 unit	9 unit
	Excavator mini			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Buldozer mini			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

c. Sektor Drainase

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor drainase difokuskan kepada penanganan saluran drainase pada jalan lingkungan permukiman. Perumusan sasaran program sektor drainase dilakukan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 9. Perumusan Sasaran Program Sektor Drainase

NO	Renc. Kebutuhan Penanganan	Kondisi Eksisting	Sasaran Program Kegiatan				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase saluran jalan lingkungan yang ditangani (%)	0	0	0,17	0,56	0,91	1,35
2	Jumlah saluran jalan lingkungan yang ditangani (m)	0	0	1465	4965	8015	11840

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor drainase yang dijabarkan setiap tahunnya. Adapun Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program Untuk Pencapaian Sasaran Program Sektor drainase sebagaimana tercantum pada Tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4. 10. Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program Untuk Pencapaian Sasaran Program Sektor drainase

NO	Rencana Kebutuhan Penanganan	EKSISTING	Rencana Pengembangan				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase saluran jalan lingkungan yang ditangani (%)	0	0	0,17	0,39	0,35	0,44
2	Panjang saluran jalan lingkungan yang ditangani (m)	0	0	1465	3500	3050	3825

4.1.3. PERUMUSAN KEBIJAKAN SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pada sub-bab ini dilakukan proses penarikan kesimpulan kebijakan setelah proses pengisian arahan kebijakan perencanaan pembangunan, spasial, dan sektoral pada Bab 2 dan kondisi eksisting pada Bab 3 yang terkait dengan arahan pengembangan sektor penataan bangunan dan lingkungan.

Tabel 4. 11. Kebijakan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Kebijakan Pengemb. Tata Bangunan dan Lingkungan 2020-2024	Strategi Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung melalui IMB dan SLF dengan dukungan TA BG, pengkaji teknis, dan SIM BG b. Peningkatan kualitas bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi BGN c. Peningkatan bantuan teknis Pengelola Teknis di daerah	Kota Denpasar	Dokumen Rnstra Ditjen Cipta Karya
2	pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan	menyelaraskan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, pemerintahan, pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan serta kegiatan permukiman untuk mendukung peran Kota Denpasar sebagai Pusat kegiatan Nasional	Kota Denpasar	Perda RTRW Kota Denpasar
3	Peningkatan layanan penilaian kesesuaian standar teknis pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah	a. Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi IMB/PBG b. Peningkatan kinerja layanan penerbitan SLF	Kota Denpasar	Rancangan Renstra DPUPR Kota Denpasar

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor Bina Penataan Bangunan difokuskan kepada penataan kantor pemerintah kota Denpasar. Perumusan sasaran program Bina Penataan Bangunan dilakukan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 12. Perumusan Sasaran Program Bina Penataan Bangunan

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah unit kantor pemerintah yang ditata (unit)	0	0	5	10	15	20

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor Bina Penataan Bangunan yang dijabarkan setiap tahunnya. Adapun rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk sasaran program sektor penataan bangunan tercantum pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 13. Rincian Usulan Hasil Identifikasi Kebutuhan Program Untuk Pencapaian Sasaran Program Sektor Bina Penataan Bangunan

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah unit kantor pemerintah yang ditata (unit)	0	0	5	5	5	5

4.1.4. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN KAWASAN TEMATIK

Pada sub-bab ini dilakukan proses penarikan kesimpulan kebijakan setelah proses pengisian arahan kebijakan perencanaan pembangunan, spasial, dan sektoral pada Bab 2 dan kondisi eksisting pada Bab 3 yang terkait dengan arahan penanganan kawasan tematik, seperti penanganan kumuh perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan khusus.

Tabel 4. 14. Kebijakan Kawasan Permukiman

No	Kebijakn Pengemb. Kws Permukiman 2020-2024	Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman 2020-2024	Arahan Lokasi	Acuan Peraturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengentasan kawasan kumuh perkotaan	Melakukan penataan kawasan kumuh serta koordinasi dan sosialisasi guna penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Kota Denpasar	Rancangan Renstra Dinas Perkim dan Pertanahan
2	Pencegahan Permukiman Kumuh	a. Penetapan regulasi bangunan dan Lingkungan; b. Sosialisasi regulasi bangunan dan lingkungan; c. Pembinaan standar air minum yang sehat; d. Pemeliharaan saluran drainase secara berkala; e. Pembinaan program 3R; berbasis masyarakat; f. Pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis; g. Sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran	Kota Denpasar	Dokumen RKPKP Kota Denpasar
3	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	a. Pengaturan komponen keteraturan bangunan; b. Rehabilitasi bangunan gedung (bedah rumah); c. Perbaikan kualitas permukaan jalan (pavingisasi); d. Rehabilitasi unit penyedia air minum; e. Penambahan jalur pipa distribusi air; f. Pembangunan saluran baru dan normalisasi saluran yang telah ada; g. Penambahan tempat sampah sementara; h. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah; i. Pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran berupa motor damkar dan hydrant.	Kota Denpasar	Dokumen RKPKP Kota Denpasar

Kebutuhan infrastruktur permukiman sektor pengembangan kawasan permukiman difokuskan kepada pengurangan kawasan kumuh. Perumusan sasaran program penanganan kawasan tematik dilakukan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. 15. Perumusan Sasaran Program Penanganan Kawasan Tematik

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kawasan Kumuh Perkotaan						
	Seluruh Kawasan Kumuh	50,52 Ha	3,78 Ha	25,20 Ha	1,20 Ha	17,60 Ha	2,74 Ha

Usulan Kebutuhan Program berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor pengembangan Kawasan permukiman yang dijabarkan setiap tahunnya. Adapun Usulan Kebutuhan Program Penanganan Kawasan Tematik tercantum pada Tabel 4.16.

Tabel 4. 16. Usulan Kebutuhan Program Penanganan Kawasan Tematik

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Awasan Kumuh Perkotaan						
	Jematang	3,78 Ha	3,78 Ha				
	Catur Panca	0,14 H					0,14 Ha
	Kerandan	0,28 Ha					0,28 Ha
	Kawasan Pesanggaran Suwung	25,20 Ha		25,20 Ha			
	Batan Poh	0,58			0,58 Ha		
	Tohpati	0,62			0,62 Ha		
	Marga Jati	0,68					0,68 Ha
	Belong Menank	1,12					1,12 Ha
	Panti Gede	0,52					0,52
	Kawsan Karya Makmur	17,60				17,60	

4.2. STRATEGI PEMBANGUNAN SKALA REGIONAL

Setelah tersusun kebutuhan penanganan per sektor, dilakukan pengelompokkan strategi pembangunan sesuai dengan entitasnya. Strategi pembangunan skala regional disusun untuk penanganan infrastruktur permukiman yang melayani kawasan regional yakni kawasan Denpasar Badung Gianyar Tabanan (Sarbagita). Hanya ada satu sektor yang memiliki entitas regional yakni sektor sanitasi (air limbah) sebagaimana tercantum pada Tabel 4.17

Tabel 4. 17. Strategi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Skala Regional

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD prov	APBD Kab/ Kota	CSR	Swadaya/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penyediaan prasarana dan Sarana Air Limbah	Denpasar dan Badung	200 SP	2021	2,060,720,000	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan prasarana dan Sarana Air Limbah	Denpasar dan Badung	200 SP	2022	2,066,792,000	0	0	0	0	0	0	0
3	Penyediaan prasarana dan Sarana Air Limbah	Denpasar dan Badung	200 SP	2023	2,073,471,000	0	0	0	0	0	0	0

4.3. STRATEGI PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN/KOTA

Strategi pembangunan skala kabupaten/kota disusun untuk penanganan infrastruktur permukiman yang memiliki wilayah pelayanan mencakup beberapa kecamatan di dalam suatu kabupaten/kota. Berikut ini disampaikan Strategi Pembangunan Infrastruktur Skala Kabupaten/Kota, meliputi : infrastruktur air minum. Infrastruktur Sanitasi, infrastruktur permukiman dan bina penataan bangunan.

Tabel 4. 18. Strategi Pembangunan Infrastruktur Air Minum Skala Kabupaten/Kota

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD Prov	APBD Kab./Kota	CSR	Swassta/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KERTALANGU/ DENPASAR TIMUR	3000 SR	2022	0	4.095.449.000	0	0	0	0	0	0
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KESIMAN DKK/ DENPASAR TIMUR	3000 SR	2023	0	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DANGRI KANGIN DKK/ DENPASAR TIMUR	5000 SR	2024	0	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	UBUNG DKK/ DENPASAR UTARA	5000 SR	2025	0	16.500.000.000	0	0	0	0	0	0
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	UBUNG DKK/ DENPASAR UTARA	5000 SR	2025	0	17.500.000.000	0	0	0	0	0	0
6	Pengadaan dan pemasangan pipa dia. 600 mm (24") di Jl. Antasura - Jl. Nangka	PEGUYANGAN / DENPASAR UTARA	0	2022	103.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Pembuatan Sumur Bor (PDAM)	KOTA DENPASAR	1 UNIT	2022	0	0	0		1.188.000.000	0	0	0
	Pembuatan Prasedimentasi, Canal dan Optimalisasi Intake di IPA Ayung Belusung	PEGUYANGAN / DENPASAR UTARA	ltr/dt	2022	28.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. 19. Strategi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Skala Kabupaten/Kota

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD Prov	APBD Kab./Kota	CSR	Swassta/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
AIR LIMBAH												
1	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	SUMERTA DKK / DENPASAR TIMUR	170 KK	2022	0	0	1.778.000.000	0	0	0	0	0
2	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	PEGUYANGAN DKK / DENPASAR UTARA	300 KK	2023	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	0
3	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	UBUNG DKK / DENPASAR UTARA	500 KK	2024	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0
4	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	PENATIH DKK / DENPASAR UTARA	500 KK	2025	0	0	5.250.000.000	0	0	0	0	0
5	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	UBUNG KAJA DKK / DENPASAR UTARA	500 KK	2025	0	0	5.500.000.000	0	0	0	0	0
PERSAMPAHAN												
1	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	3 unit	2022	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	3 unit	2022	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	3 unit	2022	5.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	1 unit	2022	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	2 unit	2022	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	2 unit	2022	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	3 unit	2023	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Pengadaan Dump Truck	KOTA	3 unit	2023	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD Prov	APBD Kab./Kota	CSR	Swassta/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		DENPASAR										
9	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	2 unit	2023	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	1 unit	2023	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	2 unit	2023	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	1 unit	2023	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	3 unit	2024	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	3 unit	2024	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	2 unit	2024	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	1 unit	2024	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	2 unit	2024	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	1 unit	2024	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	3 unit	2025	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	3 unit	2025	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	2 unit	2025	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	1 unit	2025	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	2 unit	2025	3.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	1 unit	2025	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. 20. Strategi Pembangunan Infrastruktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Skala Kabupaten/Kota

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD Prov	APBD Kab./Kota	CSR	Swassta/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	Kota Denpasar	5	2022	0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	0
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	Kota Denpasar	5	2023	0	0	22.000.000.000	0	0	0	0	0
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	Kota Denpasar	5	2024	0	0	24.000.000.000	0	0	0	0	0
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	Kota Denpasar	5	2025	0	0	26.620.000.000	0	0	0	0	0
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	Kota Denpasar	5	2025	0	0	29.282.000.000	0	0	0	0	0
6	Penataan Bangunan di Kawasan Hijau Pemecutan Kelod	Pemecutan Kelod Denpasar Barat	0	2024	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0
7	Penataan Pasar Kumbasari	Dauh Puri, Denpasar Barat	1	2022	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Supervisi Penataan Kawasan Pasar Kumbasari	Dauh Puri Denpasar Barat	1	2022	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Pembangunan Lokasi Tempat Evakuasi Sementara	Sanur, Denpasar Selatan	0	2021	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua	Denpasar Selatan	0	2022	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	DED Revitalisasi Kawasan Sanur	Sanur, Denpasar Selatan	1	2022	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Supervisi Penataan Waduk Muara Nusa Dua	Denpasar Selatan	0	2022	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	Dauh Puri, Denpasar Barat	1	2022	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Supervisi Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	Dauh Puri, Denpasar Barat	1	2022	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	DED Penataan Lingkungan Permukiman tradisional bersejarah	Dauh Puri, Denpasar Barat	0	2022	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. 21. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Skala Kabupaten/Kota

No	Rincian Kebutuhan	Lokasi	Volume	Tahun Pelaksanaan	APBN	APBD Prov	APBD Kab./Kota	CSR	Swassta/ Masy.	DAK	KPBU	PHLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	Dangin Puri DKK, Denpasar Timur	1,500 m	2022	0	0	21.712.818.000	0	0	0	0	0
2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	Sumerta DKK, Denpasar Timur	10,000 m	2023	0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	0
3	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	Kesiman DKK, Denpasar Timur	10,000 m	2024	0	0	22.000.000.000	0	0	0	0	0
4	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	Kertalangu, Denpasar Timur	10,000 m	2025	0	0	24.000.000.000	0	0	0	0	0
5	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	Penatih DKK, Denpasar Timur	10,000 m	2025	0	0	26.000.000.000	0	0	0	0	0

4.4. STRATEGI PEMBANGUNAN SKALA KAWASAN

Perolehan strategi pembangunan kawasan prioritas harus berdasarkan proses identifikasi kawasan prioritas pada Bab 3.4. Dalam satu kawasan prioritas yang terpilih tersebut terlihat keterpaduan penanganan yang multi sektor dan multi potensi pendanaan. Berikut ini disampaikan Strategi Pembangunan Infrastruktur Skala Kawasan, meliputi : Kawasan Prioritas A, Kawasan Prioritas B, dan Kawasan Prioritas C

Tabel 4. 22. Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas A

No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	DED PS IPAL Komunal Skala Kawasan di Denpasar	100 KK	400.000.000	0	0	0	0	0	0
2	Pembangunan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Segina Kertapura	600 M	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Padangasambian Kaja	600 M	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0
		Pembangunan Drainase di Jl, Tangkuban Perahu, Jl, Gunung Payung	2,000 M	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Jl. P.Misol	1,000 M	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0
3	Persampahan	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan TPST	500 KK	0	0	0	0	0	0	800.000.000
4	Kawasan Permukiman	Pengawasan Teknik dan Supervisi pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Duah Puri Kauh, Denpasar Barat	00 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Duah Puri Kauh, Denpasar Barat	3 Ha	0	0	0	800.000.000	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan, Denpasar Barat	0 Ha	0	0	0	800.000.000	0	0	0
		Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	0 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0

No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pemecutan, Denpasar Barat								
		Pengawasan Teknis Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Dauh Puri Denpasar Barat	0 Ha	0	0	0	35.000.000	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Dauh Puri, Denpasar Barat	0 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Hijau	Penataan Bangunan di Kawasan Hijau Pemecutan Kelod	0 m2	0	0	0	250.000.000	0	0	0
	Pembangunan dan Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana, Prasarana Pasar	Penataan Kawasan Pasar Kumbasari	1 unit	15.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Penataan Kawasan Pasar Kumbasari	1 unit	400.000.000	0	0	0	0	0	0
	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	1 unit	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	1 unit	500.000.000	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. 23. Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas B

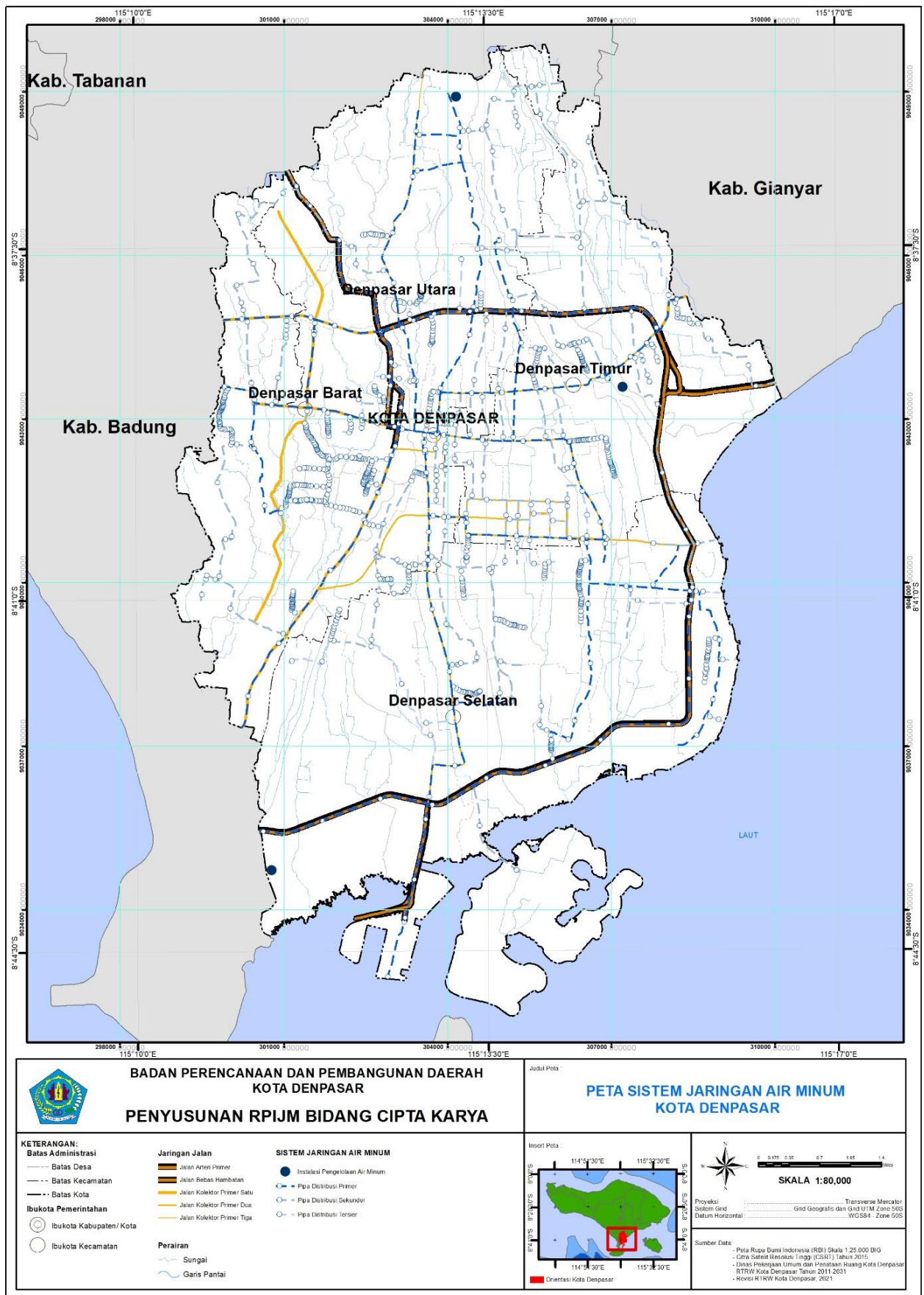
No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Cokroaminoto	00 KK	25.552.904.000	0	0	0	0	0	0
		Peningkatan Sistem Drainase di perumahan Jl. Gatsu IV dan sekitar Kelurahan Tonja	00 KK	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Pidada Kelurahan Ubung	500 M	0	0	0	1.250.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Pemecutan Kaja	700 M	0	0	0	1.750.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Kel. Peguyangan	1,500 M	0	0	0	3.750.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Dangin Puri Kangin	1,000 M	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0
2	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (Ubung Kaja)	500 KK	800.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (Ubung)	500 KK	800.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (Pemecutan Kaja)	500 KK	800.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Peremajaan Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Kumuh di Karya Makmur	17 Ha	50.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Karya Makmur	0.0 Ha	130.000.000	0	0	0	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Marga Jati), Kecamatan Denpasar Utara	0.0 Ha	0	0	0	800.000.000	0	0	0
		Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Marga Jati), Denpasar Utara	0.0 Ha		0	0	50.000.000	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Panti Gede), Kecamatan Denpasar Utara	0.0 Ha	0	0	0	8.000.000	0	0	0
		Pengawasan dan Teknik Supervisi	0.0 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0

No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Panti Gede), Denpasar Utara								
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Belong Menak), Kecamatan Denpasar Utara	1.00 Ha	0	0	0	850.000.000	0	0	0
		Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Belong Menak), Denpasar Utara	0.00 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0

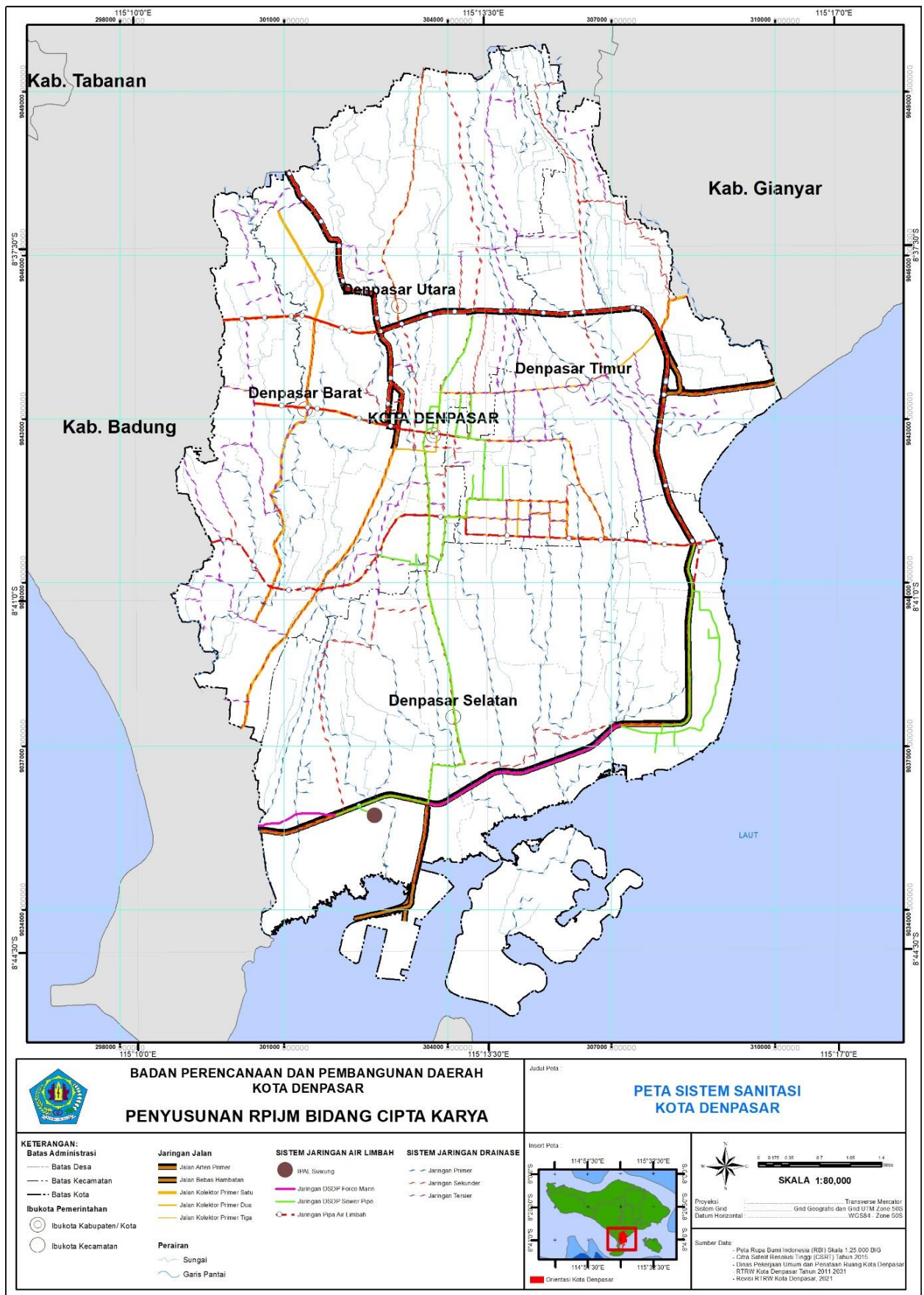
Tabel 4. 24. Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas C

No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pengembangan dan Peningkatan RID Pengelolaan Air Limbah Terpusat	0.00 KK	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembangunan PS Air Limbah Kawasan yang tidak terlayani DSDP	1662 KK	75.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		DED PS Air Limbah kawasan yang tidak terlayani DSDP	100 KK	250.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Kawasan yang tidak terlayani DSDP	1662 KK	650.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Pembangunan Jaringan Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pedungan Tahap II	700 KK	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		DED Jaringan Pipa Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pemogan	0.00 KK	950.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembangunan Jaringan Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pedungan Tahap II	700 KK	65.000.000.000	0	0	0	0	0	0
2	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	Supervisi Penanganan Drainase Bumi Ayu Sanur	0.00 KK	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
		Penanganan Sistem Drainase Bumi Ayu Sanur	0.00 KK	40.268.000.000	0	0	0	0	0	0
		Peningkatan Sistem Drainase di Jl. Gatot Subroto Timur, Kesiman Petilan	0.00 KK		0	0	600.000.000	0	0	0
		Normalisasi Alur Tukad Rangda	0.00 KK	18.250.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembuatan Drainase Lingkungan di kelurahan Seseetan, Panjer dan Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan	0.00 KK	500.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Pembuatan Drainase Lingkungan di kelurahan Seseetan, Panjer dan Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan	0.00 KK	98.000.000	0	0	0	0	0	0
		DED Pembangunan Drainase Bumi Ayu, Hayam Wuruk, Hang Tuah dan sekitarnya	0.00 KK	700.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Tukad Badung	265 M	0	0	0	662.500.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Sanur Kauh	1000 M	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa	550 M	0	0	0	1.375.000.000	0	0	0

No	Isu Kawasan	Rincian Kebutuhan	Keterangan	APBN	PHLN	APBD Prov	APBD Kota	CSR	Swasta/ Masy.	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sidakarya								
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Sumerta Kelod	1500 M	0	0	0	3.750.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Kesiman Kertalangu	1125 M	0	0	0	2.812.500.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Danau Tandano	2000 M	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0
		Pembangunan Saluran Drainase di Desa Penatih Dangin Puri	1000 M	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (Sanur Kaja)	500 KK	0	0	0	0	0	0	800.000.000
		Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (Panjer)	500 KK	800.000.000	0	0	0	0	0	0
4	Peremajaan Permukiman Kumuh	Penataan Kawasan Kumuh Pesanggaran-Suwung	25 Ha	8.900.000.000	0	0	0	0	0	0
		Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Pesanggaran- Suwung	0.00 Ha	200.000.000	0	0	0	0	0	0
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan	0.00 Ha	0	0	0	800.000.000	0	0	0
		Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan	0.00 Ha	0	0	0	50.000.000	0	0	0
5	Pembangunan Gedung Mitigasi Bencana	Pembangunan Lokasi Tempat Evakuasi Sementara	0.00 M2	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
6	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua	0.00 Kawasan	500.000.000	0	0	0	0	0	0
		DED Revitalisasi Kawasan Sanur	1 Kawasan	500.000.000	0	0	0	0	0	0
		Supervisi Penataan Waduk Muara Nusa Dua	0.00 Kawasan	400.000.000	0	0	0	0	0	0
		DED Penataan lingkungan permukiman tradisional bersejarah	0.00 Kawasan	500.000.000	0	0	0	0	0	0



Gambar 4. 1. Peta Sistem Jaringan Air Minum



Gambar 4. 2. Peta Sistem Sanitasi Kota Denpasar



BAB V

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

5.1. MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA 2021-2025

Setelah melakukan penentuan strategi pembangunan infrastruktur permukiman pada semua entitas berikut dengan strategi penanganannya pada bab sebelumnya, pada bagian bab ini merupakan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dari Kabupaten/Kota selama lima (5) tahun sebagaimana disajikan pada Lampiran : Matriks Rencana Program dan Investasi (RPIJM) Bidang Cipta Karya.

5.2. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

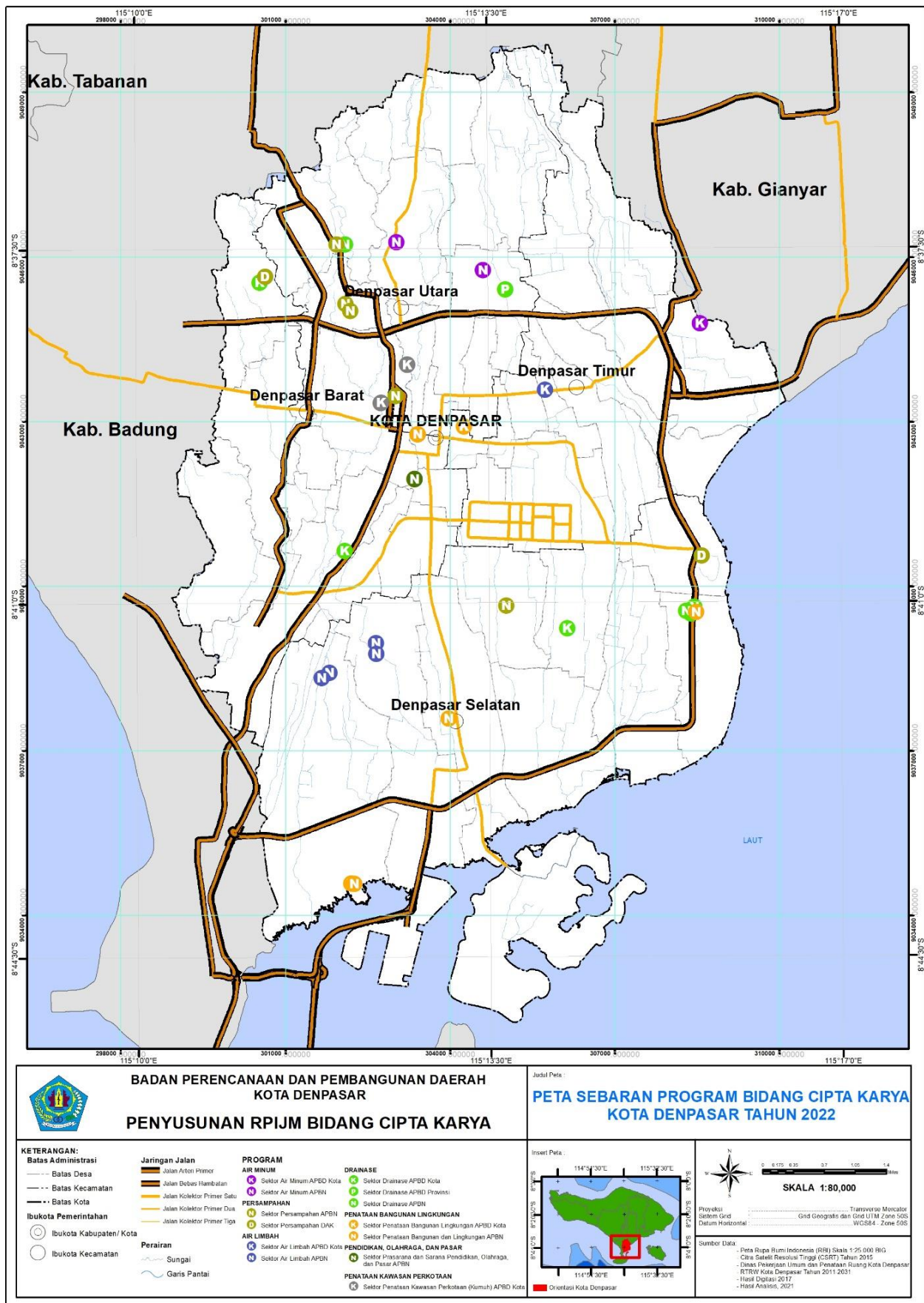
KPJM adalah Salah satu alat (tool) strategis untuk melakukan alokasi pendanaan belanja anggaran yang proses penyusunannya berdasarkan pada suatu kebijakan tertentu, yaitu keputusan yang akan menimbulkan implikasi belanja anggaran dimasa mendatang yang dituangkan dalam perkiraan maju dengan proyeksi jangka waktu yang lebih dari 1(satu) tahun anggaran (Permenkeu143/PMK-02/2015). Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Instrumen ini sudah diakomodir dalam sisitem informasi penganggaran (Sippa) yang dapat diakses secara online oleh masing-masing operator di daerah dan verifikator, sinkronisasi dipusat yang keluarannya dalam bentuk matriks KPJM. Matrik KPJM ini penting untuk memastikan ada jaminan pendanaan suatu kegiatan yang akan diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran atau diproses dalam *multiyears contract*. Matriks yang disusun saat ini menjadi data input pada aplikasi Sippa secara online.

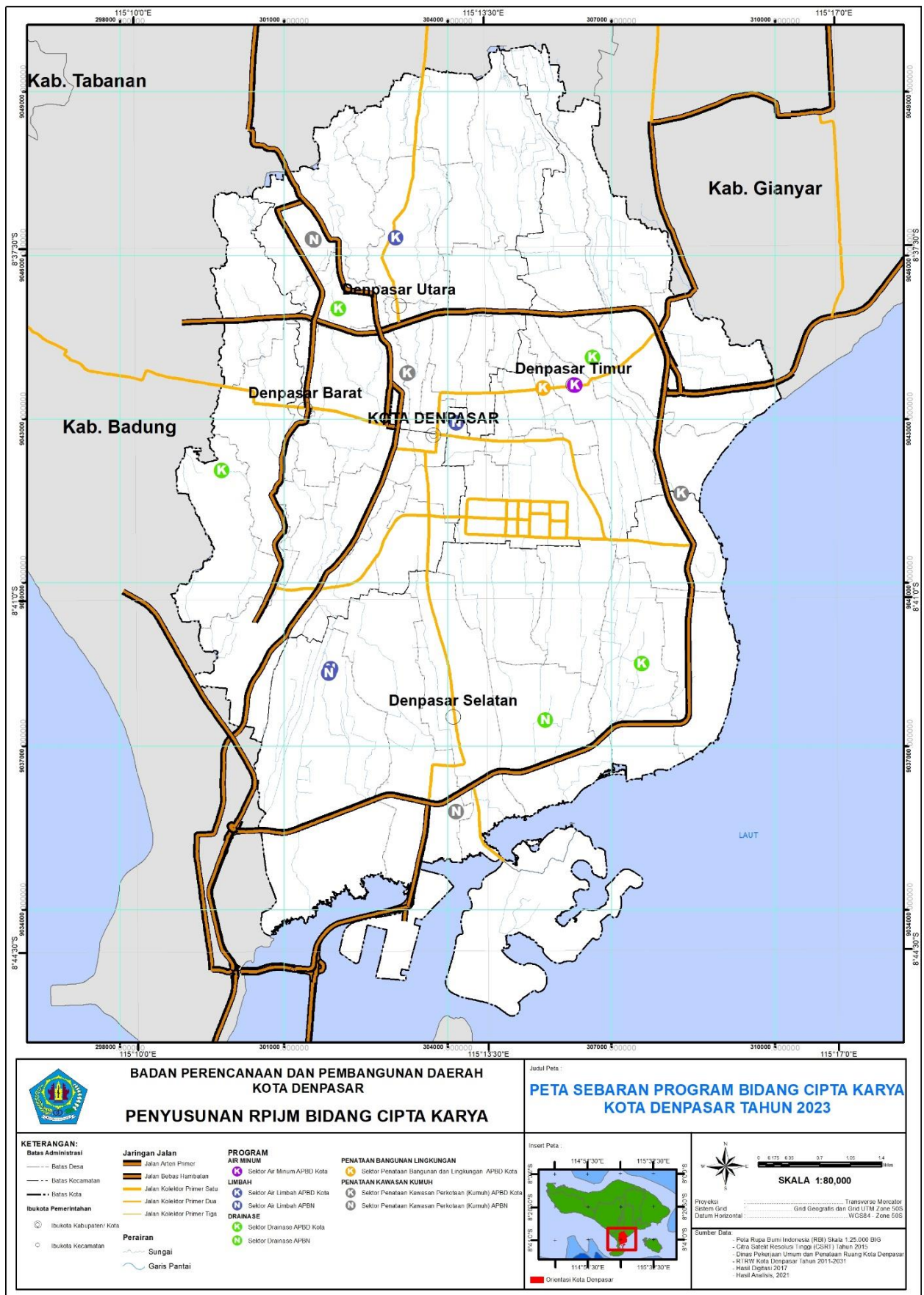
5.3. MEMORANDUM PROGRAM

Memorandum Program Bidang Cipta Karya merupakan aspek legalitas dari Matriks KPJM yang ditandatangani oleh masing-masing stakeholder (unsur pemerintah daerah, dan pemerintah pusat beserta sektor terkait bidang cipta karya. Adapun kriteria kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Memorandum Program, antara lain :

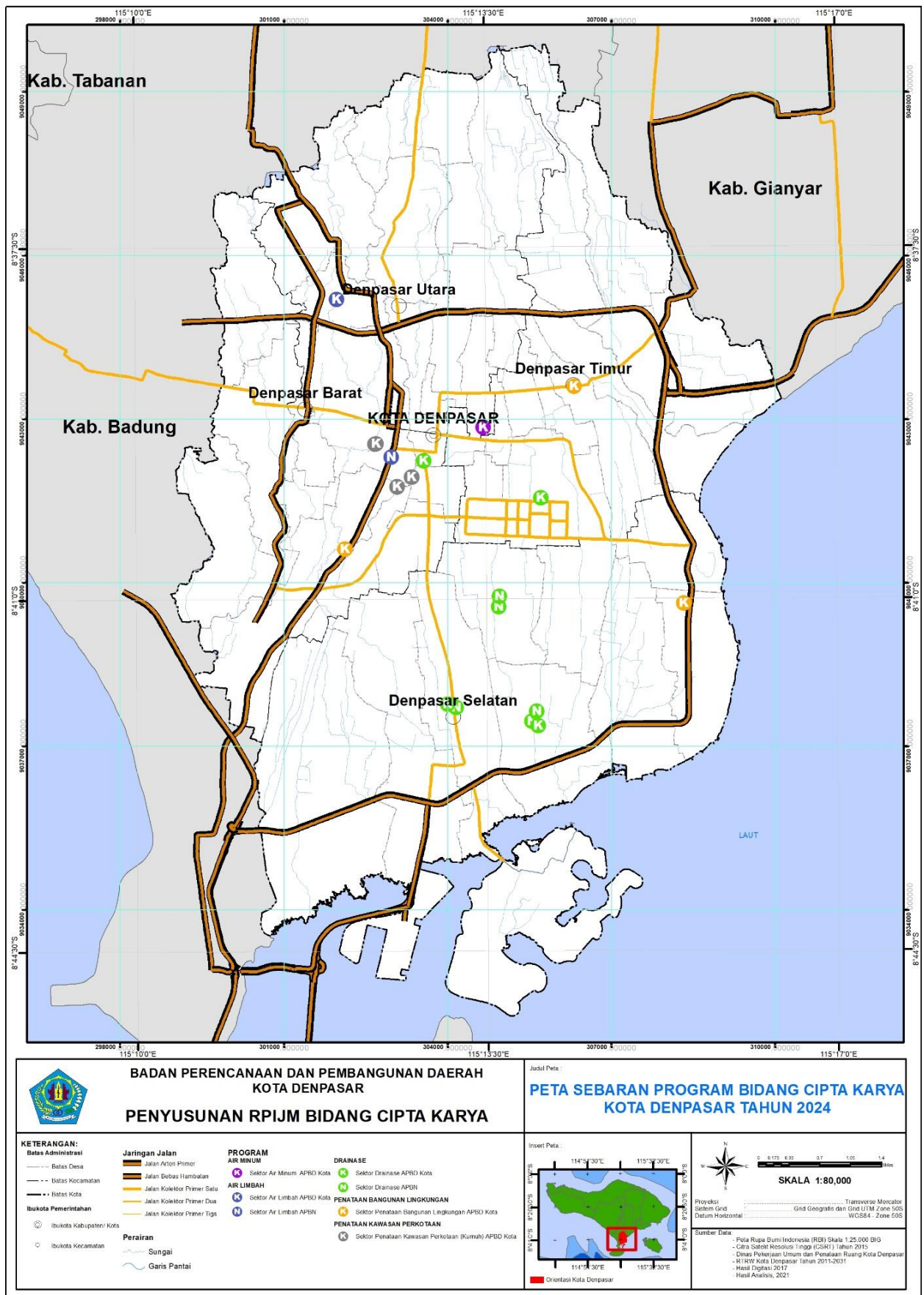
- Sesuai dengan arahan KSN, KSPN, dll;
- Melengkapi readiness criteria (kesiapan lahan, Masterplan sektor, DED);
- Multiyears contract
- Direktif presiden, menteri jika sudah diketahui;
- Sesuai delineasi kawasan prioritas yang disusun pada SIPKP/RPIJM



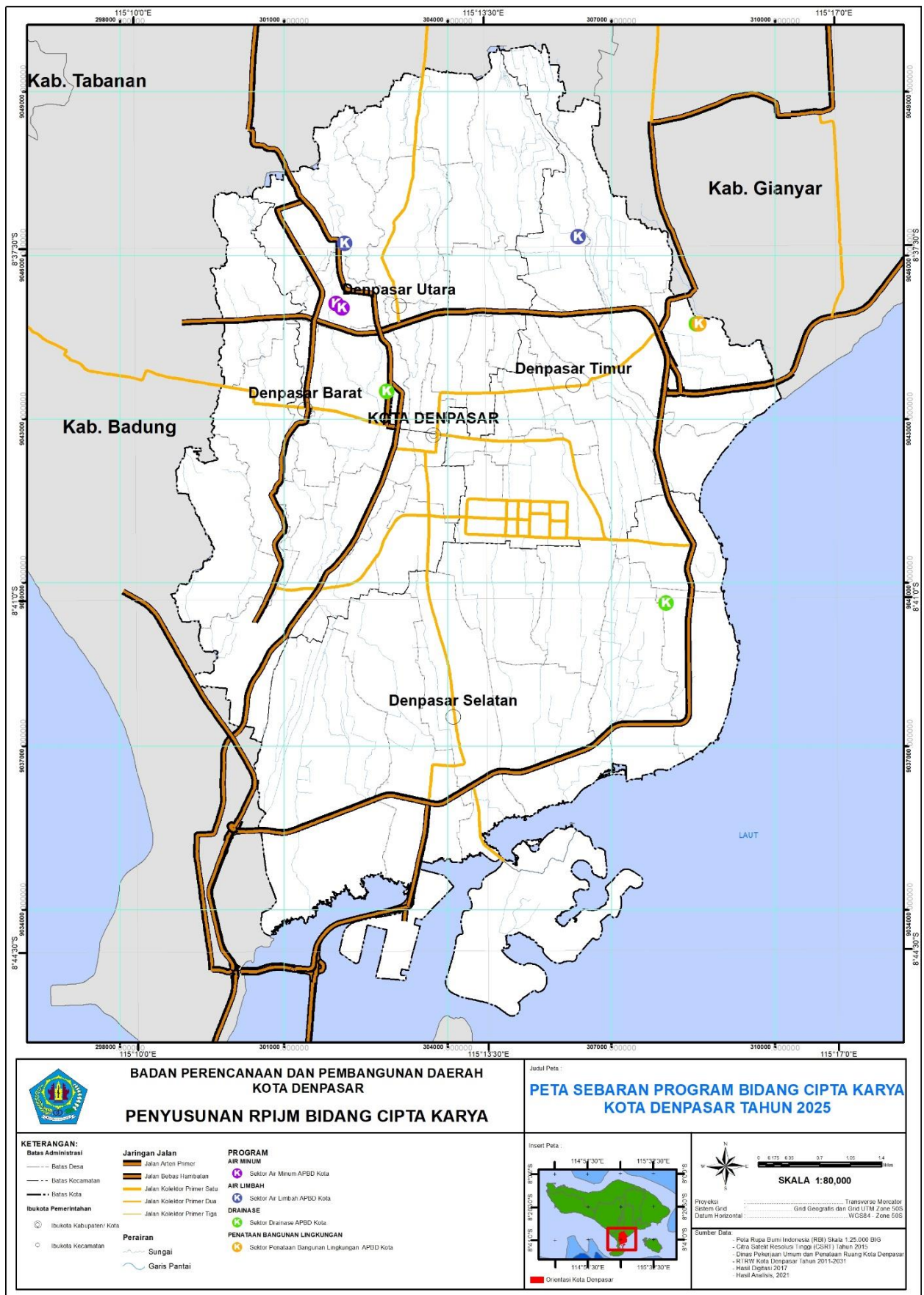
Gambar 5. 1. Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2022



Gambar 5. 2. Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2023



Gambar 5. 3. Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2024



Gambar 5. 4. Sebaran Program Bidang Cipta Karya Kota Denpasar Tahun 2025

MATRIKS RPIJM (Hasil Review) BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2021 S/D 2025

Wilayah : Kota Denpasar-BALI Sektor : Semua Sektor Tahun : 2022 - 2026 Atribut : Semua Atribut

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	-	-	-	-	-	194,068,904	3,500,000	669,000	0	0	-	-				
4840.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	-	-	4924.00	KK	-	194,068,904	3,500,000	669,000	0	0	-	-	-	-	-	-
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	-	-	0.00	KK	-	0	0	69,000	0	0	-	-	-		-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	DENPASAR DAN BADUNG	DENPASAR DAN BADUNG	200	SP			2,060,720				2021	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	DENPASAR DAN BADUNG	DENPASAR DAN BADUNG	200	SP			2,066,792				2022	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	DENPASAR DAN BADUNG	DENPASAR DAN BADUNG	200	SP			2,073,471				2023	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
4840.CBB.002	Sarana Air Limbah	-	-	0.00	KK	-	0	0	69,000	0	0	-	-	-		-	-
	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KOTA DENPASAR	SUMERTA DKK / DENPASAR TIMUR	170	KK	1020	0	0	1,778,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	
	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KOTA DENPASAR	PEGUYANGAN DKK / DENPASAR UTARA	300	KK	1800	0	0	3,000,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	
	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KOTA DENPASAR	UBUNG DKK / DENPASAR UTARA	500	KK	3000	0	0	5,000,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	
	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KOTA DENPASAR	PENATIH DKK / DENPASAR UTARA	500	KK	3000	0	0	5,250,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	
	Rehabilitasi /Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KOTA DENPASAR	UBUNG KAJA DKK / DENPASAR UTARA	500	KK	3000	0	0	5,500,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	
4840.CBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	4924.00	KK	-	105,750,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
4840.CBB.003.1	Pengembangan dan Peningkatan RID Pengelolaan Air Limbah Terpusat	KOTA DENPASAR	PEMOGAN / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	30,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.2	Pembangunan PS Air Limbah Kawasan yang tidak terlayani DSDP	KOTA DENPASAR	PEMOGAN / DENPASAR SELATAN	1662.00	KK	0	7,500,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.3	DED PS Air Limbah kawasan yang tidak terlayani DSDP	KOTA DENPASAR	DANGIN PURI / DENPASAR TIMUR	100.00	KK	0	250,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.4	Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Kawasan yang tidak terlayani DSDP	KOTA DENPASAR	PEMOGAN / DENPASAR SELATAN	1662.00	KK	0	650,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4840.CBB.003.5	Supervisi Pembangunan Jaringan Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pedungan Tahap II	KOTA DENPASAR	PEDUNGAN / DENPASAR SELATAN	700.00	KK	0	1,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.6	DED Jaringan Pipa Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pemogan	KOTA DENPASAR	PEMOGAN / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	950,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.7	Pembangunan Jaringan Air Limbah dan Sambungan Pelayanan di Pedungan Tahap II	KOTA DENPASAR	PEDUNGAN / DENPASAR SELATAN	700.00	KK	0	65,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.003.8	DED PS IPAL Komunal Skala Kawasan di Denpasar	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN / DENPASAR BARAT	100.00	KK	0	400,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman	-	-	0.00	KK	-	87,368,904	3,500,000	600,000	0	0	-	-	-	-	-	-
4840.CBB.005.1	Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Cokroaminoto	KOTA DENPASAR	UBUNG KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	KK	0	25,552,904	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.2	Supervisi Penanganan Drainase Bumi Ayu Sanur	KOTA DENPASAR	SANUR / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	2,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.3	Penanganan Sistem Drainase Bumi Ayu Sanur	KOTA DENPASAR	SANUR / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	40,268,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.4	Peningkatan Sistem Drainase di perumahan Jl. Gatsu IV dan sekitar Kelurahan Tonja	KOTA DENPASAR	TONJA / DENPASAR UTARA	0.00	KK	0	0	3,500,000	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.5	Peningkatan Sistem Drainase di Jl. Galot Subroto Timur, Kesiman Petilan	KOTA DENPASAR	KESIMAN PETILAN / DENPASAR TIMUR	0.00	KK	0	0	0	600,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.6	Normalisasi Alur Tukad Rangda	KOTA DENPASAR	SIDAKARYA / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	18,250,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.7	Pembuatan Drainase Lingkungan di kelurahan Sesetan, Panjer dan Desa Sidakarya	KOTA DENPASAR	/ DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	500,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.8	Supervisi Pembuatan Drainase Lingkungan di kelurahan Sesetan, Panjer dan Desa	KOTA DENPASAR	/DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	98,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.005.9	DED Pembangunan Drainase Bumi Ayu, Hayam Wuruk, Hang Tuah dan sekitarnya	KOTA DENPASAR	SANUR / DENPASAR SELATAN	0.00	KK	0	700,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Segina Kertapura	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KELOD DENPASAR BARAT	600	M'	0	0	0	1,500,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Padangsambian Kaja	KOTA DENPASAR	PADANGSAMBIAN KAJA/DENPASAR BARAT	600	M'	0	0	0	1,500,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Tukad Badung	KOTA DENPASAR	RENON/DENPASAR SELATAN	265	M'	0	0	0	662,500	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Tangkuban Perahu, Jl. Gn. Payung	KOTA DENPASAR	PADANGSAMBIAN KELOD/ DENPASAR BARAT	2000	M'	0	0	0	5,000,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Pidada Kelurahan Ubung	KOTA DENPASAR	UBUNG/DENPASAR UTARA	500	M'	0	0	0	1,250,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Sanur Kauh	KOTA DENPASAR	SANUR KAUH/ DENPASAR SELATAN	1000	M'	0	0	0	2,500,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Sidakarya	KOTA DENPASAR	SIDAKARYA / DENPASAR SELATAN	550	M'	0	0	0	1,375,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Sumerta Kelod	KOTA DENPASAR	SUMERTA KELOD/DENPASAR TIMUR	1500	M'	0	0	0	3,750,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	Pembangunan Saluran Drainase di Jl. P. Misol	KOTA DENPASAR	DAUH PURI KANGIN/DENPASAR BARAT	1000	M'	0	0	0	2,500,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Kesiman Kertalangu	KOTA DENPASAR	KESIMAN KERTALANGU/DENPASAR TIMUR	1125	M'	0	0	0	2,812,500	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Pemecutan Kaja	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA/DENPASAR UTARA	700	M'	0	0	0	1,750,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Jl. Danau Tandano	KOTA DENPASAR	SANUR/DENPASAR SELATAN	2000	M'	0	0	0	5,000,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Kel. Peguyangan	KOTA DENPASAR	PEGUYANGAN/DENPASAR UTARA	1500	M'	0	0	0	3,750,000	0	0	2026	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Dangin Puri Kangin	KOTA DENPASAR	DANGIN PURI KANGIN/DENPASAR UTARA	1000	M'	0	0	0	2,500,000	0	0	2026	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Pembangunan Saluran Drainase di Desa Penatih Dangin Puri	KOTA DENPASAR	DANGIN PURI/DENPASAR TIMUR	1000	M'	0	0	0	2,500,000	0	0	2026	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
4840.CBB.013	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	-	-	0.00	KK	-	950,000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4840.CBB.013.2	Pengadaan alat komposter (mesin pencacah sampah, mesin pencacah plastik, mesin	KOTA DENPASAR	/	0.00	KK	0	285,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.013.3	Pengadaan Motor Cikar	KOTA DENPASAR	/	0.00	KK	0	385,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4840.CBB.013.4	Pengadaan mesin Pengelolaan Persampahan sistem RDF(mesin pelet)	KOTA DENPASAR	/	0.00	KK	0	100,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R	KOTA DENPASAR	SANUR KAJA/ DENPASAR SELATAN	500	KK	0	0	0	0	0	800,000	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan TPST	KOTA DENPASAR	PADANG SAMBIAN KAJA/ DENPASAR BARAT	500	KK	0	0	0	0	0	800,000	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R	KOTA DENPASAR	UBUNG KAJA / DENPASAR UTARA	500	KK	0	800,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R	KOTA DENPASAR	UBUNG / DENPASAR UTARA	500	KK	0	800,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	500	KK	0	800,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R	KOTA DENPASAR	PANJER / DENPASAR SELATAN	500	KK	0	800,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	150,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	1,500,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	5,100,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	700,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Bulldozer mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,600,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (3 unit)	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1500	KK	0	2,400,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	150,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	1,500,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	700,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	1,800,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (2 unit)	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1000	KK	0	1,600,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	150,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	1,500,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	700,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	1,800,000	0	0	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Konsep 3R (2 unit)	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	0.00	KK	0	1,200,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Motor Sampah	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	150,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Dump Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	3	unit	0	1,500,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Street Sweeper Truck	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Excavator mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	700,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Buldozer mini	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	2	unit	0	3,400,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengadaan Whell Loader	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	1,800,000	0	0	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	89,030,000	0	13,385,000	0	0	-	-	-	-	-	-
4971.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	-	-	48.00	Hektar	-	74,630,000	0	13,135,000	0	0	-	-	-	-	-	-
4971.CBB.005	Peremajaan Permukiman Kumuh	-	-	46.00	Hektar	-	59,230,000	0	12,885,000	0	0	-	-	-	-	-	-
4971.CBB.005.1	Penataan Kawasan Kumuh di Karya Makmur	KOTA DENPASAR	UBUNG KAJA / DENPASAR UTARA	17.00	Hektar	759	50,000,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.2	Penataan Kawasan Kumuh Pesanggaran-Suwung	KOTA DENPASAR	PEDUNGAN / DENPASAR SELATAN	25.00	Hektar	545	8,900,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP


Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4971.CBB.005.3	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	DAUH PURI KAUH / DENPASAR BARAT	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.4	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Karya Makmur	KOTA DENPASAR	UBUNG KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	130,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.5	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	DAUH PURI KAUH / DENPASAR BARAT	3.00	Hektar	0	0	0	800,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.6	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Pesanggaran- Suwung	KOTA DENPASAR	PEDUNGAN / DENPASAR SELATAN	0.00	Hektar	0	200,000	0	0	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.7	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Marga Jati), Kecamatan Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	0	0	800,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.8	Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Marga Jati), Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.9	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Panti Gede), Kecamatan Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	0	0	8,000,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.10	Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Panti Gede), Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.11	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan Kaja (Belong Menak), Kecamatan Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	1.00	Hektar	0	0	0	850,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.12	Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan Kaja (Belong Menak), Denpasar Utara	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KAJA / DENPASAR UTARA	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.13	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan	KOTA DENPASAR	SANUR KAJA / DENPASAR SELATAN	0.00	Hektar	0	0	0	800,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.14	Pengawasan dan Teknik Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan	KOTA DENPASAR	SANUR KAJA / DENPASAR SELATAN	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4971.CBB.005.15	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pemecutan, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN / DENPASAR BARAT	0.00	Hektar	0	0	0	800,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.16	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Pemecutan, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN / DENPASAR BARAT	0.00	Hektar	0	0	0	50,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.17	Pengawasan Teknik dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Dauh Puri, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	0.00	Hektar	0	0	0	35,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.005.18	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Dauh Puri, Denpasar Barat	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	0.00	Hektar	0	0	0	500,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pengembangan Kawasan Perkotaan Strategis Nasional																
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	KOTA DENPASAR	DANGIN PURI DKK/ DENPASAR TIMUR	1500	Meter	0	0	0	2,712,818	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	KOTA DENPASAR	SUMERTA DKK/ DENPASAR TIMUR	10000	Meter	0	0	0	20,000,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	KOTA DENPASAR	KESIMAN DKK/ DENPASAR TIMUR	10000	Meter	0	0	0	22,000,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	KOTA DENPASAR	KERTALANGU/ DENPASAR TIMUR	10000	Meter	0	0	0	24,000,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional	KOTA DENPASAR	PENATIH DKK/ DENPASAR TUMR	10000	Meter	0	0	0	26,000,000	0	0	2026	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Penataan Bangunan Kawasan Prioritas Nasional																
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	5	unit	0	0	0	20,000,000	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	5	unit	0	0	0	22,000,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	5	unit	0	0	0	24,200,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	5	unit	0	0	0	26,620,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Gedung Kantor	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	5	unit	0	0	0	29,282,000	0	0	2026	Metropolitan Sarbagita	0	0	0	Belum MP
4971.CBB.009	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Hijau	-	-	0.00	M2	-	0	0	250,000	0	0	-	-	-		-	-
4971.CBB.009.1	Penataan Bangunan di Kawasan Hijau Pemecutan Kelod	KOTA DENPASAR	PEMECUTAN KLOD / DENPASAR BARAT	0.00	M2	0	0	0	250,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jiwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
4971.CBB.012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	-	-	2.00	Unit	-	15,400,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
4971.CBB.012.1	Penataan Kawasan Pasar Kumbasari	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	1.00	Unit	0	15,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBB.012.2	Supervisi Penataan Kawasan Pasar Kumbasari	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	1.00	Unit	0	400,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	-	-	0.00	M2	-	2,000,000	0	250,000	0	0	-	-	-	-	-	-
4971.CBH.001	Pembangunan Bangunan Gedung Mitigasi Bencana	-	-	0.00	M2	-	2,000,000	0	250,000	0	0	-	-	-		-	-
4971.CBH.001.1	Pembangunan Lokasi Tempat Evakuasi Sementara	KOTA DENPASAR	SANUR / DENPASAR SELATAN	0.00	M2	0	2,000,000	0	250,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	3.00	Kawasan	-	12,400,000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4971.CBN.002	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	-	-	1.00	Kawasan	-	1,400,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
4971.CBN.002.1	Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua	KOTA DENPASAR	/ DENPASAR SELATAN	0.00	Kawasan	0	500,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN.002.2	DED Revitalisasi Kawasan Sanur	KOTA DENPASAR	SANUR / DENPASAR SELATAN	1.00	Kawasan	0	500,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN.002.3	Supervisi Penataan Waduk Muara Nusa Dua	KOTA DENPASAR	/ DENPASAR SELATAN	0.00	Kawasan	0	400,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	-	-	2.00	Kawasan	-	11,000,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
4971.CBN.003.1	Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	1.00	Kawasan	0	10,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN.003.2	Supervisi Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada	KOTA DENPASAR	DAUH PURI / DENPASAR BARAT	1.00	Kawasan	0	500,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4971.CBN.003.3	DED Penataan lingkungan permukiman tradisional bersejarah	KOTA DENPASAR	SESETAN / DENPASAR SELATAN	0.00	Kawasan	0	500,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	-	-	-	-	-	28,103,000	0	0	0	0	-	-	-			
4973.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	-	-	0.00	SR	-	28,103,000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4973.CBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	-	-	0.00	L/detik	-	28,000,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
4973.CBB.001.1	Pembuatan Prasedimentasi, Canal dan Optimalisasi Intake di IPA Ayung Belusung	KOTA DENPASAR	PEGUYANGAN / DENPASAR UTARA	0.00	L/detik	0	28,000,000	0	0	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
4973.CBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	-	-	0.00	SR	-	103,000	0	0	0	0	-	-	-		-	-
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KOTA DENPASAR	KERTALANGU/ DENPASAR TIMUR	3000	SR	18000	0	0	4,095,449	0	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KOTA DENPASAR	KESIMAN DKK/ DENPASAR TIMUR	3000	SR	18000	0	0	9,000,000	0	0	2023	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KOTA DENPASAR	DANGRI KANGIN DKK/ DENPASAR TIMUR	5000	SR	30000	0	0	15,000,000	0	0	2024	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KOTA DENPASAR	UBUNG DKK/ DENPASAR UTARA	5000	SR	30000	0	0	16,500,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	KOTA DENPASAR	UBUNG DKK/ DENPASAR UTARA	5000	SR	30000	0	0	17,500,000	0	0	2025	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP

Kode	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/NAMA PAKET	KAB/KOTA	DESA/KEC	VOL	SAT	PEMANFAAT (Jhwa)	SUMBER PENDANAAN x Rp. 1.000,-					TAHUN	ATRIBUT	REDINES CRITERIA			STATUS
							Rp. MURNI	APBD PROV.	APBD KAB / KOTA	SWASTA	DAK			Lahan	DED	SCORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	Pembuatan Sumur Bor (PDAM)	KOTA DENPASAR	KOTA DENPASAR	1	unit	0	0	0	0	1.188.000	0	2022	Metropolitan Sarbagita			0	Belum MP
Sub Total Tahun Anggaran 2021							0	0	0	0	0		Rata2 Score RC				0
Sub Total Tahun Anggaran 2022							222.323.904	3.500.000	8.969.000	0	0		Rata2 Score RC				0
Sub Total Tahun Anggaran 2023							85.880.000	0	2.350.000	0	0		Rata2 Score RC				0
Sub Total Tahun Anggaran 2024							2.998.000	0	2.735.000	0	0		Rata2 Score RC				0
Sub Total Tahun Anggaran 2025							0	0	0	0	0		Rata2 Score RC				0
TOTAL							311.201.904	3.500.000	14.054.000	0	0						

Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda Kota
Denpasar


Julia Krishna Siagian, ST.MT